



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025-2045**





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang maju, adil dan berkelanjutan, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.

BAB II KERANGKA RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah
- (2) Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah terdiri atas:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV. Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI. Penutup.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 5

- (1) Visi RPJP Daerah adalah Kutim Hebat 2045: Pusat Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. peningkatan pendapatan per kapita;

- b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
- c. peran Kabupaten/kota di level provinsi meningkat;
- d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
- e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

(3) Misi RPJP Daerah adalah:

- a. Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Modern Madani dan Berbudaya;
- b. Transformasi Ekonomi Menuju Kemandirian dan Ketangguhan Ekonomi;
- c. Transformasi Tata kelola Menuju Pemerintahan yang Profesional, Efektif dan Visioner;
- d. Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum dan Birokrasi yang suportif, *agile* dan stabil;
- e. Ketahanan, Sosial, Budaya dan Ekologi;
- f. Pembangunan Kewilayahan yang merata, terencana dan relevan;
- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan dan terjangkau; dan
- h. Kesinambungan Pembangunan yang mengoptimalkan potensi daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 15 (lima belas) arah pembangunan, dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator utama pembangunan.

BAB III RPJP DAERAH SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
 - a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (7) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang, Kepala Daerah terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB IV RPJP DAERAH SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- (3) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah kabupaten/kota tahun 2025-2045.
- (4) RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

BAB V PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melengkapi pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - a. pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah; dan
 - b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.

Pasal 12

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJP Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Peraturan Bupati tentang RKP Daerah Tahun 2024, tetap berlaku sampai dengan akhir periode;
 - c. Peraturan Bupati tentang RKP Daerah Tahun 2025, tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan

- d. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait Perencanaan Pembangunan daerah jangka panjang dan menengah serta produk hukum daerah lainnya yang terkait, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, penyusunan dan periodisasi RPJM Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal ...
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (...../...../.....)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005-2025. Terhadap RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005-2025 ini telah dilakukan evaluasi hasil RPJPD yang dibagi menjadi 4 (empat) periode. Saat ini, penyusunan RPJPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang juga harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 menjadi penting untuk dilakukan dengan setidaknya mengacu pada 3 (tiga) hal, pertama bahwa masa keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Kedua, bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005-2025 terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam

dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045. Ketiga, bahwa penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perumusan visi mempedomani visi RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (2)

Penjabaran 5 (lima) sasaran visi dilakukan dengan mempedomani sasaran visi RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (3)

Perumusan misi mempedomani 8 (delapan) misi RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.

Ayat (4)

Perumusan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 38 (tiga puluh delapan) indikator utama pembangunan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJP Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Arah kebijakan dan indikator utama pembangunan pada RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah.

RPJM Daerah menjabarkan visi, misi, dan program pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

RPJM Daerah memuat tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RKP Daerah dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat sasaran strategis, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, sasaran makro pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah yang mencakup program perangkat daerah, arah kebijakan kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Prioritas Pembangunan Daerah harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pasal 7

Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku

jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan pemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup *state actors* dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan nonpemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup *non-state actors* yang dalam hal ini mencakup antara lain dan tidak terbatas pada badan usaha, media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, dan masyarakat.

Pasal 9

Tahun pertama periode pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2035, Tahun 2040 dan Tahun 2045.

Pasal 10

Yang dimaksud "instansi/lembaga" adalah badan pemerintah umum (seperti jawatan atau kantor), sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur Timur dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah pihak yang memiliki kepentingan baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian dan evaluasi" adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bencana" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan "goncangan politik" adalah ketidakstabilan dalam struktur dan/atau implementasi politik Daerah.

Yang dimaksud dengan "krisis ekonomi" adalah kondisi di mana perekonomian Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang dimaksud dengan "konflik sosial budaya" adalah pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat Daerah yang memiliki nilai, norma, kepercayaan, atau identitas budaya yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemekaran daerah” adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2024.

Huruf c

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2025.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ...
NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025-2045

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	2
<i>Daftar Tabel</i>	x
<i>Daftar Gambar</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	3
1.3.1. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJP Nasional.....	4
1.3.2. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur	4
1.3.3. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Kutai Timur	4
1.3.4. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur	4
1.3.5. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJPD Kabupaten/Kota Lainnya di Kalimantan Timur	5
1.3.6. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan KLHS RPJPD Kabupaten Kutai Timur	5
1.4. Maksud dan Tujuan	5
1.4.1. Maksud.....	5
1.4.2. Tujuan	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1.1. Geografi.....	10
2.1.2. Demografi	22
2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya	25
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	26
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	30
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	35
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	36
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	48
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah.....	52
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	59
2.4. Aspek Pelayanan Umum	60
2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2005-2025	62
2.5.1. Kesimpulan RPJPD 2005-2025	63
2.5.2. Rekomendasi Evaluasi RPJPD 2005 - 2025	63
2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	65
2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan	65
2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	72
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	76
2.7.1. Pengembangan Struktur Ruang	77
2.7.2. Rencana Pola Ruang.....	83
2.7.3. Kawasan Strategis Kabupaten	85
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	89
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	89
3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	91
3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	96

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	99
3.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	104
3.2. Isu Sesuai Konteks.....	106
3.2.1. Isu Global	106
3.2.2. Isu Nasional	109
3.2.3. Isu Regional	112
3.2.4. Isu Provinsi Kalimantan Timur.....	114
3.3. Isu Strategis Kabupaten Kutai Timur.....	120
3.3.1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	121
3.3.2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Daerah.....	123
3.3.3. Peningkatan Ketangguhan dan Pemerataan Ekonomi	125
3.3.4. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.....	130
3.3.5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	135
3.3.6. Dampak Perpindahan Ibukota Negara	137
BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KUTAI TIMUR 2025-2045.....	141
4.1 Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kaltim Sejahtera 2045.....	144
4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045	144
4.1.2. Visi Kaltim Sejahtera 2045.....	144
4.2. Rekomendasi Visi dari KLHS RPJPD	145
4.3. Visi Kutim Hebat 2045	146
4.4. Sasaran Utama Visi.....	152
4.5. Misi.....	154
4.6. Program Super Prioritas (<i>Game Changers</i>) Kutai Timur Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
4.7. Tahapan Pembangunan Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	161
5.1. Arah Kebijakan.....	163
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan Kutai Timur	163
5.1.2. Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi Visi Kutim Hebat 2045	173
5.2. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kutai Timur Hebat 2045 202	
BAB VI PENUTUP.....	209
6.1. Pelaksanaan	210
6.2. Pembiayaan	212
6.3. Mitigasi Resiko	212

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Capaian Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2023	15
Tabel 2. 2 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Kutai Timur 2019-2023.....	17
Tabel 2. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur 2019-2023	19
Tabel 2. 4 Kondisi Demografi Kutai Timur 2023	24
Tabel 2. 5 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kabupaten di Kalimantan Timur	31
Tabel 2. 6 Indeks Perlindungan Anak 2022.....	32
Tabel 2. 7 Indeks Pemberdayaan Gender Kutai Timur 2020-2022.....	33
Tabel 2. 8 PDRB Kabupaten Kutai Timur 2019-2023.....	36
Tabel 2. 9 Produksi Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kutai Timur (Ton) Tahun 2023	46
Tabel 2. 10 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Kutai Timur 2019-2023	47
Tabel 2. 11 Indeks Pendidikan Kutai Timur 2019-2023	48
Tabel 2. 12 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2023	49
Tabel 2. 13 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).....	50
Tabel 2. 14 Bendungan di Kabupaten Kutai Timur	58
Tabel 2. 15 Jumlah Tindak Kriminal Umum Di Kutai Timur 2019 – 2023	60
Tabel 2. 16 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kutai Timur 2022	60
Tabel 2. 17 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur	61
Tabel 2. 18 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	61
Tabel 2. 19 Indeks Reformasi Birokrasi	62
Tabel 2. 20 Komposisi Jumlah Penduduk Berdasar Gender.....	67
Tabel 2. 21 Proyeksi Penduduk Berdasar Kelompok Usia.....	67
Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk dan Kepadatan	69
Tabel 2. 23 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kutai Timur	69
Tabel 2. 24 Proyeksi Rumah Tinggal Sampai tahun 2045.....	73
Tabel 2. 25 Proyeksi Kebutuhan Air Sampai tahun 2045	73
Tabel 2. 26 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Sampai Tahun 2045.....	74
Tabel 2. 27 Proyeksi Persampahan Sampai Tahun 2045	74
Tabel 2. 28 Proyeksi Sarana Kesehatan Sampai Tahun 2045	75
Tabel 2. 29 Proyeksi Sarana Pendidikan Sampai Tahun 2045	76
Tabel 4. 1 Rekomendasi Visi dan Misi KLHS RPJPD Kutai Timur 2025-2045	146
Tabel 4. 2 Indikator sasaran utama visi Kabupaten Kutai Timur 2025-2045.....	154
Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Kabupaten Kutai Timur	171
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Sosial Kabupaten Kutai Timur.....	176
Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Kabupaten Kutai Timur	181
Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Kabupaten Kutai Timur	188
Tabel 5. 5 Arah Kebijakan Landasan Transformasi Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil	190
Tabel 5. 6 Arah Kebijakan Landasan Transformasi Ketahanan	194
Tabel 5. 7 Arah Kebijakan Kerangka Pelaksanaan Transformasi (Infrastruktur Kewilayahannya dan Sarana Prasarana)	199
Tabel 5. 9 Lokus Arah Kebijakan Transformasi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5. 10 Indikator Utama Pembangunan	204

Daftar Gambar

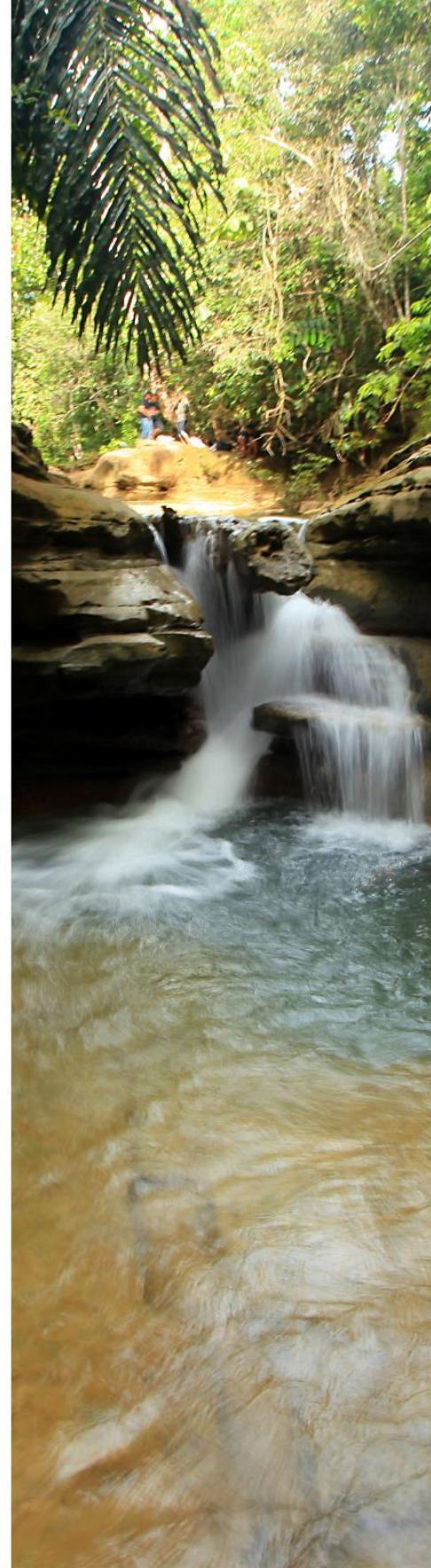
Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Kutai Timur.....	11
Gambar 2. 2 Peta Ekoregion Kabupaten Kutai Timur.....	14
Gambar 2. 3 Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	18
Gambar 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kutai Timur	19
Gambar 2. 5 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (P1) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022	20
Gambar 2. 6 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (P2) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022	21
Gambar 2. 7 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Serat (P3) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022	21
Gambar 2. 8 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik (P4) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022	22
Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2019-2023.....	23
Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2023	23
Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan PDRB Kutai Timur 2005-2025.....	26
Gambar 2. 12 Indeks Gini Kutim 2005-2025.....	27
Gambar 2. 13 Angka Kemiskinan Kutai Timur 2005-2025	28
Gambar 2. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kutim 2005-2025	29
Gambar 2. 15 IPM Kabupaten Kutai Timur 2005-2025	30
Gambar 2. 16 Persentase PDRB Sektoral Kutim	37
Gambar 2. 17 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	38
Gambar 2. 18 Perkembangan Ekonomi Inklusif Kutai Timur 2011-2021	39
Gambar 2. 19 Produksi Hasil Perikanan Kutim 2021-2023	40
Gambar 2. 20 Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Timur 2019-2022.....	41
Gambar 2. 21 UMKM Kutim 2019-2023.....	42
Gambar 2. 22 Capaian Penanaman Modal Kutim 2019-2023.....	43
Gambar 2. 23 Pelaku Usaha Berdasar NIB	44
Gambar 2. 24 Prevalensi Stunting Kutai Timur	50
Gambar 2. 25 TPAK Kutai Timur 2019-2023	51
Gambar 2. 26 Rasio Ketergantungan Kutai Timur 2019-2023	52
Gambar 2. 27 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap 2021-2023	53
Gambar 2. 28 Peta Jalan Kabupaten Kutai Timur	53
Gambar 2. 29 Persentase Jaringan Irigasi Kutai Timur 2021-2023	54
Gambar 2. 30 Infrastruktur Air, Sampah dan Drainase Kutim 2021-2023	55
Gambar 2. 31 Peta Sebaran Persampahan	55
Gambar 2. 32 Sebaran Tower Telekomunikasi	56
Gambar 2. 33 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kutai Timur 2021-2023	57
Gambar 2. 34 Indeks Daya Saing Daerah Kutai Timur 2023.....	59
Gambar 2. 35 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2025-2045.....	66
Gambar 2. 36 Piramida Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2025 dan 2045	68
Gambar 2. 37 Proyeksi Indeks Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur.....	70
Gambar 2. 38 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Lanjut.....	72
Gambar 3. 1 Permasalahan Geografi Kutai Timur.....	91
Gambar 3. 2 Permasalahan Demografi Kutai Timur	95
Gambar 3. 3 Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Kutai Timur	97
Gambar 3. 4 Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya.....	98

Gambar 3. 5 Permasalahan Daya Saing Ekonomi Kutai Timur	99
Gambar 3. 6 Permasalahan Daya Saing Manusia	100
Gambar 3. 7 Permasalahan Daya Saing Infrastruktur	102
Gambar 3. 8 Permasalahan Daya Saing Iklim Investasi	103
Gambar 3. 9 Ringkasan Permasalahan Pelayanan Umum Kutai Timur	104
Gambar 3. 10 Ringkasan Isu Global	106
Gambar 3. 11 Ringkasan Isu Nasional.....	109
Gambar 3. 12 Ringkasan Isu Regional Kutai Timur	112
Gambar 3. 13 Ringkasan Isu Provinsi Kalimantan Timur	114
Gambar 3. 14 Ringkasan Isu Strategis Kutai Timur.....	120
Gambar 3. 15 Capaian TPB Kabupaten Kutai Timur	128
Gambar 4. 1 Integrative Multidimensional Economic Development Model	142
Gambar 4. 2 Kerangka dan Paradigma Perencanaan Pembangunan.....	143
Gambar 4. 3 Visi Kutim Hebat 2045.....	148
Gambar 4. 4 Keselarasan vertikal Visi Kutim Hebat 2045	152
Gambar 4. 5 Sasaran Utama Visi Kutim Hebat 2045	153
Gambar 4. 6 Misi RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045	155
Gambar 4. 7 <i>Game Changers</i> Visi Kutim Hebat 2045.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 4. 8 Tahapan Pembangunan Kutai Timur.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 5. 1 Arah Kebijakan 5 tahunan RPJPD Kutai Timur	163
Gambar 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Sosial per Tahapan Pembangunan.....	165
Gambar 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi per Tahapan Pembangunan	167
Gambar 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola per Tahapan Pembangunan....	168
Gambar 5. 5 Arah Kebijakan Landasan Transformasi (Misi 4) per Tahapan Pembangunan.....	169
Gambar 5. 6 Arah Kebijakan Landasan Transformasi (Misi 5) per Tahapan Pembangunan.....	170
Gambar 5. 7 Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045.....	173
Gambar 5. 8 Arah Pembangunan Transformasi Sosial Kabupaten Kutai Timur	174
Gambar 5. 9 Arah Pembangunan Transformasi Ekonomi Kabupaten Kutai Timur.....	179
Gambar 5. 10 Arah Pembangunan Transformasi Tata Kelola Kabupaten Kutai Timur	186
Gambar 5. 11 Arah Pembangunan Landasan Transformasi Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil Kabupaten Kutai Timur (Misi 4)	189
Gambar 5. 12 Arah Pembangunan Landasan Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Kabupaten Kutai Timur (Misi 5)	192
Gambar 5. 13 Misi terkait Kerangka Implementasi Transformasi Kabupaten Kutai Timur	198
Gambar 5. 14 Sasaran Pokok Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur	202

Pendahuluan

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)

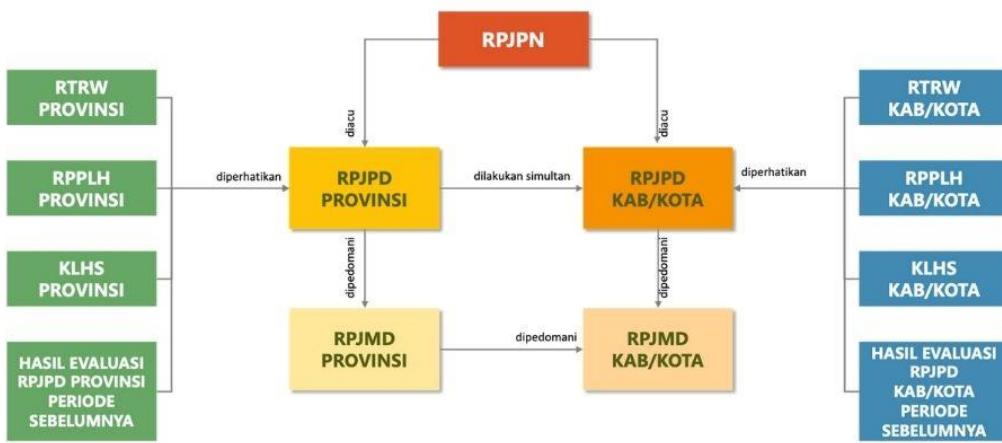
Kabupaten
Kutai Timur
2025-2045



Pendahuluan

Kutai Timur berada di persimpangan antara konservasi biodiversitas dan eksploitasi sumber daya, yang memerlukan kebijakan lingkungan yang ramah ekologi. Dalam ranah politik dan tata kelola, tantangan utama meliputi meningkatkan efisiensi dan transparansi administratif serta merespons dinamika global. Dokumen RPJPD ini bertujuan untuk merumuskan visi pembangunan daerah yang komprehensif, menyusun kerangka kerja kebijakan yang berorientasi pada hasil, dan memastikan keselarasan dengan inisiatif pembangunan nasional dan global.

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 tidak beroperasi secara terisolasi. Sebaliknya, ia berinteraksi dan bersinergi dengan serangkaian dokumen perencanaan strategis lainnya. Interkoneksi ini memastikan konsistensi dan kontinuitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 dimaksudkan sebagai alat bantu strategis yang mengarahkan jalannya pembangunan daerah selama dua dekade mendatang. RPJPD ini bertujuan untuk menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Tujuan

Menetapkan arah dan kerangka kebijakan pembangunan daerah yang akan mengarah pada :

1. peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
3. pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab
4. penguatan kapasitas institusi dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kutai Timur, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan regional dan nasional. Pada awalnya, Kutai Timur merupakan bagian dari Kabupaten Kutai yang kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang. Sejak terbentuknya, Kutai Timur terus menunjukkan perkembangan yang pesat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 31.239,84 km² dan jumlah penduduk yang terus meningkat, Kutai Timur menghadapi tantangan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 ditetapkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa RPJPD harus disahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode RPJPD sebelumnya berakhir. Periode RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005–2025 berakhir pada tahun 2025, sehingga harus segera disusun RPJPD untuk periode 2025–2045.

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 merupakan dokumen strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada peraturan

daerah yang relevan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023–2043. Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional juga menjadi perhatian untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan pembangunan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024. Surat edaran ini mengatur penyelarasan visi, misi, sasaran pembangunan, serta indikator dan target yang harus dicapai hingga tahun 2045.

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 disusun sebagai langkah untuk mengintegrasikan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini mendukung pencapaian visi nasional Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Proses penyusunan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis, melalui penerapan metode dan analisis ilmiah untuk perencanaan yang efektif;
2. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif;
3. Pendekatan politis, yang menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang diselaraskan dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yang merupakan hasil integrasi proses musyawarah pembangunan dari tingkat desa hingga nasional.

Selain itu, penyusunan RPJPD ini juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi penting untuk memastikan permasalahan dan isu strategis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta memberikan rekomendasi visi dan misi agar terjaga keberlanjutan pembangunan.

1.2. Dasar Hukum

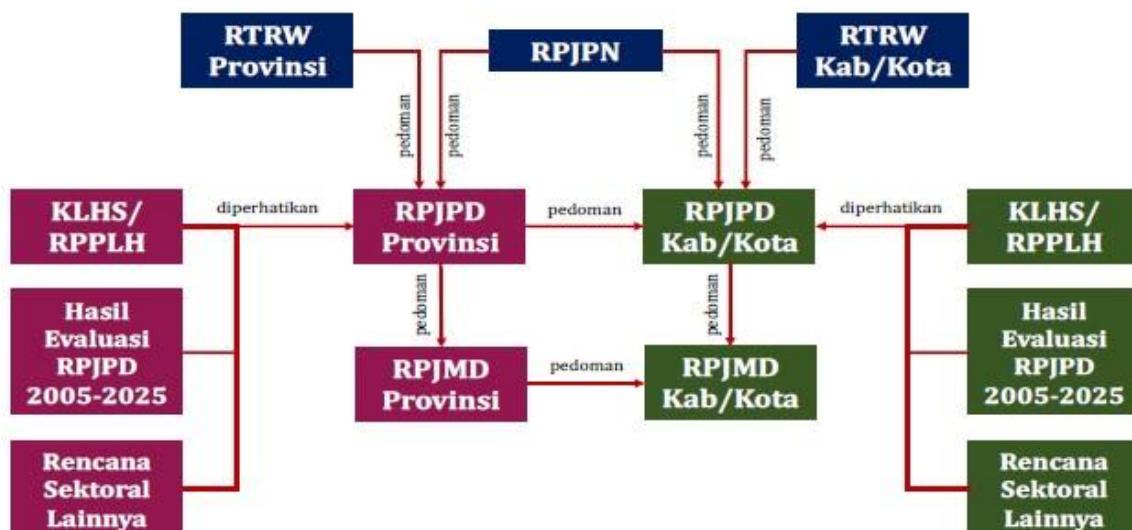
RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 disusun berdasarkan dasar hukum yang relevan, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Inmendagri No 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Bina Bangda Kemendagri

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait dengan serangkaian dokumen perencanaan strategis lainnya. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya ini memastikan konsistensi dan kelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berikut adalah keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan:

1.3.1. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJP Nasional

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, serta RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

1.3.2. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 memiliki keterkaitan erat dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, di mana RPJPD Provinsi berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan RPJPD Kabupaten. Hubungan ini memastikan bahwa arah pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Timur selaras dengan visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, RPJPD Kabupaten Kutai Timur juga memperhatikan aspek strategis yang diatur dalam RTRW Provinsi dan integrasi dengan dokumen perencanaan lain, seperti KLHS dan RPPLH. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi pembangunan yang harmonis antara kabupaten dan provinsi, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di wilayah Kalimantan Timur.

1.3.3. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Kutai Timur

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur, yang berfungsi sebagai pedoman spasial dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hubungan antara RPJPD dan RTRW bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD sejalan dengan penataan ruang yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan wilayah.

1.3.4. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 menjadi landasan strategis bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. RPJPD memberikan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD

empat periode pemerintahan kepala daerah. Hubungan ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Selain itu, RPJMD juga berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menerjemahkan sasaran jangka panjang RPJPD ke dalam program prioritas yang lebih spesifik, terukur, dan dapat direalisasikan dalam lima tahun.

1.3.5. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan RPJPD Kabupaten/Kota Lainnya di Kalimantan Timur

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 memiliki hubungan strategis dengan RPJPD kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan keterpaduan pembangunan regional. Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan Timur, RPJPD Kabupaten Kutai Timur disusun dengan memperhatikan keselarasan arah kebijakan, sasaran pokok, dan prioritas pembangunan yang diatur dalam RPJPD masing-masing kabupaten/kota. Sinergi ini penting untuk mendukung pembangunan yang saling melengkapi, mengoptimalkan potensi unggulan setiap daerah, dan meminimalkan konflik kepentingan antarwilayah.

1.3.6. RPJPD Kabupaten Kutai Timur dengan KLHS RPJPD Kabupaten Kutai Timur

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2045 disusun dengan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan jangka panjang daerah berlandaskan prinsip keberlanjutan. KLHS memberikan analisis mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sekaligus mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan dalam RPJPD. KLHS juga memberikan gambaran capaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hasil KLHS menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan yang berwawasan lingkungan. Dengan integrasi KLHS, RPJPD Kabupaten Kutai Timur tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan jalannya pembangunan Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun 2045. Selanjutnya, perencanaan pembangunan akan dioperasionalisasikan dalam empat periode RPJMD.

1.4.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 adalah:

- a. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah selama periode 2025–2045 agar tetap konsisten dan berkesinambungan sesuai visi pembangunan jangka panjang.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Pusat.
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan untuk setiap periode pemerintahan kepala daerah.
- d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Kutai Timur diatur sedemikian rupa untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur, memastikan bahwa setiap aspek pembangunan ditangani dengan menyeluruh dan seimbang. Melalui pendekatan yang terstruktur ini, RPJPD Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan prioritas provinsi dan nasional.

Berikut adalah sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 yang menguraikan struktur dokumen:

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJPD.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi tantangan pembangunan serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Memuat cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur 2045 yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah Kutai Timur tahun 2025-2045.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang empat tahapan arah kebijakan, sasaran pokok pembangunan daerah disertai indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2025-2045, serta arah pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI. PENUTUP

Memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masa transisi dan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah



Gambaran Umum

Kondisi Daerah

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)

Kabupaten
Kutai Timur
2025-2045



Ringkasan BAB 2

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Luas Wilayah

31,239,84 KM²
18 kecamatan
2 kelurahan
139 desa

Jumlah Penduduk

Total Penduduk 455.504 jiwa
Laju Pertumbuhan penduduk
0,9%
Kepadatan penduduk 14,58/Km²

➤ Kesejahteraan Ekonomi Meningkat

- Laju pertumbuhan ekonomi terakselerasi (7,71%), pulih dengan cepat setelah covid
- Indeks pembangunan manusia (IPM) (75,33) terus mengalami perbaikan
- Tingkat kemiskinan (9,06%), tingkat Pengangguran (5,93%) dan rasio gini (0,336) cenderung menurun meski belum optimal

➤ Daya Saing Daerah Membaik

- PDRB ADHB (Rp 104, 66 miliar) dan PDRB perkapita (Rp 229,77 juta) terus meningkat
- Indeks pendidikan (0,615) meningkat, tetapi TPAK (66,22) menurun
- Indeks Daya Saing Daerah (2,78) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya



➤ Pelayanan Umum Memiliki Ruang Improvisasi

- Indeks pelayanan publik untuk pemkab Kutim mendapat skor C-
- Indeks Inovasi daerah (12,20) tergolong Kurang inovatif
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat skor 2,79, masuk kategori Baik

➤ Kesejahteraan Sosial Dapat Terus Ditingkatkan

- Indeks Perlindungan Anak (62,26) baik, meski memiliki ruang untuk perbaikan
- Indeks Pemberdayaan Gender (53,00) terjadi penurunan dari 2 tahun sebelumnya

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Langkah awal yang dilakukan untuk merancang masa depan Kabupaten Kutai Timur adalah dengan pemahaman tentang kondisi Kabupaten Kutai Timur saat ini. Pemahaman kondisi saat ini dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup empat aspek pembangunan: geografi dan demografi, kesejahteraan, daya saing dan pelayanan umum. Selain itu, hasil evaluasi pembangunan 2005-2025 menjadi salah satu variabel yang harus dipertimbangkan, agar bisa mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD sebelumnya telah tercapai.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Secara **astronomis**, Kabupaten Kutai Timur berada di antara garis lintang 01°52'39" Utara hingga 00°02'11" Selatan dan garis bujur 118°58'19" Timur hingga 115°56'26" Timur, dengan total luas wilayah 31.239,84 kilometer persegi. Secara administratif, Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau)
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang), Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Karam (Kabupaten Kutai Kartanegara)

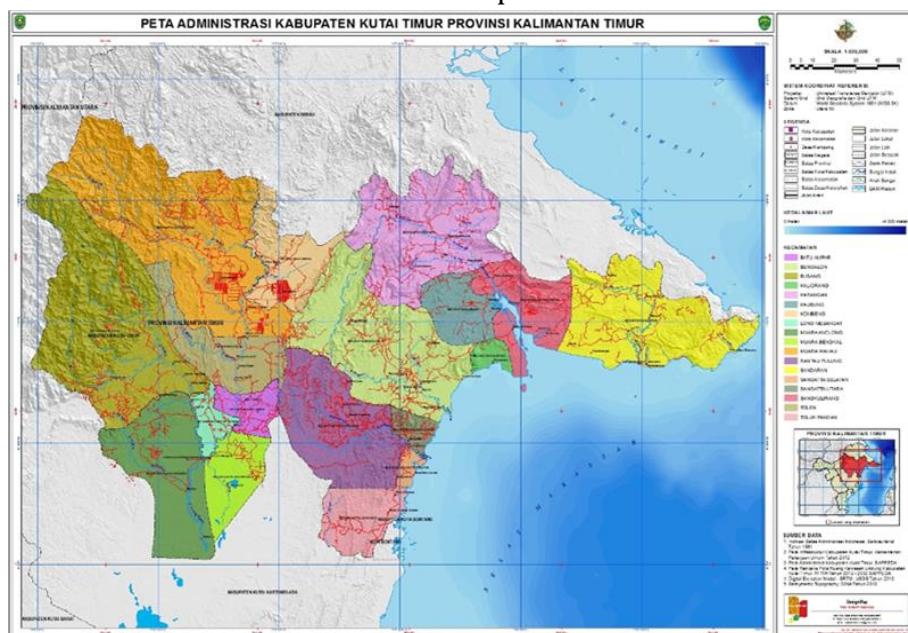
3. Sebelah Timur: Selat Makassar dan Laut Sulawesi
4. Sebelah Barat: Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara), serta Kecamatan Kayan Hilir (Kabupaten Malinau)

Posisi geografis Kabupaten Kutai Timur memberikan keunggulan strategis yang mendukung interaksi dengan wilayah lain. Beberapa poin strategis tersebut antara lain:

1. Terletak pada poros regional lintas trans Kalimantan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Utara dengan jalur Kabupaten Nunukan – Malinau – Bulungan (Kota Tanjung Selor) – Berau (Kota Tanjung Redeb) – Kota Samarinda – Kota Balikpapan – Provinsi Kalimantan Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Kalimantan Barat.
2. Terletak pada poros pertumbuhan ekonomi kawasan ekonomi terpadu SASAMBA (Samarinda – Samboja – Balikpapan) dan kawasan segitiga pertumbuhan Bontang – Sangatta – Muara Wahau dan Sangkulirang.
3. Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur memiliki garis pantai sepanjang 587,62 Km, yang terletak dalam wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, serta bagian laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kabupaten Kutai Timur ini menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil dari proses pemekaran Kabupaten Kutai, yang diresmikan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999. Saat ini, wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur mencakup 18 kecamatan, 2 kelurahan, dan 139 desa.

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2016

Dari aspek **klimatologi**, wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki iklim tropis khas Indonesia, dengan suhu udara rata-rata 26°C. Kutai Timur mengalami dua pola musim yang jelas, yaitu musim kemarau yang berlangsung dari Mei hingga Oktober, dan musim hujan yang mendominasi dari November hingga April. Kondisi iklim ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi lainnya, yang harus disesuaikan dengan karakteristik musim yang ada.

Kabupaten Kutai Timur memiliki **topografi** yang beragam, meliputi dataran, bukit, pegunungan, dan wilayah pantai dengan ketinggian bervariasi antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Sekitar 76,37% atau 2.516.233 hektar, wilayah Kutai Timur memiliki kemiringan di atas 15%. Area dengan kemiringan lebih dari 40% tersebar terutama di sisi barat laut seperti Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau, dan Muara Ancalong. Wilayah ini didominasi oleh pegunungan kapur dan perbukitan yang rawan erosi serta bencana alam, dengan ketinggian mencapai lebih dari 500 meter dpl. Sementara itu, wilayah dataran dan landai dengan kemiringan kurang dari 15% terdapat di sisi timur, seperti di Kecamatan Sangatta Utara, Muara Bengkal, dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang, dengan ketinggian antara 0 hingga 7 meter dpl. Wilayah dataran ini cenderung berupa rawa mudah tergenang dan daerah endapan.

Kondisi **geologi** Wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kompleks dengan adanya interaksi antara 3 Lempeng Utama, yakni Lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Asia. Terdapat banyak potensi mineral yang dimiliki seperti batubara, minyak dan gas bumi, emas, dan lain-lain. Secara umum, formasi geologi yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Endapan Alluvium yang banyak ditemukan di wilayah bantaran maupun wilayah paparan banjir dan dataran dari endapan sungai dan danau. Sedangkan, formasi yang paling sering ditemukan adalah Formasi Pamaluan, Mentarang, dan Balikpapan. Secara geologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh Formasi Pemaluan (disusun oleh batu pasir kuarsa dengan sisipan batu lempung, batu gamping serpihan dan batu lana) yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang terdapat di sepanjang pantai. Selain itu, terdapat juga endapan batuan tersier dan batuan endapan kquarter dalam formasi batuan endapan, terutama batuan kwarsa dan batuan liat. Jenis tanah yang ditemukan di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolk merah kuning, latosol, dan litosol. Selain itu, juga terdapat jenis tanah lain seperti aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolk merah kuning, yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Banyak faktor yang memengaruhi kemampuan tanah di wilayah ini. Semakin banyak faktor penghambat seperti lereng yang curam, akan berdampak pada ketersediaan air yang rendah, dan kondisi ini juga rentan terhadap erosi. Karena berbagai faktor ini, kemampuan tanah di wilayah tersebut menjadi rendah.

Kondisi **hidrologi** Kabupaten Kutai Timur sangat kaya dan beragam, ditandai dengan keberadaan ratusan sungai, danau, serta cekungan air tanah yang menjadi elemen vital dalam mendukung kehidupan masyarakat, pembangunan daerah, dan keberlanjutan ekosistem.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur juga memiliki 12 sungai terpanjang yang berperan penting dalam sistem hidrologi dan kehidupan masyarakat. Sungai Telen menjadi yang terpanjang dengan panjang 334 km, diikuti oleh Sungai Bengalon (235,5 km), dan Sungai Kelinjau (206,5 km). Sungai lainnya, seperti Sungai Wahau (187,5 km) dan Sungai Antan (176,5 km), turut berkontribusi pada jaringan perairan yang mendukung kebutuhan transportasi, sumber air bersih, serta keberlanjutan ekosistem.

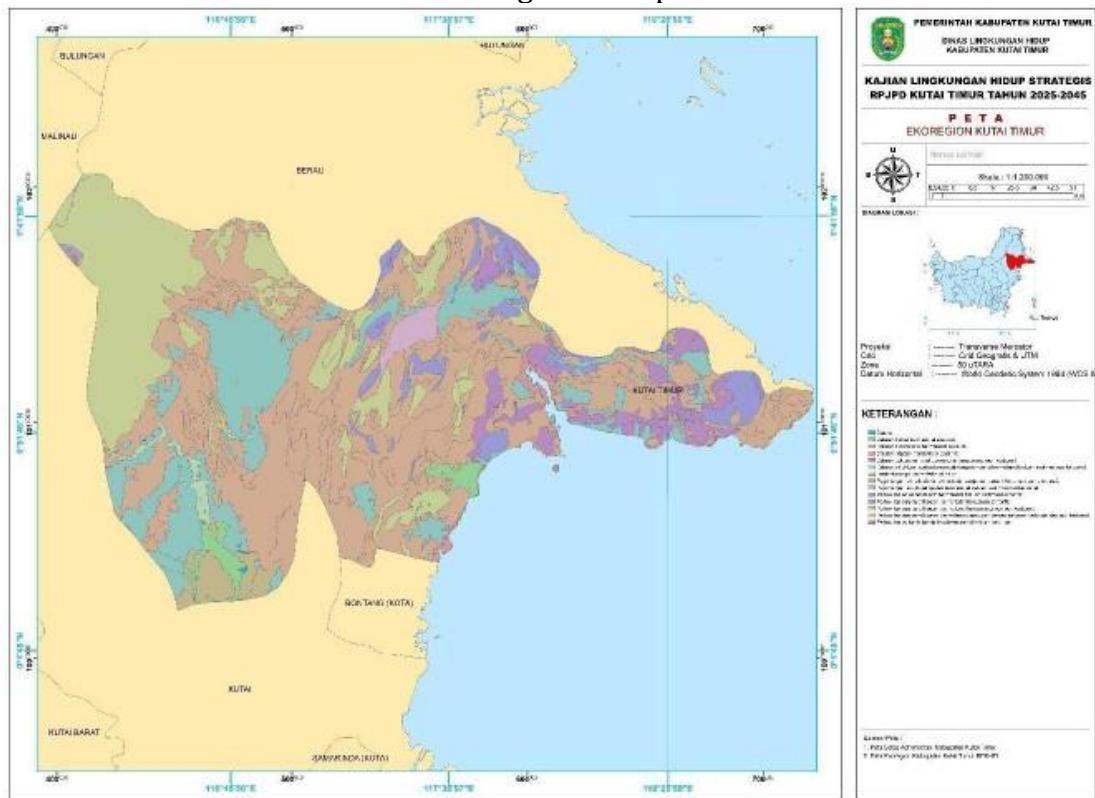
Kabupaten Kutai Timur juga memiliki sejumlah danau yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan fungsi penting untuk mendukung ekosistem dan kehidupan masyarakat. Di Kecamatan Muara Bengkal terdapat Danau Ngayantua dengan luas 1.900 hektar, menjadikannya danau terbesar di Kabupaten Kutai Timur, diikuti oleh Danau Padam Api (511,36 hektar) dan Danau Karang (750 hektar). Sementara itu, Kecamatan Muara Ancalong memiliki beberapa danau kecil, seperti Danau Empaif (6,46 hektar), Danau Kliring (9,90 hektar), dan Danau Setepus (7,25 hektar).

Selain sungai dan danau, terdapat sumber mata air lain yang menyerupai danau, seperti Danau Tapal Kuda yang memiliki luas sekitar 353,43 hektar, dan juga beberapa situs lain dengan luas mencapai 1.661,82 hektar. Wilayah pantai Kutai Timur, yang terletak di sisi timur kabupaten, memainkan peran penting sebagai media untuk pengembangan perairan marikulture komoditi perikanan, seperti budidaya ikan, udang, serta rumput laut. Di sana, juga terdapat budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA).

Selain sungai, danau, dan pantai, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki Cekungan Air Tanah (CAT) yang menjadi aset penting dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. CAT Segara-Karangan terletak di perbatasan Kabupaten Kutai Timur dan Berau, sementara CAT Sumbang berada di ujung timur Tanjung Mangkalihat. Di wilayah Sangatta dan Bontang terdapat CAT yang dikenal sebagai CAT Sangatta dan Bontang, sedangkan di bagian barat, CAT Sendawar membentuk lahan basah yang meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Long Mesangat, dan Muara Bengkal. Keberadaan CAT ini memberikan kontribusi strategis bagi keberlanjutan pasokan air bersih dan keseimbangan ekosistem daerah.

Ekoregion wilayah merupakan bagian penting dalam upaya menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekorwil didefinisikan sebagai suatu kawasan geografis yang memiliki karakteristik iklim, tanah, air, flora, dan fauna yang serupa, serta interaksi manusia dengan alam yang mencerminkan keutuhan sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion yang mendominasi di Kutai Timur adalah perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat dengan persentase luas mencapai 47,05 %.

Gambar 2. 2 Peta Ekoregion Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan hasil pengolahan data BPKHTL tahun 2023, Kabupaten Kutai Timur memiliki ekoregion yang sangat beragam dengan total luas mencapai 2.831.127,16 hektar. Ekoregion terbesar adalah perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non-karbonat, yang mencakup 1.332.041,81 hektar atau 47,05% dari total wilayah. Ekoregion ini diikuti oleh perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non-karbonat, yang mencakup 565.430,04 hektar atau 19,97%.

Wilayah dataran juga memiliki peran penting, seperti dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non-karbonat seluas 457.872,45 hektar (16,17%) dan dataran organik bermaterial gambut seluas 59.733,78 hektar (2,11%). Selain itu, dataran fluviomarin bermaterial aluvium dan dataran fluvial bermaterial aluvium masing-masing mencakup 24.722,91 hektar (0,87%) dan 47.102,28 hektar (1,66%).

Sumber daya air turut diperkaya dengan keberadaan danau seluas 1.547,96 hektar (0,05%), serta ekoregion unik seperti perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar yang mencakup 809,41 hektar (0,03%). Ekoregion ini menggambarkan keragaman karakteristik fisik Kabupaten Kutai Timur, yang berperan penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Kutai Timur menghadapi tantangan dalam mengelola risiko bencana alam, terutama banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan serta lahan. Banjir menjadi masalah tahunan di beberapa kecamatan, khususnya selama musim hujan. Risiko tanah longsor meningkat di beberapa wilayah akibat kondisi tanah yang mudah bergerak dan kelerengan yang tajam. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ancaman serius, memerlukan upaya koordinasi dan pencegahan yang efektif untuk meminimalkan risiko serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pemanfaatan lahan di Kabupaten Kutai Timur, yang dimuat dalam dokumen Penyusunan Audit Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur 2024, terdapat ketidaksesuaian penggunaan lahan antara rencana pola ruang dalam RTRW Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 dengan kondisi aktual di lapangan. Rencana pola ruang yang telah disusun dalam beberapa hal tidak diikuti oleh pemanfaatan lahan yang sesuai. Contoh konkret dari ketidaksesuaian ini adalah lahan yang direncanakan sebagai kawasan perlindungan/hutan produksi tetapi diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

2. Persentase Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Kabupaten Kutai Timur telah membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Laporan KLHS RPJPD Kutai Timur 2025-2045 memberikan data permasalahan pembangunan di Kutai Timur diantaranya bahwa terjadi laju alih fungsi hutan untuk perkebunan serta konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian maupun pemukiman.

Dampak lain dari alih fungsi lahan ini adalah pada aspek kebencanaan dan sumber daya air. Kabupaten Kutai Timur memiliki proporsi lahan penyedia air yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan terhadap pengambilan air baku berada pada level yang mengkhawatirkan.

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai Timur meningkat dari 72,48 pada tahun 2022 menjadi 72,12 pada tahun 2023.

Tabel 2. 1 Capaian Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2023

Indeks	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	71,72	69,47	71,62	72,48	72,12
IKA	58	52,73	50,63	50,00	49,47
IKU	77,72	80,69	86,16	86,61	87,00
IKTL/ IKL	77,5	77,48	80,76	81,78	83,51
IKL	-	-	-	84,95	83,48
Kategori	Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami sedikit fluktuasi, dengan penurunan dari 71,72 pada tahun 2019 menjadi 69,47 pada tahun 2020, kemudian naik kembali hingga mencapai puncaknya pada 72,48 pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun ke 72,12 pada tahun 2023.

Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari 58 pada tahun 2019 menjadi 49,47 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya air, yang bisa disebabkan oleh pencemaran, eksplorasi berlebihan, atau kebijakan pengelolaan air yang kurang efektif. Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan yang konsisten, dari 77,72 pada tahun 2019 hingga mencapai 87,00 pada tahun 2023.

Indeks Kualitas Tanah dan Lahan (IKTL/IKL) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 77,5 pada tahun 2019 menjadi 83,51 pada tahun 2023. Indeks Kualitas Lingkungan (IKL), yang baru mulai diukur pada tahun 2022, menunjukkan penurunan dari 84,95 pada tahun 2022 menjadi 83,48 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, kategori penilaian kualitas lingkungan di Kabupaten Kutai Timur berada pada tingkat 'Baik' untuk sebagian besar periode, kecuali tahun 2020 yang tercatat sebagai 'Cukup Baik'.

4. Indeks Resiko Bencana

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi bencana yang signifikan, terutama dari bencana banjir. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur 2024-2028, banjir merupakan salah satu ancaman yang dihadapi wilayah Kutai Timur. Kecamatan seperti Muara Ancalong dan Sangatta Utara termasuk dalam kategori risiko banjir kelas tinggi, dengan total luas wilayah terdampak mencapai 523.476,36 hektar. Penyebab banjir adalah intensitas hujan yang tinggi, berkurangnya luasan lahan hutan, serta topografi dataran rendah yang menyebabkan sungai-sungai meluap. Kerugian akibat banjir mencakup kerusakan infrastruktur, perumahan, serta lahan pertanian, yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan.

Cuaca ekstrem juga menjadi ancaman yang patut diwaspadai di Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Sangatta Utara dan Sangkulirang memiliki potensi bencana cuaca ekstrem kelas tinggi. Cuaca ekstrem, berupa angin kencang dan hujan lebat, dipengaruhi oleh topografi dataran dan tutupan lahan yang kurang optimal, seperti lahan kosong dan hutan terbuka.

Kebakaran hutan dan lahan juga merupakan ancaman yang signifikan di Kabupaten Kutai Timur. Luas wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan mencapai lebih dari 2,8 juta hektar, sebagian besar wilayah di kecamatan seperti Muara Wahau dan Bengalon berada dalam kategori risiko kebakaran hutan kelas tinggi. Aktivitas pembukaan lahan oleh manusia serta fenomena alam seperti El Nino merupakan faktor penyebab kebakaran hutan.

Selain itu, tanah longsor menjadi salah satu ancaman di daerah pegunungan Kabupaten Kutai Timur, terutama di Kecamatan Muara Wahau yang memiliki wilayah

rawan longsor terbesar. Tanah longsor dipicu oleh kondisi topografi dengan lereng yang curam, terutama pada wilayah pegunungan dengan elevasi tinggi. Bencana ini sering terjadi pada musim hujan ketika tanah yang tidak stabil bergerak turun akibat gaya gravitasi.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur 2024-2028, terdapat bencana yang masuk dalam kategori risiko rendah yaitu penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Faktor penyebab meliputi kurangnya kesadaran dan kesiapan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menghadapi wabah penyakit.

Gelombang ekstrem dan abrasi juga menjadi ancaman yang signifikan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur. Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran memiliki risiko moderat terhadap gelombang ekstrem dan abrasi. Bencana ini terjadi akibat siklon tropis yang menyebabkan gelombang laut tinggi dan merusak garis pantai.

Selain itu, kekeringan juga menjadi salah satu ancaman bencana di Kabupaten Kutai Timur. Wilayah ini berisiko mengalami kekeringan, terutama selama fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan menurun drastis. Dampak kekeringan terutama dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sumber air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Kekeringan juga berdampak pada penurunan kualitas air bersih, yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Seluruh kecamatan di Kutai Timur termasuk dalam kategori risiko kekeringan sedang, dan kombinasi antara pertumbuhan penduduk serta perambahan hutan semakin memperparah risiko ini.

Tabel 2. 2 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Kutai Timur 2019-2023

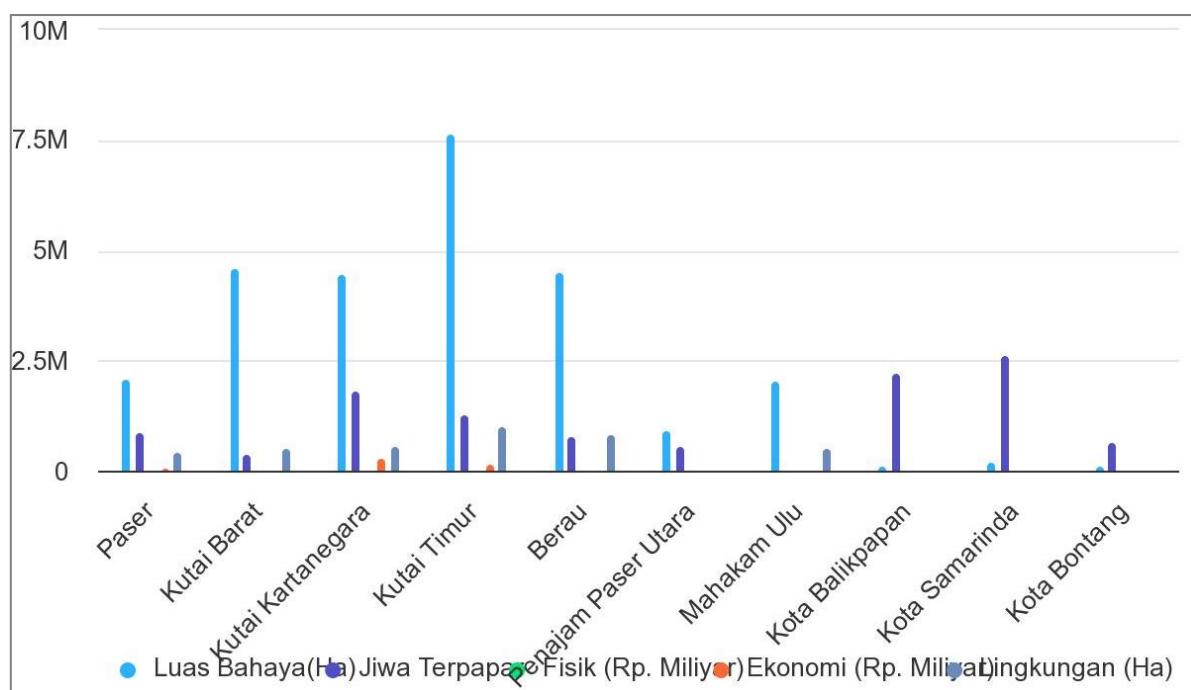
IKD	IRB	Tahun	Kelas Risiko
0,00	190	2019	Tinggi
0,00	190	2020	Tinggi
0,26	190	2021	Tinggi
0,38	181,57	2022	Tinggi
0,36	185,17	2023	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Kutai Timur 2024

Analisis data IKD dan IRB di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang konsisten dalam kelas risiko tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020, IKD berada pada nilai 0,00 dengan IRB tetap di angka 190, menunjukkan bahwa meskipun risiko bencana teridentifikasi tinggi, kerentanan spesifik tidak tercatat atau belum dimasukkan dalam penilaian. Mulai tahun 2021, terdapat peningkatan nilai IKD menjadi 0,26 yang beriringan dengan IRB tetap di 190, menunjukkan bahwa ada peningkatan pengakuan terhadap faktor-faktor kerentanan yang mempengaruhi risiko bencana.

Pada tahun-tahun berikutnya, nilai IKD terus meningkat, mencapai 0,38 pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 0,36 pada tahun 2023, sementara IRB mengalami penurunan menjadi 181,57 pada tahun 2022 dan kemudian naik sedikit menjadi 185,17 pada tahun 2023.

Gambar 2. 3 Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur



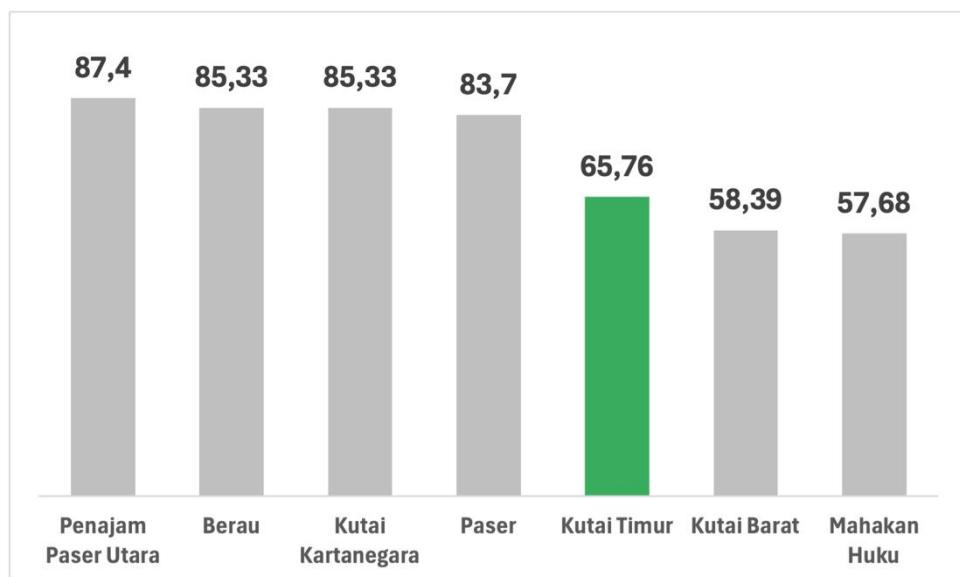
Sumber: inarisk.bnpp.go.id

Berdasarkan data RIPB yang diterbitkan BNPP, terdapat ancaman bencana gempa bumi yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Terdapat Tiga zona sesar utama yang telah diidentifikasi di Pulau Kalimantan yaitu sesar Tarakan, sesar Mangkalihat, dan sesar Meratus yang berpotensi menimbulkan gempa dengan magnitudo 7,00.

5. Indeks Ketahanan Pangan

Dalam bidang ketahanan pangan, data indeks ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional menggambarkan dari 7 kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki ketahanan pangan dengan skor 85,33 disusul kabupaten Penajam Paser Utara 87,40, Kutai Kartanegara 85,53, Paser 83,70, Kutai Barat 58,39, Kutai Timur 65,76 , Mahakam Ulu 57,68.

Gambar 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kutai Timur



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan 2023

Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019-2023:

Tabel 2. 3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Pangan	57,58	73,13	66,19	60,09	65,76
2	Kategori	Agak rentan	Tahan	Agak tahan	Agak tahan	Agak tahan

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2024

Analisis data Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, indeks berada di angka 57,58 yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan dalam kategori agak rentan. Indeks ini kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 mencapai 73,13, menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam ketahanan pangan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 66,19, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah di angka 60,09 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, indeks kembali meningkat menjadi 65,76 dalam kategori agak tahan, namun belum mencapai angka tertinggi yang dicapai pada tahun 2020.

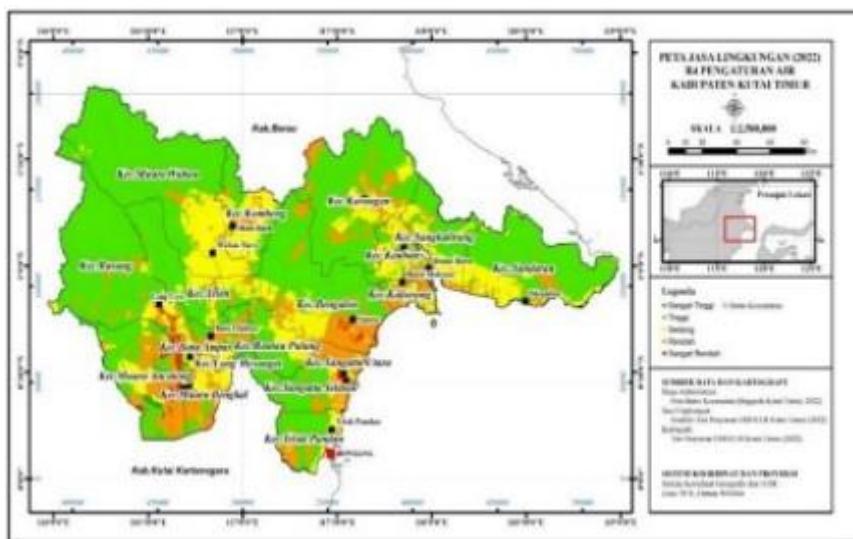
6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Kutai Timur menerapkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam, dengan menerapkan konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Ini termasuk dalam RPJPD Kutai Timur 2025-2045 yang menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan ekosistem alami.

Konsep ini tidak hanya sebagai aspek teknis, tetapi juga nilai fundamental dalam pembuatan kebijakan dan program, memperhatikan sumber daya alam, kualitas air, udara, dan faktor lingkungan lainnya yang penting untuk keberlanjutan daerah.

Kabupaten Kutai Timur mampu menyediakan jasa ekosistem berupa Jasa Lingkungan Penyedia Air (P1) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 2,60% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 26.873,28 Hektar), Rendah sebesar 33,84% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 121.551,88 Hektar), Sedang sebesar 61,93% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 375.835,98 Hektar), Tinggi sebesar 1,21% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 27.624,05 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0,41% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 2.672,83 Hektar).

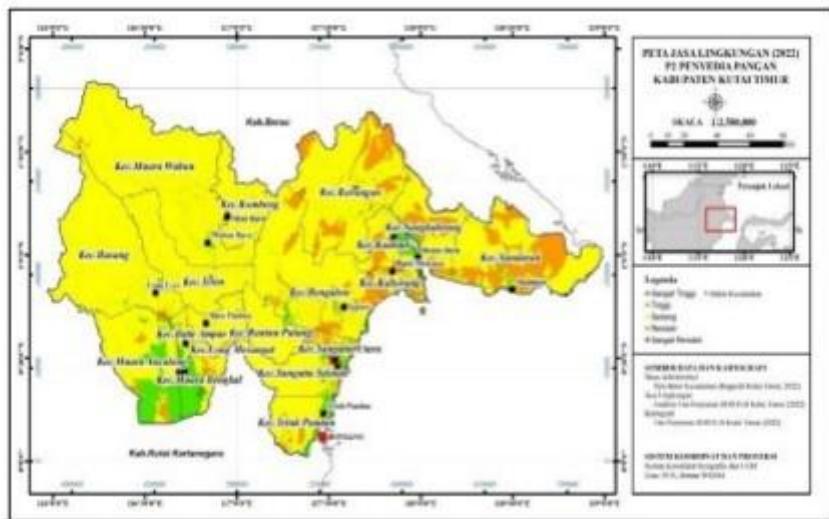
Gambar 2. 5 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (P1) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Sumber: Dinas LH Kutim 2023

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (P2) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 0,002% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 65,65 Hektar), Rendah sebesar 11,69% (didominasi Kecamatan Sandaran seluas 108.809,40 Hektar), Sedang sebesar 82,15% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 491.919,19 Hektar), Tinggi sebesar 5,71% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 68.116,68 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0,44 % (didominasi Kecamatan Bengalon seluas 4.077,07 Hektar).

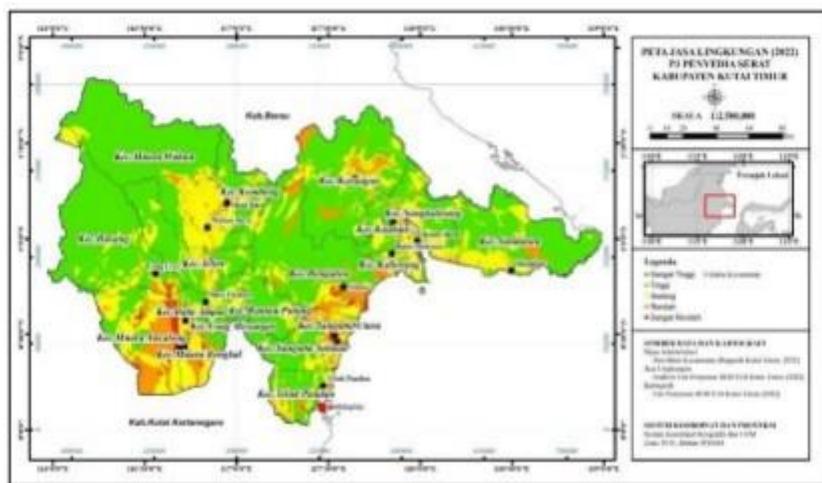
Gambar 2. 6 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (P2) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Sumber: Dinas LH Kutim 2023

Jasa Lingkungan Penyedia Serat (P3) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 1,35% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 13.146,83 Hektar), Rendah sebesar 9,18% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 80.692,56 Hektar), Sedang sebesar 24,57% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 108.583,92 Hektar), Tinggi sebesar 64,99% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 376.195,90 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 0% (Tidak ada Kecamatan yang masuk kategori sangat tinggi).

Gambar 2. 7 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Serat (P3) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022

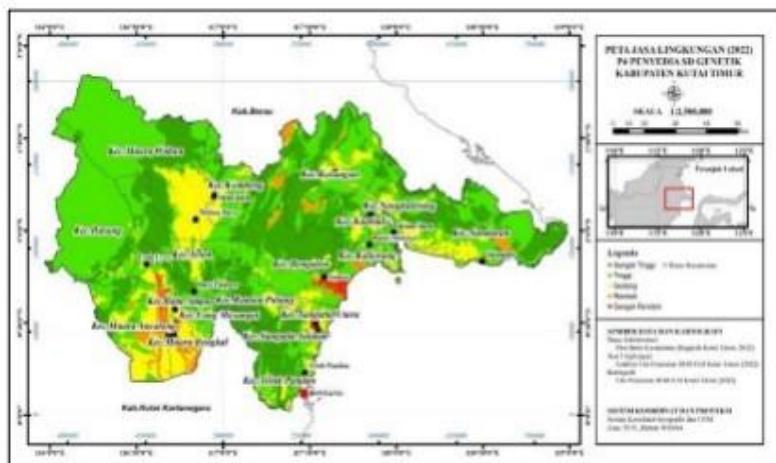


Sumber: Dinas LH Kutim 2023

Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik (P4) dengan persentase kategori kelas berturut-turut, yaitu Sangat Rendah sebesar 0,77% (didominasi Kecamatan Bengalon seluas 13.631,37 Hektar), Rendah sebesar 3,96% (didominasi Kecamatan Muara Ancalong seluas 34.774,47 Hektar), Sedang sebesar 16,11% (didominasi Kecamatan Muara Wahau seluas 99.260,19 Hektar), Tinggi sebesar 47,12% (didominasi

Kecamatan Muara Wahau seluas 285.402,88 Hektar) serta Sangat Tinggi sebesar 32,04 % (didominasi Kecamatan Bengalon seluas 179.203,68 Hektar).

Gambar 2. 8 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik (P4)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kutim, 2023

7. Perubahan Iklim

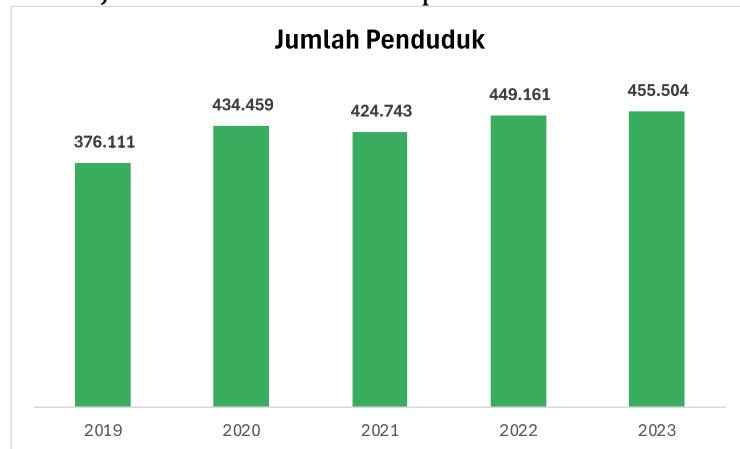
Kabupaten Kutai Timur mengalami dampak signifikan dari perubahan iklim yang dipicu oleh deforestasi. Pembukaan hutan yang masif di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Timur, telah menyebabkan peningkatan suhu. Peningkatan suhu di Kutai Timur tidak hanya menyebabkan lingkungan menjadi lebih panas, tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan Strategi Pertumbuhan Rendah Karbon. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan emisi karbon dari sektor-sektor ekonomi utama, beralih ke kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi yang menghasilkan emisi lebih rendah, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Upaya ini termasuk kebijakan "zero burning" dalam pembukaan lahan, penggunaan lahan terdegradasi untuk ekspansi perkebunan, dan program reboisasi serta konservasi hutan yang terdegradasi.

2.1.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 berdasarkan data BPS 2024 berjumlah 455.504 jiwa. Dalam konteks pembangunan, penduduk memiliki peran ganda, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Dalam kapasitas sebagai subjek pembangunan, penduduk berperan secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sebagai objek pembangunan, penduduk menjadi fokus dan penerima manfaat dari berbagai program pembangunan.

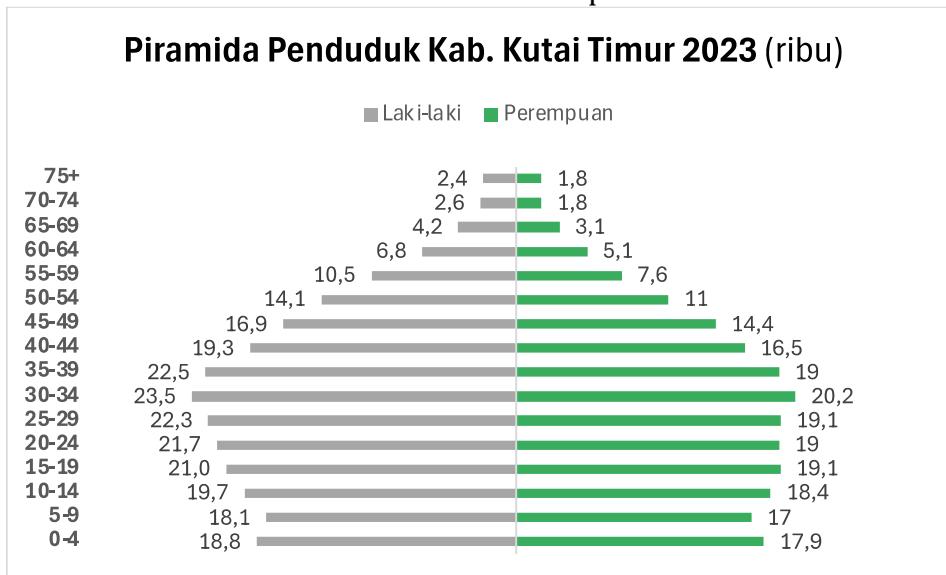
Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2019-2023



Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, BPS 2024

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 376.111 jiwa. Terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2020, mencapai 434.459 jiwa. Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dengan jumlah penduduk 424.743 jiwa. Namun, pertumbuhan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk mencapai 449.161 jiwa. Tren pertumbuhan terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana jumlah penduduk tercatat sebanyak 455.504 jiwa—meningkat 79.393 jiwa atau 21,1% selama 5 tahun terakhir.

Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2023



Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, BPS 2024

Piramida penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 menunjukkan struktur penduduk yang ekspansif, di mana kelompok usia muda mendominasi jumlah populasi. Jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang pada setiap kelompok usia. Kelompok usia 30-34 tahun memiliki jumlah terbesar, masing-masing sekitar 23,5 ribu

untuk laki-laki dan 20,2 ribu untuk perempuan. Jumlah penduduk mulai menurun pada kelompok usia yang lebih tua, terutama pada kelompok usia di atas 60 tahun, dengan jumlah yang jauh lebih kecil, seperti pada usia 70-74 tahun hanya sekitar 2,4 ribu laki-laki dan 1,8 ribu perempuan. Pola ini mencerminkan potensi pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di masa mendatang.

Tabel 2. 4 Kondisi Demografi Kutai Timur 2023

No	Variabel	Nilai
1	Jumlah Penduduk (Ribu)	455.504
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,90%
3	Persentase Penduduk	100%
4	Kepadatan Penduduk Per KM2	14,58
5	Rasio Jenis Kelamin	115,90

Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, BPS 2024

Pada 2023, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 0,90% per tahun, menunjukkan pertumbuhan yang moderat. Kondisi ini bermanfaat dalam mengelola sumber daya dan melakukan perencanaan wilayah tanpa memberikan tekanan mendadak pada sistem sosial dan ekonomi. Pertumbuhan yang stabil ini memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih fokus dan berkelanjutan.

Kepadatan penduduk yang tercatat adalah 14,58 jiwa per kilometer persegi, menggambarkan bahwa Kutai Timur memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang geografis yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut dan penyebaran yang lebih merata, yang pada gilirannya dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Aspek penting lainnya adalah rasio jenis kelamin, di mana terdapat 115,90 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan norma umum, yang bisa menggambarkan dominasi jumlah laki-laki dalam demografi. Rasio jenis kelamin yang tidak seimbang ini dapat berdampak pada isu sosial jangka panjang, termasuk ketidakseimbangan dalam kesempatan kerja dan dinamika kehidupan keluarga, serta potensi ketidakseimbangan dalam beberapa sektor tenaga kerja.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dengan Kecamatan Sangatta Utara mencatat kontribusi tertinggi terhadap total penduduk sebesar rata-rata 29,02% selama periode 2019–2023, sementara beberapa kecamatan seperti Long Mesangat dan Busang masing-masing hanya berkontribusi rata-rata 1,72% dan 1,38%. Ketidakmerataan ini mencerminkan konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi, sementara daerah pedalaman memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih rendah.

Kutai Timur adalah wilayah yang heterogen, yang dihuni dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. Dalam konteks masyarakat adat, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki suku asli yang telah berdiam sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Masyarakat adat di Kutai Timur memiliki kearifan lokal yang kaya dan bersejarah, yang tercermin dalam budaya dan tradisi mereka. Salah satu contoh penting adalah "Pelas Tanah", sebuah pesta adat yang diselenggarakan setiap tahun. Pelas Tanah memiliki akar sejarah yang mendalam, berawal dari tradisi kerajaan Kutai Martadipura, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri sejak sekitar abad ke-4. Kerajaan ini, dikenal juga sebagai Kutai Kartanegara ing Martadipura, memiliki sejarah yang merupakan salah satu yang tertua di Nusantara.

Selain itu, terdapat upaya khusus untuk mengembangkan dan memantapkan potensi budaya masyarakat adat Wehea Kelay di Kutai Timur sebagai destinasi wisata. Tujuannya adalah untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan destinasi wisata utama di Kutai Timur dengan fokus pada pengembangan wisata sosial budaya. Strategi pengembangannya meliputi studi kajian untuk mengembangkan potensi wisata budaya dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempromosikan destinasi wisata masyarakat adat Wehea Kelay.

Kedua aspek ini, Pelas Tanah dan pengembangan Wehea Kelay, menunjukkan bagaimana masyarakat adat Kutai Timur tidak hanya mempertahankan budaya mereka yang kaya, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dan mengintegrasikan warisan budaya tersebut ke dalam konteks modern, khususnya pariwisata, untuk mempromosikan dan melestarikan tradisi mereka.

2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045, aspek kesejahteraan masyarakat mendapat tempat penting sebagai salah satu pilar dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang secara kolektif menentukan kualitas hidup dan kepuasan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat berfungsi untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini. Informasi ini akan menjadi landasan penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan jangka panjang daerah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kondisi saat ini, sub-bab ini akan menggambarkan tantangan dan peluang yang ada di Kutai Timur dalam konteks kesejahteraan masyarakat.

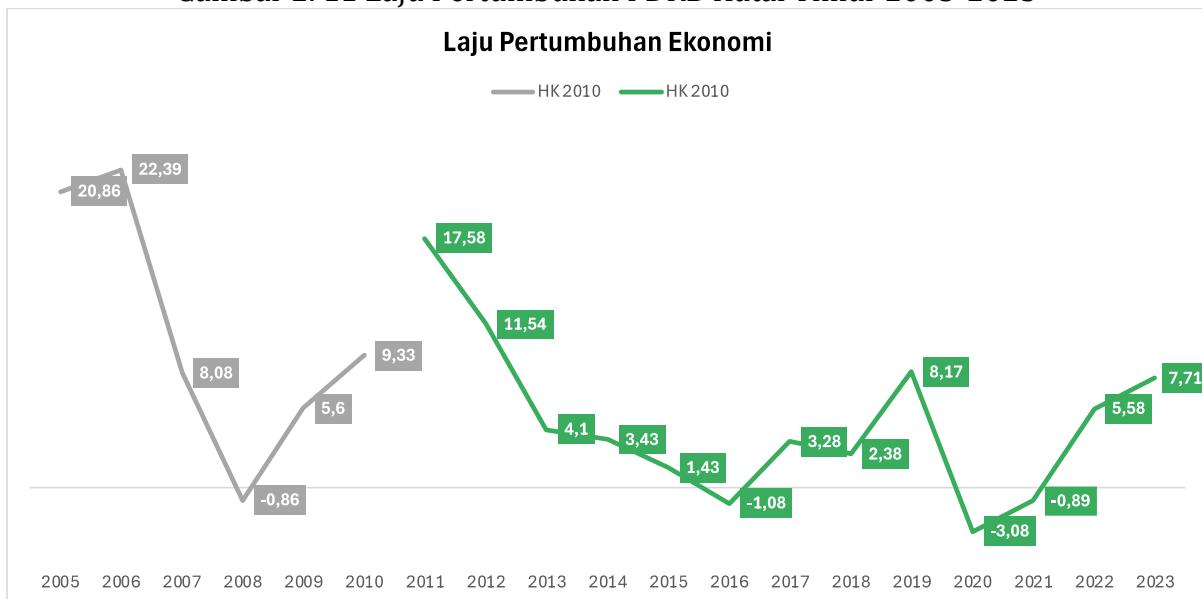
Gambaran Aspek Kesejahteraan Masyarakat ini tidak hanya memberikan gambaran tentang keadaan saat ini, tetapi juga membantu dalam merencanakan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi Kabupaten Kutai Timur.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2025-2045, karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi ditinjau melalui berbagai indikator, yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi secara komprehensif. Indikator-indikator utama yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Gini Rasio, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan PDRB Kutai Timur 2005-2025



Sumber: BPS Kutai Timur, 2024 (diolah)

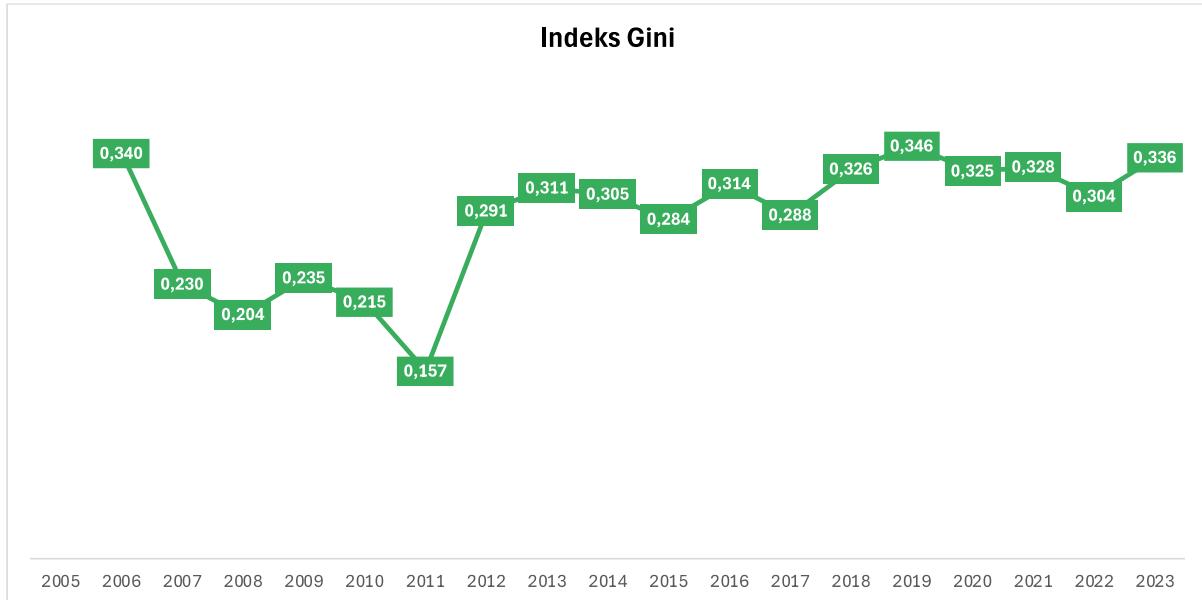
Grafik laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada awal periode, laju pertumbuhan sangat tinggi dengan puncaknya di tahun 2006 sebesar 22,39%. Namun, setelah itu terjadi penurunan tajam pada tahun 2009 dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,86%. Setelah beberapa tahun mengalami peningkatan dan penurunan, puncak berikutnya terjadi pada tahun 2011 dengan laju 17,58%. Tren menurun kembali terlihat dengan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar -3,08% yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk dampak pandemi COVID-19. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2022 - 2023 sebesar 5,58% dan 7,71%, tren keseluruhan menunjukkan penurunan laju pertumbuhan PDRB, yang mengindikasikan perlunya diversifikasi ekonomi dan kebijakan yang lebih adaptif untuk stabilitas ekonomi jangka panjang.

B. Indeks Gini

Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Gini Ratio. Gini

Ratio dihitung berdasarkan kelas pendapatan dengan skala 0-1. Nilai Gini Ratio berada pada interval 0 sampai dengan 1, semakin mendekati angka satu menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu tempat. Sebaliknya, semakin dekat Gini Ratio dengan angka 0 menunjukkan semakin terjadinya pemerataan pendapatan.

Gambar 2. 12 Indeks Gini Kutim 2005-2025



Sumber: Evaluasi RPJPD Kutim 2005-2025

Grafik Indeks Gini di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2006 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2006, Indeks Gini berada di angka 0,34, mencerminkan ketimpangan yang relatif tinggi. Setelah mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah sebesar 0,157 pada tahun 2010, indeks ini kembali meningkat secara bertahap. Puncak ketimpangan terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 0,346, sebelum menurun lagi menjadi 0,304 pada tahun 2022 meskipun kembali meningkat menjadi 0,336 pada 2023. Tren ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan melalui berbagai program redistribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Meskipun ada fluktuasi, penurunan Indeks Gini dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di Kutai Timur.

C. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah indikator penting yang mencerminkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu daerah. Di Kabupaten Kutai Timur, pemantauan angka kemiskinan menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan program sosial yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Angka kemiskinan memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Gambar 2. 13 Angka Kemiskinan Kutai Timur 2005-2025



Sumber: BPS Kutai Timur, 2024 (diolah)

Grafik angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005, angka kemiskinan tercatat sebesar 15,08% dan sempat meningkat menjadi 17,66% pada tahun 2006 serta 17,51% pada tahun 2007. Setelah itu, terjadi penurunan yang berkelanjutan, dengan beberapa fluktuasi kecil, hingga mencapai 9,06% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program bantuan sosial. Meskipun ada beberapa kenaikan pada tahun-tahun tertentu, tren keseluruhan menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Di Kabupaten Kutai Timur, TPT menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi kinerja ekonomi daerah. Mengurangi tingkat pengangguran terbuka merupakan tantangan yang kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan ketersediaan lapangan kerja.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Gambar 2. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kutim 2005-2025



Sumber: Evaluasi RPJPD Kutim 2005-2025

Grafik tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2005, TPT berada di angka 8,49% dan turun drastis menjadi 5,09% pada tahun 2007. Namun, TPT melonjak tajam pada tahun 2009 mencapai puncaknya di 14,59%, sebelum kembali turun menjadi 6,49% pada tahun 2011. Setelah itu, TPT menunjukkan penurunan yang stabil hingga 4,61% pada tahun 2017, tetapi mengalami sedikit kenaikan kembali pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 5,93% pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar kerja yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal, investasi, serta kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

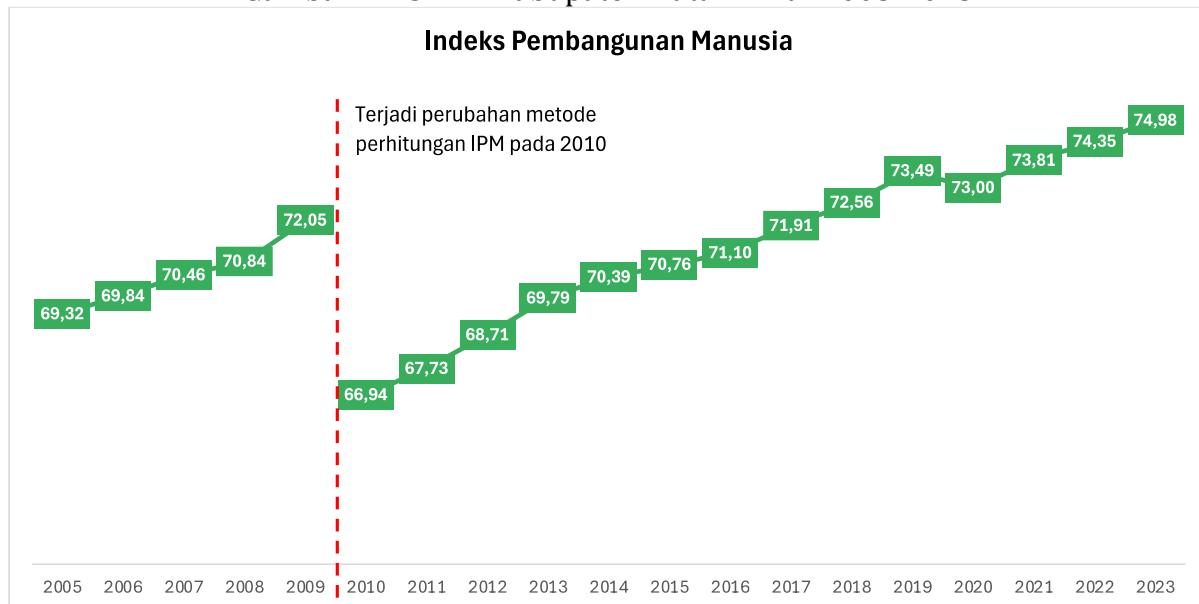
E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah ukuran yang komprehensif untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah, menggabungkan tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. IPM tidak hanya berfungsi sebagai indikator kemajuan ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan dari kualitas hidup dan kesejahteraan penduduknya.

Dalam dokumen RPJPD ini, IPM Kutai Timur dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Fokus utamanya adalah pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta peningkatan pendapatan dan standar hidup penduduk. Melalui pengukuran IPM, Pemerintah Daerah Kutai Timur dapat menilai efektivitas program pembangunan yang telah dijalankan, sekaligus merencanakan strategi pembangunan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan utama pemanfaatan IPM dalam RPJPD adalah untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan mampu berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur secara menyeluruh, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dua dekade kedepan, indikator IPM akan digantikan dengan indikator baru, yaitu Indikator Modal Manusia atau Human Capital Indicator (HCI).

Gambar 2. 15 IPM Kabupaten Kutai Timur 2005-2025



Sumber: BPS Kutai Timur, 2024 (diolah)

Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2005 hingga 2023. Pada tahun 2005, IPM tercatat sebesar 69,32 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 74,98 pada tahun 2023. Namun, terdapat beberapa fluktuasi, seperti penurunan tajam pada tahun 2010 menjadi 66,94 yang disebabkan adanya perubahan metode penghitungan. Kemudian naik lagi pada tahun selanjutnya. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan standar hidup. Tren ini menunjukkan keberhasilan dalam berbagai program pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

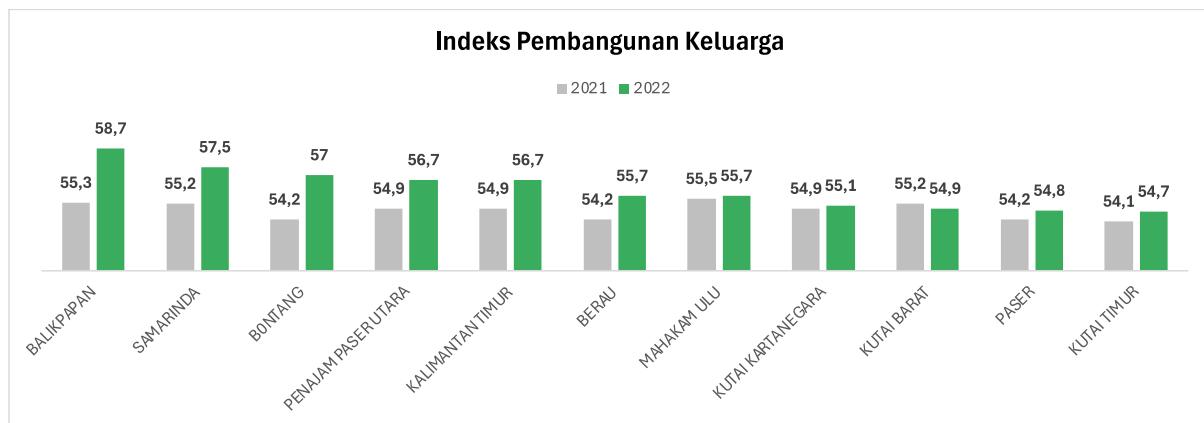
A. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat memegang peranan penting dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Timur. Sebagai indikator komprehensif yang mengukur berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga, indeks ini memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan kesehatan dan kesejahteraan di tingkat lokal, yang sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan publik.

Pada tahun 2023, data dari Dinas Kesehatan Kutai Timur, Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan, yaitu 18. Angka ini mencerminkan rendahnya tingkat kesehatan keluarga dibandingkan dengan standar yang diharapkan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya indeks ini adalah tingginya prevalensi merokok di antara anggota keluarga. Merokok dikenal sebagai salah satu perilaku yang berdampak negatif terhadap kesehatan, tidak hanya bagi perokok itu sendiri tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya melalui paparan asap rokok pasif.

B. Indeks Pembangunan Keluarga

Tabel 2. 5 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kabupaten di Kalimantan Timur



Sumber: KEMENKO PMK

Gambar diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) untuk kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan 2022. Secara umum, sebagian besar daerah mengalami peningkatan indeks dari 2021 ke 2022. Balikpapan mencatat indeks tertinggi pada tahun 2022 dengan nilai 58,7—meningkat dari 55,3 pada tahun sebelumnya. Samarinda menempati posisi kedua dengan indeks 57,5 pada tahun 2022, naik dari 55,2 pada tahun 2021. Kalimantan Timur secara keseluruhan mencapai indeks 56,7 pada tahun 2022, meningkat dari 54,9 pada tahun 2021.

Di sisi lain, Kutai Timur mencatat indeks terendah pada tahun 2022 dengan nilai 54,7, meski tetap menunjukkan peningkatan dari 54,1 pada tahun 2021. Walaupun peningkatan ini positif, Kutai Timur masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. Namun, kenaikan indeks Kutai Timur dari 2021 ke 2022 mengindikasikan adanya upaya perbaikan.

C. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak dalam RPJPD menjadi fondasi untuk membangun strategi jangka panjang yang bertujuan untuk menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan positif, sesuai dengan hak asasi dan kebutuhan mereka yang fundamental.

Dari data yang dirilis oleh KemenPPPA dan Bappenas, Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Kutai Timur tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6 Indeks Perlindungan Anak 2022

Kabupaten	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
Kutai Timur	47,70	77,85	74,48	34,54	72,61	62,26

Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2022

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator komposit yang mencerminkan sejauh mana hak-hak anak dipenuhi dan dilindungi di suatu wilayah. IPA untuk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2022 tercatat sebesar 62,26. Nilai ini disusun dari lima dimensi yang mengevaluasi aspek-aspek berbeda dari perlindungan anak.

Indeks D1: Hak Sipil dan Kebebasan

Nilai untuk Hak Sipil dan Kebebasan adalah 47,70, yang merupakan nilai terendah di antara indikator lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan dalam mengakui dan melindungi hak-hak sipil anak-anak di Kutai Timur, seperti identitas hukum, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi.

Indeks D2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Dimensi kedua mencatat nilai 77,85, menunjukkan bahwa Kutai Timur telah memiliki praktik yang relatif baik dalam menyediakan lingkungan keluarga yang mendukung dan pengasuhan alternatif ketika diperlukan. Ini mencerminkan upaya yang baik dalam memelihara hubungan keluarga yang kuat dan pengasuhan yang berpusat pada anak.

Indeks D3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Nilai 74,48 pada dimensi kesehatan dasar dan kesejahteraan menandakan bahwa Kabupaten Kutai Timur telah memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek kesehatan dan kesejahteraan anak, meski masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal nutrisi, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Indeks D4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya mencatat nilai terendah kedua yaitu 34,54. Ini merupakan isyarat yang jelas bahwa sektor ini memerlukan perhatian serius dan peningkatan. Perlu ada investasi lebih dalam pendidikan dan pengembangan fasilitas untuk waktu luang dan kegiatan budaya yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan anak.

Indeks D5: Perlindungan Khusus

Dengan nilai 72,61, dimensi Perlindungan Khusus menunjukkan bahwa telah ada upaya yang cukup untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan situasi darurat lainnya.

Secara keseluruhan, nilai IPA yang tercatat untuk Kutai Timur mencerminkan ada beberapa kekuatan dan sejumlah tantangan yang signifikan dalam perlindungan anak. Pendidikan dan hak sipil anak menjadi area yang paling memerlukan perbaikan. Sementara itu, lingkungan keluarga, kesejahteraan, dan perlindungan khusus telah menunjukkan hasil yang lebih positif.

D. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan ukuran yang menilai kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Fokus utama dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam hal partisipasi politik, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur, IPG digunakan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk memberikan akses yang setara kepada perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan politik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi partisipasi penuh perempuan dalam semua aspek kehidupan dan untuk memastikan bahwa pembangunan manusia berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

Penggunaan IPG dalam RPJPD menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk mengatasi diskriminasi gender dan mempromosikan kesetaraan antara pria dan wanita. Hal ini tidak hanya penting dalam mencapai keadilan sosial, tetapi juga penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi, karena pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender telah terbukti meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2. 7 Indeks Pemberdayaan Gender Kutai Timur 2020-2022

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,35	53,77	53,78	51,55	53,99

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IDG tercatat sebesar 56,35, menunjukkan tingkat pemberdayaan gender yang relatif baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 53,77. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak sosial dan ekonomi dari pandemi

COVID-19, yang mempengaruhi partisipasi dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Pada tahun 2021, IDG sedikit meningkat menjadi 53,78, namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Tahun 2022 mencatat penurunan lebih lanjut dalam IDG, yang mencapai titik terendah dalam periode ini dengan angka 51,55. Penurunan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pemberdayaan gender di Kutai Timur. Namun, pada tahun 2023, IDG kembali meningkat menjadi 53,99, menunjukkan adanya perbaikan dan upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Peningkatan ini bisa jadi merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang difokuskan untuk mendukung peran serta perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Meski begitu, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan gender masih diperlukan untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan dan signifikan di masa depan.

E. Indeks Ketimpangan Gender

Tabel 2. 8 : Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kutai Timur 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,561	0,53	0,518	0,552	0,532

Sumber: BPS 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator pembangunan yang mengukur disparitas pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi kritis: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. IKG dikembangkan berdasarkan metodologi United Nations Development Programme (UNDP) untuk Gender Inequality Index (GII) 2010, dengan modifikasi untuk memungkinkan ketersediaan data di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Nilai IKG yang lebih rendah mengindikasikan tingkat ketimpangan gender yang lebih rendah.

Analisis IKG di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan variasi selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, IKG tercatat sebesar 0,561. Selama dua tahun berikutnya, terjadi penurunan dengan IKG mencapai 0,53 pada tahun 2020 dan 0,518 pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Timur.

Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan IKG menjadi 0,552, yang menunjukkan adanya tantangan dalam upaya mengurangi ketimpangan gender. Namun, pada tahun 2023, IKG kembali mengalami penurunan menjadi 0,532. Hal ini mencerminkan adanya komitmen berkelanjutan dalam mengatasi isu ketimpangan gender di Kabupaten Kutai Timur.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Kabupaten Kutai Timur adalah sebuah daerah yang kaya akan potensi ekonomi dengan beberapa sektor unggulan yang menjadi tulang punggung pembangunannya. Sektor-sektor ini meliputi pertambangan, agro industri, perkebunan, dan pariwisata, masing-masing memberikan kontribusi signifikan untuk perekonomian lokal dan nasional.

Sektor pertambangan merupakan pilar utama ekonomi di Kutai Timur. Daerah ini kaya akan sumber daya mineral, terutama batu bara, yang telah menarik banyak perusahaan pertambangan besar. Industri pertambangan di Kutai Timur tidak hanya memberikan sumbangan besar terhadap PDRB daerah tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja dan menggerakkan industri terkait, seperti transportasi dan logistik.

Agro industri juga menjadi sektor penting di Kutai Timur. Dengan kondisi tanah dan iklim yang mendukung, daerah ini cocok untuk berbagai jenis pertanian dan perkebunan. Produksi kelapa sawit dan kakao merupakan kontributor utama, dengan perkebunan-perkebunan besar yang telah lama beroperasi di daerah ini. Pengembangan agro industri tidak hanya berfokus pada produksi tetapi juga pada pengolahan hasil pertanian, sehingga menambah nilai tambah ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Perkebunan dan pertanian merupakan sektor yang tak terpisahkan dari agroindustri. Kutai Timur memiliki lahan perkebunan dan pertanian yang luas dan subur. Komoditas utama perkebunan adalah kelapa sawit dan karet, sedangkan pertanian berfokus pada nanas dan pisang. Sektor ini tidak hanya penting bagi ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Saat ini, peningkatan praktik perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi fokus utama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.

Pariwisata adalah sektor yang sedang berkembang di Kutai Timur, dengan potensi yang besar untuk menjadi sumber pendapatan penting di masa depan. Wilayah Kabupaten Kutai Timur menawarkan keindahan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, dan keanekaragaman hayati yang kaya. Tempat-tempat seperti Taman Nasional Kutai, Karst Sangkulirang - Mangkalihat yang saat ini telah menjadi kawasan *geoheritage* dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 187, merupakan daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang alami. Pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bisa membuka peluang ekonomi baru dan mendukung pelestarian alam dan budaya lokal.

Keseluruhan sektor ini, pertambangan, agro industri, perkebunan, dan pariwisata, masing-masing memiliki peran penting dalam perekonomian Kutai Timur. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, sektor-sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah merupakan aspek penting yang merefleksikan kemampuan suatu wilayah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk memahami dan mengevaluasi daya saing ekonomi suatu daerah, berbagai indikator ekonomi digunakan, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Inklusif, dan Rasio Kewirausahaan.

Dengan memahami dan mengevaluasi indikator-indikator ini, dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang daya saing ekonomi suatu daerah, membantu dalam pembuatan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

A. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur potensi ekonomi daerah ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran agregat dari total nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Dalam konteks Kutai Timur, PDRB memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sektor-sektor andalan seperti pertambangan dan penggalian, berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Tabel 2. 8 PDRB Kabupaten Kutai Timur 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Dengan Pertambangan dan Penggalian					
Harga Berlaku	133,87	115,56	136,62	211,10	168,27
Harga Konstan 2010	95,82	92,87	92,04	97,17	104,66
Tanpa Pertambangan dan Penggalian					
Harga Berlaku	24,86	25,71	27,63	31,47	34,21
Harga Konstan 2010	15,96	15,87	16,01	17,03	18,11

Sumber: BPS Kutai Timur, 2023 (Data diolah)

Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2023 menunjukkan dinamika ekonomi yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Tabel di atas menggambarkan PDRB Kabupaten Kutai Timur yang dibagi menjadi dua kategori utama: dengan dan tanpa sektor pertambangan dan penggalian, serta berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2010.

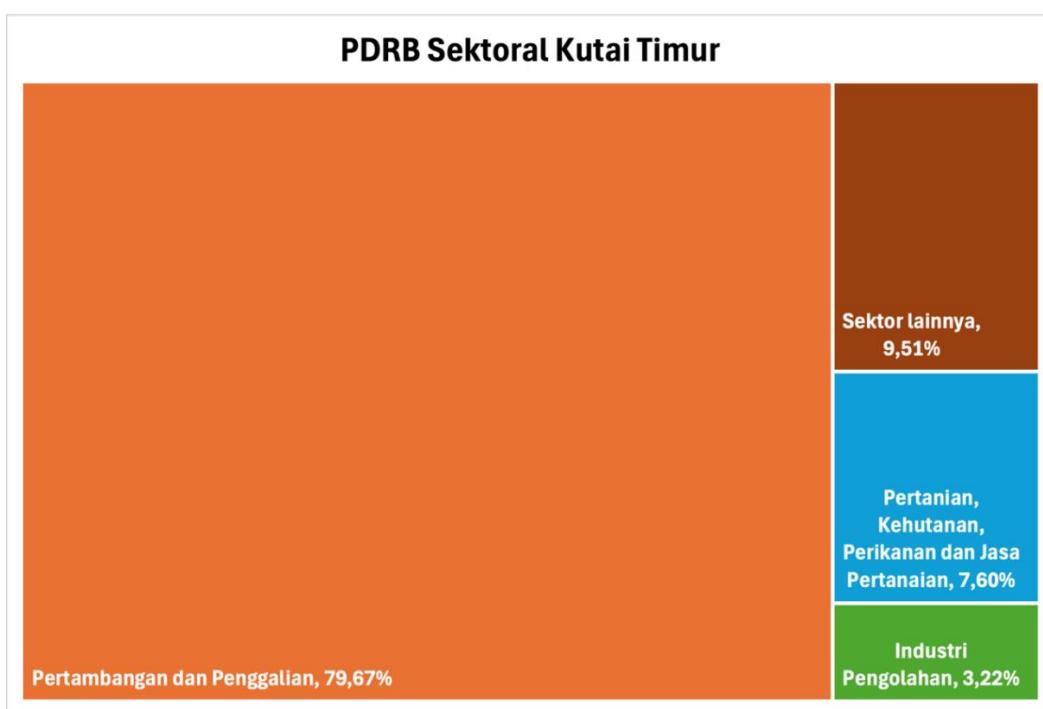
Dengan mempertimbangkan sektor pertambangan dan penggalian, PDRB Kutai Timur dengan harga berlaku menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 211,10 triliun rupiah, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 168,27 triliun rupiah. Sementara itu, PDRB dengan harga konstan 2010 menunjukkan tren yang lebih stabil dengan peningkatan bertahap dari 95,82 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 104,66 triliun rupiah pada tahun 2023.

Tanpa memperhitungkan sektor pertambangan dan penggalian, PDRB Kutai Timur menunjukkan pertumbuhan yang lebih konsisten. Dengan harga berlaku, nilainya meningkat dari 24,86 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 34,21 triliun rupiah pada tahun 2023. Sedangkan dengan harga konstan 2010, terjadi peningkatan dari 15,96 triliun rupiah menjadi 18,11 triliun rupiah dalam periode yang sama.

Perbedaan signifikan antara nilai PDRB dengan dan tanpa sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kutai Timur. Namun, pertumbuhan yang lebih stabil pada PDRB tanpa sektor pertambangan dan penggalian mengindikasikan adanya diversifikasi ekonomi yang penting untuk ketahanan ekonomi jangka panjang daerah ini.

Untuk melihat struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Timur secara utuh, berikut gambaran persentase PDRB Sektoral di Kabupaten Kutai Timur tahun 2023. Dimana sektor pertambangan dan penggalian mendominasi PDRB Kutai timur dengan kontribusi sebesar 79,67%.

Gambar 2. 16 Persentase PDRB Sektoral Kutim



Sumber: Kutim Dalam Angka 2024

B. PDRB Per Kapita

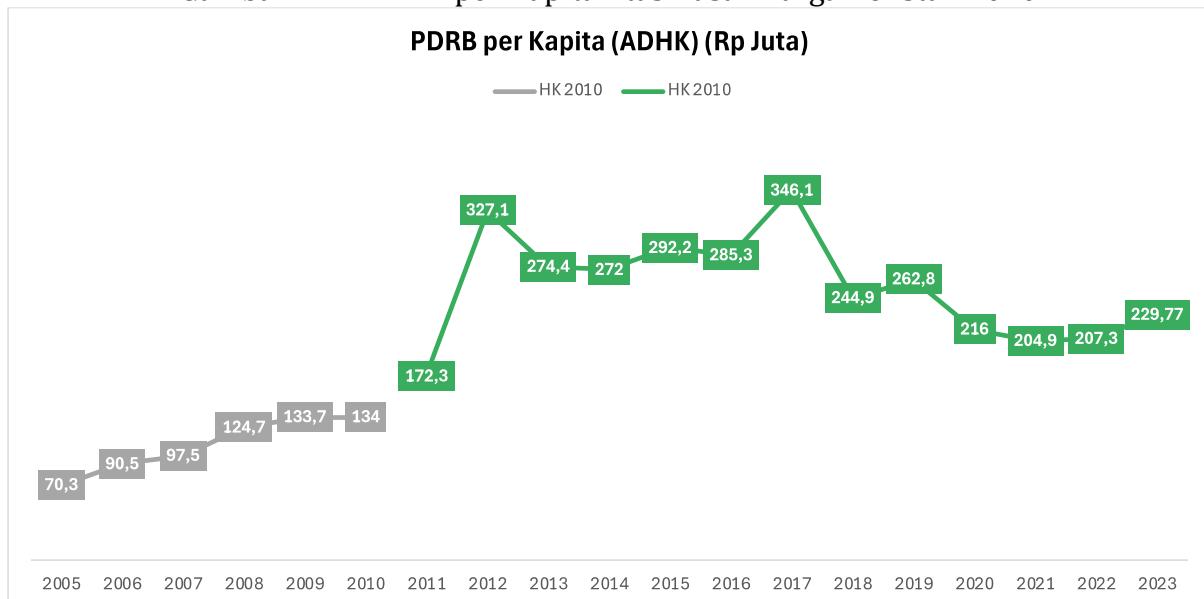
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Kutai Timur merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai dan merencanakan pembangunan jangka panjang. Tingkat PDRB per kapita yang tinggi sering diinterpretasikan sebagai cerminan dari kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi penduduk Kabupaten Kutai Timur, menandakan bahwa pendapatan rata-rata penduduknya relatif tinggi. Hal ini, pada gilirannya, mencerminkan tidak hanya

peningkatan dalam output ekonomi tetapi juga distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata di antara penduduk.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, PDRB per kapita memiliki pengaruh signifikan. Misalnya, tingkat PDRB per kapita yang tinggi dapat menarik perhatian investor, menandakan adanya pasar yang kuat dengan daya beli yang tinggi, yang penting untuk pertumbuhan industri, pariwisata, dan sektor jasa. Di sisi lain, ini juga mengindikasikan bahwa ada ruang untuk pembangunan sumber daya manusia yang lebih lanjut, seperti melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

PDRB per kapita juga penting dalam pembuatan kebijakan di Kabupaten Kutai Timur. Data ini membantu membuat kebijakan dalam menetapkan prioritas pembangunan, mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan dukungan lebih, dan menentukan di mana alokasi sumber daya dan investasi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang paling signifikan. Dengan fokus pada PDRB per kapita, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan.

Gambar 2. 17 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010



Sumber: BPS Kutai Timur, 2024 (diolah)

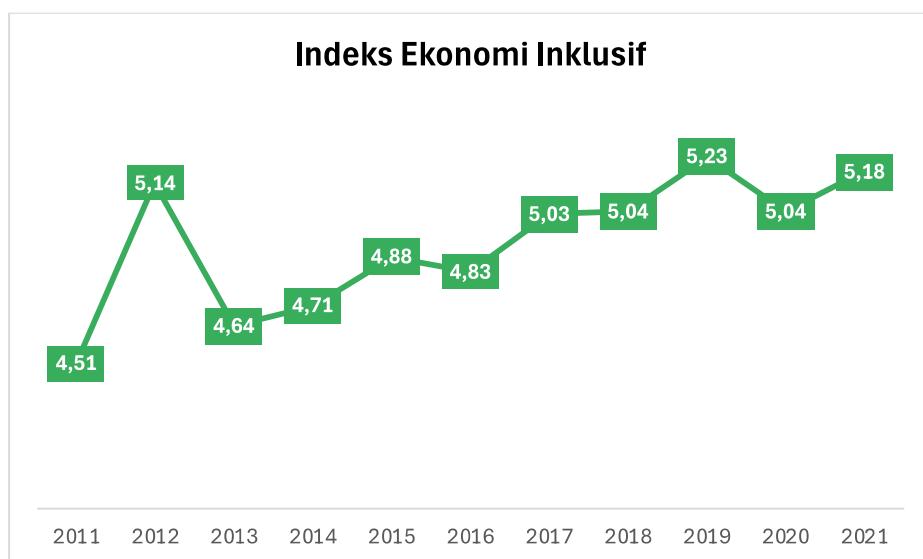
Grafik PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2005 hingga 2023. Pada awal periode, PDRB per kapita meningkat secara konsisten dari Rp 70,3 juta pada tahun 2005 hingga mencapai puncaknya pada 2011 dengan Rp 327,1 juta. Setelah itu, terjadi beberapa penurunan dan kenaikan, dengan titik tertinggi lainnya pada tahun 2016 sebesar Rp 346,1 juta. Namun, dari tahun 2017 hingga 2021, grafik cenderung menurun, dengan nilai PDRB per kapita mencapai Rp 204,9 juta pada tahun 2021 sebelum meningkat lagi menjadi Rp 229,77 juta pada 2023. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga komoditas global dan kebijakan ekonomi lokal. Upaya

diversifikasi ekonomi dan peningkatan sektor-sektor non-migas diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

C. Indeks Ekonomi Inklusif

Ekonomi inklusif memainkan peran penting dalam pembangunan jangka panjang karena mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi, ekonomi inklusif mengurangi ketimpangan, meningkatkan stabilitas sosial, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi berkelanjutan, yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang yang sehat dan stabil. Ekonomi inklusif juga menekankan pada pembangunan kapasitas dan pemberdayaan komunitas lokal, yang merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2. 18 Perkembangan Ekonomi Inklusif Kutai Timur 2011-2021



Sumber: Bappenas (2024)

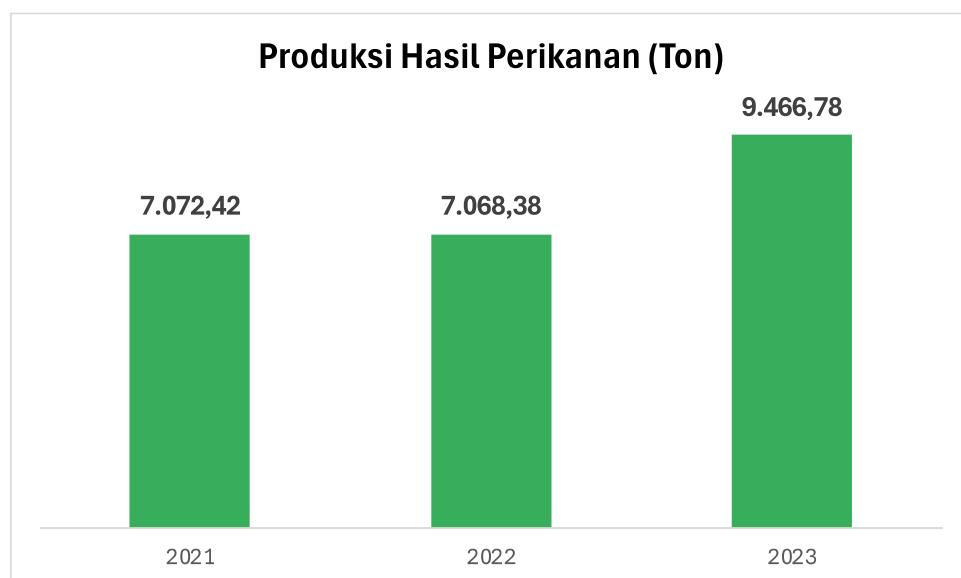
Perkembangan pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan tren positif. Kutai Timur, sebagaimana tercermin dalam data, tampaknya telah mengalami peningkatan bertahap dalam aspek-aspek kunci yang mendukung ekonomi inklusif. Ini termasuk peningkatan dalam aksesibilitas, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peningkatan ini menandakan upaya yang berkelanjutan dan efektif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pertumbuhan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat luas. Pembangunan yang inklusif di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada inklusi sosial dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

D. Nilai Produksi Perikanan

Indeks Ekonomi Biru (*Blue Economy Index*) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi maritim dan pesisir yang berkelanjutan. Indeks ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya laut, kontribusi ekonomi dari sektor perikanan dan kelautan, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta perlindungan ekosistem laut. Karena data Indeks Ekonomi Biru tidak tersedia untuk Kabupaten Kutai Timur, digunakan proksi berupa kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor perikanan di Kabupaten Kutai Timur memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terlihat dari volume produksi perikanan yang tinggi dan kontribusi signifikan terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, sektor ini juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berkontribusi pada ekspor hasil perikanan, yang menunjukkan daya saing dan kualitas hasil perikanan.

Perikanan, dalam PDRB digabungkan dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Jasa Pertanian. Kelompok sektor ini menunjukkan penurunan kontribusi dari 9,12% pada tahun 2020 menjadi 5,90% pada tahun 2022, sebelum naik lagi menjadi 7,60% pada tahun 2023. Ini menunjukkan volatilitas dalam sektor ini yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi iklim dan pasar.

Gambar 2. 19 Produksi Hasil Perikanan Kutim 2021-2023



Sumber: Dinas Perikanan Kutai Timur 2024

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur 2024, produksi hasil perikanan mengalami fluktuasi dari tahun 2021 sebesar 7072,42 Ton, turun menjadi 7068,38 Ton dan naik signifikan pada tahun 2023 sebesar 9466,78 Ton. Pertumbuhan nilai produksi perikanan laut yang signifikan mencerminkan potensi ekonomi yang besar dari sektor ini, kemungkinan didorong oleh peningkatan kualitas produk, pemasaran yang efektif, serta peningkatan permintaan pasar baik lokal maupun internasional.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur, nilai produksi perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 – 2022 bisa dilihat dari grafik berikut:

Gambar 2. 20 Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Timur 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024 (Diolah)

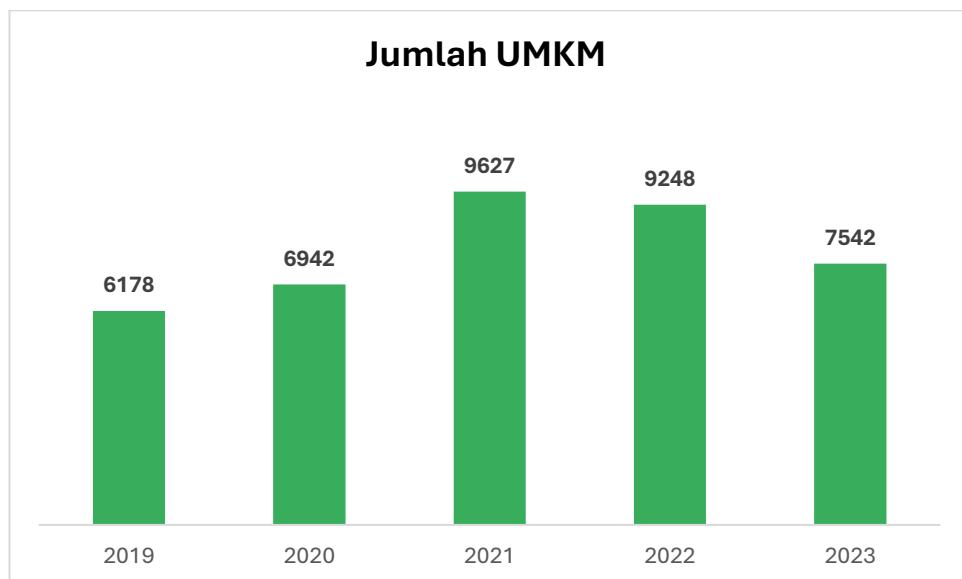
Nilai produksi perikanan Kabupaten Kutai Timur menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, nilai produksi tercatat sebesar Rp1,36 miliar, meningkat tajam menjadi Rp32,33 miliar pada tahun 2020. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp30,99 miliar, nilai produksi kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai Rp32,48 miliar. Tren ini menggambarkan potensi besar sektor perikanan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Kutai Timur.

E. Rasio Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM

Di tengah upaya nasional Indonesia untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 12 persen guna mencapai status negara maju pada 2045, Kabupaten Kutai Timur memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Saat ini, secara nasional rasio kewirausahaan masih berada pada angka 3,47%, masih sangat jauh dari target nasional.

UMKM di Kabupaten Kutai Timur memainkan peran vital dalam perekonomian daerah, menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan lebih dari 7.500 UMKM aktif hingga tahun 2023, sektor ini berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM membantu mengurangi kemiskinan dengan menyediakan sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas lokal, memanfaatkan sumber daya daerah, serta memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Dukungan dari pemerintah melalui berbagai program dan pelatihan terus diupayakan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Kutai Timur.

Gambar 2. 21 UMKM Kutim 2019-2023



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kutim 2024

Analisis jumlah UMKM dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah UMKM tercatat sebanyak 6.178 unit. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6.942 unit, yang mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi kecil dan menengah di wilayah tersebut. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2021, dengan jumlah UMKM mencapai 9.627 unit. Pertumbuhan ini kemungkinan didorong oleh upaya pemulihan ekonomi dan berbagai inisiatif pemerintah atau lembaga terkait yang mendorong pengembangan UMKM.

Namun, pada tahun 2022, jumlah UMKM mengalami sedikit penurunan menjadi 9.248 unit. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, seperti perubahan kondisi pasar atau kesulitan dalam mendapatkan akses ke sumber daya. Pada tahun 2023, jumlah UMKM kembali menurun lebih jauh menjadi 7.542 unit. Penurunan ini bisa jadi mencerminkan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh sektor UMKM, termasuk kemungkinan penutupan usaha atau kurangnya kegiatan bisnis akibat faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan yang signifikan di tengah periode tersebut, tren akhir menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap stabilitas dan keberlanjutan UMKM.

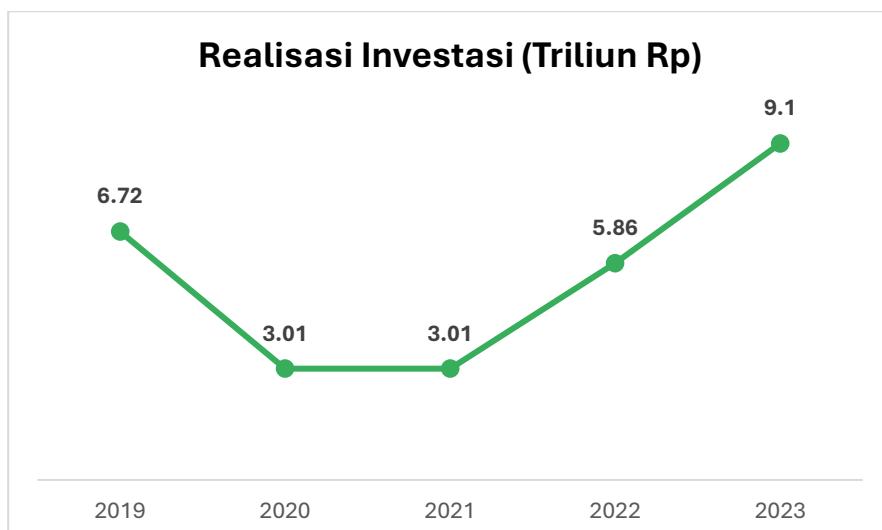
Meskipun terjadi penurunan jumlah UMKM, terdapat perkembangan positif dalam kualitas UMKM di Kabupaten Kutai Timur. Konsep "UMKM naik kelas" menjadi fokus penting dalam upaya pengembangan sektor ini. UMKM naik kelas berarti peningkatan level usaha—from mikro ke kecil, atau dari kecil ke menengah—yang mencerminkan peningkatan kapasitas dan kualitas usaha. Peningkatan ini meliputi aspek-aspek seperti manajemen, teknologi, akses pasar, dan keuangan. Pada tahun 2023, tercatat 762 UMKM di Kabupaten Kutai Timur berhasil naik kelas. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

F. Penanaman Modal

Untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi investasi serta peningkatan kualitas pelayanan. Intensifikasi melibatkan peningkatan investasi di sektor yang ada, sementara ekstensifikasi menciptakan peluang investasi baru. Upaya ini didukung oleh perencanaan strategis dan melibatkan semua pihak terkait. Bertindak sebagai *leader* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait investasi dan perizinan.

Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur tahun 2024, dari tahun 2021 hingga 2023 terlihat beberapa perkembangan signifikan dalam kajian potensi daerah, promosi, investasi, dan kepuasan masyarakat.

Gambar 2. 22 Capaian Penanaman Modal Kutim 2019-2023



Sumber: Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu Kutim 2024

Analisis realisasi investasi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, realisasi investasi mencapai Rp 6,72 triliun, menandakan kondisi ekonomi yang cukup kuat dan menarik bagi investor. Namun, pada tahun 2020, realisasi investasi mengalami penurunan tajam menjadi Rp 3,01 triliun. Penurunan ini bisa diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan mengurangi aktivitas investasi.

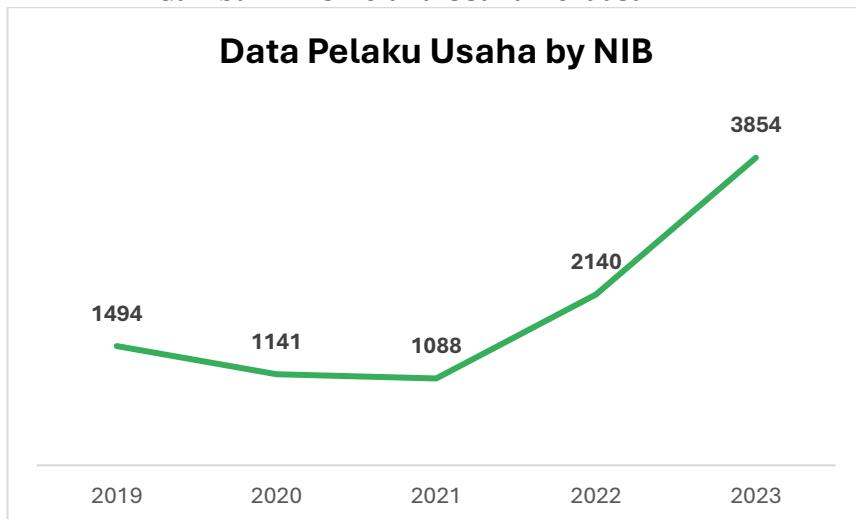
Tahun 2021 menunjukkan stagnasi dengan realisasi investasi tetap di angka Rp 3,01 triliun. Meskipun ekonomi mulai pulih, tantangan untuk memulihkan kepercayaan investor masih berlanjut. Namun, pada tahun 2022, terdapat peningkatan yang signifikan dalam realisasi investasi, mencapai Rp 5,86 triliun. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai membawa hasil, serta kemungkinan adanya kebijakan-kebijakan yang lebih menarik bagi investor.

Pada tahun 2023, realisasi investasi melonjak tajam hingga mencapai Rp 9,1 triliun. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat dan meningkatnya minat investor terhadap peluang investasi di wilayah tersebut. Lonjakan ini bisa juga disebabkan oleh

berbagai proyek strategis dan peningkatan daya tarik ekonomi lokal yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan perjalanan pemulihan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Kutai Timur yang menunjukkan tren positif setelah mengalami tantangan berat selama pandemi.

Data pelaku usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun dengan tren peningkatan yang signifikan pada akhirnya. Pada tahun 2019, jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan NIB adalah 1.494, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.141 dan terus menurun hingga 1.088 pada tahun 2021. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh tantangan ekonomi dan regulasi yang dihadapi oleh pelaku usaha. Namun, mulai tahun 2022, jumlah pelaku usaha yang terdaftar mulai menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 2.140 dan melonjak tajam pada tahun 2023 menjadi 3.854. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendaftar dan memperoleh NIB, serta membaiknya kondisi ekonomi yang mendorong lebih banyak individu dan perusahaan untuk memulai atau meresmikan usahanya.

Gambar 2. 23 Pelaku Usaha Berdasar NIB



Sumber: Dinas PMPTSP Kutim 2024

Analisis grafik jumlah pelaku usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada akhir periode. Pada tahun 2019, terdapat 1.494 pelaku usaha yang terdaftar dengan NIB, menandakan awal yang cukup kuat dalam jumlah registrasi bisnis baru. Namun, tahun 2020 mencatat penurunan jumlah pelaku usaha menjadi 1.141, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak usaha menghadapi tantangan operasional dan ekonomi.

Pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan NIB sedikit menurun lagi menjadi 1.088. Penurunan ini mencerminkan berlanjutnya ketidakpastian ekonomi dan mungkin kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan situasi pandemi. Namun, memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan

menjadi 2.140 pelaku usaha yang terdaftar. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong kemudahan berbisnis dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan NIB melonjak drastis menjadi 3.854. Lonjakan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat dan kepercayaan yang meningkat di antara pelaku usaha terhadap iklim bisnis yang semakin membaik. Kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan usaha baru, peningkatan akses terhadap pembiayaan, serta perbaikan dalam proses registrasi usaha mungkin berkontribusi pada pertumbuhan yang signifikan ini. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan peningkatan aktivitas bisnis yang menjanjikan dan menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di masa depan.

G. Sumber Daya Alam

Kabupaten Kutai Timur memiliki **potensi sumber daya alam** yang kaya dan beragam. Potensi unggulan ini dapat dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya:

1. Pertanian Tanaman Pangan

Data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 menunjukkan selama 2019-2023 menunjukkan fluktuasi signifikan pada luas tanam dan produksi komoditas utama. Padi sawah mencatat peningkatan produksi dari 13.398 ton pada 2019 menjadi 20.193,93 ton pada 2023, sementara padi ladang menunjukkan penurunan berkelanjutan dari 13.272 ton pada 2019 menjadi 4.795,67 ton pada 2023. Jagung mengalami peningkatan luas tanam hingga 3.190 ha pada 2022, tetapi produksi turun drastis dari 14.567 ton pada 2022 menjadi 2.062,66 ton pada 2023. Sektor buah-buahan menunjukkan tren pertumbuhan yang menarik, terutama pada pisang dan nanas. Produksi pisang melonjak dari 47.452,10 ton pada 2019 menjadi 104.612,80 ton pada 2023, sedangkan nanas meningkat signifikan dari 127,20 ton pada 2019 menjadi 9.560,66 ton pada 2023. Meski demikian, fluktuasi pada beberapa komoditas mencerminkan tantangan dalam mempertahankan produktivitas yang stabil. Untuk mengatasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengembangkan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) seluas 2.940,49 hektar guna melindungi lahan produktif dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

2. Peternakan

Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, tahun 2024, Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi peternakan yang signifikan, baik dari populasi ternak besar maupun unggas, serta hasil produksinya. Pada 2023, populasi sapi mencapai 19.305 ekor, disertai produksi daging sebesar 447,50 ton, sementara kerbau dengan populasi 491 ekor menghasilkan 12,30 ton daging. Kambing dan babi juga menunjukkan kontribusi yang menjanjikan dengan masing-masing produksi daging sebesar 55,50 ton dan 392,80 ton. Di sektor unggas, ayam ras pedaging mencatat populasi tertinggi sebanyak 4.187.827 ekor dengan produksi daging mencapai 3.132,60 ton,

sedangkan ayam kampung memiliki populasi 693.328 ekor dengan produksi daging 349,80 ton. Produksi telur unggas juga menonjol, di mana ayam ras petelur menghasilkan 810 ton telur, diikuti ayam kampung dengan 493 ton dan itik dengan 223 ton. Potensi ini mencerminkan peran strategis sektor peternakan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

3. Perkebunan

Kabupaten Kutai Timur memiliki beragam komoditas perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan utama. Luas lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2023 sebesar 529.586 hektare.

Tabel 2. 9 Produksi Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kutai Timur (Ton) Tahun 2023

No	Kabupaten	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
1	Kutai Timur	7.876.111	679	1.557	59	1.456

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Berdasarkan data terbaru mengenai produksi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, terlihat bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dengan hasil produksi mencapai 7.876.111 ton. Selain kelapa sawit, Kabupaten Kutai Timur juga memiliki luas perkebunan kelapa sebesar 679 hektar, karet seluas 1.557 hektar, kopi seluas 59 hektar, dan kakao seluas 1.456 hektar.

Tabel 2. 7 Jumlah Perusahaan Besar Sawit di Kabupaten Kutai Timur 2023

Kabupaten	Jumlah Perusahaan Besar Sawit	Kapasitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
Kutai Timur	38	2.040	1.828,56

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2024

Dalam rangka meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan upaya hilirisasi produk perkebunan secara intensif dan terstruktur. Hilirisasi ini bertujuan untuk mengolah hasil produk perkebunan menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan adanya hilirisasi, produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di pasar akan cenderung stabil. Kabupaten Kutai Timur sendiri memiliki 38 Perusahaan Besar Sawit (PBS) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dengan kapasitas terpasang sebesar 2.040 ton/jam dan kapasitas terpakai sebesar 1.828,56 ton/jam.

4. Pariwisata

Kabupaten Kutai Timur memiliki berbagai obyek wisata yang menarik bagi pengunjung. Salah satu tempat yang terkenal adalah Taman Nasional Kutai, yang

memiliki luas sekitar 192.709,55 hektar. Taman Nasional ini terkenal dengan kekayaan ekosistemnya yang mencakup hutan Dipterocarpaceae, hutan Ulin-Meranti-Kapur, vegetasi hutan mangrove, dan berbagai flora dan fauna khas seperti Orangutan, Bekantan, Owa Kalimantan, dan lainnya.

Selain itu, Kutai Timur juga memiliki lokasi wisata utama yang harus dikunjungi, di antaranya adalah Pantai Teluk Lombok, Teluk Perancis, Pantai Kenyamukan, dan Aquatiq yang berada di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan, serta Taman Nasional Kutai Mentoko, Pantai Birah-birahan di Kecamatan Sandaran, dan wisata tambang serta wisata religi di Bukit Pelangi. Hutan Lindung Wehea, yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai jenis flora dan fauna. Kawasan ini juga mencakup Gugusan Karst Sangkulirang dan Mangkalihat, yang menawarkan pemandangan gua-gua dan lukisan purba yang menarik bagi para penjelajah dan peneliti sejarah. Kabupaten Kutai Timur dengan potensi wisata alamnya yang kaya dan beragam, menawarkan peluang besar untuk pengembangan pariwisata yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Berikut ini adalah data kunjungan wisatawan nusantara dan asing di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2. 10 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu ke Kutai Timur 2019-2023

Tipe Wisatawan	2019	2020	2021	2022	2023
Nusantara	70.560	40.129	72.438	107.006	212.959
Asing	345	365	6	152	805

Sumber: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur 2024

Kunjungan wisatawan di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah wisatawan nusantara dan asing. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan nusantara mencapai 70.560, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi 40.129, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. Meskipun demikian, jumlah wisatawan nusantara kembali meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 212.959 kunjungan.

Sementara itu, jumlah wisatawan asing menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam dan jumlah yang relatif kecil dibandingkan wisatawan nusantara. Pada tahun 2019, terdapat 345 wisatawan asing yang berkunjung, angka ini sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 365, namun anjlok drastis pada tahun 2021 hanya menjadi 6 wisatawan. Angka kunjungan wisatawan asing mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2022 dengan 152 wisatawan dan meningkat lebih lanjut pada tahun 2023 menjadi 805 wisatawan.

5. Pertambangan Minyak dan Batubara

Potensi sumber daya alam Kabupaten Kutai Timur terutama pada komoditas batu bara. Data realisasi muat dari BPS Kutai Timur 2024 menunjukkan bahwa batu bara tetap

menjadi komoditas unggulan dengan volume yang dominan, meskipun mengalami fluktuasi dari 58.962.032 ton pada 2021, turun menjadi 46.420.248 ton pada 2022, dan kembali meningkat menjadi 56.069.846 ton pada 2023. Sementara itu, bahan bakar minyak mencatat tren peningkatan yang signifikan, dari 1.301 ton pada 2021 menjadi 4.610 ton pada 2022, dan mencapai 6.900 ton pada 2023.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan di Kutai Timur menunjukkan tren positif selama periode 2020-2022, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur. Indeks ini merupakan ukuran penting yang menggambarkan kualitas dan akses pendidikan di suatu wilayah. Menggunakan dua komponen utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indeks ini memberikan gambaran tentang status pendidikan di Kutai Timur.

Cara menghitung indeks ini dimulai dengan menilai IHLS, yang merupakan perbandingan antara harapan lama sekolah di suatu daerah dengan standar maksimum pendidikan formal yang umumnya ditetapkan sebesar 18 tahun. Ini mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan bisa dijalani oleh anak-anak yang sedang dalam usia sekolah.

Selanjutnya, IRLS dihitung dengan membandingkan rata-rata lama sekolah yang telah diterima oleh populasi usia 25 tahun ke atas dengan standar yang sama, yaitu 18 tahun. Ini merefleksikan durasi pendidikan yang secara rata-rata telah diterima oleh warga dewasa. Dengan menggabungkan kedua indeks ini, kita mendapatkan gambaran komprehensif mengenai status pendidikan di suatu wilayah, yang tidak hanya melihat ke depan ke harapan masa depan tetapi juga menilai kondisi saat ini berdasarkan pengalaman pendidikan masa lalu.

Indeks Pendidikan secara keseluruhan kemudian dihitung dengan mengambil rata-rata geometris dari IHLS dan IRLS. Ini dilakukan dengan mengalikan kedua nilai indeks dan mengambil akar kuadrat dari hasil perkalian tersebut. Dengan cara ini, Indeks Pendidikan memberikan nilai yang mencerminkan kombinasi dari aspirasi pendidikan masa depan dan realitas pendidikan masa lalu, memberikan pandangan yang seimbang dan mendalam tentang kualitas dan akses pendidikan dalam suatu populasi.

Tabel 2. 11 Indeks Pendidikan Kutai Timur 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	12,78	12,89	12,90	13,00	13,01
Rata-rata Lama Sekolah	9,18	9,19	9,43	9,44	9,45

Sumber: Kutim Dalam Angka 2024 (diolah).

Peningkatan Harapan Lama Sekolah dari 12,78 tahun pada tahun 2019 menjadi 13,01 tahun pada tahun 2023 menggambarkan upaya yang signifikan dalam memperluas

durasi pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak di Kutai Timur. Di sisi lain, Rata-rata Lama Sekolah yang juga meningkat dari 9,18 tahun menjadi 9,45 tahun dalam periode yang sama menggambarkan perbaikan dalam partisipasi pendidikan di kalangan penduduk usia dewasa dan peningkatan ketersediaan akses pendidikan.

Peningkatan indikator pendidikan ini mencerminkan perbaikan kualitas dan akses pendidikan di Kutai Timur. Tren positif ini bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai program dan kebijakan yang mendukung, serta peningkatan kesadaran dan kepentingan pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan yang lebih baik memiliki korelasi langsung dengan peningkatan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendapatan, dan kualitas hidup secara umum. Sejalan dengan ini, peningkatan indeks pendidikan dapat menjadi indikator potensial peningkatan kesempatan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesadaran kesehatan.

B. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasar data Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023, IPLM Kabupaten Kutai Timur mencatatkan skor diangka 57,87 dengan faktor penentu sebagaimana tabel berikut:

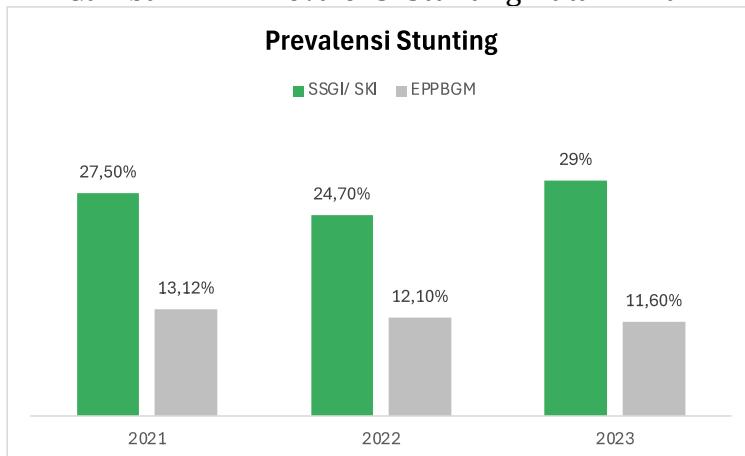
Tabel 2. 12 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2023

No	Unsur (UPLM)	Skor
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,6711
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	0,2421
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,4266
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	0,1557
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	0,5555
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	1,0000
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,87

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023

C. Prevalensi Stunting

Gambar 2. 24 Prevalensi Stunting Kutai Timur



Sumber: Survei Kesehatan Indonesia, Kemenkes dan e-PPBGM

Analisis prevalensi stunting di Kutai Timur dilakukan berdasarkan data dari dua sumber utama: SSGI/SKI (Survei Status Gizi Indonesia/Survei Kesehatan Indonesia) dan EPPBGM (Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) selama periode tiga tahun terakhir. Data SSGI/SKI menunjukkan tingkat prevalensi stunting sebesar 27,50% pada tahun 2021, 24,70% pada tahun 2022, dan 29% pada tahun 2023. Sementara itu, data EPPBGM mencatat angka yang relatif lebih rendah, yaitu 13,12% pada tahun 2021, 12,10% pada tahun 2022, dan 11,60% pada tahun 2023.

D. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Tabel 2. 13 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
AKI	126	198	176	66	148
AKB	7	5	4	6	4

Catatan: AKI Per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian bayi (AKB) termasuk kematian pada neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, AKI tercatat sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup. Terjadi peningkatan tajam pada tahun 2020 menjadi 198, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Tahun 2021 menunjukkan penurunan menjadi 176, diikuti penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 66. Namun, terjadi kenaikan kembali pada tahun 2023 dengan AKI mencapai 148 per 100.000 kelahiran hidup.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur, yang mencakup kematian neonatal, menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, AKB tercatat sebesar 7 per 1.000 kelahiran hidup. Terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 5 dan 4 per 1.000 kelahiran hidup secara

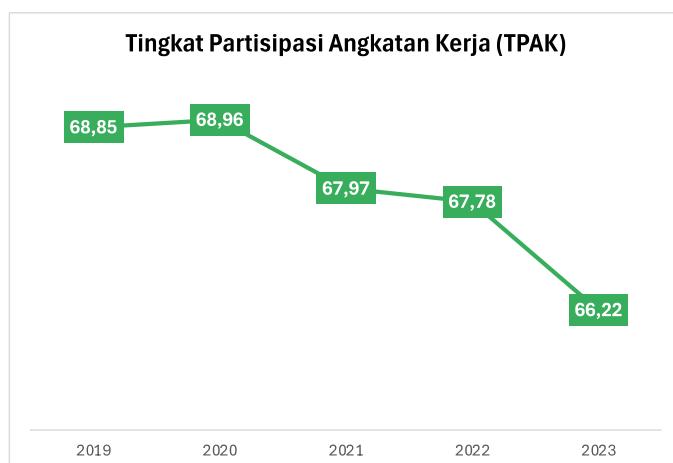
berturut-turut. Tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 6, namun kembali turun ke angka 4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator kunci dalam menganalisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan suatu wilayah atau negara. Indikator ini mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk pekerjaan formal, pekerjaan informal, atau mencari pekerjaan baru.

Berdasar data Kutai Timur Dalam Angka 2024, berikut tabel TPAK Kabupaten Kutai Timur, sejak 2021 sampai 2023.

Gambar 2. 25 TPAK Kutai Timur 2019-2023



Sumber: Kutai Timur Dalam Angka 2024 BPS

Dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2023, Kabupaten Kutai Timur menunjukkan suatu pola penurunan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Timur telah mengalami fluktuasi dan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, TPAK tercatat sebesar 68,85%. Terjadi sedikit peningkatan di tahun berikutnya, dengan TPAK mencapai 68,96% pada 2020. Namun, sejak tahun 2021, terlihat adanya tren penurunan yang konsisten. TPAK turun menjadi 67,97% pada 2021, kemudian menurun lagi ke 67,78% di tahun 2022. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2023, ketika TPAK mencapai titik terendah dalam periode lima tahun ini, yaitu 66,22%. Secara keseluruhan, dari tahun 2019 hingga 2023, TPAK Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan sebesar 2,63 poin persentase. Penurunan paling signifikan terjadi antara tahun 2022 dan 2023, dengan penurunan sebesar 1,56 poin persentase.

F. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan indikator demografis yang menunjukkan beban penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (di atas 65 tahun). Dalam menganalisis data demografis Kabupaten Kutai Timur, dilakukan

dengan melihat komposisi angka ketergantungan yang memberikan gambaran menarik tentang struktur sosial dan tantangan ekonomi yang dihadapi.

Gambar 2. 26 Rasio Ketergantungan Kutai Timur 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Ketergantungan	NA	39,22	NA	NA	38,17

Sumber: BPS Kutai Timur (2019-2023) Data Diolah

Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kutai Timur mencapai 109.906 jiwa, sedangkan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) tercatat sejumlah 15.925 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang berjumlah 329.673 jiwa, dapat digali lebih dalam mengenai beban ketergantungan yang ada. Dengan jumlah tersebut, maka angka ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 sebesar 38,17. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 individu usia produktif, ada sekitar 38 individu yang bergantung.

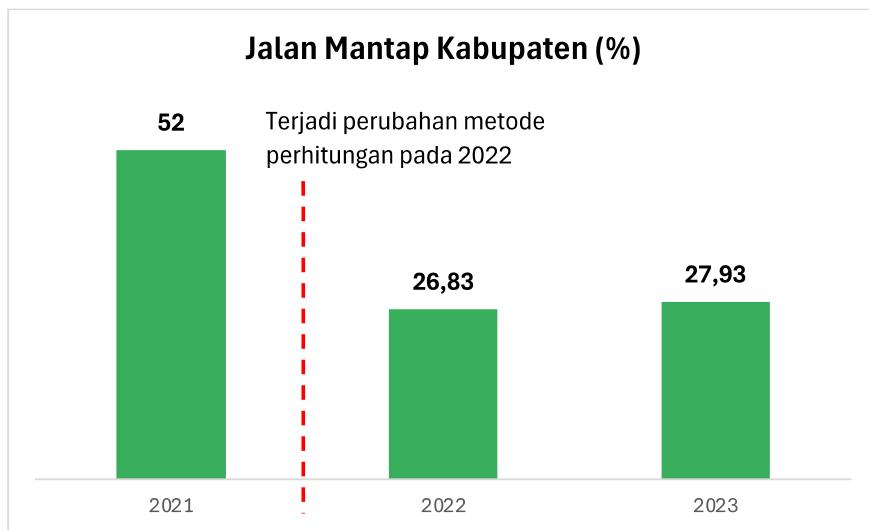
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah

Daya saing fasilitas dan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur mendapatkan perhatian serius sebagai syarat penting untuk mendorong perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan produktivitas, serta menciptakan lingkungan yang mendukung investasi.

A. Kemantapan Jalan

Kemantapan jalan merupakan indikator penting dalam menilai daya saing infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Jalan yang berada dalam kondisi mantap, baik dari segi kualitas permukaan maupun pemeliharaan, mencerminkan kesiapan daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi.

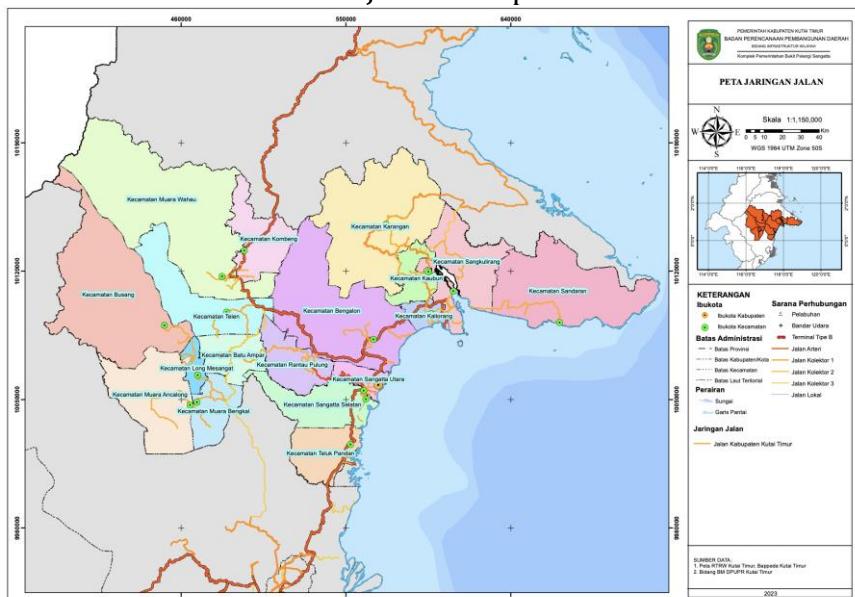
Gambar 2. 27 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap 2021-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

Kemantapan jalan di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan signifikan, dari 52% pada tahun 2021 menjadi 26,83% pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 27,93% pada tahun 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam perumusan perhitungan status jalan mantap yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Perubahan ini membuat status jalan mantap lebih sulit dicapai, sehingga target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi sulit terpenuhi. Upaya peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas yang harus terus ditingkatkan untuk mendukung mobilitas dan ekonomi daerah. Peta jalan Kabupaten Kutai Timur terlihat pada gambar dibawah:

Gambar 2. 28 Peta Jalan Kabupaten Kutai Timur

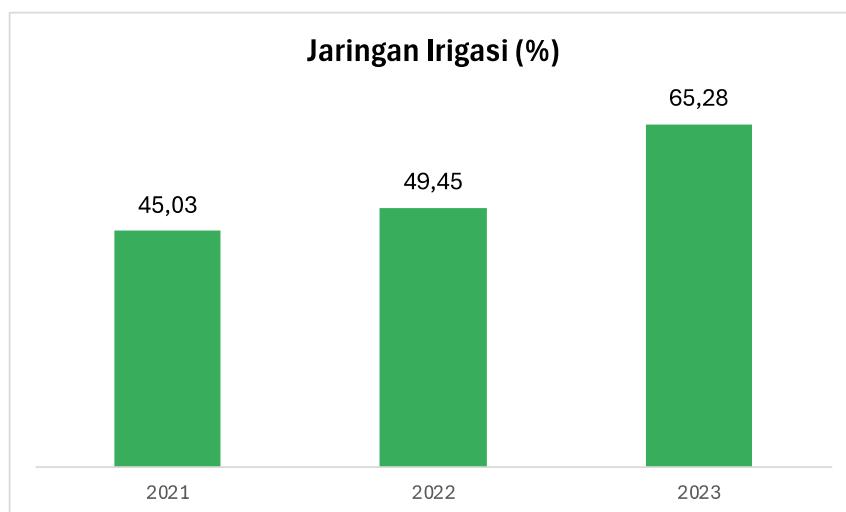


Sumber: Bappeda Kutai Timur Tahun 2024

B. Persentase Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi di Kutai Timur memainkan peran vital dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Irigasi yang baik memastikan pasokan air yang cukup dan teratur ke lahan pertanian, meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitas hasil panen. Selain itu, keberadaan jaringan irigasi yang memadai membantu petani mengelola air secara efisien, mengurangi risiko kekeringan dan gagal panen. Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang baik sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kutai Timur.

Gambar 2. 29 Persentase Jaringan Irigasi Kutai Timur 2021-2023



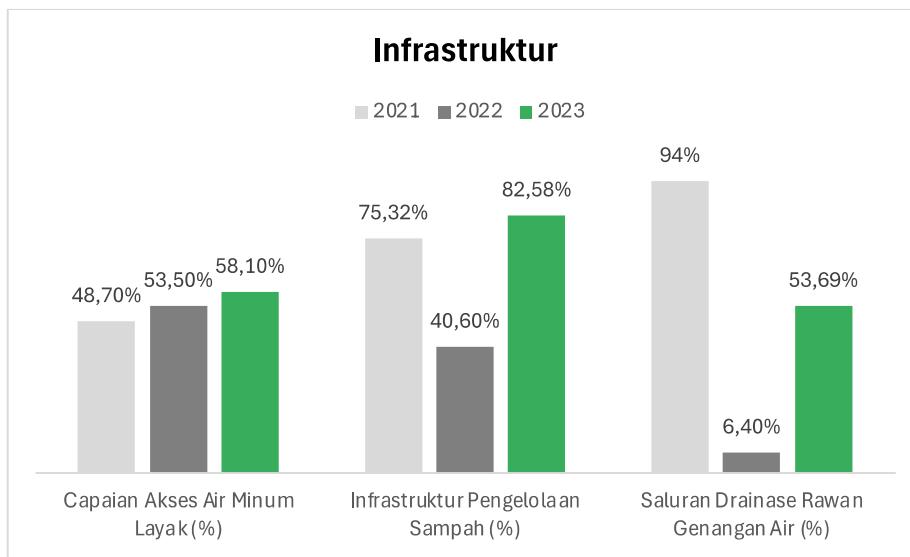
Sumber: Dinas PUPR Kutim 2024

Grafik menunjukkan peningkatan persentase jaringan irigasi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jaringan irigasi tercatat sebesar 45,03%, meningkat menjadi 49,45% pada tahun 2022, dan mencapai 65,28% pada tahun 2023. Peningkatan signifikan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Peningkatan jaringan irigasi yang baik sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian, memastikan pasokan air yang stabil, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan daerah. Peningkatan ini juga berkontribusi pada pengurangan risiko kekeringan dan kegagalan panen, yang sangat penting bagi perekonomian Kutai Timur.

C. Infrastruktur Air Minum, Persampahan dan Saluran Drainase Rawan Genangan

Pembangunan infrastruktur air minum, pengelolaan persampahan, dan sistem saluran drainase di Kutai Timur merupakan aspek krusial dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Akses yang memadai terhadap air minum bersih, pengelolaan sampah yang efisien, serta sistem drainase yang baik untuk mengatasi genangan menjadi prioritas pemerintah daerah.

Gambar 2. 30 Infrastruktur Air, Sampah dan Drainase Kutim 2021-2023

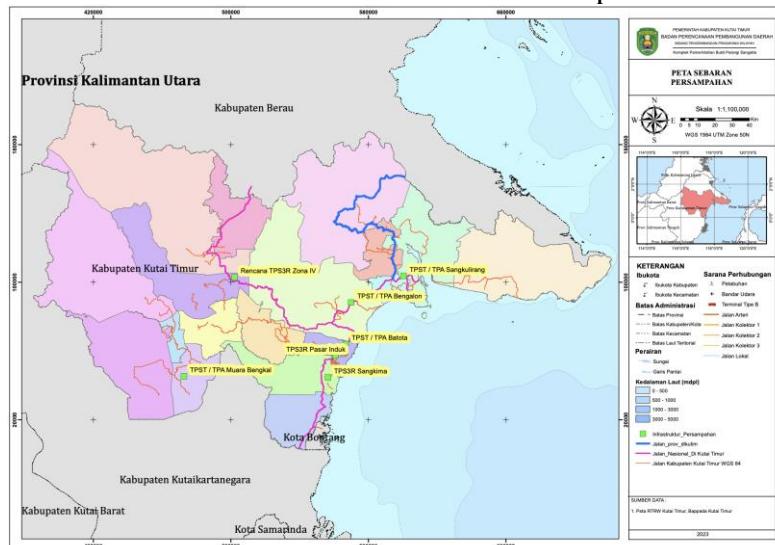


Sumber: Dinas PUPR Kutim 2021-2023

Terdapat fluktuasi dan perubahan signifikan dalam berbagai aspek infrastruktur di Kutai Timur antara tahun 2021 hingga 2023. Capaian akses air minum layak meningkat secara konsisten dari 48,70% pada tahun 2021 menjadi 53,50% pada tahun 2022, dan mencapai 58,10% pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Namun, terdapat perubahan drastis pada infrastruktur pengelolaan sampah, di mana terjadi penurunan tajam dari 75,32% pada tahun 2021 menjadi 40,60% pada tahun 2022, sebelum melonjak kembali menjadi 82,58% pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah yang dihadapi selama periode tersebut. Adapun sebaran persampahan Kabupaten Kutai Timur terlihat pada gambar dibawah:

Gambar 2. 31 Peta Sebaran Persampahan



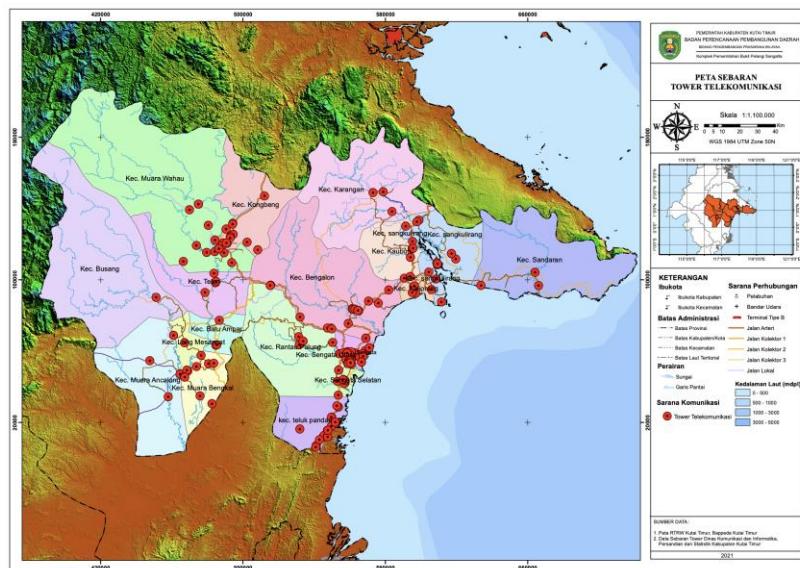
Sumber: Bappeda Kutai Timur Tahun 2024

Adapun saluran drainase rawan genangan air menunjukkan penurunan tajam dari 94,00% pada tahun 2021 menjadi 6,40% pada tahun 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 53,69% pada tahun 2023. Perubahan ini menunjukkan adanya usaha perbaikan dan peningkatan sistem drainase, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mengurangi risiko genangan air secara lebih efektif.

D. Jaringan Internet

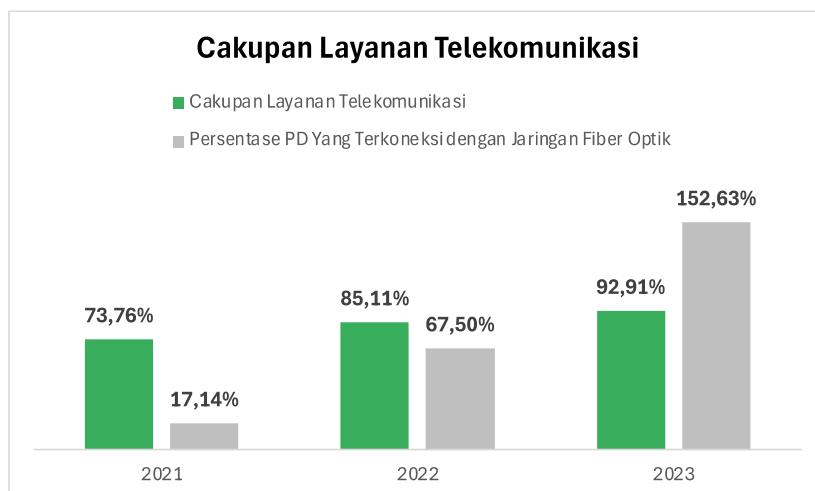
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen meningkatkan konektivitas komunikasi di seluruh wilayah, meskipun menghadapi tantangan. Masalah utama adalah kesulitan komunikasi antar wilayah. Sebagai respons, pembangunan jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) di desa-desa setiap kecamatan diprioritaskan, sesuai RPJMD 2021-2026. Selain itu, pemerintah memfasilitasi perijinan bagi penyedia layanan telekomunikasi untuk memudahkan ekspansi jaringan. Tujuannya adalah menyediakan layanan telekomunikasi merata di seluruh wilayah, sehingga meningkatkan akses komunikasi, mendukung aktivitas ekonomi, dan sosial baik di perkotaan maupun pedesaan. Peta sebaran telekomunikasi Kabupaten Kutai Timur terlihat pada gambar dibawah:

Gambar 2. 32 Sebaran Tower Telekomunikasi



Sumber: Bappeda Kutai Timur Tahun 2024

Gambar 2. 33 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kutai Timur 2021-2023



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

Berdasarkan data cakupan layanan telekomunikasi dan koneksi jaringan fiber optik di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat peningkatan yang signifikan. Cakupan layanan telekomunikasi naik dari 73,76% pada tahun 2021 menjadi 85,11% pada tahun 2022, dan mencapai 92,91% pada tahun 2023. Ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan telekomunikasi guna mendukung kebutuhan masyarakat dan ekonomi yang semakin digital.

Selain itu, persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik juga meningkat tajam. Pada tahun 2021, hanya 17,14% Perangkat Daerah yang terkoneksi, meningkat menjadi 67,50% pada tahun 2022, dan melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 152,63% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan investasi signifikan dalam infrastruktur digital, yang meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah serta memperkuat layanan publik berbasis digital. Dengan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik, Kutai Timur dapat lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan berbasis teknologi dan informasi, mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

E. Jumlah Bendungan

Kabupaten Kutai Timur memiliki 25 bendungan strategis yang mendukung kebutuhan irigasi dan pengelolaan sumber daya air. Bendungan-bendungan ini tersebar di berbagai kecamatan dengan fungsi utama untuk mendukung sektor pertanian, termasuk irigasi teknis dan pelindungan lahan pertanian. Beberapa di antaranya adalah Bendung Kandolo yang dibangun oleh Kementerian PU, Dirjen OP SDA di Kecamatan Teluk Pandan, dan Bendung Kaliorang yang dibangun oleh PU Provinsi Kalimantan Timur di Kecamatan Kaliorang.

Tabel 2. 14 Bendungan di Kabupaten Kutai Timur

No	Nama	Desa	Kecamatan	Lokasi
1	Bendung Kandolo	Kandolo	Teluk Pandan	Desa Kandolo
2	Bendung Kaliorang	Bangun Jaya	Kaliorang	Desa Bangun Jaya
3	Bendung Teluk Pandan	Teluk Pandan	Teluk Pandan	Desa Teluk Pandan
4	Bendung Suka Rahmat	Suka Rahmat	Teluk Pandan	Desa Suka Rahmat
5	Bendung Suka Damai II	Suka Damai	Teluk pandan	Desa Suka Damai
6	Bendung Suka Damai	Suka Damai	Teluk Pandan	Desa Suka Damai
7	Bendung Rantau Makmur	Rantau Makmur	Rantau Pulung	Desa Rantau Makmur
8	Bendung Masalap Raya	Masalap Raya	Rantau Pulung	Desa Masalap Raya
9	Bendung Margo Mulyo	Margo Mulyo	Rantau Pulung	Desa Margo Mulyo
10	Bendung Selangkau awal	Selangkau	Kaliorang	Desa Selangkau
11	Bendung Selangkau	Selangkau	Kaliorang	Desa Selangkau
12	Bendung Bangun Jaya	Bangun jaya	Kaliorang	Desa Bangun Jaya
13	Bendung Sangkima Lama	Teluk Singkama	Sangatta Selatan	Desa Teluk Singkama
14	Bendung Sangkima II	Sangkima	Sangatta Selatan	Desa Sangkima
15	Bendung KM 01	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan
16	Bendung Tanah Abang	Tanah Abang	Long Mesangat	Desa Tanah Abang
17	Bendung Pesap	Miau Baru	Kongbeng	Desa Miau Baru
18	Bendung Bumi Rapak	Bumi Rapat	Kaubun	Desa Bumi Rapak
19	Bendung Pelawan	Pelawan	Sangkulirang	Desa Pelawan
20	Bendung Kadungan Jaya	Kadungan Jaya	Kaubun	Desa Kadungan Jaya
21	Bendung Bukit Baru	Kadungan Jaya	Kaubun	Desa Kadungan Jaya
22	Bendung Bukit Permata	Bukit Permata	Kaubun	Desa Bukit Permata
23	Bendung Mata Air	Mata Air	Kaubun	Desa Mata Air
24	Bendung Cinta Graha	Cipta Graha	Kaubun	Desa Cipra Graha
25	Bendung Miau Baru	Miau Baru	Kongbeng	Desa Miau Baru

Sumber: Bappeda 2024

Selain itu, terdapat bendungan dengan kapasitas irigasi yang signifikan seperti Bendung Tanah Abang di Kecamatan Long Mesangat, yang mendukung irigasi seluas 1.500 hektar, serta Bendung Bumi Rapak di Kecamatan Kaubun yang memiliki kapasitas untuk irigasi seluas 3.000 hektar. Beberapa bendungan lainnya, seperti Bendung Pesap dan Bendung Miau Baru di Kecamatan Kongbeng, juga berfungsi penting dalam mendukung lahan irigasi dengan luas yang bervariasi.

Bendungan di Kabupaten Kutai Timur juga mencakup daerah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan irigasi lokal, seperti Bendung Pelawan di Kecamatan Sangkulirang dan Bendung Kadungan Jaya di Kecamatan Kaubun. Di sisi lain, terdapat bendungan dengan kapasitas teknis tinggi seperti Bendung KM 01 yang dibangun melalui APBD Tahun 2010 di Kecamatan Sangatta Selatan.

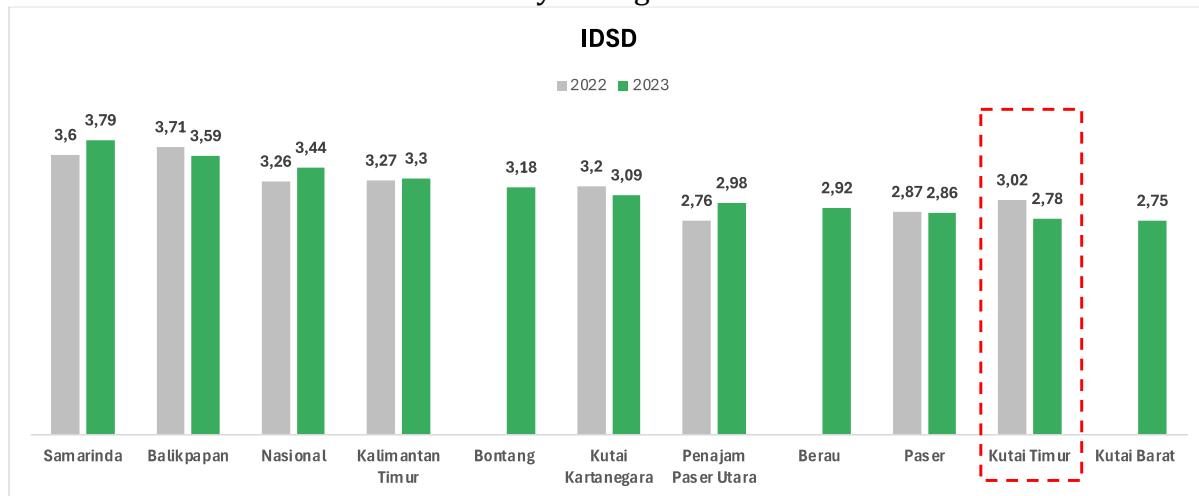
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing investasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur dapat dipahami melalui indikator Indeks Daya Saing Daerah.

A. Indeks Daya Saing Daerah

Analisis terhadap skor Indeks Daya Saing Sektor Daerah (IDSD) untuk Kabupaten Kutai Timur mengungkapkan beberapa aspek penting dalam konteks pembangunan dan potensi daerah tersebut. Semakin tinggi skor IDSD, maka semakin baik pula daya saing daerah tersebut.

Gambar 2. 34 Indeks Daya Saing Daerah Kutai Timur 2023



Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari tahun 2022 ke 2023. Indeks Kutai Timur tercatat sebesar 3,02 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan menjadi 2,78 pada tahun 2023, menunjukkan penurunan sebesar 0,24 poin. Pada tahun 2023, Kutai Timur menempati posisi kedua terendah dalam hal IDSD di Provinsi Kalimantan Timur, hanya berada di atas Kabupaten Kutai Barat. Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan daya saing Kutai Timur dibandingkan tahun sebelumnya, serta posisinya yang lebih rendah dibandingkan mayoritas daerah lain di Kalimantan Timur dan rata-rata nasional.

B. Jumlah Kejadian Tindak Kriminal Umum

Jumlah tindak kriminal umum di suatu daerah memiliki hubungan erat dengan daya saing investasi, termasuk di Kabupaten Kutai Timur. Tingginya angka kriminalitas dapat

menciptakan persepsi negatif terhadap keamanan dan stabilitas wilayah, yang pada akhirnya dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat kriminalitas rendah cenderung lebih menarik bagi investor karena dianggap memiliki lingkungan yang kondusif untuk menjalankan bisnis. Oleh karena itu, pengendalian tindak kriminal melalui peningkatan keamanan, penegakan hukum yang tegas, serta pembangunan sosial yang inklusif sangat penting untuk mendukung iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 15 Jumlah Tindak Kriminal Umum Di Kutai Timur 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tindak Kriminal Umum	NA	342	475	351	526

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur (data diolah)

Berdasarkan data jumlah tindak kriminal umum di Kabupaten Kutai Timur selama periode 2019–2023, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan. Pada 2020, tercatat 342 kasus, meningkat menjadi 475 kasus pada 2021, lalu menurun menjadi 351 kasus pada 2022, namun kembali meningkat tajam menjadi 526 kasus pada 2023. Tingginya angka kriminalitas dapat menjadi tantangan bagi daya saing investasi daerah, karena tingkat keamanan menjadi salah satu indikator utama yang dipertimbangkan oleh investor.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), aspek pelayanan umum memegang peranan kunci dan dapat diukur melalui berbagai indikator seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

A. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional tahun 2022, yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, skor yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur dalam Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kutai Timur 2022

No	OPD	Nilai	Kategori
1	Pemkab Kutim	2,48	C-

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional 2022

Dalam upaya mengukur kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur tahun 2022 dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional, dan mendapatkan skor 2,48 yang masuk dalam kategori C-.

Kategori C- menggambarkan kinerja yang masih di bawah rata-rata dalam hal pelayanan publik. Skor ini menandakan bahwa terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan dan pembaharuan dalam proses pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini menunjukkan adanya berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi layanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.

B. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Kabupaten Kutai Timur yang berada pada angka 12,20 (Kurang Inovatif), menempatkan pada urutan ke-365 dari 415 kabupaten di Indonesia, seperti tercatat dalam Kepmendagri No 400.10.11-6287 Tahun 2023. Penilaian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan inovasi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Upaya peningkatan inovasi ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kinerja administratif dan pelayanan publik tetapi juga untuk mengintegrasikan solusi teknologi yang berkelanjutan dalam sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini akan mendukung Kutai Timur dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis, serta memperkuat daya saing daerah dalam skala nasional.

Tabel 2. 17 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

No	OPD	Nilai	Kategori	Urutan Nasional
1	Pemkab Kutim	12,20	Kurang Inovatif	365 dari 415 Kabupaten

C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kabupaten Kutai Timur berhasil menduduki peringkat kedua di Kalimantan Timur dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor 3,20.

Tabel 2. 18 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur



Sumber: KepmenPANRB No 13 tahun 2024

Peringkat ini didasarkan pada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana Kutai Timur hanya memiliki skor 2,79 pada 2022 dan 1,03 pada 2021. Keberhasilan ini

mencerminkan upaya signifikan dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE, termasuk pengelolaan risiko, keamanan informasi, manajemen data, dan audit teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mengadopsi praktik pemerintahan yang efisien, efektif, dan berkesinambungan berbasis teknologi informasi.

D. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator untuk mengukur capaian pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan kinerja aparatur. Indeks ini mengukur berbagai aspek, mulai dari manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, efisiensi, transparansi, hingga upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kutai Timur, Indeks Reformasi Birokrasi berperan sebagai alat evaluasi penting untuk mengukur efektivitas reformasi dalam menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola dan layanan publik. Untuk meraih capaian tersebut, Kabupaten Kutai Timur perlu memperkuat kapasitas SDM aparatur, mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi, dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Tabel 2. 19 Indeks Reformasi Birokrasi

No	Instansi	Indeks RB	Indeks SAKIP
1	Kab Kutai Timur	CC	B

Sumber: 1data.menpan.go.id

Berdasarkan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencapai hasil sebagai berikut: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) berada pada kategori CC. Hal ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi masih pada tahap awal dengan tantangan signifikan untuk mencapai tingkat birokrasi yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai nilai B, menandakan tata kelola kinerja yang cukup baik dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja instansi. Namun, diperlukan peningkatan ke kategori yang lebih tinggi untuk memperkuat akuntabilitas dalam mendukung pembangunan daerah.

2.5. Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2005-2025

Sebagai langkah penting dalam menjembatani masa lalu dan masa depan, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, dan prospek ke depan. Refleksi 2005-2025 menawarkan

wawasan kritis tentang berbagai aspek pembangunan yang telah terjadi selama 20 tahun terakhir, menyoroti keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Dengan pendekatan evaluatif yang mendalam, tidak hanya mencerminkan pencapaian Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan visi dan misinya, tetapi juga menegaskan pentingnya adaptasi dan inovasi berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui analisis yang cermat, hal ini menyediakan basis yang kokoh dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan berikutnya, memastikan bahwa Kabupaten Kutai Timur tidak hanya memenuhi target jangka pendek, tetapi juga menetapkan fondasi yang kuat untuk **kemakmuran** dan **kemandirian** jangka panjang.

2.5.1. Kesimpulan RPJPD 2005-2025

Berikut adalah ringkasan kesimpulan utama yang dihasilkan dari evaluasi RPJPD 2005-2025. Kesimpulan ini berfokus pada berbagai aspek pembangunan, sementara rekomendasi yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengarahkan Kabupaten Kutai Timur menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Ringkasan Kesimpulan dan Rekomendasi dari Laporan Evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- i. Pelaksanaan Pembangunan: Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur selama 20 tahun terakhir telah dilaksanakan dengan baik, mengacu pada visi, misi, dan sasaran RPJPD 2005-2025.
- ii. Capaian Pembangunan: Rata-rata hasil capaian RPJMD empat periode tinggi dengan capaian target pembangunan RPJPD sebesar 86,44%.
- iii. Fokus pada Pembangunan Jangka Panjang: Kabupaten Kutai Timur memfokuskan pada pembangunan jangka panjang yang mencakup pengembangan potensi non-tambang seperti agrobisnis, agroindustri, manufaktur, dan pariwisata.
- iv. Ketergantungan pada Sektor Tambang: Sektor tambang masih mendominasi PDRB, namun ada kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya ini demi keberlanjutan jangka panjang.
- v. Perhatian pada Aspek Lain: Meskipun ada capaian tinggi, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai visi yang lebih luas, termasuk pemberdayaan sumber daya lokal non-tambang.
- vi. Tidak tercapainya aspek kemandirian sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi Kutai Timur 2025, karena tingkat ketergantungan yang tinggi dari sektor pertambangan.

2.5.2. Rekomendasi Evaluasi RPJPD 2005 - 2025

- i. Mengurangi Ketergantungan pada Sektor Tambang: Mengutamakan optimalisasi sektor non-migas.

- ii. Mengurangi Sensitivitas Terhadap Harga Batu Bara Global: Menurunkan ketergantungan pada sektor tambang untuk stabilitas pendapatan daerah.
- iii. Optimalisasi Keunggulan Sumber Daya Alam: Menggunakan keuntungan sektor tambang untuk mendukung pembangunan jangka panjang.
- iv. Keberlanjutan dan Kesinambungan Pembangunan: Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan pembangunan yang terintegrasi antar sektor.
- v. Perencanaan yang Terintegrasi: Menciptakan peta vertikal dan horizontal pembangunan yang detail.
- vi. Adaptasi Capaian Pembangunan: Menambahkan indikator pembangunan yang sesuai dengan identitas lokal Kutai Timur.
- vii. Pemanfaatan Momentum IKN: Mengintegrasikan peluang dari IKN dengan rencana pembangunan daerah.
- viii. Redefinisi Capaian dan Ukuran Pembangunan: Memasukkan dimensi material dan non-material, pengembangan manusia dan infrastruktur, dan pendekatan mikro dan makro dalam pembangunan.
- ix. *Strategi Cultural-Led Development* dan *Catalyst Strategy*: Menggunakan budaya dan potensi lokal sebagai pendorong utama pembangunan.
- x. *SWOT Based Planning*: Menggunakan analisis SWOT untuk perencanaan yang lebih realistik dan terfokus.
- xi. *Ecosystem Based Planning*: Memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antar sektor dalam pembangunan.
- xii. Penyempurnaan Perencanaan dengan *Road Map* dan *Blue Print*: Menyediakan arahan yang jelas dan terukur dalam pembangunan.
- xiii. Pengendalian dan Evaluasi yang Komprehensif: Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan.

Dengan mempertimbangkan evaluasi yang komprehensif ini, kita mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang langkah-langkah strategis yang harus diambil Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai pertumbuhan dan kemandirian berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi yang terkandung dalam evaluasi RPJPD 2005-2025 bukan hanya mencerminkan pencapaian masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai *road map* yang vital untuk masa depan. Melalui implementasi rekomendasi ini, Kutai Timur berada di jalur yang tepat untuk membangun sebuah masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan mandiri, memanfaatkan sepenuhnya potensi lokalnya sambil mengatasi tantangan yang ada. Hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 ini, dengan analisis dan saran yang terperinci, menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan Kabupaten Kutai Timur di masa yang akan datang, menjanjikan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik merupakan elemen penting dalam perencanaan dan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Timur. Sesuai dengan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, diperlukan pemahaman mendalam tentang dinamika penduduk dan segala kebutuhan yang berkaitan dengan infrastruktur dan layanan publik.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mendorong tantangan serta peluang dalam pengembangan infrastruktur yang memadai. Fokus utama dalam dokumen RPJPD ini adalah bagaimana mengintegrasikan data demografis terkini dengan strategi pengembangan sarana dan prasarana yang tidak hanya menunjang kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan proyeksi kebutuhan masa depan.

Kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan publik lainnya harus direncanakan dengan hati-hati untuk memastikan ketersediaan dan kualitas yang berkelanjutan. Melalui RPJPD, diupayakan penggarisan pentingnya infrastruktur yang responsif terhadap pertumbuhan demografis, perubahan sosial, dan transformasi ekonomi daerah.

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Analisa proyeksi kependudukan memainkan peran yang sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Proyeksi kependudukan adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJPD karena memiliki dampak langsung pada berbagai aspek pembangunan, termasuk infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

A. Jumlah Total Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah total penduduk di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 455.504 jiwa. Data demografis menunjukkan adanya perbedaan jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 244.525 jiwa, sedangkan penduduk perempuan tercatat sebanyak 210.979 jiwa. Ini menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dengan selisih sekitar 33.546 jiwa.

Perbandingan ini bisa diinterpretasikan dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari perspektif rasio jenis kelamin, Kutai Timur memiliki rasio yang condong ke laki-laki. Ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk migrasi tenaga kerja yang cenderung didominasi oleh laki-laki, terutama di daerah dengan pertambangan dan perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja fisik, dimana Kutai Timur dikenal dengan sektor pertambangan batu bara dan perkebunan sawit.

Kedua, perbedaan ini juga bisa mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Misalnya, ada kecenderungan untuk keluarga di Kutai Timur untuk memiliki lebih banyak anak laki-laki atau ada faktor migrasi keluar yang lebih tinggi di kalangan perempuan.

Dengan adanya ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dari ketidakseimbangan ini dalam perencanaan kebijakan. Misalnya, dapat mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja, kebijakan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan, perlu ada program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks proyeksi jangka panjang, perbedaan ini perlu menjadi perhatian khusus dalam merencanakan pertumbuhan penduduk dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat di masa depan. Kebijakan yang inklusif dan adil gender akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua warga Kutai Timur memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, sehingga pertumbuhan penduduk dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup yang merata bagi laki-laki dan perempuan.

Gambar 2. 35 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2025-2045



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kutim 2023

Pada 2025, penduduk Kutai Timur diperkirakan akan bertambah menjadi 470.396 jiwa. Pertumbuhan ini mencerminkan kenaikan sekitar 3,3% dari tahun 2023, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti laju kelahiran, migrasi, serta peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap layanan kesehatan. Melanjutkan tren yang sama, penduduk di tahun 2030 diperkirakan mencapai 505.845 jiwa. Dalam periode lima tahun berikutnya, proyeksi penduduk meningkat menjadi 538.152 jiwa pada tahun 2035.

Tahun 2040 memberikan gambaran penduduk Kutai Timur yang berjumlah 566.176 jiwa. Proyeksi untuk tahun 2045, penduduk Kutai Timur diperkirakan akan

mencapai 589.422 jiwa. Angka ini menandakan pertumbuhan yang bertahap dan terencana dalam kurun waktu dua puluh dua tahun, dari 2023 hingga 2045, dengan pertumbuhan rata-rata kurang lebih 1,2% setiap tahunnya dari basis tahun 2023.

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin memberikan gambaran yang diperlukan untuk mengidentifikasi disparitas dan mengembangkan strategi intervensi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi setiap individu terhadap pertumbuhan dan kemakmuran daerah.

Tabel 2. 20 Komposisi Jumlah Penduduk Berdasar Gender

No	Tahun	Proyeksi L	Proyeksi P
1	2025	251.457	218.939
2	2030	267.654	238.191
3	2035	281.890	256.262
4	2040	293.664	272.512
5	2045	302.793	286.629

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kutim 2023

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kutai Timur tahun 2023, proyeksi penduduk laki-laki di Kutai Timur tahun 2025 adalah sebanyak 251.460, sedangkan perempuan diperkirakan berjumlah 218.940. Tahun 2030 proyeksi penduduk laki-laki meningkat menjadi 267.650, dan perempuan menjadi 238.190. Proyeksi untuk tahun 2035 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 281.890, sedangkan perempuan sebanyak 256.260. Pada tahun 2040, diperkirakan jumlah penduduk laki-laki akan mencapai 293.660, dan perempuan 272.510. Proyeksi untuk tahun 2045 menunjukkan jumlah laki-laki meningkat menjadi 302.790, dan perempuan menjadi 286.630.

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur diperlukan untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai distribusi usia dari populasi di Kabupaten Kutai Timur, yang tercermin dari tabel berikut:

Tabel 2. 21 Proyeksi Penduduk Berdasar Kelompok Usia

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1.	0 – 4	41.242	40.510	39.860	38.634	37.647
2.	5 – 9	32.683	41.631	40.907	40.268	39.032
3.	10 – 14	37.014	32.736	41.714	41.006	40.374
4.	15 – 19	39.490	37.187	32.899	41.911	41.215
5.	20 – 24	41.234	40.307	37.970	33.609	42.793
6.	25 – 29	41.190	42.575	41.647	39.250	34.749
7.	30 – 34	43.258	42.270	43.706	42.758	40.297
8.	35 – 39	43.464	43.634	42.653	44.109	43.145
9.	40 – 44	37.589	43.349	43.536	42.582	44.046
10.	45 – 49	33.129	37.140	42.859	43.075	42.161

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
11.	50 – 54	27.525	32.438	36.400	42.056	42.305
12.	55 – 59	20.549	26.630	31.441	35.339	40.869
13.	60 – 64	13.764	19.353	25.155	29.794	33.538
14.	65 – 69	8.641	12.456	17.586	22.983	27.310
15.	70 – 74	4.905	7.324	10.636	15.135	19.900
16.	75 +	4.719	6.305	9.183	13.667	20.041

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kutim 2023

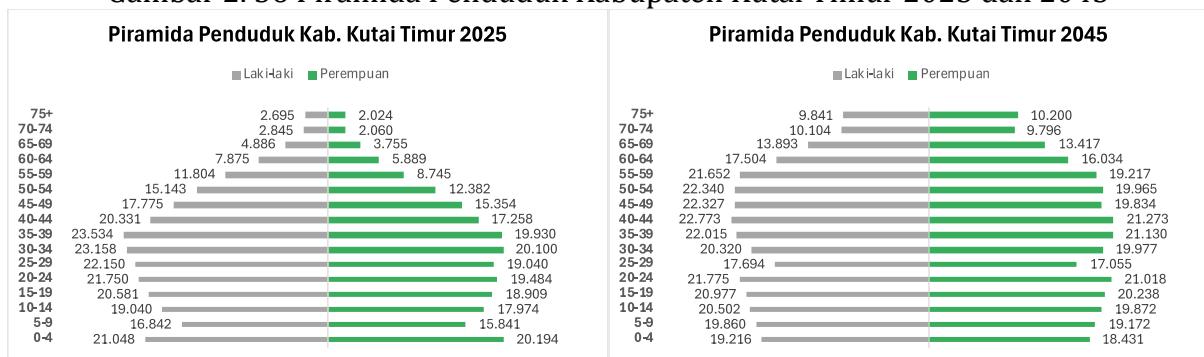
Proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2025 hingga 2045 menunjukkan dinamika demografis yang menarik dan bervariasi.

Kelompok usia 0-4 tahun diperkirakan akan menunjukkan penurunan jumlah penduduk dari 41.242 jiwa pada tahun 2025 menjadi 37.647 jiwa pada tahun 2045. Hal serupa terjadi pada kelompok usia 5-9 tahun dan 10-14 tahun, yang kedua kelompok ini mengalami fluktuasi dengan puncak pada periode pertengahan proyeksi sebelum kembali menurun.

Untuk kelompok usia produktif, terdapat tren peningkatan konsisten pada hampir semua kelompok umur dalam rentang usia ini, yang mencerminkan pertumbuhan penduduk dalam usia bekerja. Kelompok usia 20-24 dan 25-29 tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai puncak pada akhir periode proyeksi. Ini mungkin berdampak pada peningkatan sumber daya manusia dan potensi ekonomi.

Pada kelompok usia lanjut, yaitu 65 tahun ke atas, terjadi peningkatan yang konsisten dari tahun 2025 hingga 2045. Ini menunjukkan pergeseran struktur umur menuju populasi yang lebih tua, yang mengimplikasikan kebutuhan akan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, serta dukungan sosial yang lebih besar untuk kelompok ini.

Gambar 2. 36 Piramida Penduduk Kabupaten Kutai Timur 2025 dan 2045



Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kutim 2023

Proyeksi demografis ini memberikan indikasi penting terhadap tantangan dan kesempatan yang akan dihadapi Kutai Timur dalam 20 tahun mendatang. Pemerintah perlu merespon dinamika ini dengan menyusun strategi yang mencakup peningkatan fasilitas pendidikan untuk anak-anak, pengembangan kebijakan pasar kerja yang

mendukung inklusi dan pertumbuhan tenaga kerja muda, serta perencanaan matang terkait layanan kesehatan dan pensiun untuk penduduk usia lanjut.

D. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk

Jumlah dan kepadatan penduduk memberikan wawasan penting yang diperlukan untuk merancang kebijakan publik yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan kualitas hidup, serta memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan mengelola sumber daya secara bijaksana dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Tahun	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	455.504	470.396	505.845	538.152	566.176	589.422
Kepadatan (jiwa/km)	14,58	15,06	16,19	17,23	18,12	18,87

Sumber: Proyeksi Penduduk Kutai 2023 (BPS)

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan yang meningkat di Kabupaten Kutai Timur menuntut perhatian dalam hal perencanaan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan penyediaan fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengembangan proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk ini serta meningkatkan kualitas hidup warganya.

E. Penduduk Usia Produktif

Usia produktif umumnya didefinisikan sebagai kelompok umur antara 15 hingga 64 tahun, merupakan segmen populasi yang memiliki peran krusial dalam dinamika ekonomi dan sosial suatu wilayah. Informasi tentang usia produktif merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengeksplorasi berbagai dimensi yang terkait dengan penduduk usia produktif, termasuk potensi tenaga kerja, kontribusi mereka terhadap produktivitas ekonomi, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks pembangunan daerah. Analisis ini akan meliputi peninjauan terhadap tingkat pendidikan, keterampilan kerja, kesempatan kerja, serta kesehatan dan kesejahteraan penduduk dalam kelompok usia ini.

Tabel 2. 23 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kutai Timur

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
4.	15 – 19	39.490	37.187	32.899	41.911	41.215
5.	20 – 24	41.234	40.307	37.970	33.609	42.793
6.	25 – 29	41.190	42.575	41.647	39.250	34.749
7.	30 – 34	43.258	42.270	43.706	42.758	40.297
8.	35 – 39	43.464	43.634	42.653	44.109	43.145
9.	40 – 44	37.589	43.349	43.536	42.582	44.046
10.	45 – 49	33.129	37.140	42.859	43.075	42.161

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
11.	50 – 54	27.525	32.438	36.400	42.056	42.305
12.	55 – 59	20.549	26.630	31.441	35.339	40.869
13.	60 – 64	13.764	19.353	25.155	29.794	33.538

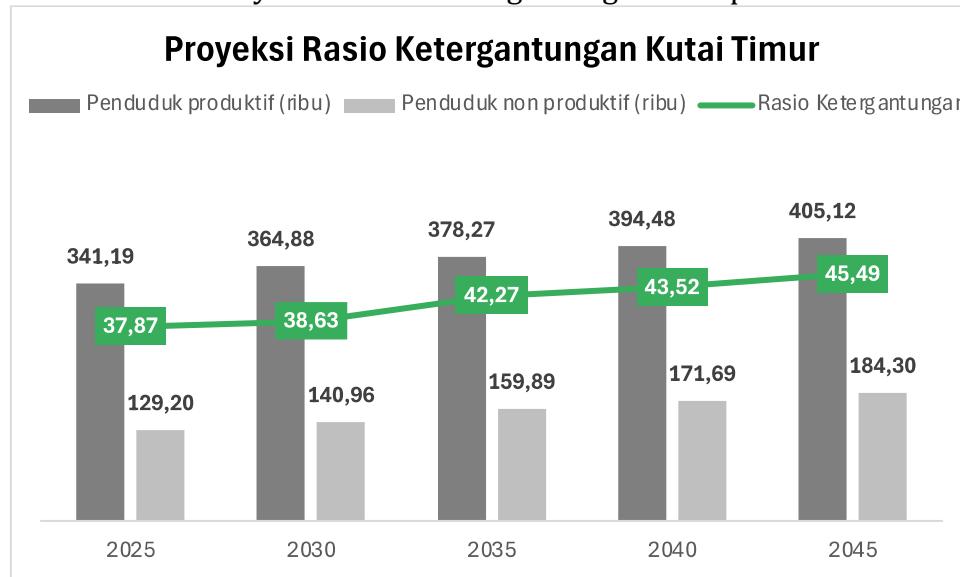
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Kutai Timur BPS 2023

Pentingnya pembahasan usia produktif ini dalam konteks RPJPD adalah untuk memberikan panduan dalam formulasi kebijakan dan program yang mendukung pemanfaatan optimal potensi penduduk usia produktif. Hal ini termasuk pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif.

F. Proyeksi Angka Ketergantungan

Proyeksi angka ketergantungan penting untuk mengantisipasi perubahan struktur penduduk dan merumuskan kebijakan yang tepat. Angka ini membantu pemerintah memaksimalkan potensi bonus demografi serta memitigasi dampak ekonomi dari peningkatan beban penduduk non-produktif, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Gambar 2. 37 Proyeksi Indeks Ketergantungan Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020–2035, diolah

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur sekitar 470.396 penduduk. Di antaranya, terdapat 110.939 jiwa di bawah 15 tahun dan 18.265 jiwa di atas 64 tahun. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil dari populasi yang bergantung pada kelompok usia produktif, yang berjumlah 341.192 jiwa. Dengan demikian, angka ketergantungan di tahun 2025 relatif rendah.

Namun, seiring perjalanan waktu hingga 2045, jumlah penduduk total tumbuh menjadi 589.422, dan pergeseran demografis jelas. Populasi di bawah usia 15

tahun meningkat sedikit menjadi 117.054 jiwa, sementara yang berusia di atas 64 tahun meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 67.251 jiwa. Populasi usia kerja juga bertambah, tetapi pertumbuhan penduduk lansia lebih signifikan, menunjukkan perubahan struktur umur yang menuju ke populasi yang menua. Ini akan meningkatkan angka ketergantungan secara signifikan karena populasi yang lebih tua umumnya tidak bekerja dan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk perawatan kesehatan dan pensiun.

Pada tahun 2045, meskipun populasi produktif tetap menjadi kelompok terbesar, pertumbuhan pesat populasi yang lebih tua menandakan bahwa akan ada lebih banyak tekanan pada generasi muda untuk mendukung generasi yang lebih tua, baik melalui pengeluaran sosial seperti pensiun dan kesehatan, maupun dukungan langsung melalui keluarga.

Perubahan dalam angka ketergantungan dari tahun 2025 hingga 2045 di Kabupaten Kutai Timur mencerminkan transisi menuju masyarakat yang menua (*aging population*). Ini akan memerlukan penyesuaian dalam kebijakan ekonomi dan sosial untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk usia muda yang lebih lambat tetap mampu mendukung populasi usia lanjut yang semakin bertambah, dan untuk memelihara pembangunan berkelanjutan di masa depan

G. Bonus Demografi

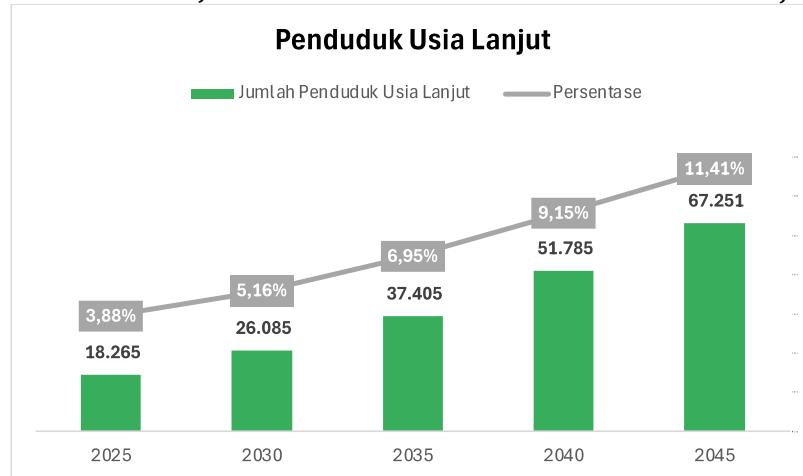
Analisis terhadap data demografis Kabupaten Kutai Timur mengenai distribusi kelompok umur dari tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan dinamika yang signifikan terkait dengan fenomena bonus demografi, yang terjadi ketika suatu populasi memiliki proporsi yang tinggi dari penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Dalam data yang tersedia kelompok usia produktif, terutama yang berusia antara 25 hingga 59 tahun, menunjukkan kecenderungan peningkatan. Ini menandakan bahwa selama periode ini, Kabupaten Kutai Timur akan mengalami fase di mana sebagian besar penduduknya berada dalam rentang usia produktif.

E. Penduduk Usia Lanjut

Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Timur berjumlah 18.265 orang atau 3,88% dari total populasi. Seiring berjalannya waktu, diperkirakan terjadi kenaikan jumlah penduduk usia lanjut. Tahun 2030, penduduk lanjut usia meningkat menjadi 26.085 orang, atau sekitar 5,16% dari total populasi.

Gambar 2.38 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Lanjut



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020–2035, diolah

Pada tahun 2035, data menunjukkan lonjakan yang lebih tajam dengan total penduduk usia lanjut mencapai 37.405 orang, ada peningkatan menjadi sekitar 6,95% dari keseluruhan jumlah penduduk. Memasuki tahun 2040, jumlah penduduk lanjut usia tercatat sebanyak 51.785 orang, mencapai 9,15% dari total populasi. Pada puncaknya di tahun 2045, data proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia lanjut akan melonjak menjadi 67.251 orang. Hal ini menandakan bahwa sekitar 11,41% dari populasi Kabupaten Kutai Timur adalah individu berusia 65 tahun ke atas.

Kabupaten Kutai Timur akan mengalami perubahan struktural populasi dengan persentase penduduk usia lanjut yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini menuntut perencanaan dan kebijakan sosial yang komprehensif untuk memastikan kesejahteraan kelompok usia ini, termasuk ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, pensiun yang terjamin, dan dukungan sosial yang berkelanjutan.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Dalam merancang dan mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan, pendekatan yang komprehensif dan terstruktur menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kelayakan dari perencanaan perkotaan. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika pertumbuhan penduduk serta bagaimana hal ini mempengaruhi kebutuhan infrastruktur kota. Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan, perencanaan ini harus mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang dinamis, dengan memperhatikan kebutuhan ruang dan fasilitas yang memadai.

A. Proyeksi Rumah/Tempat tinggal

Tabel 2. 24 Proyeksi Rumah Tinggal Sampai tahun 2045

Variabel	Acuan	2023	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk		455.504	470.396	505.845	538.152	566.176	589.422
Jumlah Rumah (Unit)*	1 unit/ 4 jiwa	104.342	117.599	126.461	134.538	141.544	147.356
Luas Lahan untuk rumah (m2)**	36 m2/ unit rumah		4.233.564	4.552.605	4.843.368	5.095.584	5.304.798

Acuan: BKKBN (1 KK ideal adalah 4 orang)* dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan**

Proyeksi kebutuhan perumahan merupakan aspek penting dalam perencanaan perkotaan, terutama di tengah dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat. Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga 2045, terlihat adanya tren peningkatan signifikan yang harus diakomodasi dengan perencanaan perumahan yang tepat.

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan signifikan untuk perluasan dan pengembangan perumahan di masa depan. Pertumbuhan perumahan ini harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur, layanan publik, dan ruang hijau, untuk memastikan kualitas hidup yang baik.

B. Proyeksi Air Bersih

Tabel 2. 25 Proyeksi Kebutuhan Air Sampai tahun 2045

Variabel	Acuan	2023	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk		455.504	470.396	505.845	538.152	566.176	589.422
Kebutuhan air bersih- Kota kecil*	100 liter/ hari/kapita		17.169.454.000	18.463.342.500	19.642.548.000	20.665.424.000	21.513.903.000
Kebutuhan kran umum air bersih**	1 buah/ 250 jiwa		1.882	2.023	2.153	2.265	2.358

Acuan: Ditjen SDA Departemen Kimpraswil (2003)* dan SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum**

Seiring dengan pertumbuhan ini, kebutuhan air bersih untuk kota kecil (100 liter/hari/kapita) diproyeksikan meningkat dari 17,17 miliar liter pada 2023 menjadi 21,51 miliar liter pada 2045. Selain itu, kebutuhan kran umum air bersih juga diperkirakan bertambah dari 1.882 unit pada 2023 menjadi 2.358 unit pada 2045 (dengan asumsi 1 kran untuk 250 jiwa). Peningkatan ini menekankan pentingnya

perencanaan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di masa depan.

C. Proyeksi Energi/Listrik

Tabel 2. 26 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Sampai Tahun 2045

Variabel	Acuan	2023	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk		455.504	470.396	505.845	538.152	566.176	589.422
Listrik rumah tangga (VA)	450 VA per jiwa		211.678.200	227.630.250	242.168.400	254.779.200	265.239.900
Listrik lingkungan	40% dari listrik rumah tangga		84.671.280	91.052.100	96.867.360	101.911.680	106.095.960
Total (VA)		296.349.480	318.682.350	339.035.760	356.690.880	371.335.860	

Acuan: SNI 04-8287.603-2002 tentang Istilah kelistrikan

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk dan acuan SNI 04-8287.603-2002 mengenai istilah kelistrikan, kebutuhan listrik rumah tangga dan lingkungan diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dengan asumsi 450 VA per jiwa untuk listrik rumah tangga, total kebutuhan listrik rumah tangga diproyeksikan naik dari 211,68 juta VA pada 2025 menjadi 265,24 juta VA pada 2045. Sementara itu, kebutuhan listrik lingkungan, yang dihitung sebesar 40% dari listrik rumah tangga, juga meningkat dari 84,67 juta VA pada 2025 menjadi 106,10 juta VA pada 2045. Secara keseluruhan, total kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 296,35 juta VA pada 2025 dan meningkat menjadi 371,34 juta VA pada 2045.

D. Proyeksi Persampahan

Tabel 2. 27 Proyeksi Persampahan Sampai Tahun 2045

Variabel	Acuan	2023	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk		455.504	470.396	505.845	538.152	566.176	589.422
Timbulan sampah (Kg)*	0,5 kg/org/hari		85.847.270	92.316.713	98.212.740	103.327.120	107.569.515
Tong sampah rumah**	1 unit/ 5 jiwa		94.079	101.169	107.630	113.235	117.884
TPS lingkungan**	1 unit/ 2.500 jiwa		188	202	215	226	236
TPS kawasan**	1 unit/ 30.000 jiwa		16	17	18	19	20
TPA lokal**	1 unit/ 120.000 jiwa		4	4	4	5	5
TPA wilayah**	1 unit/ 480.000 jiwa		1	1	1	1	1
TPST***	1 unit/ 7.377.380 kg sampah/tahun		12	13	13	14	15

Acuan: SNI 3242 : 2008 tentang Pengelolaan sampah di permukiman *; SNI 19-2454-2002 mengenai Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan** dan Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL, vol. 7. No. 1, 2023.***

Keberadaan sistem pengelolaan sampah yang efisien menjadi sangat penting. Strategi pengelolaan sampah harus mencakup aspek reduksi, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan sumber daya, serta penanganan dan pembuangan akhir sampah (*reuse, reduce, recycle*). Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah harus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penerapan teknologi pengelolaan sampah yang inovatif juga harus dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan sampah.

E. Proyeksi Sarana Kesehatan

Tabel 2. 28 Proyeksi Sarana Kesehatan Sampai Tahun 2045

Variabel	Acuan	2023	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk		455.504	470.396	505.845	538.152	566.176	589.422
BKIA/Klinik bersalin	1 unit/ 30.000 jiwa	64	66	71	75	79	82
Puskesmas pembantu	1 unit/ 30.000 jiwa	113	116	135	139	139	139
Puskesmas	1 unit/ 120.000 jiwa	21	21	21	21	21	21
Rumah sakit*	1 unit/ 240.000 jiwa	9	9	10	10	10	10
Apotek	1 unit/ 30.000 jiwa	88	90	97	103	109	113

Sumber acuan: SNI 03-1733-2004 tantang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang terus meningkat dari 455.504 jiwa pada tahun 2023 menjadi 589.422 jiwa pada tahun 2045, kebutuhan infrastruktur kesehatan akan dimaksimalkan pemenuhannya pada dua periode RPJMD awal, yaitu 2025 dan 2029. Pada periode ini, pemenuhan infrastruktur seperti BKIA/Klinik Bersalin direncanakan meningkat dari 66 unit pada 2025 menjadi 71 unit pada 2029, sementara puskesmas pembantu juga akan mengalami lonjakan dari 116 unit pada 2025 menjadi 135 unit pada 2029. Begitu pula dengan apotek yang akan bertambah dari 90 unit pada 2025 menjadi 97 unit pada 2029. Rumah sakit akan bertambah 1 unit saja, dari 9 rumah sakit menjadi 10 rumah sakit. Penekanan pemenuhan kebutuhan infrastruktur ini bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Setelah dua periode RPJMD awal, fokus akan beralih pada pemeliharaan dan pengoptimalan

infrastruktur yang telah tersedia guna menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan hingga tahun 2045.

F. Proyeksi Sarana Pendidikan

Tabel 2. 29 Proyeksi Sarana Pendidikan Sampai Tahun 2045

Variabel	Acuan	2023	2025	2029	2034	2039	2045
Jumlah Penduduk		455.504	470.396	505.845	538.152	566.176	589.422
Kebutuhan TK	1 unit/ 1.250 jiwa	190	376	405	431	453	472
kebutuhan SD	1 unit/ 1.600 jiwa	238	294	316	336	354	368
Kebutuhan SMP	1 unit/ 4.800 jiwa	97	98	105	112	118	123

Sumber acuan: SNI 03-1733-2004 tantang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Dengan proyeksi kebutuhan sebanyak 376 unit Taman Kanak-kanak pada tahun 2025, pemerintah daerah harus merencanakan dan membangun fasilitas-fasilitas baru untuk menampung penduduk usia dini yang terus bertambah. Angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 472 unit pada tahun 2045, mengingat pentingnya pendidikan usia dini yang berkualitas dalam membentuk fondasi kecerdasan dan karakter anak-anak.

Di sisi lain, Sekolah Dasar, sebagai pondasi pendidikan dasar, juga memerlukan perhatian serius. Dengan 294 unit yang ada di tahun 2025, pemerintah harus menambah jumlahnya menjadi 368 unit pada tahun 2045 untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Kutai Timur mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak.

Kebutuhan akan pendidikan menengah juga mengalami kenaikan. Sekolah Menengah Pertama, yang berjumlah 98 unit di tahun 2025, harus ditambah hingga mencapai 123 unit di tahun 2045.

Dalam rangka menjawab tantangan-tantangan ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tanah, serta tenaga pendidik yang berkualitas. Langkah-langkah strategis dan implementasi kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi generasi penerus, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Kutai Timur.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) suatu wilayah dapat diartikan sebagai pertumbuhan sebuah kawasan yang signifikan dimana kemudian layak dijadikan sebagai

pusat pembangunan guna memberikan dampak terhadap perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Pusat pertumbuhan wilayah dibangun agar kawasan di sekitarnya dapat ikut berkembang. Secara fungsional, pengertian pusat pertumbuhan adalah kawasan yang menjadi lokasi konsentrasi berbagai kelompok usaha karena memiliki unsur-unsur kedinamisan. Unsur-unsur itu dapat menstimulasi kehidupan ekonomi di dalam maupun luar kawasan. Dari aspek geografis, definisi pusat pertumbuhan adalah kawasan yang memiliki banyak fasilitas dengan kemudahan akses memadai, sehingga menjadi pusat daya tarik bagi perpindahan penduduk maupun aktivitas berbagai jenis kegiatan usaha.

2.7.1. Pengembangan Struktur Ruang

Struktur ruang Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui pengembangan sistem pusat permukiman dan jaringan infrastruktur utama untuk menciptakan hubungan fungsional yang efektif antara pusat kegiatan, infrastruktur pendukung, dan sumber daya wilayah.

A. Sistem Pusat Permukiman

- a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKW Kabupaten Kutai Timur berada di Pusat Perkotaan Sangatta, Kecamatan Sangatta Utara.
- b) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. PKL Kabupaten Kutai Timur terdapat di Kecamatan Muara Bengkal, Muara Wahau, Kaliorang dan Sangkulirang.
- c) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Kutai Timur terletak di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Busang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Telen dan Kecamatan Teluk Pandan.
- d) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah kumpulan kegiatan, aktivitas, prasarana, dan sarana yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah. PPL Kabupaten Kutai Timur terdapat di Desa Sangatta Selatan, Desa Sangatta Utara, Desa Sekerat, Desa Singageweh, Desa Swargabara, dan Desa Teluk Linga.

B. Sistem Jaringan Transportasi

1. Sistem Jaringan Jalan

Jalan Umum

- a. Jalan Arteri; yang terdiri dari Sp. Perdau - Tepian Langsat, Santan (Batas Kabupaten Kutai Kartanegara) - Sp. 3 Bontang, Sp. 3 Bontang - Sangatta, Jl. Yos Sudarso (Sangatta), Sangatta - Sp. Perdau, Sp. Perdau - Muara Lembak, Muara Lembak - Sangkulirang, Akses Pelabuhan Maloy Baru, Tepian Langsat - Batu Ampar, Batu Ampar - Sp. 3 Muara Wahau, Sp. 3 Muara Wahau - Batas Kabupaten Berau, Jl. Akses Pelabuhan Lhok Tuan, Sp. 3 Bontang - Batas Kota Bontang.
- b. Jalan Kolektor; terdiri dari Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder
- c. Jalan Lokal, terdiri dari Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder
- d. Jalan Lingkungan, terdiri Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder.

Jalan Khusus, jalan yang khusus dilingkungan akses Bandara Tanjung Bara, pertanian, perkebunan, pertambangan maupun jalan di lingkungan perusahaan.

Jalan Tol, Sangatta - Maloy; Sangatta - Tanjung Selor - Nunukan; dan Bontang - Sangatta.

Terminal Penumpang, terdiri dari type B (Marga Mulya Kecamatan Kombeng dan Terminal Sangatta di Kecamatan Sangatta Selatan), type C di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangatta Utara.

Terminal Barang, berupa Terminal Barang Sangatta di Kecamatan Sangatta Selatan; dan Terminal Barang Maloy di Kecamatan Kaliorang.

Jembatan Timbang, terdapat di Jembatan Timbang Sangkimah di Kecamatan Sangatta Selatan; Jembatan Timbang Tepian Langsat di Kecamatan Bengalon; dan Jembatan Timbang Bengalon di Kecamatan Bengalon.

Jembatan, terdiri dari Jembatan Jl. A Wahab Syahranie di Kecamatan Sangatta Utara, Jembatan Jl. H. Masdar Sangatta Utara di Kecamatan Sangatta Utara, Jembatan Gantung Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara, Jembatan Kayu Sangatta Utara di Kecamatan Sangatta Utara, Jembatan Kecamatan Kongbeng di Kecamatan Kombeng, Jembatan Jl. Ahmad Yani di Kecamatan Bengalon, Jembatan Sei Separo Barat di Kecamatan Bengalon, Jembatan Pinang di Kecamatan Sangatta Selatan, Jembatan Kelinjau II di Kecamatan Muara Ancalong, Jembatan Long Mesangat di Kecamatan Long Mesan, Jembatan Senyiur di Kecamatan Muara Ancalong, Jembatan Tanjung Manis Long Tesak di Kecamatan Muara Ancalong, Jembatan Ngayau di Kecamatan Muara Bengkal, Jembatan Gantung PDC di Kecamatan Muara Wahau, Jembatan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, Jembatan Rimba Hijau di Kecamatan Sandaran, Jembatan Sangatta Selatan di Kecamatan Sangatta Selatan, Jembatan Kampung Kajang di Kecamatan Sangatta Utara, Jembatan Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, Jembatan

Sangatta Lama di Kecamatan Sangatta Selatan, Jembatan Batu Balai di Kecamatan Muara Bengkal dan jembatan lainnya.

2. Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem Jaringan Kereta Api terdiri atas Jaringan Jalur Kereta Api, yang meliputi jaringan jalur kereta api khusus berupa Jalur Kereta Api Logistik dan Jalur Kereta Api Batubara, dengan sifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan kebijakan serta ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian, sementara penambahan dan penetapan sistem jaringan kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyebrangan

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan mencakup Alur Pelayaran Sungai dan Danau, Pelabuhan Sungai dan Danau, serta Pelabuhan Penyeberangan. Alur Pelayaran Sungai dan Danau, yang merupakan alur pelayaran kelas II, meliputi Alur Pelayaran Sungai Kelinjau, Alur Pelayaran Sungai Telen, dan Alur Pelayaran Sungai Karangan. Pelabuhan Sungai dan Danau berupa pelabuhan pengumpan yang mencakup Pelabuhan Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal, Pelabuhan Long Mesangat di Kecamatan Long Mesangat, Pelabuhan Muara Ancalong di Kecamatan Muara Ancalong, Pelabuhan Busang di Kecamatan Busang, Pelabuhan Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, Pelabuhan Kaliorang di Kecamatan Kaliorang, dan Pelabuhan Karangan di Kecamatan Karangan. Sementara itu, Pelabuhan Penyeberangan kelas III terdiri atas Pelabuhan Desa Sakka/Desa Peridan dan Pelabuhan Tanjung Keramat, keduanya berada di Kecamatan Sangkulirang.

4. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem Jaringan Transportasi Laut berupa Pelabuhan Laut yang terdiri atas Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Perikanan, dan Terminal Khusus. Pelabuhan Pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Regional Sangkulirang yang terletak di Kecamatan Sangkulirang. Pelabuhan Pengumpul meliputi Pelabuhan Maloy di Kecamatan Kaliorang, Pelabuhan Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara, Pelabuhan Pengumpul di Kecamatan Bengalon, dan Pelabuhan Pengumpul di Kecamatan Kaliorang. Pelabuhan Perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Sangatta yang terletak di Kecamatan Sangatta Utara. Terminal Khusus meliputi Terminal Khusus di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, dan Kecamatan Sangkulirang.

5. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus terdiri atas Bandar Udara Pengumpan dan Bandar Udara Khusus. Bandar Udara Pengumpan berupa Bandar Udara Pengumpan Muara Wahau/Uyang Lahai/Miau Baru yang terletak di Kecamatan Kombeng. Bandar Udara Khusus meliputi Bandar Udara Khusus Sangkima di Kecamatan Sangatta Selatan, Bandar Udara Khusus KPC Tanjung Bara di Kecamatan Sangatta Utara, dan Bandar Udara Khusus Indexim Coalindo di Kecamatan Sangkulirang.

C Sistem Jaringan Energi

Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Kutai Timur mencakup Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi terdiri atas infrastruktur dan jaringan yang berfungsi menyalurkan minyak dan gas bumi. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi meliputi Tangki Timbun di Kecamatan Sangatta Utara dan Fasilitas Coal to Methanol di Kecamatan Bengalon. Sementara itu, Jaringan Minyak dan Gas Bumi berfungsi menyalurkan minyak dan gas dari fasilitas produksi hingga tempat penyimpanan yang terdapat di Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Teluk Pandan.

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan mencakup pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi berbagai jenis pembangkit seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Kaltim Prima Coal di Kecamatan Sangatta Utara, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tersebar di PLTD Sangata di Sangatta Utara, PLTD Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang, PLTD Sepaso di Kecamatan Bengalon, PLTD Karangan Dalam di Kecamatan Karangan, PLTD Muara Bengkal di Kecamatan Muara Ancalong, PLTD Muara Wahau di Kecamatan Kecamatan Muara Wahau, PLTD Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, PLTD Senyiur di Kecamatan Muara Ancalong, PLTD Long Segar di Kecamatan Telen, dan PLTD Gemar Baru di Kecamatan Busang, Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Juwata di Kecamatan Sangkulirang dan Beno Harapan Kecamatan Batu Ampar. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) juga terdapat di Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Karangan.

Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung terdiri atas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem yang mencakup Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Muara Wahau–Sepaso melalui Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Kaliorang; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Muara Badak–Teluk Pandan melalui Kecamatan Teluk Pandan; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bontang (Teluk Pandan)–Sangatta melalui Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Sangatta Selatan, dan Kecamatan Sangatta Utara; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTU Kaltim (FTP-2)–Bontang melalui Kecamatan Teluk Pandan; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Maloy–Kobexindo melalui Kecamatan Kaliorang; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Muara Wahau–Sepaso melalui Kecamatan Bengalon, Kecamatan Telen, Kecamatan Kombeng, dan Kecamatan Muara Wahau; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Muara Wahau–Tanjung Redeb melalui Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kombeng; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kembang Janggut–Muara Bengkal melalui Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Muara Bengkal–Muara Wahau melalui Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Kombeng; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Muara Wahau–Sangatta melalui Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Telen, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Kombeng; Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Maloy–

Talisayan melalui Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Sangkulirang; serta jaringan transmisi tenaga listrik lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik mencakup Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang tersebar di Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Kaliorang; Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar di Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Kaliorang; serta Saluran Distribusi Lainnya yang tersebar di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Busang, Kecamatan Telen, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, dan Kecamatan Karangan. Gardu Listrik terdiri atas Gardu Induk (GI) Bontang/Teluk Pandan di Kecamatan Teluk Pandan, GI Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara, GI Suwandi di Kecamatan Sangatta Utara, GI Sepaso di Kecamatan Bengalon, GI Muara Wahau di Kecamatan Muara Wahau, GI Maloy di Kecamatan Kaliorang, dan GI Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal.

D. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak. Jaringan Tetap mencakup infrastruktur yang meliputi POP Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara, beach man hole Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara, POP Tepian di Kecamatan Bengalon, POP Miau Baru di Kecamatan Kombeng, dan STO Sangatta di Kecamatan Sangatta Utara. Selain itu, jaringan tetap tersebar di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Telen, dan Kecamatan Teluk Pandan. Sementara itu, Jaringan Bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler tersedia di seluruh kecamatan.

E. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas Prasarana Sumber Daya Air, yang mencakup Sistem Jaringan Irigasi, Sistem Pengendalian Banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air.

Sistem Jaringan Irigasi mencakup Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier. Jaringan Irigasi Primer tersebar di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Sangatta Selatan, dan Kecamatan Sangkulirang. Jaringan Irigasi Sekunder terdapat di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Rantau Pulung, sementara Jaringan Irigasi Tersier berada di Kecamatan Rantau Pulung dan Kecamatan Bengalon.

Sistem Pengendalian Banjir terdiri atas Jaringan Pengendalian Banjir dan Bangunan Pengendalian Banjir. Kedua elemen ini, yaitu jaringan dan bangunan pengendalian banjir, berlokasi di Kecamatan Sangatta Utara.

Bangunan Sumber Daya Air tersebar di berbagai wilayah, yaitu Kecamatan Busang, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Sangkulirang.

F. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Sistem Jaringan Persampahan, Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, dan Sistem Drainase.

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem Penyediaan Air Minum mencakup Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.

Jaringan Perpipaan terdiri atas Jaringan Air Baku yang terdapat di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kaliorang; Unit Distribusi di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, dan Kecamatan Teluk Pandan; serta Unit Produksi di Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sangatta Utara, dan Kecamatan Teluk Pandan.

Bukan Jaringan Perpipaan mencakup Sumur Dangkal yang berada di Kecamatan Bengalon, serta Bangunan Penangkap Mata Air yang terdapat di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kaliorang.

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Sistem Pengelolaan Air Limbah terdiri atas Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kaliorang, Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, dan Kecamatan Sangatta Utara, serta Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang terdapat di Kecamatan Sangatta Utara.

3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Pengelolaan Limbah B3 berada di Kecamatan Kaliorang.

4. Sistem Jaringan Persampahan

Sistem Jaringan Persampahan mencakup:

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA): TPA Bengalon di Kecamatan Bengalon, TPA Regional Maloy di Kecamatan Kaliorang, dan TPA Batota/Sangatta Utara di Kecamatan Sangatta Utara.

Tempat Penampungan Sementara (TPS): TPS Pelabuhan dan TPS Swarga Bara di Kecamatan Sangatta Utara, TPS di Kecamatan Bengalon, TPS di Kecamatan Kaliorang, serta Depo Sampah di Kecamatan Sangatta Utara.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST): TPST Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang.

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R): TPS3R Sangkima dan TPS3R Pasar Sangatta Selatan di Kecamatan Sangatta Selatan, TPS3R Pasar Induk dan Bank Sampah di Kecamatan Sangatta Utara, serta rencana TPS3R Simono di Kecamatan Sangatta Utara dan TPS3R Zona IV di Kecamatan Telen.

5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana terdiri atas Jalur Evakuasi Bencana di Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, dan Kecamatan Sangatta Utara, serta Tempat Evakuasi Bencana yang berada di seluruh pusat kecamatan.

6. Sistem Drainase

Sistem Drainase mencakup Jaringan Drainase Primer, Sekunder, dan Tersier.

Jaringan Drainase Primer terdapat di Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, dan Kecamatan Sangkulirang.

Jaringan Drainase Sekunder terdapat di setiap kecamatan.

Jaringan Drainase Tersier terdapat di Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, dan Kecamatan Sangkulirang.

2.7.2. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur disusun untuk mengatur pemanfaatan ruang secara terencana, mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sebagai elemen utama. Pengaturan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pengembangan sosial ekonomi.

Kawasan Lindung

Kawasan Lindung terdiri atas Kawasan Badan Air, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung Geologi, dan Kawasan Ekosistem Mangrove.

Kawasan Badan Air memiliki luas sekitar 9.965 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya meliputi:

Kawasan Hutan Lindung dengan luas 328.732 hektare di Kecamatan Bengalon, Busang, Karangan, Muara Wahau, Sandaran, Sangkulirang, dan Teluk Pandan.

Kawasan Lindung Gambut seluas 334 hektare di Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

Kawasan Perlindungan Setempat mencakup area seluas 1.380 hektare di Kecamatan Bengalon, Karangan, Kaubun, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Sandaran, Sangatta Utara, dan Sangkulirang.

Kawasan Konservasi terdiri atas:

Cagar Alam seluas 33.611 hektare di Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

Taman Nasional seluas 151.908 hektare di Kecamatan Rantau Pulung, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, dan Teluk Pandan.

Kawasan Konservasi Perairan seluas 0,17 hektare di Kecamatan Muara Bengkal.

Kawasan Lindung Geologi meliputi:

Kawasan Keunikan Bentang Alam seluas 14.206 hektare di Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Karangan, Muara Wahau, Sandaran, dan Sangkulirang.

Kawasan Imbuhan Air Tanah seluas 228 hektare di Kecamatan Kaliorang.

Kawasan Ekosistem Mangrove berupa hutan bakau seluas 22.369 hektare di Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Karangan, Kaubun, Sandaran, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, dan Sangkulirang.

Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya mencakup beberapa kategori pemanfaatan ruang, yaitu:

Kawasan Hutan Produksi meliputi:

Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 853.389 hektare di Kecamatan Batu Ampar, Bengalon, Busang, Kaliorang, Karangan, Kaubun, Kombeng, Long Mesangat, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Rantau Pulung, Sandaran, Sangatta Selatan, Sangkulirang, Telen, dan Teluk Pandan .

Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 703.268 hektare di Kecamatan Bengalon, Busang, Karangan, Kombeng, Muara Ancalong, Muara Wahau, dan Telen.

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 22.206 hektare di Kecamatan Bengalon, Busang, Karangan, Kaubun, Kombeng, Muara Bengkal, Sangkulirang, dan Teluk Pandan .

Kawasan Perkebunan Rakyat mencakup 229 hektare di Kecamatan Sangatta Utara.

Kawasan Pertanian meliputi:

Kawasan Tanaman Pangan seluas 6.973 hektare tersebar di Kecamatan Bengalon, Busang, Kaliorang, Karangan, Kaubun, Kombeng, Long Mesangat, Muara Ancalong, Muara

Bengkal, Muara Wahau, Rantau Pulung, Sandaran, Sangatta Selatan, Sangkulirang, Telen, dan Teluk Pandan.

Kawasan Perkebunan seluas 898.786 hektare di seluruh kecamatan.

Kawasan Perikanan mencakup Kawasan Perikanan Budidaya seluas 3.438 hektare di Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Sandaran, Sangatta Utara, dan Sangkulirang.

Kawasan Pertambangan dan Energi terdiri atas:

Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi seluas 8 hektare di Kecamatan Sangatta Selatan.

Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas 101 hektare di Kecamatan Karangan, Muara Bengkal, dan Sangatta Utara.

Kawasan Peruntukan Industri seluas 9.947 hektare tersebar di Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Kombeng, Muara Bengkal, Muara Wahau, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, dan Sangkulirang.

Kawasan Pariwisata seluas 1.037 hektare tersebar di Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, dan Sangkulirang.

Kawasan Permukiman terdiri atas:

Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 43.919 hektare di Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Kaubun, Kombeng, Long Mesangat, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, dan Sangkulirang .

Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 31.008 hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan Transportasi seluas 216 hektare di Kecamatan Kombeng, Sangatta Selatan, dan Sangatta Utara.

2.7.3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu, mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis ini terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.

A. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kutai Timur mencakup:

Kawasan Strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Industri Maloy, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan industri dan ekonomi.

Kawasan Strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat yang memiliki keunikan geologi dan ekosistem penting, serta Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan

Bentang Alam Wehea-Kelay, yang berperan dalam konservasi satwa liar dan keberlanjutan ekosistem.

B. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten Kutai Timur terdiri atas tiga kategori utama:

Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan ini meliputi:

Koridor Ekonomi Muara Wahau-Kongbeng sebagai pusat penggerak perekonomian yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi lokal dan regional.

Kawasan Peruntukan Industri, yang mendukung pengembangan sektor industri untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya Kawasan ini mencakup Kawasan Strategis Kabupaten Masyarakat Adat Wehea Kelay, yang memiliki nilai sosial dan budaya tinggi, berperan dalam pelestarian tradisi masyarakat adat serta pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal.

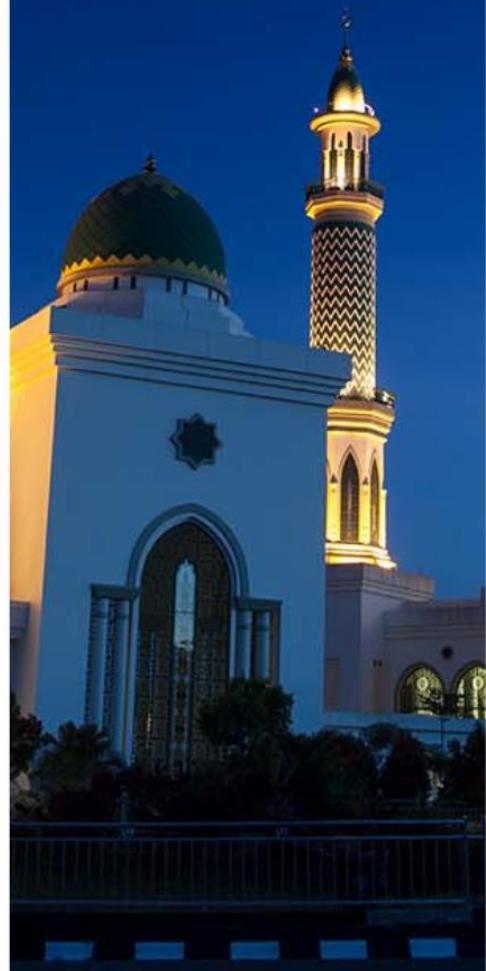
Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan ini meliputi Kawasan Strategis Kabupaten Lahan Basah Mesangat Suwi, yang merupakan habitat penting dengan fungsi ekologi utama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten ini bertujuan mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat konektivitas wilayah, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya, serta pelestarian lingkungan.

Permasalahan dan Isu Strategis

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)

Kabupaten
Kutai Timur
2025-2045



Permasalahan dan Isu Strategis



Permasalahan

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- Ketergantungan kue ekonomi pada sumber daya alam(terutama batu bara)
- Hilirisasi produk
- Pembangunan Katalisator Ekonomi (KEK-Maloy)
- Optimalisasi Potensi IKN terhadap Kab. Kutai Timur
- Investasi dan Penanaman Modal
- Pengembangan BUMD Unggulan
- Optimalisasi anggaran daerah untuk peningkatan sektor ekonomi unggulan, strategis dan prioritas
- Pengembangan produk UMKM
- Penciptaan Ekosistem Ekonomi yang menghubungkan ekonomi masyarakat dan industri komersial skala besar

Sumber Daya Manusia

- Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan
- Tingkat Pengangguran Tinggi
- Kurangnya SDM Bidang Kesehatan
- Mindset Masyarakat
- Peningkatan Kompetensi Aparatur
- Sinergitas dan Harmonisasi Perangkat Daerah
- Kurangnya Sarana Prasarana Kesehatan di Daerah Terpencil
- Pemasaran Hasil Produk Unggulan
- Kurangnya Infrastruktur Dasar di Daerah
- Antisipasi Perkembangan Penduduk

Infrastruktur dan Kewilayahannya

- Persentase penduduk miskin
- Masih belum menyeluruhnya tenaga pendidik dengan kualifikasi Sarjana Pendidikan
- Masih terdapat kasus stunting
- Kurangnya tenaga dokter spesialis, staf kesehatan, dan sarpras penunjang kesehatan
- Terdapat pekerja yang kualifikasinya tidak sesuai pasar kerja.
- Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka
- Meningkatnya penyalahgunaan Narkoba dan NAPZA
- Meningkatnya kasus kriminalitas
- Kurangnya tatalaksana Good Governance
- Kurang Optimalnya Program Tribina (Bina Balita, Bina Remaja, dan Bina Lansia)



Isu Strategis

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Daerah

Peningkatan Ketangguhan dan Pemerataan Ekonomi

Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dampak Perpindahan Ibukota Negara



Rekomendasi

1. Redefinisi Capaian dan Ukuran Pembangunan
2. Penerapan strategi Cultural-Led Development Approach, yaitu pembangunan yang berlandaskan pada kekayaan dan kekhasan daerah
3. Penerapan Strategi Katalisator (Catalyst Strategy) dan Soft Power Strategy- penetapan satu-atau dua program pembangunan utama yang dapat menggerakkan pembangunan sektor lainnya.
4. Penyusunan Rencana pembangunan berdarkan kelemahan dan kelebihan wilayah serta peluang dan tantangan yang sedang dihadapi (SWOT Based Planning)
5. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan sektor berkaitan secara komprehensif dan terintegrasi (Ecosystem Based Planning)
6. Penyempurnaan perencanaan pembangunan dengan Road Map dan Cetak Biru (Blue Print) yang jelas
7. Dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan secara komprehensif dan berkala

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peran pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.

Permasalahan pembangunan daerah biasanya tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan setempat, diantaranya:

- a. Kemiskinan dan Ketimpangan: Masih menghadapi adanya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antara berbagai kelompok penduduk. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur, serta perbedaan dalam pendidikan dan keterampilan.
- b. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Dasar: Beberapa daerah mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Faktor geografis, infrastruktur yang kurang,

dan kurangnya sumber daya keuangan dan manusia dapat menjadi hambatan bagi penyediaan layanan tersebut.

- c. Infrastruktur yang Kurang: Infrastruktur yang kurang berkualitas dan terbatas, seperti jalan, jembatan, listrik, dan transportasi umum, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas bagi masyarakat.
- d. Kesehatan dan Kesejahteraan: Masalah kesehatan masyarakat seperti penyakit menular, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, dan kurangnya kesadaran akan praktik kesehatan yang baik dapat menjadi permasalahan serius di banyak daerah.
- e. Ketahanan Pangan: Beberapa daerah mungkin menghadapi masalah ketahanan pangan karena faktor seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan kurangnya diversifikasi pertanian. Hal ini dapat mengakibatkan kelaparan dan malnutrisi di kalangan penduduk.
- f. Ketahanan Lingkungan: Daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, memerlukan strategi yang kokoh dalam mengelola risiko dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan lingkungan.
- g. Ketidakstabilan Politik dan Sosial: Konflik politik, ketidakstabilan sosial, dan ketegangan antar-etnis atau agama dapat menghambat pembangunan daerah. Tanpa perdamaian dan stabilitas politik, sulit untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.
- h. Ketergantungan pada Sektor Tertentu: Daerah-daerah yang sangat bergantung pada satu atau beberapa sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau industri tertentu, rentan terhadap fluktuasi pasar dan risiko ekonomi.

Mengatasi permasalahan pembangunan di tingkat daerah memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Diperlukan pula strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

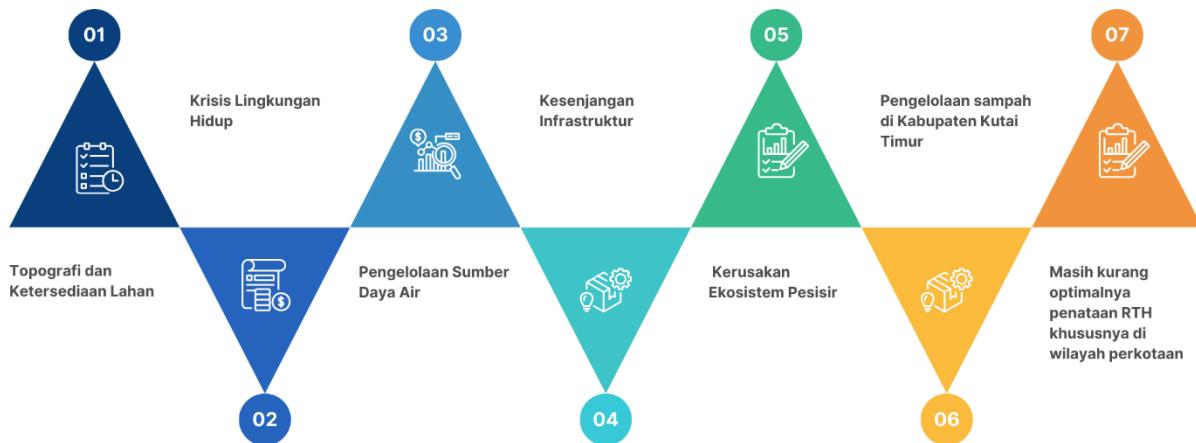
Secara keseluruhan, pelaksanaan RPJPD 2006-2025 di Kabupaten Kutai Timur telah mendorong kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan. Namun, tantangan seperti ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih perlu terus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang optimal. Kemajuan pembangunan tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan.

Pada bab ini akan disajikan permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Permasalahan disajikan per aspek yaitu 1) Aspek Geografi dan Demografi; 2). Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 3) Aspek Daya Saing Daerah; dan 4). Aspek Pelayanan Umum.

3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Geografi

Gambar 3. 1 Permasalahan Geografi Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Permasalahan aspek geografi meliputi: topografi dan ketersediaan lahan, krisis lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air, kesenjangan infrastruktur dan kerusakan ekosistem pesisir.

Topografi dan Ketersediaan Lahan. Wilayah Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh topografi bergelombang hingga berbukit, dengan sekitar 85% wilayahnya memiliki kelerengan lebih dari 15%. Secara umum, wilayah ini terletak pada ketinggian antara 0 hingga lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan bagian barat laut memiliki elevasi tertinggi, yaitu lebih dari 500 mdpl. Kondisi topografi yang didominasi oleh perbukitan dan lereng curam ini menjadi kendala utama dalam aksesibilitas dan pengembangan infrastruktur, terutama di kawasan yang jauh dari pusat-pusat kota. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur menunjukkan bahwa jaringan jalan yang terbangun hingga tahun 2023 sebagian besar masih berupa jalan tanah atau kerikil, terutama di wilayah pedalaman, sehingga akses ke beberapa desa terpencil sangat terbatas, khususnya pada musim hujan.

Selain itu, satuan morfologi di wilayah ini meliputi dataran, kawasan karst, dan lereng terjal. Kawasan karst yang tersebar di beberapa bagian Kutai Timur, seperti di Kecamatan Sangkulirang, menyimpan potensi ekologi dan geologi yang signifikan, termasuk gua-gua prasejarah dan sumber air bawah tanah. Namun, wilayah karst ini juga menghadirkan tantangan pembangunan, mengingat sifatnya yang rapuh terhadap tekanan pembangunan berat. Di sisi lain, lereng-lereng terjal meningkatkan risiko erosi tanah dan longsor, yang sering kali berdampak pada pemukiman dan infrastruktur di sekitarnya. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur mencatat setidaknya 15 kejadian tanah longsor di tahun 2023, dengan mayoritas terjadi di wilayah pegunungan dan lereng curam.

Kondisi geografis ini menuntut perencanaan tata ruang yang lebih strategis dan inklusif, termasuk penguatan infrastruktur transportasi seperti jembatan gantung untuk

menghubungkan daerah-daerah terpencil, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan di kawasan karst. Dengan mengatasi tantangan ini, wilayah Kutai Timur memiliki peluang untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Krisis Lingkungan Hidup. Sebagian besar kawasan Kabupaten Kutai Timur menghadapi tekanan lingkungan yang signifikan akibat kegiatan pertambangan dan penggundulan hutan. Aktivitas pertambangan batu bara skala besar, seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang utama di wilayah ini, sering kali menciptakan kerusakan ekologis yang meluas, termasuk perubahan lanskap secara drastis, pencemaran air permukaan, dan degradasi tanah. Selain itu, penggundulan hutan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan aktivitas ilegal logging turut mempercepat laju deforestasi, yang menyebabkan meningkatnya erosi tanah, hilangnya tutupan hutan, dan gangguan terhadap habitat satwa liar yang dilindungi.

Salah satu kawasan yang sangat rentan terhadap dampak ini adalah wilayah Karst Kutai Timur, terutama di Kecamatan Sangkulirang dan sekitarnya. Kawasan karst ini memiliki peran penting dalam ekosistem, tidak hanya sebagai habitat unik bagi flora dan fauna endemik tetapi juga sebagai penyedia sumber daya air bawah tanah yang menjadi tumpuan bagi masyarakat lokal. Namun, eksplorasi yang tidak terkendali, baik untuk kegiatan tambang maupun pembangunan, mengancam keberlanjutan fungsi ekologisnya. Data dari kajian lingkungan tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 20% dari area karst Kutai Timur telah terganggu, dengan peningkatan risiko pencemaran dan kerusakan struktur geologi yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan karst sebagai cadangan air alami.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan industri tentang pentingnya menjaga ekosistem. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal sangat dibutuhkan agar eksplorasi sumber daya alam di Kutai Timur dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang.

Pengelolaan Sumber Daya Air. Kabupaten Kutai Timur memiliki Sungai Kedang Kepala sebagai sungai terpanjang di wilayah ini, dengan panjang mencapai 319 km yang melintasi berbagai kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Muara Wahau. Sungai ini menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat, baik untuk kebutuhan air minum, pertanian, maupun perikanan. Namun, meskipun sungai ini menyediakan potensi besar untuk pemenuhan kebutuhan air, distribusi air bersih di daerah ini masih menjadi masalah serius.

Keterbatasan infrastruktur pengelolaan air bersih yang memadai menjadi kendala utama, terutama di daerah pedesaan dan kawasan yang jauh dari pusat-pusat kota seperti Sangatta. Sebagian besar wilayah pedalaman Kutai Timur masih mengandalkan sumur gali dan sumber air sederhana lainnya yang seringkali tidak terjaga kebersihannya. Hal ini memengaruhi kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang

rentan tercemar oleh limbah pertambangan dan pengolahan lahan yang tidak ramah lingkungan.

Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur, hanya sekitar 30% dari total kebutuhan air bersih yang dapat dipenuhi melalui sistem penyediaan air minum yang layak. Sebagian besar desa masih kesulitan mendapatkan akses air bersih yang memenuhi standar kesehatan. Pembangunan infrastruktur air bersih yang terpusat dan merata di seluruh wilayah pedesaan menjadi tantangan besar, karena sebagian besar area tersebut sulit dijangkau oleh kendaraan berat dan membutuhkan teknologi yang tepat guna, seperti sistem pengolahan air berbasis komunitas atau penyaringan sederhana yang dapat dioperasikan secara mandiri oleh warga.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perencanaan dan investasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan air bersih yang lebih merata. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat juga sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang cukup, aman, dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya air yang berbasis pada prinsip konservasi dan keberlanjutan sangat penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air, seperti Sungai Kedang Kepala, agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Kesenjangan Infrastruktur. Sebagian besar daerah pedesaan di Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi tantangan besar terkait infrastruktur dasar yang belum memadai, seperti jalan yang rusak atau belum terhubung dengan baik, serta fasilitas umum yang terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan, seperti Sangatta, yang relatif lebih maju, dan daerah pedalaman yang sulit dijangkau.

Berdasarkan berbagai informasi, salah satu contoh konkret adalah keterlambatan pembangunan jembatan di Telen yang sangat dinantikan oleh masyarakat setempat. Infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan dan jembatan penghubung antar wilayah, akan sangat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa, yang sebagian besar bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, mengurangi biaya logistik, dan akhirnya mendorong perekonomian kerakyatan yang lebih merata

Pemerintah daerah telah mencatatkan beberapa program perbaikan, namun realisasi di lapangan masih menghadapi kendala yang perlu segera diatasi untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Hal ini termasuk peningkatan konektivitas dan penyediaan fasilitas dasar di pedesaan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.

Kerusakan Ekosistem Pesisir. Wilayah pesisir Kutai Timur menghadapi ancaman serius terhadap lingkungan, terutama dari abrasi pantai dan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas industri dan perikanan yang tidak terkelola dengan baik. Kawasan pesisir di sekitar Sangkulirang dan Sandaran menjadi area yang sangat rentan

terhadap kerusakan ini, karena aktivitas yang terus berkembang tanpa pengelolaan yang tepat.

Abrasi pantai yang terjadi disebabkan oleh tingginya gelombang dan erosi yang terus berlangsung, yang mengancam daratan pesisir yang dihuni oleh masyarakat dan tempat berkembangnya ekosistem pesisir. Selain itu, kegiatan perikanan yang tidak terkendali juga turut berkontribusi terhadap pencemaran laut, seperti pembuangan sampah plastik, limbah industri, dan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses penangkapan ikan. Pencemaran ini merusak kualitas air dan mengancam keberlangsungan hidup biota laut yang ada di daerah tersebut.

Data Badan Lingkungan Hidup Kutai Timur menunjukkan bahwa pencemaran laut di kawasan pesisir Sandaran telah mencapai titik kritis, dengan peningkatan jumlah sampah plastik yang ditemukan di sepanjang pantai. Aktivitas tambang yang tidak ramah lingkungan juga memberi dampak buruk, meningkatkan kandungan logam berat yang dapat merusak ekosistem laut. Tanpa adanya upaya pemulihan dan pengelolaan yang lebih baik, kerusakan ini bisa semakin parah dan mengancam kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi tantangan besar meskipun ada peningkatan dalam upaya penanganannya. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat, jumlah timbulan sampah juga semakin meningkat. Pada tahun 2022, tingkat penanganan sampah di Kutai Timur tercatat sebesar 40,52%, namun pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 58,50%. Meskipun ada peningkatan, pencapaian ini masih belum memadai, mengingat volume sampah yang terus berkembang, terutama di kawasan perkotaan seperti Sangatta yang menjadi pusat administratif dan ekonomi.

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas pengolahan yang memadai, serta terbatasnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Di daerah pedesaan dan pesisir, infrastruktur pengelolaan sampah sering kali tidak tersedia, sementara masyarakat yang tinggal di daerah tersebut seringkali membuang sampah secara sembarangan, yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Penanganan sampah yang tidak menyeluruh ini juga mengakibatkan penumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan sementara yang tidak terkelola dengan baik, sehingga menyebabkan polusi udara dan mengancam kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah telah mengupayakan beberapa solusi, seperti pembangunan fasilitas daur ulang dan tempat pembuangan sampah sementara yang lebih efisien, serta program edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Namun, upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik antar berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program

pemilahan sampah dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan.

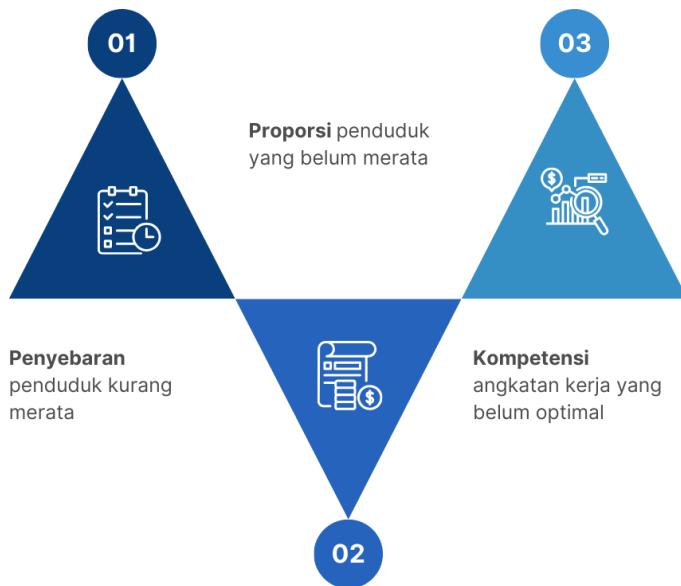
Permasalahannya adalah karena sampai saat ini belum semua kecamatan di Kabupaten Kutai Timur memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA yang tersebar baru ada di Kecataman Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Bengalon, Sangkulirang, Rantau Pulung dan Kaliorang.

Masih kurang optimalnya penataan RTH khususnya di wilayah perkotaan.

Pembangunan infrastruktur yang intensif oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belakangan ini telah menarik perhatian berbagai pihak. Namun, dampaknya terhadap lingkungan juga menjadi sorotan, terutama berkaitan dengan penebangan pohon-pohon untuk membuka jalan bagi pembangunan jalan dan drainase. Salah satunya di sepanjang jalan Yos Sudarso Sangatta, dimana masih sangat kurang ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), yang berfungsi sebagai paru-paru Kota Sangatta untuk dapat menyerap karbon (CO) akibat buangan pembakaran kendaraan khususnya kendaraan pertambangan batu bara yang melintasi jalan tersebut, serta debu dari truk pengangkut pasir tanpa penutup.

B. Demografi

Gambar 3. 2 Permasalahan Demografi Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Permasalahan aspek demografi mencakup: peningkatan jumlah penduduk, persebaran pendudukan dan kompetensi angkatan kerja.

Penyebaran penduduk kurang merata, ditandai dengan Kecamatan Sangatta Utara memiliki komposisi penduduk sebesar 29,02% terhadap total penduduk selama 2019–2023, sementara kecamatan seperti Long Mesangat dan Busang masing-masing hanya berkontribusi 1,72% dan 1,38%. Ketimpangan ini mencerminkan konsentrasi penduduk di pusat pemerintahan dan ekonomi, sementara daerah dengan populasi

rendah menghadapi keterbatasan layanan publik, stagnasi ekonomi, dan minimnya infrastruktur.

Proporsi penduduk yang belum merata. Variasi yang mencolok dalam penyebaran kepadatan penduduk 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur tercermin dengan jelas. Kecamatan Sangatta Utara menonjol dengan proporsi penduduk tertinggi mencapai 29,19%, sementara Kecamatan Busang hanya memiliki proporsi penduduk terendah yaitu sebesar 1,38%. Situasi ini memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan dan perkembangan kota, termasuk kesenjangan dalam akses fasilitas umum, disparitas kualitas hidup antar wilayah, serta potensi masalah sosial dan tekanan lingkungan di daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi.

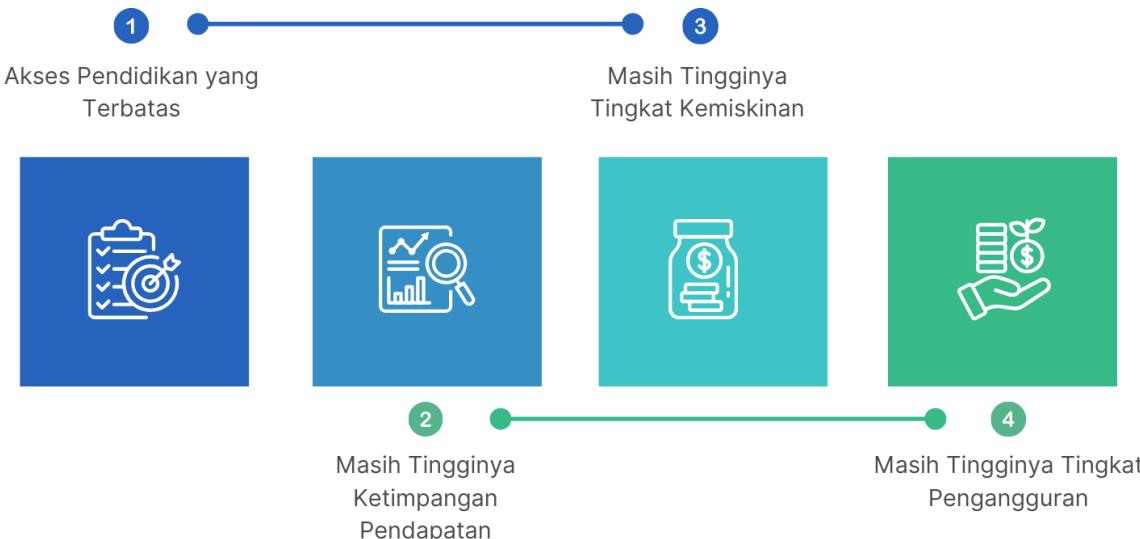
Kompetensi angkatan kerja yang belum optimal merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Timur. Banyak tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur masih belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja saat ini, sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini termasuk kurangnya pelatihan vokasional dan pendidikan praktis yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Sistem pendidikan yang ada sering tidak sejalan dengan permintaan pasar kerja, mengakibatkan ketidakcocokan antara kualifikasi pekerja dan harapan industri. Diperlukan dorongan lebih besar dalam meningkatkan akses terhadap program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan agar angkatan kerja menjadi lebih kompetitif dan siap menghadapi perkembangan dunia.

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk mencapai sejumlah tujuan strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi daerah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan berdasarkan capaian kinerja. Permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat diuraikan sebagai berikut:

A. Kesejahteraan Ekonomi

Gambar 3. 3 Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesejahteraan ekonomi mencakup beberapa isu seperti akses Pendidikan yang terbatas, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan pengangguran.

Akses Pendidikan yang Terbatas. Akses terhadap pendidikan di daerah pedesaan dan pesisir masih terbatas, dengan banyaknya sekolah yang kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas. Di daerah seperti Kecamatan Sandaran dan Kecamatan Kongbeng, banyak sekolah yang hanya memiliki fasilitas minimal dan jarak antar sekolah yang cukup jauh, mengharuskan anak-anak untuk menempuh perjalanan yang panjang. Hal ini menyebabkan angka putus sekolah yang cukup tinggi, terutama di kalangan anak-anak di usia remaja. Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah di beberapa kecamatan pedesaan masih rendah, hanya sekitar 60-70%, sementara di daerah perkotaan seperti Sangatta, angka APK mencapai lebih dari 90%.

Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu permasalahan utama. Ketimpangan pendapatan antara penduduk digambarkan melalui indikator rasio gini. Pada tahun 2017, Rasio Gini Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,288, mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,346 pada tahun 2019. Pada tahun 2022 Rasio Gini Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan hingga menjadi 0,304, namun meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,336. Tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 masih diatas rasio gini Provinsi Kalimantan Timur (0,322), namun berada dibawah nasional (0,388).

Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan. Tingkat kemiskinan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun secara persentase, namun meningkat secara jumlah. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur

menunjukkan persentase sebesar 9,06% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27.200 jiwa. Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebesar 9,55% dan 9,81% atau sebanyak 36.980 jiwa dan 37.780 jiwa, yang diakibatkan pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan sebesar 0,22% dari sebesar 9,28% menjadi 9,06%, namun secara jumlah terjadi peningkatan sebanyak 200 jiwa, dari sebanyak 36.840 jiwa menjadi 37.040 jiwa.

Walaupun tingkat kemiskinan Kutai Timur menurun pada tahun 2023 menjadi 9,06%, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 6,10%, tetapi sudah berada diatas capaian nasional yang baru mencapai 9,36%.

Masih Tingginya Tingkat Pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada periode 2018-2023 mengalami lonjakan signifikan dimana pada tahun 2018 mencapai 1,12%, sementara pada tahun 2020, 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 5,45%, 5,35% dan 6,48% sebagai akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi sebesar 5,93%. TPT Kabupaten Kutai Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dimana capaian tahun 2023 sebesar 5,31% dan nasional sebesar 5,32%.

B. Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Gambar 3. 4 Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesejahteraan sosial budaya mencakup beberapa isu seperti perlindungan anak, pemberdayaan gender, peran pemuda dalam pemajuan kebudayaan serta penegakan peraturan daerah.

Perlindungan anak belum optimal. Terlihat melalui capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2022 di Kutai Timur sebesar 62,26 yang masih dibawah nasional (69,12). IPA merupakan indikator komposit yang mencerminkan sejauh mana hak-hak anak dipenuhi dan dilindungi di suatu wilayah disusun berdasar 5 (lima) dimensi yang mengevaluasi aspek-aspek berbeda dari perlindungan anak, dimana capaian yang masih rendah adalah Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan serta Indeks D4 Pendidikan,

Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Perlu ada investasi lebih dalam mengakui dan melindungi hak-hak sipil anak-anak di Kutai Timur, seperti identitas hukum, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi, serta peningkatan pendidikan dan pengembangan fasilitas untuk waktu luang dan kegiatan budaya yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan anak.

Masih Rendahnya Pemberdayaan Gender, ditunjukkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kutai Timur berfluktuasi pada periode 2020-2023. Pada tahun 2020 IDG Kabupaten Kutai Timur sebesar 55,72, mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 2,72 poin menjadi 53,00. Penyebab menurunnya IDG tersebut antara lain karena faktor berkurangnya sumbangsih perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi.

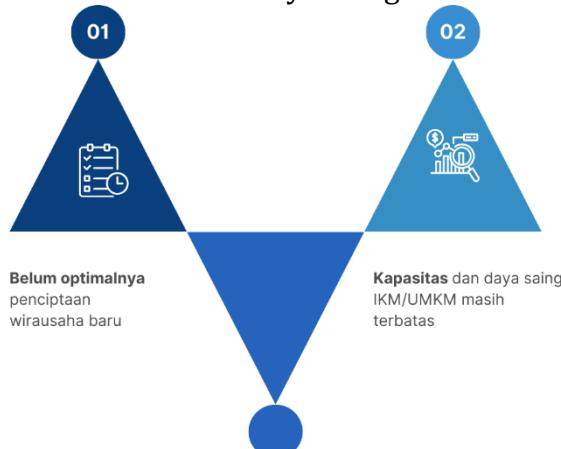
Nilai IDG Kabupaten Kutai Timur yang lebih rendah jika dibandingkan IDG Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 68,96 dan IDG Nasional yang sebesar 76,90, memiliki arti bahwa tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur lebih rendah dari provinsi dan nasional.

Masih rendahnya peran pemuda dalam upaya pelestarian seni dan budaya, dapat dilihat berdasarkan ketertarikan generasi muda Kutai Timur terhadap seni dan budaya masih rendah. Sementara generasi muda merupakan harapan masa depan bangsa, calon pemimpin masa depan, oleh karena itu di pundak generasi muda lah nasib suatu bangsa dipertaruhkan. Tanpa keterlibatan generasi muda, keberlangsungan dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan leluhur akan terputus dan tidak dapat diwariskan kepada generasi setelahnya. Oleh sebab itu generasi muda harus menjadi pelaku utama dalam mewariskan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam pelestarian budaya.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Ekonomi

Gambar 3. 5 Permasalahan Daya Saing Ekonomi Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Permasalahan daya saing Kabupaten Kutai Timur meliputi penciptaan wirausaha baru, serta kapasitas dan daya saing IKM/UMKM.

Belum optimalnya penciptaan wirausaha baru, diukur melalui rasio kewirausahaan di Kutai Timur berada pada angka 3,47%, yang masih jauh dari target nasional. Dalam rangkaian upaya nasional Indonesia untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 12 persen guna mencapai status negara maju pada tahun 2045, Kabupaten Kutai Timur memiliki peran penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Kutai Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan inovatif.

Kapasitas dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas. Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di Kutai Timur. Selain mengalami perkembangan yang baik, sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan melalui pembukaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan devisa, pendapatan dari pajak penghasilan dan penjualan, serta kesempatan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Meski jumlah UMKM meningkat dari 7.542 pada tahun 2022 menjadi sebanyak 12.050 pada tahun 2023, namun masih harus dilakukan peningkatan kapasitas dan daya saingnya.

B. Daya Saing Manusia

Gambar 3. 6 Permasalahan Daya Saing Manusia



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Permasalahan daya saing manusia di Kabupaten Kutai Timur meliputi komponen pembentuk IPM, keterkaitan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, partisipasi angkatan kerja dan komponen pembentuk IPM.

Masih kurangnya keterkaitan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan. Pendidikan, sebagai faktor kunci dalam penyediaan tenaga kerja terampil, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing kota di masa depan. Hingga kini, kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur masih tergolong rendah, dengan profil angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah. Data dari BPS menunjukkan bahwa hanya 12,30% tenaga kerja di Kutai Timur yang memiliki

pendidikan Diploma atau Universitas. Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Selain itu, pelatihan kerja yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

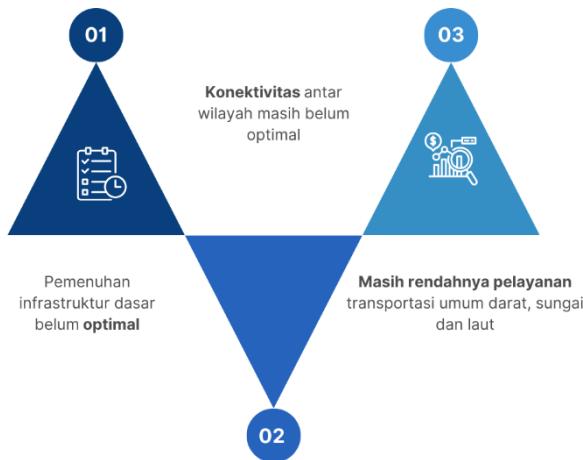
Menurunnya partisipasi angkatan kerja, mengindikasikan besarnya persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas usia kerja yang aktif secara ekonomi menurun. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kutai Timur pada tahun 2021 mencapai 68,96%, mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 67,78% dan 66,22%. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja setiap tahunnya, sehingga pemerintah daerah perlu mempersiapkan berbagai lapangan pekerjaan dan membuka banyak kesempatan untuk generasi usia produktif tersebut.

Masih Rendahnya Komponen Pembentuk IPM, terutama Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kualitas sumberdaya manusia (SDM) di Kabupaten Kutai Timur sudah baik, ditunjukkan oleh indikator IPM tahun 2023 yang mencapai 75,33. Capaian tersebut masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 78,20 namun sudah diatas capaian nasional yang sebesar 74,39. IPM Kutai Timur yang tinggi didukung oleh indikator yang menggambarkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dari ketiga komponen tersebut, data capaian angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 yang mencapai 73,57 tahun berada pada posisi ke-4 se-Kalimantan Timur. Masih rendahnya AHH masyarakat Kutai Timur menunjukkan derajat kesehatan masih membutuhkan peningkatan lagi.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 sebesar 9,45 tahun masih dibawah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,99 tahun dan masih dibawah Kabupaten Berau (9,56), Kota Bontang (10,92), Kota Samarinda (10,93) dan Kota Balikpapan (10,93). Angka RLS ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kutai Timur hanya menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Capaian RLS yang relatif rendah ini perlu ditingkatkan melalui partisipasi sekolah penduduk usia SD-SLTA dan tidak putus sekolah.

C. Daya Saing Infrastruktur

Gambar 3. 7 Permasalahan Daya Saing Infrastruktur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur meliputi pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, serta pelayanan transportasi sungai dan darat.

Pemenuhan infrastruktur dasar belum optimal. Pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran air, jalan, jembatan, drainase, dan penyediaan air minum perpipaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Kabupaten Kutai Timur menghadapi sejumlah tantangan terkait infrastruktur dasar, mencakup kerusakan jalan yang signifikan, sistem drainase yang tidak optimal, masalah dalam penyediaan air minum, serta pengelolaan air limbah yang belum memadai.

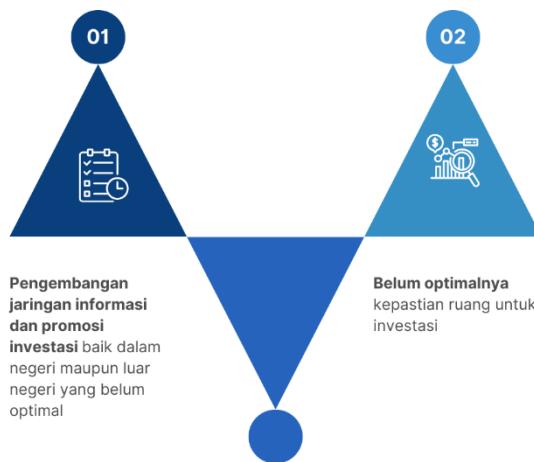
Pada tahun 2023, persentase jalan kabupaten kondisi mantap baru mencapai 27,93% atau sepanjang 140,23 km dari total jalan kabupaten sepanjang 502,1 km, sisanya sepanjang 361,86 km masuk kondisi tidak mantap. Capaian Akses Air Minum baru mencapai 58,10%, sementara cakupan layanan Perumdam Tirta Tuah Benua terhadap jumlah penduduk wilayah teknis pelayanan PDAM (Kota Sangatta) sebesar 74,25%. Untuk persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik baru tercapai sebesar 5,47%.

Konektivitas antar wilayah masih belum optimal. Gambaran keadaan konektivitas di Kutai Timur saat ini masih belum sepenuhnya optimal. Keterkaitan perdagangan, produksi dan transfer antar wilayah masih sangat kecil dibanding keterkaitan ekonomi intrawilayahnya. Kerusakan beberapa ruas jalan yang menghubungkan antar kecamatan masih terjadi hampir sepanjang tahun terutama dimusim penghujan. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah akan menggerakkan perekonomian Kutai Timur dan mempercepat pemerataan kesejahteraan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, sehingga kemudian secara tidak langsung akan mengurangi kesenjangan.

Masih rendahnya pelayanan transportasi umum darat, sungai dan laut. Pelayanan transportasi darat di Kutai Timur masih belum optimal dikarenakan keterkaitan dengan akses jalan yang menghubungkan antar wilayah di kecamatan maupun perdesaan masih banyak yang belum memadai. Angkutan sungai masih memiliki sejumlah keunggulan, dimana dengan tersedianya aliran secara alami, biaya pengembangan jaringan lebih rendah (5-10%) dari angkutan jalan dan rel, dan biaya pemeliharaan rendah (20%) dari jaringan jalan. Lalu, keselamatan lebih tinggi dibandingkan angkutan jalan, bahan bakar lebih efisien (3,7%) dari angkutan jalan, dampak lingkungan lebih rendah (5,38%) dari angkutan jalan, biaya angkut lebih ekonomis untuk angkutan barang jarak jauh (2,86%) dari angkutan jalan. Sementara angkutan laut, perlu ditingkatkan untuk kelancaran barang, jasa serta logistik dari dan ke Kutai Timur. Percepatan terhadap operasional Pelabuhan Kenyamukan dan Pelabuhan Maloy perlu dilakukan untuk memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan ekonomi Kutai Timur.

D. Daya Saing Iklim Investasi

Gambar 3. 8 Permasalahan Daya Saing Iklim Investasi



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Permasalahan daya saing investasi di Kabupaten Kutai Timur meliputi pengembangan jaringan informasi dan promosi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang belum optimal dan kepastian ruang untuk investasi.

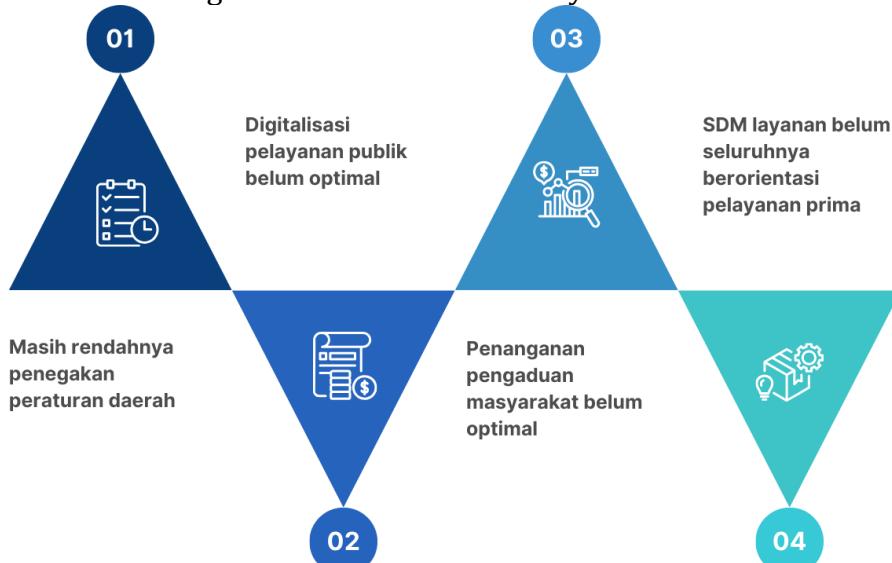
Pengembangan jaringan informasi dan promosi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang belum optimal. Tantangan dalam meningkatkan daya saing iklim investasi di Kabupaten Kutai Timur meliputi kebutuhan akan data yang akurat, lengkap, dan mudah diakses bagi investor potensial untuk membuat keputusan yang tepat. Seringkali, data dan informasi yang disajikan kurang terperinci, sehingga menyulitkan calon investor dalam menilai potensi dan peluang investasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan kualitas penyajian data dan informasi untuk menarik lebih banyak investasi. Promosi investasi yang dilakukan media online berbasis elektronik baik dalam bentuk *zoom meeting*

maupun virtual masih belum intens dan optimal, dan diperlukan upaya dalam menambah mitra yang dapat meningkatkan pengembangan pelaksanaan promosi investasi.

Belum optimalnya kepastian ruang untuk investasi. Investasi membutuhkan alokasi ruang dan infrastruktur pendukung yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah untuk memberikan kepastian berusaha serta efisiensi dalam penyediaan infrastruktur wilayah. Saat ini, alokasi ruang untuk investasi belum sepenuhnya diimbangi dengan layanan infrastruktur pendukung, sehingga mengurangi daya saing investasi wilayah. Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi, sangat penting untuk menarik dan mempertahankan investor, serta memastikan investasi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi Kutai Timur.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Gambar 3.9 Ringkasan Permasalahan Pelayanan Umum Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Tata kelola pemerintahan merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga tata kelola pemerintahan yang efektif memainkan peran sentral dalam kemajuan dan keberlanjutan Kabupaten Kutai Timur. Dalam penyelenggaranya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam penyediaan layanan publik berkualitas,

seperti permasalahan dalam digitalisasi pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan SDM layanan.

Masih rendahnya penegakan peraturan daerah, terindikasi dengan belum optimalnya kerja sama perangkat daerah, instansi terkait dan penegak hukum dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, dimana capaian tahun 2023 baru mencapai 65%. Upaya penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP perlu lebih ditingkatkan, salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang, berkoordinasi dengan instansi lain, serta melakukan razia atau giat operasi penegakan peraturan daerah.

Digitalisasi pelayanan publik belum optimal. Meski Kabupaten Kutai Timur berhasil meningkatkan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 1,03 pada tahun 2021 dengan predikat "Kurang", menjadi 2,79 pada tahun 2023 dengan predikat "Baik", digitalisasi layanan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya yaitu: 1) belum meratanya pemahaman Perangkat Daerah dalam implementasi SPBE, 2) terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam implementasi SPBE, dan 3) belum optimalnya strategi diseminasi atau promosi aplikasi dan layanan. Oleh karena itu, Kabupaten Kutai Timur perlu meningkatkan penerapan manajemen SPBE melalui penerapan secara menyeluruh pada manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan, serta audit infrastruktur dan audit keamanan SPBE.

Penanganan pengaduan masyarakat belum optimal. Penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat adalah elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah. Mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan masyarakat memastikan bahwa isu-isu yang dihadapi warga dapat diselesaikan dengan cepat dan transparan, serta menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Meski Pemerintah Kutai Timur telah meluncurkan aplikasi LAPOR!, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, namun hingga saat ini, masih terdapat keluhan bahwa sebagian laporan pengaduan dari masyarakat belum ditindaklanjuti secara optimal. Perbaikan serius harus dilaksanakan agar setiap warga dapat dengan mudah mengadukan keluhan atau permasalahan mereka kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan mendapatkan tanggapan yang cepat serta solusi yang tepat. Peningkatan transparansi dalam proses penanganan pengaduan serta pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi langkah signifikan untuk mempercepat respons dan memastikan setiap keluhan direspon dengan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat melihat bagaimana pengaduan mereka ditangani, sementara teknologi digital memungkinkan pengelolaan pengaduan yang lebih efisien dan sistematis, memastikan bahwa tidak ada keluhan yang terlewatkan atau diabaikan.

SDM layanan belum seluruhnya berorientasi pelayanan prima. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna

layanan sebagai tugas utama, dimana pelayanan yang berorientasi pada *customer service area* adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pelayanan prima yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip 3A, yaitu *attitude, attention* dan *action*. Walau telah ada upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, masih ada petugas pelayanan yang kurang terlatih dan belum memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya pelayanan yang responsif dan proaktif, dimana mempertimbangkan kualitas layanan yang diberikan dan dampaknya pada kepuasan masyarakat. Sehingga evaluasi menyeluruh dan pengembangan kompetensi SDM merupakan agenda penting yang harus dilakukan, disamping peningkatan upaya membangun budaya organisasi dengan prioritas pelayanan prima.

3.2. Isu Sesuai Konteks

3.2.1. Isu Global

Gambar 3. 10 Ringkasan Isu Global



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Perubahan Iklim. Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan kondisi yang menandakan kerusakan planet bumi. Pemanasan global merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Berbagai akibat yang ditimbulkan dari adanya pemanasan global adalah hilangnya gletser, punahnya berbagai jenis hewan dan juga berpengaruh terhadap hasil pertanian. Berbagai upaya dan kebijakan ditempuh beberapa negara untuk mengurangi dampak pemanasan global tersebut. Di tingkat internasional, beberapa negara sudah menjalankan kebijakan tersebut, hal ini sejalan dengan tujuan deklarasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan keberlanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yaitu agenda pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan, yang kemudian dibagi ke dalam 169 target. Semua target direncanakan tercapai sampai dengan tahun 2030, dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Isu tentang pemanasan global dan pembangunan ekonomi berkelanjutan sangat terkait dengan tujuan-tujuan SDGs. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi letak geografis strategis dan ditambah lagi dengan bonus demografinya. Dengan kondisi lingkungan saat ini, Indonesia tentunya juga berupaya mengatasi kerusakan lingkungan, sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam upaya global ini, dimana telah menetapkan target mencapai nol emisi karbon (*net zero emission*) pada tahun 2060, menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 31,89% pada tahun 2030, serta mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 44% pada tahun 2030. Oleh karena itu, perubahan iklim menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian penuh dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Geopolitik dan geoekonomi. Persaingan dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung yaitu di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut China Selatan-Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Perkembangan konflik di kawasan Laut China Selatan menunjukkan dinamika menarik antara pihak yang bersengketa maupun pihak yang memiliki kepentingan tertentu di kawasan tersebut. Karena posisi strategis Laut China Selatan, maka banyak negara berkepentingan terhadap kawasan Laut China Selatan, termasuk Amerika Serikat, China dan Indonesia. Strategi *rebalancing policy* Amerika Serikat yang ditunjukkan dengan perubahan nama komando menjadi US-INDOPACOM, China dengan klaim *nine dash-line* dan *Belt Road Initiative* (BRI) serta kepentingan ZEE Laut Natuna Utara Indonesia memunculkan ketegangan dan konflik di Kawasan Laut China Selatan.

Demografi global. Proyeksi *United Nations* / Perserikatan Bangsa-bangsa menunjukkan bahwa populasi global pada tahun 2030 akan mencapai 8,5 miliar dan pada tahun 2045 meningkat menjadi 9,5 miliar. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh penurunan angka kematian dan peningkatan angka harapan hidup saat lahir. Struktur demografi, seperti peningkatan jumlah penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda, akan menimbulkan tantangan dalam penyediaan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga populasi dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, dengan 95% dari pertumbuhan ini terjadi di negara-negara dengan ekonomi berkembang. Penduduk perkotaan di Asia juga diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 1,7 kali lipat.

Disrupsi Teknologi. *Digital Disruption* atau Disrupsi Teknologi Digital adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Hadirnya *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan adalah sistem kerja perangkat digital yang mampu mendeteksi, mengolah data, dan menyelesaikan masalah. Data dari artificial intelligence itu nantinya akan diolah untuk membantu merumuskan, memutuskan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas

pemerintahan, misalnya melalui penggunaan kecerdasan buatan dan analitik data, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perdagangan Internasional. Kebijakan perdagangan internasional memiliki manfaat serta dampak terhadap ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Salah satu contoh manfaat perdagangan internasional adalah meningkatkan GDP atau *Gross Domestic Product* suatu negara. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Manfaat lain yang bisa didapat dari adanya perdagangan internasional adalah membuka kesempatan bagi suatu negara agar bisa memanfaatkan sumber daya negara lain secara proporsional.

Berdasarkan negara partisipasinya, perdagangan internasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, dan perdagangan internasional multilateral. Perdagangan internasional bisa dalam bentuk impor ekspor, *package deal*, konsinyasi, *border crossing* dan sebagainya. Dampak negatif perdagangan internasional adalah sulitnya UMKM untuk dapat bersaing di pasar. Keterbatasan modal seringkali menjadi masalah utama bagi para pemilik industri kecil. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional akan berpotensi memperkecil ruang berkembang industri kecil.

3.2.2. Isu Nasional

Gambar 3.11 Ringkasan Isu Nasional



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial, dan Transformasi Tata Kelola.

Transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola adalah dimensi krusial dalam evolusi dan perkembangan suatu negara. Potensi transformasi ekonomi mengacu pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara, termasuk pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan, atau dari sektor ekonomi tradisional ke sektor berbasis teknologi. Transformasi ekonomi ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing global.

Transformasi sosial merujuk pada perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Transformasi ini melibatkan proses modernisasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi yang memengaruhi dinamika sosial suatu negara. Selain itu, transformasi sosial juga terkait dengan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kesenjangan sosial, serta upaya mempromosikan inklusivitas dalam masyarakat. Perubahan dalam transformasi sosial menciptakan tantangan kompleks yang memerlukan adaptasi kebijakan dan intervensi yang tepat.

Transformasi tata kelola mencakup perubahan dalam sistem pengelolaan pemerintahan dan kebijakan. Ini melibatkan reformasi dalam tata kelola ekonomi, politik, dan publik secara umum. Transformasi ini berfokus pada upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan tata kelola juga sering menjadi kunci untuk mengatasi korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

Transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola saling terkait dan saling memengaruhi dalam membentuk masa depan suatu negara. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi suatu bangsa, serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan positif.

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor eksport perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI Jakarta diperkirakan mencapai 90% dari total keseluruhan belanja.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara baru di Provinsi Kalimantan Timur membawa dampak besar terhadap kebutuhan dan isu-isu yang muncul di Kabupaten Kutai Timur. Pertama-tama, kebutuhan infrastruktur menjadi fokus utama seiring relokasi ibu kota. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya perencanaan yang matang untuk memastikan pengembangan infrastruktur yang memadai dan mampu menopang pertumbuhan kota serta kebutuhan penduduk yang semakin bertambah. Dari sisi transportasi hingga sumber daya energi, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Kalimantan Timur.

Komitmen pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia termasuk salah satu dari negara-negara yang berkontribusi untuk mencapai goals yang telah dicanangkan sebelum tahun 2030. Sebelumnya, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai wujud peran aktif pemerintah dalam mencapai SDGs. Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai isu strategis nasional karena mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan dan stabilitas nasional. Dalam aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai isu strategis karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global negara tersebut.

Potensi penurunan struktur penduduk usia produktif. Bonus demografi sering dipahami secara simplistik yang mana ketika proporsi usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif maka otomatis pertumbuhan ekonomi akan mengalami percepatan. Dari kacamata makro ekonomi pandangan ini memang tidak keliru. Tapi asumsi yang melandasi sangat problematik yaitu penduduk usia produktif mampu

merealisasikan potensinya secara penuh. Dalam realitas, kelompok usia produktif (15-65 tahun) tidak memiliki potensi atau kapasitas yang sama. Adapun kapasitas produksi mensyaratkan seperangkat skill dan ketrampilan yang dimiliki.

Skill dan ketrampilan itu sendiri baru dapat terealisasi ketika ada infrastruktur yang menunjang serta terdapat peluang aktivitas ekonomi yang prospektif. Dua hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sektor-sektor industri yang kemudian membentuk struktur perekonomian. Dengan demikian bonus demografi baru memiliki dampak yang signifikan ketika terjadi penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Jika kita melihat data ternyata sekitar 60 persen pekerja Indonesia beraktivitas di sektor informal. Sektor ini memiliki karakter yang khas misalnya skala bisnis yang kecil, manajemen yang lemah, dan penetrasi teknologi yang rendah. Dengan karakter seperti itu tidak mengherankan apabila sektor ini menjadi sangat fleksibel dan berada di luar jangkauan regulasi. Inilah yang membuat para pekerjanya sering diupah tidak sesuai standar, tidak memperoleh jaminan sosial, serta rentan menjadi pengangguran.

Pemenuhan swasembada pangan nasional. Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi rakyat. Negara berkewajiban untuk menyediakan pangan bagi rakyatnya guna memenuhi konsumsi pangan mereka. Setiap tahunnya persoalan pangan dihadapkan pada adanya peningkatan jumlah penduduk dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi pangan harus terus dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut juga harus dilakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi.

Pemenuhan swasembada pangan nasional menjadi fokus utama di Indonesia mengingat pentingnya ketahanan pangan sebagai aspek strategis untuk kesejahteraan rakyat. Di tengah potensi pertumbuhan sektor pertanian yang besar, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai swasembada pangan. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya alam mempengaruhi produktivitas pertanian dan menyulitkan akses masyarakat terhadap pangan yang memadai.

Percepatan penurunan kemiskinan, menjadi agenda penting bagi banyak negara, khususnya Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36%. Padahal, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5-7,5%. Kemiskinan bukan hanya berhubungan dengan masalah finansial, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Faktor-faktor kompleks seperti ketidaksetaraan akses dan distribusi sumber daya, serta ketidakpastian ekonomi, menjadi hambatan signifikan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan inklusivitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi penting agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan ekonomi. Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama di tengah dinamika global yang berubah

dengan cepat dan fluktuasi ekonomi yang dapat berdampak pada kelompok-kelompok rentan.

Percepatan penghapusan stunting, menjadi prioritas kesehatan masyarakat, dimana merupakan kondisi gagalnya pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Tingkat stunting masih cukup tinggi, yang mengindikasikan tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak-anak di Indonesia. Permasalahan stunting melibatkan kompleksitas aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Belum meratanya akses terhadap gizi, pendidikan, dan layanan kesehatan di berbagai wilayah dan kelompok sosial menjadi salah satu kendala utama. Hal ini kemudian melibatkan berbagai variabel seperti ketersediaan pangan, dan sanitasi, menjadi penting untuk merancang intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Middle Income Trap. Saat puncak bonus demografi terjadi tetapi sebagian besar pekerja berada di sektor informal maka salah satu konsekuensi yang muncul adalah produktivitas yang rendah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan optimal. Pada akhirnya Indonesia akan gagal menjadi negara maju dan mengalami apa yang disebut *middle-income trap* (jebakan negara berpenghasilan menengah). Artinya Indonesia tidak mampu berkompetisi dengan negara-negara lain dalam menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi.

Kondisi tersebut tentu akan membuat tingkat kesejahteraan penduduk merosot. Salah satu indikatornya adalah daya beli masyarakat yang menurun. Apabila pemerintah tidak memiliki kebijakan serta mekanisme pendistribusian kekayaan yang efektif maka ketimpangan pasti akan meningkat. Efek samping dari ketimpangan ekonomi adalah angka pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas yang tinggi.

3.2.3. Isu Regional

Gambar 3. 12 Ringkasan Isu Regional Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Pulau Kalimantan dikenal sebagai salah satu sumber energi yang menopang perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya pemerataan hasil pembangunan masih menjadi permasalahan utama di kawasan ini, baik pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi maupun sumber daya manusia (SDM). Dibidang infrastruktur, konektivitas jalur darat antar provinsi di Kalimantan belum sepenuhnya memadai, terutama jalur darat antara provinsi Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat. Jalur perhubungan udara juga belum terkoneksi sepenuhnya.

Supply bahan kebutuhan pokok di Kalimantan juga sangat tergantung dari pulau lain bahkan negara lain. Kebutuhan bahan makanan pokok selama ini tergantung dari Jawa dan Sulawesi. Demikian juga kebutuhan barang-barang hasil industri. Di kawasan perbatasan dengan Malaysia, yaitu di wilayah Utara Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah dan wilayah Barat Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, transaksi perdagangan secara ilegal masih terjadi. Hal ini tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan kepada masyarakat karena pertimbangan efisiensi dan ekonomi. Bahkan di Kalimantan Barat, pasokan energi listrik masih disuplai dari Malaysia.

Pembagian peran wilayah Kalimantan sebagai Mitra IKN membawa dampak strategis dalam mengarahkan pembangunan ekonomi di pulau Kalimantan. Penetapan peran masing-masing wilayah memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan menjadi kunci untuk memastikan kesuksesan IKN. Selain itu, diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan pembagian peran ini sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala nasional di Pulau Kalimantan menjadi strategi untuk mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing regional. Identifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat berkembang dengan pesat perlu didukung oleh kebijakan yang mendukung investasi dan penelitian serta pengembangan. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan perencanaan wilayah yang terpadu, melibatkan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat lokal untuk mencapai sinergi yang optimal.

Penguatan peran Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Pulau Kalimantan memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan yang penting untuk keseimbangan ekologis global. Upaya perlindungan dan rehabilitasi lingkungan harus diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan, melainkan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

3.2.4. Isu Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3. 13 Ringkasan Isu Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Isu strategis pertama yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Kesenjangan-kesenjangan yang masih dijumpai perlu diatasi untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Peningkatan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keahlian menjadi krusial untuk mengatasi isu ini.

Kesenjangan kualitas SDM dan meningkatkan daya saing juga harus dilihat dari perspektif ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai provinsi dengan potensi ekonomi yang besar, investasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor-sektor kunci di Kalimantan Timur. Penguatan

keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, mitigasi yang komprehensif terhadap isu kesenjangan kualitas SDM dan peningkatan daya saing memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Program-program pelatihan dan pendidikan perlu didesain sesuai dengan kebutuhan industri lokal, nasional dan global, dengan memperhatikan inovasi dan perkembangan teknologi. Provinsi Kalimantan Timur perlu mengambil contoh dan belajar dari praktik-praktik baik di tingkat nasional maupun internasional yang telah dilakukan. Studi banding dengan daerah atau negara yang telah berhasil mengatasi isu kesenjangan kualitas SDM dapat memberikan wawasan dan strategi implementasi yang lebih tepat. Selain itu, peran aktif lembaga riset dan akademisi dalam menyediakan data dan analisis mendalam juga akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Secara umum, perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dan inklusif perlu diimplementasikan dalam naskah RPJDP ini untuk menangani isu kesenjangan kualitas SDM dan peningkatan daya saing. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil mesti mencakup aspek-aspek seperti akses pendidikan yang merata, dukungan untuk penelitian dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai. Dengan demikian, Provinsi Kalimantan Timur dapat memastikan bahwa SDM-nya siap bersaing dan berkontribusi secara optimal pada pembangunan ekonomi dan sosial di masa mendatang.

Pemerataan Pembangunan Wilayah. Isu strategis kedua yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemerataan pembangunan wilayah. Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur masih cukup tinggi yakni mencakup disparitas ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap pelayanan publik di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Fenomena ini memperlihatkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan, yang bisa berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk pemerataan antarwilayah menjadi esensial agar pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya untuk menanggulangi kesenjangan antarwilayah dapat menggunakan perspektif inklusivitas pembangunan. Kesenjangan yang tinggi dapat menyebabkan sebagian wilayah terpinggirkan dan kesulitan mengakses peluang pembangunan. Suatu upaya perencanaan pembangunan yang berfokus pada pemerataan distribusi investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik perlu untuk dilakukan. Perencanaan ini harus didasarkan kepada karakteristik, potensi, dan juga isu khusus di setiap wilayah. Selain itu, identifikasi penyebab utama dari kesenjangan antarwilayah dengan memerhatikan faktor aksesibilitas akan sangat membantu perencanaan yang baik.

Akselerasi Transformasi Ekonomi. Isu strategis ketiga yang memerlukan perhatian dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah akselerasi transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat

kemampuan suatu daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, perlunya memahami faktor-faktor yang memperlambat transformasi ekonomi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan resiliensi, inklusivitas, dan keberlanjutan perekonomian daerah.

Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya mencakup kurangnya diversifikasi ekonomi, rendahnya investasi dalam inovasi dan teknologi, serta keterbatasan akses pasar. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap hambatan-hambatan ini, pemerintah provinsi Kalimantan Timur dapat merancang strategi yang efektif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat transformasi sektor ekonomi.

Resiliensi ekonomi menjadi krusial untuk menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi global atau bencana alam. Provinsi Kalimantan Timur perlu membangun ketahanan ekonomi yang mampu mengatasi guncangan ekonomi dan memulihkan aktivitas ekonomi dengan cepat. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi sektor ekonomi, pengembangan kapasitas SDM yang tangguh, dan penyusunan kebijakan fiskal yang bijaksana.

Kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai inklusivitas, perlu diterapkan kebijakan yang memastikan bahwa manfaat ekonomi merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat local dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan perekonomian yang inklusif.

Keberlanjutan ekonomi daerah juga harus diperhatikan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Provinsi Kalimantan Timur, sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, perlu mengelola eksploitasi sumber daya ini secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan perekonomian. Penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam menjadi penting untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan sektor ekonomi di masa depan.

Pemenuhan Infrastruktur Dasar serta Konektivitas dan Aksesibilitas yang Terintegrasi. Isu strategis keempat yang memerlukan perhatian dalam konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemenuhan infrastruktur dasar serta konektivitas dan aksesibilitas yang terintegrasi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, ketidakterintegrasiannya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan barang dan orang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan melambatkan pengembangan wilayah.

Identifikasi wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar menjadi perlu untuk dilakukan. Data dan analisis yang komprehensif dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif perlu untuk dilakukan sehingga

perencanaan-perencanaan proyek bisa menghasilkan kondisi perbaikan secara optimal. Persoalan konektivitas antarwilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi yang terintegrasi, termasuk jalan, jembatan, dan transportasi publik. Intervensi terhadap persoalan ini akan meningkatkan mobilitas dan efisiensi distribusi daerah. Suatu skema yang memutlakkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur transportasi tidak hanya fokus pada kota-kota besar, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah terpencil harus dimunculkan dalam seluruh naskah perencanaan.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh provinsi Kalimantan Timur. Akses internet yang cepat dan terjangkau dapat mempercepat pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis online, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN. Isu strategis kelima yang muncul dalam konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah peluang pembangunan superhub ekonomi dan mitra IKN. Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh IKN menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, pengembangan Kawasan Strategis dan Industri dapat menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Kalimantan Timur.

Peluang pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan, energi, dan industri lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Kutai Timur menjadi daya tarik utama bagi investasi dan pengembangan industri. Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penilaian mendalam terhadap potensi risiko dan dampak dari setiap proyek pembangunan IKN.

Kolaborasi yang efektif dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak, memaksimalkan potensi peluang pembangunan, dan meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Penting untuk memperhatikan aspek peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi peluang pembangunan IKN. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan dapat mendukung keterlibatan masyarakat setempat dalam industri-industri yang berkembang. Dengan demikian, peluang pembangunan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kualitas Lingkungan Hidup serta Penurunan Emisi GRK. Isu strategis keenam yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah strategis

untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim melalui penurunan emisi GRK.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup mencakup berbagai aspek, termasuk pemeliharaan ekosistem alami, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya alam. Melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian lingkungan dan edukasi lingkungan hidup menjadi penting untuk menciptakan kesadaran kolektif terhadap perlunya menjaga keseimbangan alam. Selain itu, penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan kebijakan konservasi dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global. Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki sektor-sektor seperti pertambangan dan energi, perlu merumuskan strategi untuk mengurangi emisi yang berasal dari kegiatan industri. Implementasi teknologi bersih, pemanfaatan sumber energi terbarukan, dan diversifikasi sektor ekonomi dapat menjadi langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target penurunan emisi GRK.

Kolaborasi yang solid antar pihak dapat mempercepat implementasi kebijakan dan proyek-proyek lingkungan, menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi pelestarian lingkungan dan pengendalian emisi GRK. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program hijau dan kegiatan pelestarian lingkungan dapat meningkatkan efektivitas upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Penanganan isu ini juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan sektor ekonomi. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak hanya berfokus pada pelestarian alam tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel menuju *World Class Government*. Isu strategis ketujuh yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel menuju *world class government*. Tata pemerintahan yang efektif dan berkualitas memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam struktur pemerintahan.

Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. SDM pemerintah perlu mendapatkan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam merespons tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Sistem seleksi, pengangkatan, dan promosi pegawai juga perlu didasarkan pada meritokrasi untuk memastikan bahwa posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dari tata pemerintahan yang baik. Provinsi Kalimantan Timur perlu mengadopsi praktik-praktik baik dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan pemerintahan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan juga harus diperhatikan. Masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Keterlibatan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi dan sistem *e-government* juga merupakan perkembangan yang perlu dipertimbangkan sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Penerapan teknologi ini dapat membantu mengurangi birokrasi yang berbelit, meningkatkan transparansi, dan mempercepat penyelesaian berbagai proses administratif.

Pembangunan Jangka Panjang yang Berkesinambungan. Pembangunan Jangka Panjang yang Berkesinambungan adalah isu strategis yang memerlukan penanganan untuk menghadapi kompleksitas perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan menjadi fokus utama dalam merinci isu ini. Mitigasi yang diperlukan adalah dengan menggabungkan kepentingan sektor ekonomi dengan keberlanjutan sumber daya alam serta kelestarian ekosistem merupakan tantangan krusial. Menjaga integritas lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi memerlukan strategi yang cermat dan terintegrasi.

Partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam membentuk dan mendukung kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan dukungan luas. Adopsi inovasi teknologi menjadi elemen kunci lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Percepatan teknologi yang ramah lingkungan serta penelitian dan pengembangan solusi berkelanjutan menjadi landasan untuk melangkah ke masa depan yang berwawasan lingkungan.

Ketahanan sosial dan ekonomi juga menjadi fokus dalam merinci isu ini. Bagaimana membangun masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan perubahan ekonomi global perlu diperhatikan lebih lanjut. Kolaborasi internasional menjadi aspek penting, di mana negara-negara perlu bersatu untuk mengatasi tantangan global yang melibatkan sumber daya dan dampak lingkungan. Pendidikan dan kesadaran publik juga memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan berkesinambungan,

memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dan sikap yang positif terhadap isu-isu keberlanjutan.

Isu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatasi dengan cermat dalam konteks pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan. Menjadi esensial untuk mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, ketahanan pangan dan sumber daya alam perlu dikelola dengan bijak dalam menghadapi pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi. Dengan merinci aspek-aspek ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas dan tantangan dalam mencapai pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan.

3.3. Isu Strategis Kabupaten Kutai Timur

Gambar 3. 14 Ringkasan Isu Strategis Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025–2045 ini mempertimbangkan berbagai aspek yang mencerminkan konteks global, nasional, dan regional yang berpotensi memengaruhi pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusunan isu strategis ini dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk RPJPN 2025–2045 sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang nasional, laporan resmi dari lembaga pemerintah maupun lembaga internasional yang relevan, Laporan KLHS RPJPD 2025–2045 sebagai kerangka analisis keberlanjutan lingkungan, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini

menjamin bahwa isu strategis yang diidentifikasi tidak hanya relevan dengan kebutuhan Kutai Timur, tetapi juga selaras dengan dinamika pembangunan global dan nasional.

3.3.1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

A. Penyempurnaan Fasilitas Pelayanan Dasar di Beberapa Daerah Tertentu

Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan f) Sosial. Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD 2021-2026), masih terdapat beberapa capaian yang belum tercapai.

Keenam Pelayanan Dasar tersebut merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan supaya penerapan SPM dari keenam pelayanan dasar tersebut dapat terwujud secara baik sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan terbitnya Permendagri 100 Tahun 2018 penerapan SPM di daerah lebih terarah untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

B. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana serta pembaharuan sistem pendidikan merupakan langkah awal yang penting. Semua masyarakat Kutai Timur, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk pendidikan yang berkualitas. Dengan tindakan yang tepat dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, masyarakat, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi, maka akan dapat menciptakan transformasi positif dalam sistem pendidikan.

Dalam mengembangkan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pendidikan yang berkualitas dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan model pendidikan yang inovatif, memperkuat jaringan kerja sama antar institusi pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pemberdayaan masyarakat lokal dapat menjadi kunci keberhasilan untuk mengatasi tantangan pendidikan di daerah, sehingga dapat membuka pintu akses pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.

C. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur membutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Penggunaan teknologi digital dan jaringan telekomunikasi dapat membantu

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di perkotaan dan perdesaan, walau tidak dapat mengatasi semua tantangan yang ada. Peningkatan infrastruktur dan tenaga medis perlu dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dapat tersedia.

Pelatihan dan edukasi di tingkat masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan teknologi digital dalam akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, dan secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur.

D. Penciptaan Wirausaha Baru

Dalam rangka upaya menekan persoalan kesejahteraan sosial, terkhususnya pengangguran, maka pemerintah Indonesia melahirkan bermacam program untuk menekan angka pengangguran dengan jalan membuka dan meluaskan peluang kerja yang berproduktif dan terus menerus dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi salah satu hal yang penting terlebih setelah situasi pandemi Covid-19 usai. Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru harus terus digalakkan di berbagai sektor agar ekonomi masyarakat terus bertumbuh.

E. Peningkatan Keterkaitan Sistem Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi yang baik agar bisa memainkan peran penting dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia.

Kutai Timur harus mampu mewujudkan sinergi dalam bidang pendidikan melalui perkembangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia untuk menghadapi era society 5.0. Di tengah dinamika dan transformasi ketenagakerjaan dan pendidikan, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi harus dapat menghadapi perubahan-perubahan dan menciptakan sinergi. Untuk itu, perlu dilakukan usaha-usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong kewirausahaan, pengembangan kemampuan digital, program pelatihan dan adaptasi, dan peningkatan mobilitas ketenagakerjaan.

F. Peningkatan Kualitas SDM dan Inovasi

Peningkatan kualitas SDM dan Inovasi adalah dua aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Keduanya saling terkait dan sangat berperan dalam meningkatkan daya saing ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Peningkatan kualitas SDM berperan besar dalam mendorong inovasi. SDM yang terdidik dan terampil cenderung lebih mampu menciptakan solusi inovatif untuk permasalahan yang ada, sementara inovasi yang berkembang membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka lebih jauh. Sebaliknya, inovasi yang diterapkan

dengan baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan inovasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Daerah yang memiliki SDM terampil dan inovatif cenderung lebih cepat berkembang, memiliki daya saing yang lebih tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan global. Pembangunan SDM dan inovasi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi. Inovasi dalam sektor-sektor sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

G. Peningkatan Berbasis Gender

Peningkatan berbasis gender merujuk pada upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Konsep ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dan laki-laki dengan cara yang seimbang, serta mengidentifikasi dan mengurangi hambatan yang mungkin membatasi peluang atau akses mereka terhadap sumber daya dan layanan.

Peningkatan berbasis gender bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam semua sektor kehidupan. Ini bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan kualitas hidup perempuan, pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang setara, serta penghapusan kekerasan berbasis gender merupakan elemen-elemen yang sangat penting dalam mencapainya.

3.3.2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Daerah

A. Peningkatan Ketersediaan Layanan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu dari 4 pilar program intervensi penurunan kematian ibu (maternal) pada *save motherhood*. Penurunan angka kematian ibu sebagai indikator peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan KB, diperlukan adanya standarisasi pelayanan KB yang berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kompeten. Kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB, termasuk mengenai efek samping dan penanganannya serta komplikasi dan kegagalan. Sehingga berkontribusi pada menurunnya angka kelahiran total, meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern, menurunnya angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatnya peserta KB aktif, serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan.

B. Peningkatan Profesionalisme Dalam Penanganan Permasalahan Sosial

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Problem-problem yang berasal dari faktor ekonomis antara lain kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Penyakit misalnya bersumber dari faktor biologis. Dari faktor psikologis timbul persoalan seperti penyakit syaraf (neurosis), bunuh diri, disorganisasi jiwa dan seterusnya. Sementara itu persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak, konflik rasial, dan keagamaan bersumber pada faktor kebudayaan. Dalam menghadapi permasalahan ini, Kabupaten Kutai Timur perlu mengambil langkah tepat dalam untuk meningkatkan profesionalisme dalam penanganan permasalahan sosial.

C. Peningkatan Program Tri Bina (Bina Balita, Bina Remaja, dan Bina Lansia)

Tri Bina memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita maupun remaja. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik atau tumbuh kembang balita, kemampuan motorik. Sedangkan untuk remaja mengenai cara efektif berinteraksi dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja, dan lain-lain. Selain itu, Tri Bina juga mengedepankan kesejahteraan lansia agar tetap memiliki produktivitas yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan keluarga memiliki pemahaman serta pengetahuan lebih dalam membina balita, remaja, dan lansia. Dengan peningkatan program tersebut, diharapkan setiap keluarga mampu mencapai kesejahteraan serta mampu mencapai keluarga yang berkualitas di Kutai Timur.

D. Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan ketahanan pangan merupakan isu strategis yang tak boleh diabaikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketahanan pangan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan bagi seluruh warga. Ini mencakup upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Ketahanan pangan harus mencakup seluruh wilayah agar setiap warga bisa hidup lebih sehat dan produktif. Untuk itu, berbagai langkah strategis diperlukan, seperti peningkatan produksi pangan, diversifikasi sumber daya pangan, penguatan rantai pasok pangan, serta promosi pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kemandirian pangan lokal juga harus didorong untuk menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

E. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Daerah

Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban daerah merupakan hal esensial yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan setiap warga. Keamanan dan ketertiban juga merupakan hal mendasar yang sangat penting dalam

pembangunan secara menyeluruh. Kondisi yang aman, tertib, dan kondusif memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat untuk memberikan kontribusi yang produktif dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus dapat memastikan bahwa lingkungan daerah terhindar dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial. Penegakan hukum dan pengendalian keamanan dan ketertiban harus dilakukan secara konsisten. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga penting untuk diperkuat sehingga dapat menciptakan suasana daerah yang tenteram dan tertib.

3.3.3. Peningkatan Ketangguhan dan Pemerataan Ekonomi

A. Optimalisasi Sumber Daya Daerah Non-Tambang

Perekonomian Kutai Timur yang masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian perlu melakukan transformasi struktural seiring dengan kesepakatan *Paris Agreement* terkait transisi energi menuju nol emisi karbon (*net zero emission*). Pengurangan atau bahkan penghentian pemanfaatan bahan bakar fosil dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara secara global dipastikan akan memengaruhi PDRB Kutai Timur secara signifikan.

Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari sektor pertambangan, yang saat ini masih memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDBR) Kutai Timur. Meskipun Kutai Timur saat ini masih mengandalkan PDRB yang berasal dari sektor pertambangan gas dan minyak bumi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersiap menghadapi batasan penggunaan batu bara yang akan berakhir pada tahun 2050.

Melalui perencanaan pembangunan daerah yang sudah dilakukan Kabupaten Kutai Timur melalui RPJPD 2005-2025, dimana tumpuan terhadap agribisnis dan agroindustri dipandang perlu untuk dilanjutkan pada perencanaan selanjutnya agar ketergantungan terhadap industri tambang dapat berfokus pada transformasi pertanian dalam arti luas, perikanan, manufaktur, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi digital.

B. Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi

Perbaikan iklim investasi menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan daerah sebagai kunci pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan menarik bagi investor, Kabupaten Kutai Timur dapat mengalami lonjakan investasi yang berpotensi menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memperluas basis ekonomi lokal.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah menghadirkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan infrastruktur yang mendukung, pengembangan manusia yang terampil dan berdaya saing, serta promosi inovasi dan teknologi. Komitmen yang kuat

dalam memperbaiki iklim investasi akan mendorong Kabupaten Kutai Timur memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

C. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Sejalan dengan pertambahan penduduk, isu strategis lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, mengingat berdasarkan data penduduk jumlah usia angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur setiap tahunnya semakin meningkat sehingga tantangan penyediaan lapangan pekerjaan semakin besar. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.

Langkah-langkah strategis untuk mencapai hal tersebut, harus dilakukan mulai dari menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui stabilisasi bahan pokok dan bantuan sosial hingga memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, perbaikan pranata sosial dan infrastruktur untuk penguatan UMKM dan pelatihan vokasi, serta membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan yang massif dan berkelanjutan sesuai dengan tantangan kerja masa depan. Dengan demikian, diharapkan setiap warga Kutai Timur dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya.

D. Pengembangan Inovasi Pengolahan Produk Unggulan Lokal

Produk unggulan lokal sering kali berhubungan erat dengan sumber daya alam, tradisi pertanian, seni dan kerajinan tangan lokal. Melindungi dan mempromosikan produk-produk ini dapat memberikan dorongan signifikan pada ekonomi lokal. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan industri lokal. Banyak produk unggulan lokal terkait dengan praktik pertanian dan perikanan tradisional serta pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan produk ini juga berarti mendukung praktik yang berkelanjutan secara lingkungan, membantu menjaga keanekaragaman hayati dan menjaga lingkungan yang sehat. Pemeliharaan budaya dan produk unggulan daerah dapat memberdayakan masyarakat setempat. Ini memberikan peluang bagi pengusaha kecil, kelompok petani, seniman lokal, dan pelaku industri lainnya untuk tumbuh dan berkembang.

Inovasi dan kreativitas daerah adalah salah satu faktor kunci yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui dukungan terhadap inovasi dan kreativitas lokal, potensi ekonomi kota dapat dioptimalkan dengan menciptakan produk-produk lokal unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi. Penguatan produk lokal juga dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Inovasi dan kreativitas daerah juga diperlukan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

E. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing IKM/UMKM

Peningkatan kapasitas dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Kutai Timur. IKM/UMKM merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dalam kewirausahaan dan bisnis. Berbagai program dan kebijakan yang mendukung IKM/UMKM diperlukan untuk menjawab berbagai kebutuhan IKM/UMKM mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, permodalan, pemasaran, hingga pelaporan keuangan.

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Kabupaten Kutai Timur perlu memberikan stimulus dan dorongan bagi IKM/UMKM agar dapat berkembang secara signifikan. Langkah-langkah strategis seperti penyediaan akses pembiayaan, penyederhanaan proses perizinan, dan peningkatan kapasitas serta kualitas produk IKM/UMKM dapat menjadi intervensi yang diharapkan untuk mendukung IKM/UMKM naik kelas (*scalling up*). Dengan berbagai intervensi tersebut, diharapkan IKM/UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang kuat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara keseluruhan.

F. Pengembangan Potensi Pariwisata dan Pelestarian Budaya

Sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Timur merupakan sektor potensial yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik.

Pengembangan potensi pariwisata dan pelestarian budaya di Kutai Timur memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Melalui pengelolaan yang bijaksana dan pemanfaatan potensi alam serta budaya lokal, Kutai Timur dapat menjadi destinasi pariwisata yang menarik dan berkelanjutan. Namun, tantangan terkait infrastruktur dan pelestarian lingkungan perlu diatasi agar manfaat jangka panjang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya.

G. Pembangunan Berkelanjutan dan Orientasi Pembangunan Jangka Panjang

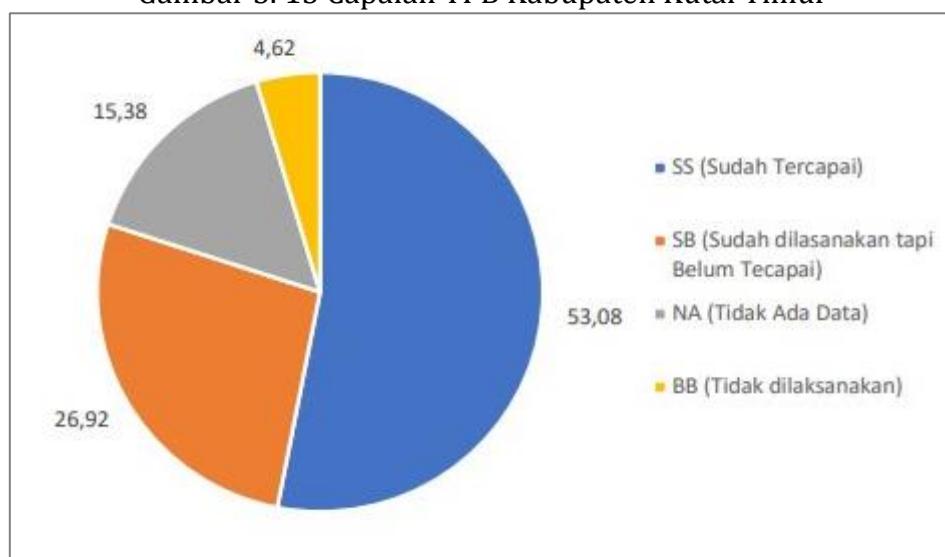
Paradigma pembangunan baru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material dan non-material manusia, memajukan keadilan sosial, memperluas efektivitas organisasi, dan membangun kapasitas manusia dan teknis menuju keberlanjutan. Tujuan keberlanjutan memerlukan perlindungan basis sumberdaya alam yang menjadi dasar

pengembangan masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari upaya baru untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial lingkungan dan ekonomi ke dalam paradigma pembangunan yang baru.

Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi sejarah baru dalam pembangunan global dengan 17 tujuan dan 169 target. Indonesia merupakan satu dari 193 negara yang ikut menyepakati SDGs. Pemerintah Indonesia kemudian mengatur penerapan SDGs di Indonesia dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur menggambarkan sinergi yang strategis dalam menanggapi isu-isu kunci. Dalam menghadapi isu strategis seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, RPJPD menetapkan *roadmap* yang terintegrasi dengan 17 tujuan SDGs. Hal ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah Kutai Timur dalam mengatasi permasalahan lokal, seperti keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, ketimpangan ekonomi, serta tantangan lingkungan, dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dan merasakan manfaat dari proses pembangunan tersebut. Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Kutai Timur menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Gambar 3. 15 Capaian TPB Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Bappeda Kutai Timur, 2024

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup 17 tujuan umum menunjukkan hasil yang bervariasi. Analisis diagram mengungkapkan bahwa 53.08% wilayah sudah mencapai TPB, dengan fokus pada Pengurangan Kemiskinan (60% pencapaian), Pembangunan Pertanian dan Pangan (66.67%), Kesehatan dan

Kesejahteraan Masyarakat (63.16%), serta Pendidikan Bermutu (50%). Sementara itu, tujuan terkait Fasilitas dan Akses Air Bersih serta Sanitasi mencapai 66.67%, dan Akses Gas Rumah Tangga mencapai 33.33%. Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta Infrastruktur Industri dan Inovasi mencatatkan pencapaian 100%, sedangkan Pengurangan Ketimpangan Masyarakat mencapai 42.86%. Tujuan Kota dan Komunitas Berkelanjutan, serta Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, mencapai 50% dan 100% masing-masing. Akhirnya, tujuan pembangunan terkait Perdamaian dan Institusi Peradilan yang Kuat mencapai 47.06%, dan Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan mencatat 66.67% pencapaian di Kutai Timur.

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

H. Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama karena ketergantungan daerah ini pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan kelapa sawit. Meskipun sektor-sektor ini telah memberi kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, dampak lingkungan yang ditimbulkan sering kali memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Menurut data BPS Kutai Timur, pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur tercatat mencapai 10,93% dari total populasi, dengan sebagian besar berada di wilayah pedalaman seperti Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Sangatta Utara. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan untuk sektor UMKM, namun distribusi bantuan yang masih terbatas dan kurang merata menjadi hambatan utama dalam pencapaian hasil yang optimal.

Di samping itu, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga telah diperkenalkan untuk membantu masyarakat miskin. Namun, meskipun ada peningkatan jumlah bantuan yang disalurkan, misalnya pada tahun 2022 penanganan sampah dan kebersihan meningkat sebesar 40,52% dan pada 2023 menjadi 58,50%, masalah pendistribusian dan pemanfaatannya di lapangan masih jauh dari harapan. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak masih menjadi masalah besar, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berusaha meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan dan fasilitas kesehatan, yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, namun tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketergantungan pada industri ekstraktif tetap menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius.

I. Pengembangan Industri dan Ekonomi Lokal

Pengembangan industri dan ekonomi lokal di Kabupaten Kutai Timur mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan berkembangnya sektor pertambangan,

perkebunan kelapa sawit, dan sektor-sektor lainnya. Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil batubara terbesar di Indonesia, dengan sejumlah perusahaan besar beroperasi di sektor pertambangan. Namun, ketergantungan yang besar pada industri ekstraktif ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata menjadi alternatif yang terus didorong oleh pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Data BPS mencatat, pada 2023, sektor pertanian dan perikanan menyumbang sekitar 20% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Timur, meskipun kontribusi terbesar tetap berasal dari sektor pertambangan dan industri pengolahan.

Untuk meningkatkan ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menginisiasi pengembangan ekonomi berbasis sektor UMKM. Program-program pelatihan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM di sektor industri kreatif dan pengolahan hasil pertanian mulai digalakkan di berbagai kecamatan, khususnya di daerah-daerah seperti Sangatta, Bengalon, dan Muara Wahau. Meskipun demikian, pengembangan industri lokal ini masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya akses pasar dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Dengan adanya bantuan pembiayaan dari Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk mereka. Pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung sektor-sektor ini, termasuk jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor non-pertambangan terhadap PDRB mulai menunjukkan peningkatan, yang mencerminkan arah yang positif dalam diversifikasi ekonomi di Kutai Timur.

3.3.4. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan

A. Peningkatan Pelayanan Transportasi yang Efisien dan Terpadu

Peningkatan pelayanan transportasi yang efisien dan terpadu di Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mendukung pembangunan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Kabupaten ini memiliki kondisi geografis yang luas dan bervariasi, dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari pedalaman yang terisolasi. Hal ini menjadikan pengembangan infrastruktur transportasi sebagai tantangan besar. Pada tahun 2023, BPS mencatat bahwa sekitar 45% dari total panjang jalan di Kutai Timur masih dalam kondisi rusak, yang menghambat mobilitas barang dan orang, terutama di kecamatan-kecamatan yang terpencil seperti Muara Wahau dan Bengalon. Pemerintah daerah berusaha untuk mengatasi hal ini dengan meningkatkan kualitas jalan kabupaten, serta memperbaiki akses menuju kawasan industri dan pusat ekonomi.

Paradigma pembangunan transportasi di Kutai Timur harus dikembalikan menjadi satu sistem transportasi yang humanis dan terpadu melalui penyelenggaraan transportasi publik baik darat sungai maupun laut yang efektif, efisien, handal,

terjangkau dan berkelanjutan. Transportasi publik seharusnya sudah menerapkan pelayanan yang menerus dan tidak terputus (*single seamless services*) melalui keterpaduan jaringan prasarana, jaringan pelayanan, dan pelayanan transportasi sehingga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan transportasi di perkotaan dan perdesaan untuk dapat meningkatkan kelancaran perjalanan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

B. Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah di Kutai Timur perlu dilakukan peningkatan, dimana pengelolaan sampah dengan sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan) perlu diganti dengan sistem pengelolaan sampah secara terpadu, yang mana merupakan pendekatan sistem yang dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Pengelolaan sampah terpadu merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang ada di Kutai Timur masih bertumpu pada pola lama, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu keindahan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Konsep pengolahan sampah secara terpadu dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan pendekatan aspek hukum (peraturan), aspek organisasi (kelembagaan), aspek teknis operasional, aspek pembiayaan (retribusi), serta aspek peran aktif masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Timur.

C. Peningkatan Antisipasi Banjir dan Genangan

Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Timur perlu dilakukan upaya pencegahan harus meliputi pembenahan infrastruktur drainase dan jaringan pengendalian banjir yang mencakup beberapa sungai utama, pembangunan tanggul atau bangunan pengaman lainnya, perbaikan saluran air, serta sistem informasi untuk peringatan dini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan peran aktif dalam upaya pencegahan juga sangat diperlukan. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayahnya terhadap banjir dan genangan, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini.

D. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Dasar

Pertumbuhan pembangunan infrastruktur mendasar yang belum merata, menyebabkan masih banyaknya desa tertinggal. Hal ini masih terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Kutai Timur, ditandai dengan minimnya infrastruktur, baik prasarana jalan, fasilitas pelayanan umum, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi yang mengakibatkan aktivitas sosial ekonomi rendah, sehingga desa ditinggalkan penduduknya bermigrasi ke kota.

Peningkatan pemerataan infrastruktur, terutama yang bersifat dasar seperti: prasarana transportasi, jaringan listrik dan komunikasi serta instalasi dan jaringan air minum sangat panting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kutai Timur. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, serta akan mempengaruhi dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

E. Peningkatan Perlindungan dan Pelestarian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di era modern ini. Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang efektif dan bertanggung jawab penting dilakukan. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan (KSDAL) merupakan tanggung jawab semua tanpa terkecuali karena pengaruh ekologis yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara. Oleh karena itu, upaya konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur akan terkait dengan kepentingan daerah lain maupun kepentingan nasional bahkan internasional.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberlanjutan. Dengan sumber daya alam yang terbatas, pengelolaan yang efektif diperlukan agar sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pengelolaan yang baik juga akan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi masa depan.

F. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman merupakan aspek primer dalam pembangunan daerah, berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dimana terciptanya sebuah lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini yang dihadapi Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah penghasil batu bara, menarik migrasi yang cukup signifikan selama 20 tahun terakhir ini diiringi perkembangan permukiman yang tumbuh pesat, yang mana sanitasi permukiman belum sepenuhnya berbanding lurus.

Tata kelola daerah yang berkualitas, didukung oleh sumber daya manusia, organisasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional, diperlukan untuk mengatasi beragam permasalahan daerah seperti kawasan pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan keterbatasan akses air bersih. Kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sektor swasta, dan masyarakat melalui berbagai agenda pemberdayaan masyarakat juga penting untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

G. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu prioritas utama mengingat potensi bencana alam yang tinggi di wilayah ini. Kabupaten Kutai Timur terletak di daerah rawan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Wilayah dengan topografi bergelombang dan curah hujan yang tinggi menjadikan daerah ini rentan terhadap tanah longsor, terutama di wilayah pedalaman seperti Muara Wahau dan Sangatta Utara. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 10 kejadian tanah longsor yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan pemukiman penduduk. Selain itu, Kabupaten Kutai Timur juga sering dilanda banjir akibat meluapnya sungai-sungai besar, seperti Sungai Kedang Kepala, yang mengalir melalui daerah-daerah padat penduduk.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana yang melibatkan koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini untuk banjir dan tanah longsor, telah diperkenalkan di beberapa titik rawan bencana. Selain itu, pelatihan mitigasi bencana dan simulasi penanganan darurat juga rutin dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pada tahun 2023, pemerintah daerah juga mengandeng lembaga internasional dan non-pemerintah untuk mendukung program rehabilitasi pasca-bencana, terutama dalam pemulihian ekosistem dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Meski sudah ada langkah-langkah ini, tantangan besar tetap ada, termasuk keterbatasan anggaran dan aksesibilitas ke daerah-daerah terisolasi yang rentan terhadap bencana.

H. Pengembangan Sustainable and Smart City

Pengembangan konsep Sustainable and Smart City di Kabupaten Kutai Timur menjadi fokus utama dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan, efisien, dan berbasis teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menyusun berbagai rencana strategis untuk menciptakan kawasan perkotaan yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan infrastruktur fisik guna mempermudah layanan publik. Di pusat kota Sangatta, yang merupakan ibu kota Kabupaten Kutai Timur, proyek smart city mulai dilaksanakan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti sistem transportasi cerdas, manajemen sampah berbasis teknologi, dan penggunaan energi terbarukan untuk penerangan jalan umum. Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 15% dari total lampu jalan umum di Sangatta telah digantikan dengan lampu LED hemat energi, sebagai bagian dari upaya pengurangan jejak karbon dan efisiensi energi.

Selain itu, pengembangan kota cerdas di Kutai Timur juga melibatkan penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber

daya alam yang lebih efektif. Dengan adanya platform digital untuk pengelolaan data, pemerintah dapat memantau perkembangan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih cepat dan akurat. Pemerintah daerah juga berencana untuk memperkenalkan sistem transportasi berbasis aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses angkutan umum serta meminimalisir kemacetan. Di sisi lain, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Kutai Timur juga mengutamakan pelestarian lingkungan dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya, di berbagai fasilitas umum. Dengan adanya berbagai upaya ini, Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan sistem perkotaan yang lebih cerdas dan efisien di masa depan.

I. Pencegahan Kerusakan Lingkungan

Pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kutai Timur menjadi prioritas utama mengingat kondisi alam yang rawan degradasi akibat berbagai aktivitas manusia, seperti pertambangan, penggundulan hutan, dan konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, salah satunya dengan memperketat izin usaha dan memastikan adanya analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang mendalam sebelum proyek-proyek besar dimulai. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 80% dari area hutan yang dikelola oleh perusahaan besar di kawasan ini sudah memiliki izin yang disertai dengan AMDAL, meskipun masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum mematuhi ketentuan tersebut. Upaya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan lahan dan mengembangkan sistem penghijauan di area yang terdampak oleh deforestasi.

Selain itu, dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan, Kutai Timur juga mengembangkan program rehabilitasi lahan kritis yang telah rusak akibat kegiatan pertambangan ilegal dan pembukaan lahan secara tidak sah. Pada tahun 2023, BPBD Kabupaten Kutai Timur melaporkan bahwa sekitar 25.000 hektar lahan yang rusak akibat aktivitas pertambangan telah direhabilitasi dengan menanam kembali berbagai jenis tanaman lokal dan memperkenalkan sistem pertanian yang ramah lingkungan untuk masyarakat sekitar. Pemerintah daerah juga gencar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan melibatkan komunitas lokal dalam program konservasi alam dan penghijauan. Dengan adanya kebijakan yang lebih tegas, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan kerusakan lingkungan di Kutai Timur dapat ditekan dan ekosistem lokal dapat dipulihkan secara bertahap.

3.3.5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Timur telah menjadi salah satu agenda utama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Upaya reformasi ini bertujuan untuk meminimalisir praktik birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah digitalisasi sistem pemerintahan, dimana sejak 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mengimplementasikan e-Government untuk mempermudah akses layanan publik dan mempercepat proses administrasi. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur, lebih dari 80% pelayanan administratif kini dilakukan secara daring, seperti pengurusan izin usaha, pengajuan dana bantuan, dan pendaftaran dokumen penting lainnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik pungli dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, reformasi birokrasi juga mencakup peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Pada tahun 2023, lebih dari 1.500 ASN di Kutai Timur mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi yang meliputi bidang administrasi publik, manajemen proyek, dan pelayanan publik berbasis teknologi. Data dari Bappeda Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa hasil dari reformasi birokrasi ini mulai terlihat, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat sebesar 15% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja ASN juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa reformasi ini berjalan sesuai dengan rencana dan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

B. Peningkatan Kerja sama Antar Daerah dalam Pengelolaan Wilayah

Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kota Bontang, memiliki peluang yang besar untuk dapat bekerja sama dalam pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerja sama antar daerah yang bertetangga. Dalam pasal 195 (1) dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan." Pada pasal 196 (2) lebih tegas lagi berisi "perintah" untuk membuat kerja sama antar daerah, dengan menyatakan: "Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat." Kerja sama

antar daerah diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi kemajuan Kabupaten Kutai Timur serta kesejahteraan masyarakatnya dalam jangka panjang.

Peningkatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah di Kabupaten Kutai Timur menjadi sangat penting mengingat wilayah ini memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan, hingga pariwisata. Dalam rangka memaksimalkan potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota tetangga, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Salah satu bentuk kerja sama yang telah terjalin adalah dalam pengelolaan sumber daya air, di mana Kutai Timur bekerja sama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengelola sungai-sungai yang mengalir antar kedua wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pasokan air bersih bagi masyarakat kedua daerah, serta menjaga kelestarian ekosistem sungai yang rawan tercemar akibat aktivitas industri.

Selain itu, kerja sama antar daerah juga dilaksanakan dalam pengembangan infrastruktur transportasi. Kabupaten Kutai Timur telah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan daerah tetangga untuk memperbaiki aksesibilitas antar wilayah, terutama untuk daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Sebagai contoh, proyek pembangunan jalan penghubung antara Sangatta dan Kecamatan Muara Wahau, yang merupakan wilayah perbatasan Kutai Timur dengan kabupaten lain, melibatkan anggaran dan perencanaan dari beberapa daerah serta pemerintah provinsi. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% jalan di daerah pedesaan telah diperbaiki berkat kerja sama lintas daerah tersebut. Melalui kerjasama antar daerah ini, diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengelolaan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Peningkatan mutu layanan dan kinerja, serta penerapan *good corporate governance*, harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kutai Timur.

3.3.6. Dampak Perpindahan Ibukota Negara

A. Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur

Perpindahan IKN diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Timur, khususnya melalui pembangunan infrastruktur yang masif. Sebagai pusat pemerintahan yang baru, IKN akan menarik investasi besar dalam pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi. Kabupaten Kutai Timur yang berdekatan dengan lokasi IKN, akan menikmati dampak langsung dalam hal pertumbuhan ekonomi, seperti terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan sektor konstruksi, serta sektor-sektor pendukung seperti logistik dan perhotelan. Pembangunan jalan, bandara, dan fasilitas umum di sekitar IKN juga akan mendorong perkembangan ekonomi di Kutai Timur. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa proyek IKN diperkirakan akan meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kalimantan Timur secara keseluruhan, dengan kontribusi langsung dari Kutai Timur yang signifikan.

B. Perubahan Demografi dan Mobilitas Penduduk

Perpindahan IKN berpotensi meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur karena migrasi dari berbagai daerah yang ingin berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN. Peningkatan jumlah penduduk ini akan berdampak pada kebutuhan akan perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas sosial lainnya. Hal ini dapat menciptakan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik yang sudah ada. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan bahwa jumlah penduduk Kutai Timur akan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang, terutama di sekitar lokasi IKN yang baru. Selain itu, adanya peningkatan mobilitas tenaga kerja akan mendorong perkembangan sektor-sektor informal dan peningkatan urbanisasi di beberapa area.

C. Dampak Lingkungan

Pembangunan besar-besaran untuk mendukung perpindahan IKN dapat menimbulkan dampak lingkungan, terutama di Kutai Timur yang dikenal dengan kekayaan alamnya. Aktivitas pembangunan infrastruktur, seperti pembukaan lahan dan pembangunan gedung-gedung besar, dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan menyebabkan deforestasi, peningkatan polusi, serta penurunan kualitas udara dan air. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan lingkungan yang lebih ketat untuk memitigasi dampak negatif tersebut. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak merusak lingkungan alam yang menjadi sumber daya vital bagi masyarakat Kutai Timur.

D. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan adanya IKN di Kalimantan Timur, Kutai Timur akan menjadi pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait dengan sektor-sektor pemerintahan dan pembangunan. Hal ini akan membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selain itu, meningkatnya permintaan tenaga

kerja terampil akan mendorong pembenahan dalam sektor pendidikan dan pelatihan vokasional. Program-program pendidikan yang lebih baik akan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap pengembangan SDM di Kutai Timur.

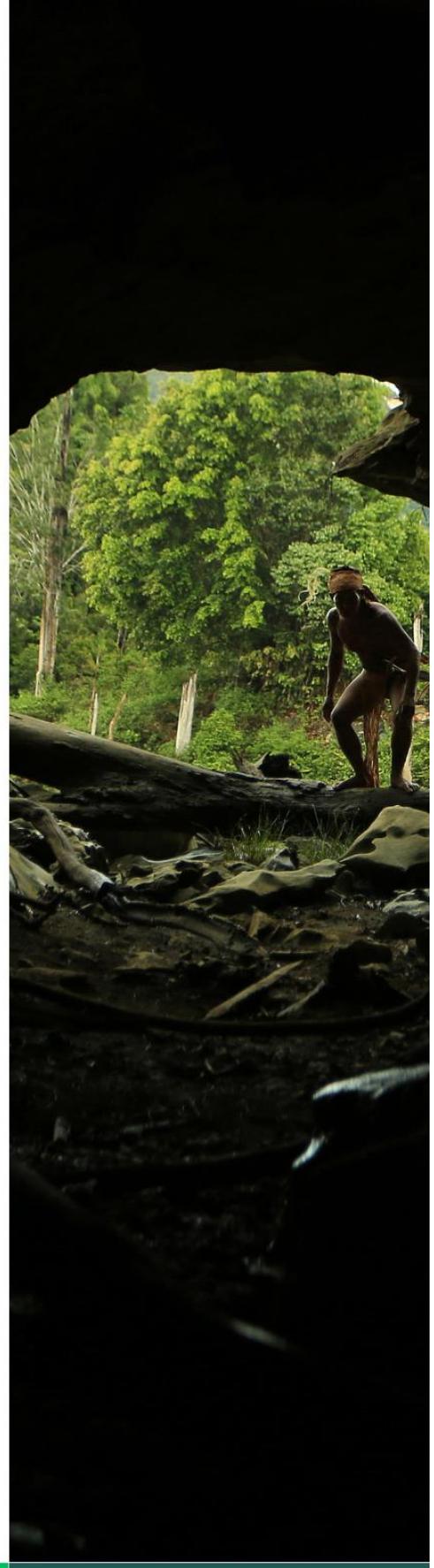
E. Perubahan Sosial dan Budaya

Adanya IKN di Kutai Timur dapat memperkenalkan pengaruh budaya dari berbagai daerah yang datang bersama migrasi tenaga kerja dan penduduk baru. Ini bisa memperkaya kebudayaan lokal, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam hal integrasi sosial. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian budaya lokal.

Visi dan Misi Daerah

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)

Kabupaten
Kutai Timur
2025-2045



Visi dan Misi Daerah

Visi Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

Visi Kaltim Sejahtera 2045

Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan

Visi Kutim Hebat 2045

Pusat Hilirisasi SDA yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan

Maju

Kemajuan Kutai Timur mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia, transformasi ekonomi untuk pertumbuhan inklusif dan pemerintahan profesional sebagai motor penggerak daerah

Inklusif

Inklusif mencakup perkembangan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya yang merata dan relevan untuk semua lapisan masyarakat. Inklusivitas bukan hanya semboyan, tetapi praktik yang terencana, berkesinambungan dan adil

Berkelanjutan

Berkelanjutan berarti menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, serta tata kelola baik. Kutim Hebat ditandai dengan kemajuan ekonomi, keadilan sosial, lingkungan lestari, pemukiman layak dan ekosistem terjaga

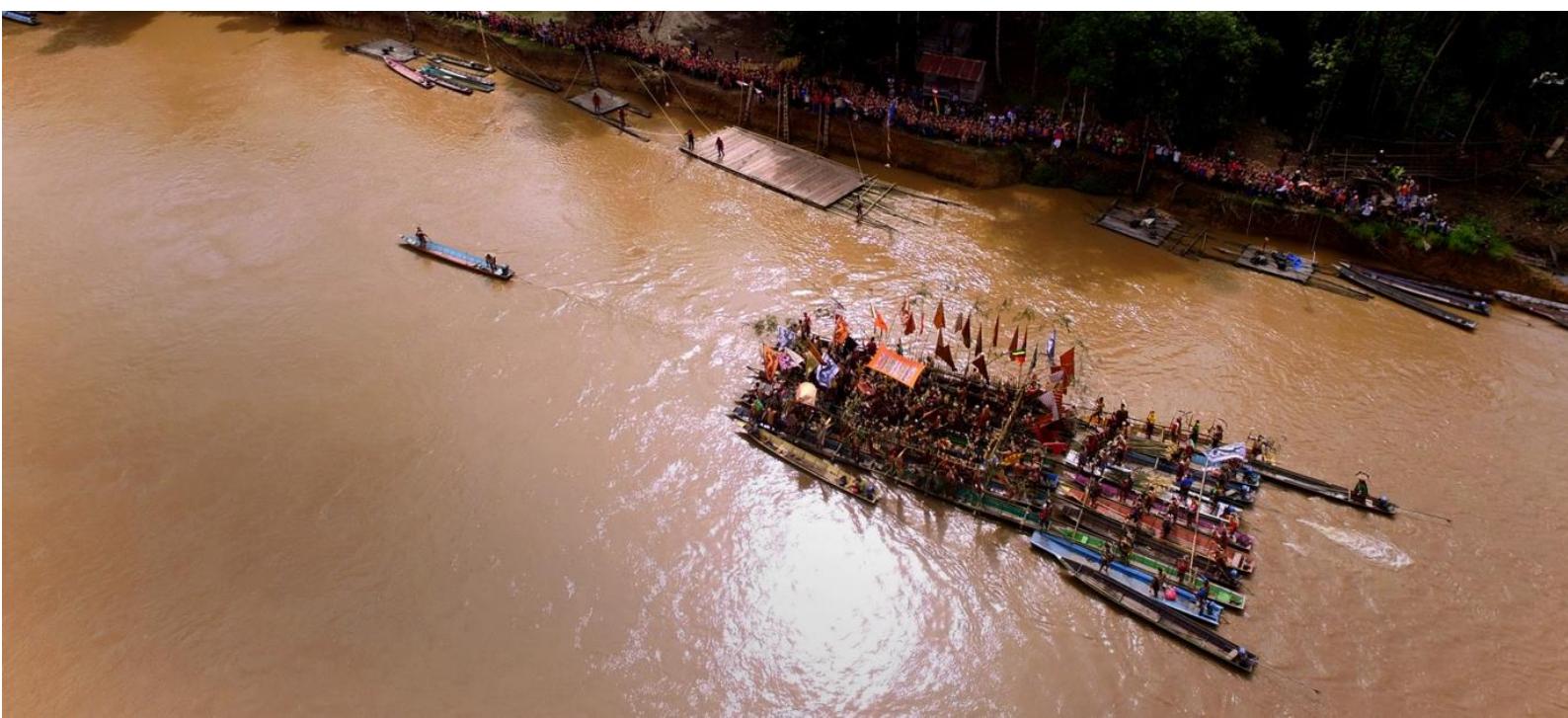
Sasaran Utama Visi Kutim Hebat 2045

- Peningkatan Pendapatan Per Kapita
- Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi
- Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah
- Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
- Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

KUTAI TIMUR 2025-2045



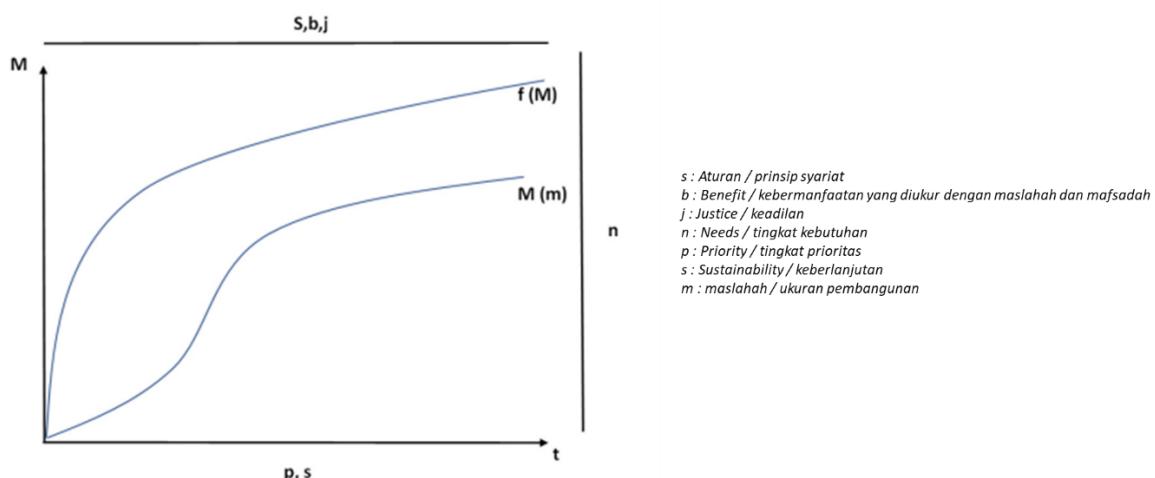
Dalam menyusun rencana pembangunan yang efektif, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pembangunan. Pembangunan daerah adalah proses untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan memanfaatkan serta mengelola potensi daerah secara optimal, baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam, kondisi geografis, maupun aspek strategis lainnya. Pembangunan yang baik tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan sebagaimana motivasi dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah harus bersifat multidimensi dan beragam.

Keberhasilan tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh berbagai input daerah, seperti keadaan sosial politik, sumber daya alam, demografi, infrastruktur, dan koneksi, baik internal maupun eksternal. Penggunaan optimal dari modal pembangunan (input) untuk mencapai tujuan sangat tergantung pada tata kelola yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam menentukan kualitas proses pembangunan. Beberapa aspek tata kelola yang harus diperhatikan meliputi kualitas kepemimpinan, kemampuan manajemen, pembuatan regulasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta kualitas pelayanan publik.

Kerangka pembangunan ini menekankan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia sebagai subjek dan objek

pembangunan. Pembangunan harus mencakup proses pencapaian, tidak hanya hasil akhirnya. Selain itu, pembangunan harus memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan, serta harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas, di mana kebutuhan dasar harus didahului sebelum yang sekunder atau tersier. Pendekatan ini dikenal sebagai *Integrative Multidimensional Economic Development Model*, yang dijelaskan dalam gambar 4.1¹.

Gambar 4. 1 Integrative Multidimensional Economic Development Model



Sumber: Azison & Arundina, 2023; Mahri et al, 2021

Prinsip dan model ini menunjukkan bahwa kerangka pembangunan yang baik memiliki visi dan agenda yang universal, multidimensi, dan integratif. Fokusnya tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pencapaian ekonomi dan pembangunan. Model ini disebut sebagai model pembangunan yang terintegrasi, multidimensi, dengan kerangka gagasan yang jelas.

Kerangka berpikir ini juga diterapkan dalam penyusunan RPJPN 2025-2045. Pendekatan pembangunan dalam visi Indonesia emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 perlu diapresiasi karena mengarahkan pembangunan bangsa ke depan menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi. Pembangunan sosial dan ekonomi dilihat tidak hanya dari indikator hasil tetapi juga dari proses, dengan perspektif yang tidak hanya materialistik tetapi juga prosedural. Ini menunjukkan bahwa visi pembangunan Indonesia ke depan fokus pada cara bijak dan tepat dalam mencapai tujuan, bukan hanya pada hasil akhir. Hal ini penting karena seringkali indikator pembangunan hanya

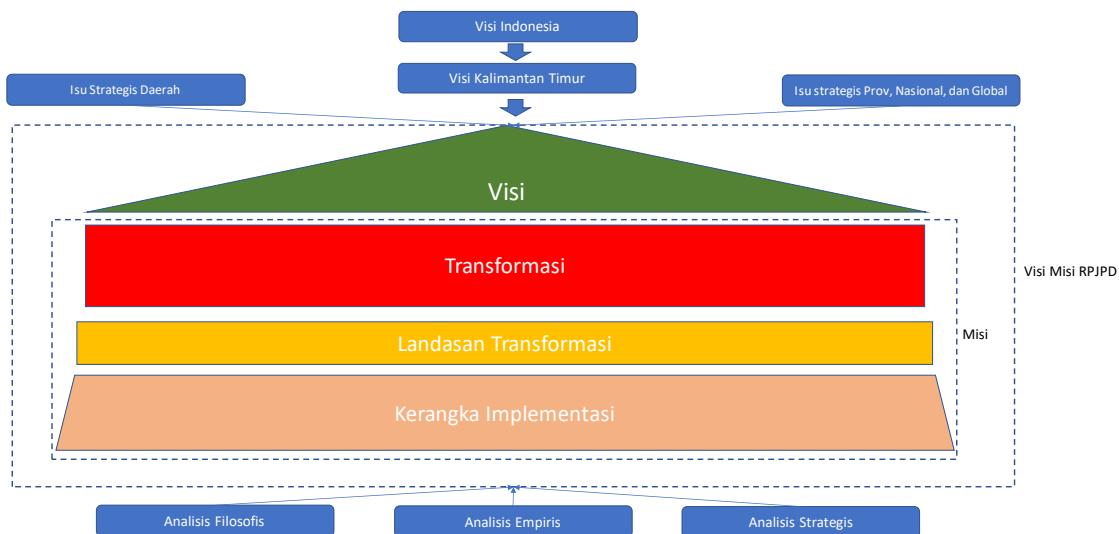
¹ Pendekatan ini dijelaskan dalam Azison, A., & Arundina, T. (2023). *Integrative Multidimensional Economic Development Model: A New Approach of Development in Islamic Economics*. Working Paper, Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia dan Mahri, A. J. W., Al Arif, M. N. R., Widiastuti, T., & Fajri, M. (2021). Ekonomi Pembangunan Islam. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*; Publisher: Atlantis Press, 1(1), Juni.

dikaitkan dengan ukuran materialistik. Pendekatan ini juga menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan bangsa tidak hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau infrastruktur tetapi juga untuk kemajuan yang inklusif. Pendekatan ini dikenal sebagai narasi transformasi pembangunan.

Narasi transformasi pembangunan menjadi landasan dalam menyusun visi dan misi RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045. Dalam mencapai pembangunan dibutuhkan tiga transformasi utama yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kondisi tertentu yang disebut landasan transformasi. Selain itu, narasi ini juga mencakup kerangka implementasi transformasi yang memberikan arah dan batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan arahan yang terdapat dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, kerangka penyusunan visi dan misi RPJPN ini harus menjadi acuan penyusunan RPJPD baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Mengikuti alur berpikir dan skema yang digunakan dalam RPJPN, maka Rancang Bangun Visi-Misi Kabupaten Kutai Timur dalam RPJPD 2025-2045 akan mencakup visi, sasaran utama, misi, dan tujuan pembangunan. Penyusunan visi-misi Kabupaten Kutai Timur memperhatikan potensi daerah, isu dan permasalahan lokal, serta keselarasan dengan visi nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis yang digunakan meliputi analisis filosofis, empiris, dan strategis. Secara umum, kerangka berpikir pembangunan dalam penyusunan visi-misi Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 disajikan pada gambar 4.2.

Gambar 4. 2 Kerangka dan Paradigma Perencanaan Pembangunan



4.1 Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kaltim Sejahtera 2045

4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045

Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045, terdapat visi ambisius **Indonesia Emas 2045** yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Konseptualisasi visi ini dirinci dalam delapan misi dan tujuh belas arah pembangunan, yang merupakan turunan dari visi abadi Indonesia: Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Penjabaran visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN 2025-2045 dibagi menjadi tiga klaster utama. Pertama, transformasi Indonesia yang mencakup tiga aspek utama: sosial, ekonomi, dan tata kelola. Kedua, landasan transformasi yang meliputi supremasi hukum, stabilitas diplomasi, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Ketiga, kerangka implementasi transformasi yang berfokus pada pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan.

Untuk mencapai visi ini, perjalanan pembangunan diuraikan dalam empat tahap: Perkuatan Fondasi Transformasi, Akselerasi Transformasi, Ekspansi Global, dan Perwujudan Indonesia Emas. Melalui tahapan ini, Indonesia diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat, mempercepat transformasi, memasuki kancang global, dan akhirnya mewujudkan visi sebagai negara yang maju pada tahun 2045.

4.1.2. Visi Kaltim Sejahtera 2045

Selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045, Provinsi Kalimantan Timur dalam Rancangan RPJPD 2025-2045 menurunkan **Visi Kaltim Sejahtera 2045** yaitu “Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil, dan Berkelanjutan”. Maju dimaknai sebagai kondisi dimana Kalimantan Timur yang mampu tumbuh beriringan dengan kemajuan IKN dan menjadi Mitra yang mampu memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik dari aspek perekonomian, SDM, infrastruktur, dan lingkungan; Kalimantan Timur secara optimal menjalankan peran sebagai Superhub ekonomi IKN dan Mitra IKN; Masyarakat Kalimantan Timur mampu bersaing di era perkembangan teknologi dan modernisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan; Perekonomian di Kalimantan Timur digerakkan dari sektor sekunder dan tersier.

Sementara adil dimaksudkan dengan kondisi di mana kehidupan yang memberi kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh masyarakat untuk dapat memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dalam rangka kehidupan yang lebih bermutu dan maju; seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, lebih mudah dan bermutu; memperoleh akses pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi/kemampuan; serta mendapatkan hak layanan publik yang setara dan perlindungan yang sama di depan hukum. Sedangkan berkelanjutan diartikan ketika Transformasi ekonomi dan transformasi sosial telah berjalan optimal tetapi struktur perekonomian tidak lagi

didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri bernilai tambah tinggi, jasa dan perdagangan mendominasi kontribusi struktur ekonomi Kaltim kedepan; Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

Kerangka misi yang digunakan oleh Kaltim juga mengikuti narasi transformasi yang digunakan dalam RPJPN dengan 3 misi transformasi, 2 misi menjadi landasan transformasi dan 3 misi sebagai kerangka implementasi transformasi. Selaras dengan RPJPN visi dan misi RPJPD Kaltim juga menggunakan pentahapan dalam 4 periode yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan pelaksanaan visi misi ini diharapkan kedepan Kalimantan Timur menjadi episentrum pertumbuhan, katalisator pembangunan berbasis maritim, dan *trajectory* pertumbuhan ekonomi.

Visi misi RPJPN dan RPJPD Kalimantan Timur ini merupakan salah satu landasan utama dalam menyusun RPJPD Kabupaten Kutai Timur. Selain tentu poin-poin ini akan disinkronisasikan dengan isu strategis Kutim, analis SWOT Kutim dan berbagai faktor lain terkait yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

4.2. Rekomendasi Visi dari KLHS RPJPD

Salah satu arahan lain yang terdapat dalam aturan penyusunan RPJPD adalah keselarasananya dengan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Rekomendasi KLHS untuk dokumen Visi RPJPD Kutai Timur harus mencerminkan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan. Implementasi visi ini memerlukan sinergi antar-sektor dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kutai Timur diharapkan dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam semua dimensi pembangunan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekologis untuk generasi masa kini dan mendatang.

Hasil rekomendasi visi dalam KLHS RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 mengarahkan pada empat pilar yaitu **berkelanjutan, berdaya, sejahtera dan berkeadilan**. Berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Berdaya mengarahkan orientasi pembangunan pada pengembangan pada Sumber Daya Manusia yang kompetitif dan inovatif dalam menciptakan peluang. Sementara itu sejahtera menunjukkan fokus pembangunan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Sedangkan berkeadilan memastikan pembangunan yang inklusif untuk semua. Rekomendasi Visi KLHS ini menunjukkan semangat yang kuat dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan yang pada dasarnya juga menjadi semangat pembangunan nasional maupun daerah di Indonesia.

Dalam KLHS RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 juga memberikan rekomendasi misi untuk setiap pilar yang disebutkan diatas dengan detail sebagaimana terlampir dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Rekomendasi Visi dan Misi KLHS RPJPD Kutai Timur 2025-2045

Pilar	Misi
Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Mitigasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana. b. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana. c. Mengembangkan pemanfaatan lahan yang mempertimbangkan risiko bencana. ● Ketahanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produksi pangan melalui praktik pertanian yang efisien, teknologi modern, dan diversifikasi tanaman. b. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian pangan. ● Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan Menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya berkelanjutan, termasuk regulasi lingkungan, pengelolaan izin, dan insentif ekonomi.
Berdaya	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah. b. Memperluas akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. c. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. ● Peningkatan Daya Saing Produk Lokal <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas produk unggulan lokal. b. Mengembangkan inovasi dalam pengolahan produk unggulan. ● Pelestarian Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> a. Mengintegrasikan pendidikan budaya ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. b. Menyelenggarakan program pendidikan budaya di luar sekolah.
Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ● Penurunan Kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. b. Menyediakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat kurang mampu agar memiliki keahlian yang mendukung ekonomi. ● Pengurangan Kesenjangan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan akses dasar di wilayah tertinggal. b. Mengembangkan wilayah yang terbelakang secara terencana. ● Penyediaan Sarana Prasarana Dasar <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sarana transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan produksi ekonomi wilayah. b. Meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. c. Menambah kuantitas dan kualitas fasilitas ekonomi serta telekomunikasi.
Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelayanan Publik Membangun transparansi dalam pelayanan publik dengan menyediakan informasi program, anggaran, dan prosedur kepada masyarakat. ● Good Governance Menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ● Kerja Sama Antar Pemerintah Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah untuk mencapai sinergi pembangunan.

4.3. Visi Kutim Hebat 2045

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah dengan beragam potensi dan tengah berkembang menjadi salah satu daerah katalisator kemajuan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Kabupaten Kutai Timur memiliki kapasitas maupun kualitas fiskal

yang baik karena disokong oleh jumlah APBD yang relatif tinggi dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Selain itu, Kabupaten Kutai Timur juga diwariskan dengan kekayaan budaya yang beraneka ragam serta lokasi yang cukup strategis baik dalam kondisi saat ini maupun dalam perencanaan pembangunan nasional kedepan. Kondisi dan potensi ini merupakan modal dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan daerah.

Meskipun demikian, kualitas kesejahteraan masyarakat masih tetap perlu digenjot dan tetap diupayakan untuk meningkat secara berkesinambungan. Tingkat ketimpangan kemiskinan dan indikator pembangunan lainnya belum menunjukkan angka yang istimewa karena masih berada di angka sekitar rata-rata nasional. Selain itu, tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Kutai Timur pada sektor pertambangan tetap menjadi isu sentral yang perlu menjadi perhatian dalam merencanakan dan menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di masa depan.

Kondisi ini mendorong tema pembangunan dan ekonomi berkelanjutan seperti *green economy*, pertambangan dan perkebunan berkelanjutan serta pertumbuhan yang bersifat inklusif menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan Kutai Timur kedepan. Selain itu, penciptaan stabilitas dalam hukum, regulasi dan birokrasi, serta kondisi ekonomi merupakan *necessary condition* untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan masyarakat sejahtera. Isu dan perencanaan ini harus menjadi narasi pembangunan Kutai Timur baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Hal ini harus direncanakan dan diimplementasikan secara sistematis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kondisi surplus yang saat ini didapatkan oleh Kutai Timur dari hasil tambang merupakan modal dan momentum penting untuk mempersiapkan masa depan. Hal positif ini perlu dimanfaatkan dengan cerdas dan terukur untuk memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dan keberlangsungan pembangunan Kutai Timur. Disamping itu, agenda nasional berupa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menciptakan efek positif atau "*side effect*" yang merambah ke berbagai sektor dan memberikan tambahan nilai bagi pembangunan Kutai Timur.

Keadaan dan potensi ini harus dioptimalkan untuk kebaikan jangka panjang. Fokus utama rencana dan visi pembangunan ke depan haruslah menjadi penuntun dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan Kutai Timur sebagai proses transformasi pembangunan di segala bidang. Hal ini juga sesuai dengan amanah yang tersemat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Kalimantan Timur, yang menggariskan agenda pembangunan jangka Panjang 20 tahun kedepan sebagai proses transformasi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Kabupaten Kutai Timur harus terlibat aktif dan menjadi katalisator utama dalam proses transformasi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan yang menjadi tonggak dalam menciptakan sinergi dan kolaborasi vertikal pembangunan nasional.

Berkaca pada kerangka penyusunan RPJPD yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diusulkan visi Kutim untuk periode 2025-2045 adalah **Kutim Hebat 2045: Pusat**

Hilirisasi SDA yang Maju, inklusif dan berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: i) isu strategis yang dimiliki oleh Kutai Timur, ii) keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki Kutai Timur iii) capaian pembangunan yang telah dilakukan, iv) visi dan arah kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, dan v) mengakomodir rekomendasi visi KLHS RPJPD Kutai Timur.

Gambar 4. 3 Visi Kutim Hebat 2045



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Kutim Hebat dalam hal ini diterjemahkan sebagai Kutai Timur yang memiliki performa optimal dalam menciptakan kesejahteraan baik dari segi sosial, ekonomi, pemerintahan dan menjaga budaya serta ketahanan lingkungan dengan menggunakan sebaik mungkin keunggulan dan kesempatan yang dimilikinya. Kehebatan Kutim pada tahun 2045 terjadi jika Kutai Timur memiliki kemajuan sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan dan memiliki peran besar dalam mendorong kemajuan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Kemajuan Sosial: Masyarakat Kutai Timur dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul, memiliki daya saing tinggi, memperoleh kehidupan yang layak, memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, provinsi dan nasional, namun tetap menjadi masyarakat yang berbudaya, beradat dan beragama.

Kemajuan Ekonomi: Kutai Timur bertransformasi menjadi daerah yang memiliki struktur ekonomi kuat yang tidak lagi bergantung pada sektor berbasiskan sumber daya alam tidak terbarukan, sistem ekonomi yang tumbuh secara inklusif dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki baik dari sektor agro, pariwisata, geografis dan demografis.

Kemajuan Tata Kelola: Kutai Timur memiliki pemerintahan yang bekerja secara profesional, memiliki efektivitas dan efisiensi tinggi dalam mengelola daerah, memiliki mindset jangka Panjang (visioner) dan mampun menjadi motor penggerak terdepan dalam menciptakan kemajuan Kutai Timur.

Pilar Visi Kutim Hebat 2045

Visi Kutai Timur Hebat 2045 didukung oleh tiga pilar utama yaitu Maju, Inklusif dan Berkelanjutan. Ketiga pilar ini harus berjalan secara harmonis untuk mencapai Kutai Timur Hebat.

Maju

Kemajuan sosial, ekonomi, pemerintahan dan geografis Kutai Timur ditunjukkan oleh karakter berupa ketangguhan, kemandirian, modern, berdaya dan madani.

Tangguh: Kutai timur harus memastikan bahwa kehidupan ekonomi, sosial dan budaya tumbuh, progresif dan selalu mengalami perbaikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas secara tangguh. Hal ini memastikan bahwa Kutai Timur konvergen untuk selalu berkembang dan terdepan dalam kemajuan zaman dan memiliki perkembangan kemanjuran yang kokoh dalam segala bidang. Kutai Timur Tangguh secara ekonomi dengan struktur ekonomi yang kuat, masyarakat Tangguh dengan kemajuan yang berbudaya dan madani serta tata kelola yang Tangguh dengan pelayanan yang agile dan adaptif.

Mandiri: Kemandirian Kutai Timur terletak dari kemampuan daerah dalam membangun Kutai Timur yang tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam tidak terbarukan (Tambang dan Perkebunan Kelapa sawit). Komposisi PDRB Kutai Timur yang didominasi oleh sektor tambang dan galian menunjukkan kerapuhan sektor ekonomi Kutai Timur yang sangat bergantung pada jumlah dan harga barang tambang. Dalam dua dekade kedepan Kutai Timur harus melepaskan diri dari ketergantungan ini dengan menumbuhkan sektor manufaktur, agrobisnis, pariwisata dan jasa dan menambah nilai aktivitas ekonomi dari hilirisasi.

Modern: Kemandirian dan progresivitas pembangunan Kutai Timur harus bersifat modern yang dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman, inovatif dan mampu menempatkan diri tidak hanya sebagai masyarakat lokal, tetapi juga nasional dan global.

Berdaya: Kutai Timur baik secara individual (masyarakat) dan komunal (pemerintah dan daerah secara umum) harus mampu untuk melaksanakan pembagunan, melakukan perbaikan, berkembang secara pribadi dan kedaerahan serta memiliki daya saing. Selain itu juga mampu untuk berbicara banyak dan berperan aktif dalam kehidupan berdaerah (provinsi), bernegara (nasional) dan berkehidupan secara internasional (global)

Madani: Kemandirian, Kemajuan, Adaptabilitas dan peningkatan daya saing masyarakat dan daerah tidak membuat kelestarian adat, budaya, agama dan lingkungan lokal menjadi terancam. Kelestarian adat, budaya, agama dan lingkungan Kutai Timur harus tetap menjadi nilai dan nafas dalam mencapai kemajuan dan perkembangan pembangunan daerah.

Inklusif

Kutim Hebat tidak hanya ditunjukkan dari adanya perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial budaya secara kuantitas tetapi juga memastikan bahwa perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan tersebut terjadi pada semua lapisan masyarakat sektor dan kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi di lapangan. Inklusivitas harus diimplementasikan dan terlihat secara riil tidak hanya menjadi semboyan atau kebijakan parsial tetapi harus diimplementasikan secara menyeluruh, terencana dan berkesinambungan. Inklusivitas ini dapat ditunjukkan oleh karakter adil, merata dan relevan.

Adil: Keadilan merupakan nafas dari pembangunan Kutai Timur. Kutai Timur harus dapat memastikan bahwa setiap pertumbuhan, kemajuan, kebijakan, program, pelayanan publik, rencana strategis yang dilakukan harus berlandaskan pada keadilan dan tanpa pandang bulu.

Merata: Selain hadirnya kehadiran, pembangunan Kutai Timur juga harus diupayakan se bisa mungkin untuk membangun Kutai Timur secara merata. Pembangunan yang dilakukan diupayakan untuk dilakukan secara komprehensif dan harmonis baik antar individu, daerah maupun sektor.

Relevan: Keadilan dan pemerataan dalam pembangunan Kutai Timur juga harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, komunitas maupun daerah tertentu.

Berkelanjutan

Sebagai daerah yang memiliki PDRB dan APBD relatif tinggi dan berkomitment untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memiliki potensi kerusakan lingkungan dari sektor tambang dan perkebunan sawit yang masif, pertumbuhan ekonomi Kutai Timur harus terus diupayakan selaras dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan kualitas tata kelola yang baik. Kutim Hebat ditandai dengan kehidupan ekonomi dan sosial yang maju dan berkembang secara adil dan merata, lingkungan yang lestari, pemukiman yang layak,

bebas polusi dan sampah serta kondisi ekosistem darat dan laut beserta isinya yang terjaga dengan baik.

Kutai Timur sebagai Pusat Hilirisasi Sumber Daya Alam

Dalam visi Kutim Hebat 2045 juga dinyatakan secara jelas positioning Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat hilirisasi SDA. Penentuan positioning ini tentunya sudah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keunggulan Kutai Timur dan juga tujuan yang ingin dicapai dalam visi Kutim Hebat 2045. Kutai Timur sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya mulai dari sumber daya alam yang beraneka ragam, posisi strategis dan competitive advantage yang dimiliki saat ini berupa kapasitas fiskal sangat cocok untuk dikembangkan sebagai Pusat Hilirisasi SDA. Dengan positioning sebagai pusat hilirisasi SDA berbagai isu dan tantangan pembangunan Kabupaten Kutai Timur dapat dihadapi dengan baik.

Ketergantungan Kutai Timur terhadap ekstraksi tambang dapat berkurang seiring dengan peningkatan nilai tambah ekonomi sektor non-tambang. Selain itu hal ini disisi lain juga diharapkan mampu untuk menciptakan inklusivitas ekonomi. Hilirisasi yang difokuskan pada produk-produk unggulan di sektor perkebunan seperti sawit, karet, kakao, pisang, dan nanas serta termasuk produk tambang tentu akan memberikan dampak ekonomi yang lebih sustainable dalam jangka Panjang. Hal ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hilirisasi lebih fokus pada peningkatan nilai tambah dalam rantai ekonomi bukan pada kuantitas ekstraksi produk. Secara multiplier effect hilirisasi juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, pengembangan tata kelola dan penciptaan ekosistem dan ketahanan yang lebih baik. Sehingga diharapkan dengan positioning ini akan menjadi katalisator dalam mencapai Visi Kutim Hebat 2045. Ditambah lagi positioning ini juga sesuai dengan locus pembangunan yang dicanangkan oleh Provinsi Kalimantan Timur yang tentunya akan memberikan dampak positif secara timbal balik.

Keselarasan Visi Kutim Hebat 2045 dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kaltim Sejahtera 2045

Visi Kutim Hebat 2045 memiliki keselarasan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kaltim Sejahtera 2045. Keselarasan visi ini dapat dilihat baik dari segi esensi tujuan pembangunan, arah pembangunan, metode penyusunan, dan *logical framework*. Keselarasan tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah.

Gambar 4. 4 Keselarasan vertikal Visi Kutim Hebat 2045



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Selaras dengan Visi Indonesia Emas dan Kaltim Sejahtera 2045, Kabupaten Kutai Timur mencanangkan visi Kutim Hebat 2045. Dua pilar Visi Indonesia emas yang relevan baik dengan Visi Kaltim Sejahtera dan Kutim Hebat adalah pilar negara maju dan berkelanjutan. Kaltim dan Kutim sama-sama mengadopsi kata maju sebagai pilar visinya sama hal nya dengan pilar berkelanjutan. Sementara itu pilar adil yang terdapat pada Visi Kaltim Sejahtera juga selaras dengan pilar inklusif pada Visi Kutim Hebat 2045. Jika dilihat lebih detail pada RPJPD Kalimantan Timur 2025-2045 Kutai Timur juga sudah mengikuti *locus* pembangunan Kalimantan Timur sebagai daerah pusat hilirisasi.

4.4. Sasaran Utama Visi

Terwujudnya Kutim Hebat sebagai daerah yang maju, Inklusif dan berkelanjutan tercermin dari 6 sasaran utama sebagaimana gambar 4.5. Lima sasaran visi ini diturunkan secara imperatif dari sasaran visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu tiga sasaran visi lain yaitu pengurangan ketergantungan pada sektor tambang, menjadi gerbang/tol laut strategis nasional dan menjadi pusat pertambangan dan perkebunan berkelanjutan nasional merupakan sasaran visi spesifik terkait kebutuhan pembangunan Kabupaten Kutai Timur kedepannya.

Gambar 4. 5 Sasaran Utama Visi Kutim Hebat 2045



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator penting kemajuan karena menggambarkan tingkat produktivitas rata-rata masyarakat Kutim. Namun perlu dicatat bahwa secara pendapatan per kapita Kutai Timur termasuk daerah yang sudah memiliki pendapatan per kapita sangat tinggi. Namun pendapatan per kapita tersebut lebih ditopang dari pendapatan sektor tambang yang secara inklusivitas relatif cukup rendah, sehingga fokus inklusivitas menjadi sangat penting dalam hal ini. Namun, pendapatan per kapita yang stabil harus tetap dijaga untuk menjaga performa ekonomi secara umum.

Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Berkaitan dengan fokus peningkatan inklusivitas, sasaran visi ini merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan. Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan dapat menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil, memicu pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Perekonominan dan Daya Saing Daerah: Kutai Timur dapat menjadi daerah yang tidak hanya memiliki peran strategis kedalam tetapi juga memiliki dampak yang besar dalam skala yang lebih tinggi baik di level provinsi, nasional maupun global baik secara individu maupun komunal melalui SDM yang unggul dan daerah yang Tangguh. Hal ini sangat feasible untuk dicapai jika dilihat dari modal dan posisi strategis yang dimiliki oleh Kutai Timur.

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM). Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pemahaman bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan potensi masyarakat merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan menghasilkan SDM yang unggul, Kutai Timur dapat lebih baik bersaing di pasar global, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan perkembangan budaya. Keseluruhan, sasaran-sasaran ini dipilih dengan visi keberlanjutan dan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang holistik dan inklusif di Kabupaten Kutai Timur.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (*Nett Zero Emission*). Sasaran utama visi ini menunjukkan bagaimana Kutai Timur juga ikut serta dalam mengatasi isu global terkait perubahan iklim. Isu ini juga sangat relevan dengan Kutai Timur sebagai kabupaten yang cukup luas di Pulau Kalimantan yang terkenal dengan paru-paru dunia. Selain itu sasaran visi ini juga menggambarkan pilar keberlanjutan yang ada pada Visi Kutim Hebat 2045.

Untuk memastikan ketercapaian dan progresivitas dari kelima sasaran visi ini, maka masing-masing dilengkapi dengan indikator pencapaian. Masing-masing indikator pencapaian ini diselaraskan dengan indikator pencapaian baik dalam RPJPN maupun RPJPD Kalimantan Timur dengan beberapa penyesuaian. Selain itu juga ditambahkan beberapa indikator capaian yang berkaitan dengan sasaran utama visi yang bersifat spesifik dengan Kabupaten Kutai Timur. Berikut beberapa indikator sasaran utama visi Kabupaten Kutai Timur 2025- 2045

Tabel 4. 2 Indikator sasaran utama visi Kabupaten Kutai Timur 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target			
			2029	2034	2039	2045
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	399,6	547,05 - 724,09	694,5 - 1048,5 7	841,94 - 1373,0 6	989,39 - 1.697,5 4
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	3,52	12,54	21,57	30,59	39,61
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,87	5,94 - 6,05	4,01 - 4,23	2,07 - 2,40	0,13 - 0,58
	Rasio gini (Indeks)	0,29 - 0,32	0,29 - 0,31	0,29 - 0,31	0,28 - 0,3	0,28 - 0,29
Peningkatan Perkonomian dan Daya Saing Daerah	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi (%)	19,24	17,96	16,67	15,39	14,1
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8 - 9	7,5 - 8,5	7 - 8	6,5 - 7,5	6 - 7
	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	2,89	3,18	3,47	3,76	4,05
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM (indeks)	76,18	78,96	81,75	84,53	87,31
Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	61,66	70,83	80,00	89,16	98,33
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (indeks)	78,88	79,74	80,59	81,45	82,3

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

4.5. Misi

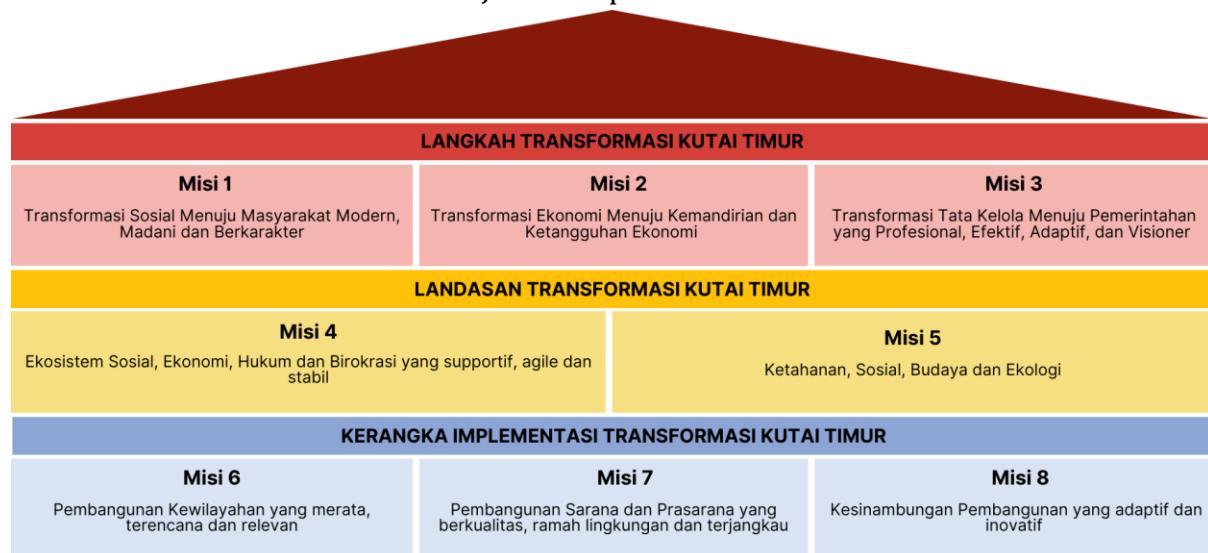
Untuk mencapai Visi Kutim Hebat 2045, diturunkan 8 misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur mengikuti kerangka berpikir pembangunan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Kerangka pembangunan mengarahkan

pembangunan dalam 2 dekade mendatang dijalankan dengan narasi transformatif. Misi Kabupaten Kutai Timur ini memiliki 3 misi yang merupakan langkah transformasi Kutai Timur yaitu: i) Transformasi Sosial menuju masyarakat modern, madani dan berbudaya, ii) Transformasi Ekonomi menuju kemandirian dan ketangguhan ekonomi, dan iii) Transformasi tata kelola menuju pemerintah yang profesional, efektif dan visioner.

Untuk melakukan tiga transformasi ini secara baik dibutuhkan kondisi ekosistem yang mendukung. Tanpa kondisi ini proses transformasi yang dilakukan tidak akan berjalan secara optimal. Untuk menyelaraskan ini maka terdapat 2 misi yang merupakan landasan transformasi Kutai Timur yaitu: i) Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum dan Birokrasi yang supportif, agile dan stabil, dan ii) Ketahanan, Sosial, Budaya dan Ekologi.

Untuk memastikan bahwa proses transformasi dilakukan selaras dengan visi, nilai dan prinsip pembangunan Kutai timur yang inklusif dan berkelanjutan serta secara teknis dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicanangkan maka 3 misi terakhir terkait dengan kerangka implementasi transformasi Kutai Timur yaitu: i) Pembangunan Kewilayahan yang merata, terencana dan relevan, ii) Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan dan terjangkau, dan iii) Kesinambungan Pembangunan yang mengoptimalkan potensi daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Rancangan bangun dari misi ini secara lengkap tersaji pada gambar berikut.

Gambar 4. 6 Misi RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Misi 1: Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Modern, Madani dan Berkarakter

Misi ini mencerminkan kesadaran Kutai Timur akan pentingnya transformasi sosial dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang. Pemilihan misi ini didasarkan pada justifikasi logis bahwa transformasi sosial akan menciptakan masyarakat atau sumber daya manusia (SDM) yang lebih inklusif, dinamis, dan berdaya saing. Progresivitas kemajuan salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan kapabilitas SDM.

Masyarakat/SDM dalam hal ini tidak hanya sebagai subjek tetapi sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Selaku subjek pembangunan, masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan terjadinya transformasi pembangunan baik untuk mendorong kegiatan ekonomi, menciptakan tata kelola yang baik, serta memastikan terbentuknya ekosistem pembangunan yang menyejahterakan untuk semua. Transformasi dari Kutai Timur dalam dua puluh tahun kedepan diharapkan dapat membentuk masyarakat modern, madani dan berkarakter yaitu masyarakat yang berdaya saing dan maju tetapi tetap menjaga nilai, prinsip, norma dan budaya yang berkembang ditengah masyarakat.

Misi 2: Transformasi Ekonomi Menuju Kemandirian dan Ketangguhan Ekonomi

Misi ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan Kutai Timur untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tambang yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Justifikasi logisnya adalah bahwa diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor yang berkelanjutan akan menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang. Keunggulan dalam sektor pertambangan dapat diintegrasikan dengan pengembangan industri lokal, pertanian modern, dan sektor jasa. Kelemahan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia, harus diatasi melalui investasi strategis dalam pendidikan dan infrastruktur. Sejalan dengan isu strategis nasional dan provinsi, misi ini mendukung transformasi ekonomi nasional ke arah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi 3: Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Adaptif, dan Visioner

Misi ini dipilih untuk mengatasi tantangan tata kelola yang dapat menghambat pencapaian visi Kutai Timur Hebat. Justifikasi logisnya adalah bahwa pemerintahan yang baik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Pemilihan misi ini didukung oleh kebutuhan akan sistem administrasi yang profesional dan transparan untuk memitigasi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, juga dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, di mana mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan konteks dan zaman. Untuk konteks Kutai Timur, tata kelola yang visioner juga menjadi kunci utama. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat pentingnya political will dan tata kelola yang berorientasi jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ditengah kemewahan yang saat ini diberikan oleh sektor tambang. Dalam konteks nasional dan provinsi, misi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola yang bersih dan efisien.

Misi 4: Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil.

Misi ini ditetapkan untuk merespons kebutuhan Kutai Timur akan sistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial secara seimbang. Ekosistem yang supportif, agile, dan stabil akan menciptakan kondisi ideal bagi

masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk bekerja sama dan mengoptimalkan peran masing-masing. Keunggulan dalam membangun ekosistem yang mendukung dapat memberikan insentif bagi investasi dan inovasi, sementara kelemahan seperti ketidakpastian hukum dan birokrasi yang kompleks dapat diatasi melalui reformasi kebijakan yang efektif. Selain itu juga dibutuhkan ekosistem yang agile dan stabil. Agility sebuah ekosistem akan memberikan kepastian kepada stakeholders pembangunan seperti investor ruang untuk dapat berkembang sedangkan kestabilan ekosistem memberikan kepastian akan resiko yang rendah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah nasional maupun daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan daya saing daerah.

Misi 5: Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Ketahanan sosial, budaya dan ekologi merupakan hal krusial yang perlu dipastikan dalam melaksanakan transformasi pembangunan. Ketahanan masyarakat, budaya, dan ekologi saling terkait satu sama lain dan merupakan *necessary condition* untuk menjalankan transformasi baik sosial, ekonomi maupun tata kelola yang optimal dan berkelanjutan. Misi ini juga memastikan bahwa proses transformasi pembangunan Kutai Timur juga selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Terencana, dan Relevan.

Misi ini dipilih untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur. Justifikasi logisnya terletak pada pemahaman bahwa pembangunan yang merata akan menciptakan inklusivitas dan mengurangi disparitas antarwilayah. Keunggulan dalam pemanfaatan potensi lokal dapat diperluas ke seluruh daerah, sementara kelemahan seperti ketidakmerataan distribusi sumber daya dan infrastruktur memerlukan perencanaan dan implementasi kebijakan yang cermat. Pembangunan Kewilayahan yang dilakukan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini semakin krusial mengingat latar belakang masyarakat yang beragam dan memiliki kesejahteraan subjektif yang berbeda. Misi ini mendukung visi pembangunan nasional yang mendorong pembangunan merata di seluruh Indonesia dan menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial tidak hanya terjadi di daerah perkotaan saja.

Misi 7: Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Ramah Lingkungan, dan Terjangkau.

Misi ini dipilih untuk memastikan infrastruktur yang baik sebagai dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam sarana dan prasarana yang berkualitas akan meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Sarana prasarana yang dibangun juga harus dipastikan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan semangat keberlanjutan pembangunan. Selain itu, sebagai daerah yang memiliki luas yang cukup besar, pembangunan sarana-prasarana yang dilakukan juga harus menjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. *Competitive advantage* yang saat ini dimiliki oleh

Kabupaten Kutai Timur berupa kapasitas fiskal yang memadai dari nilai ekonomi sektor tambang dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan.

Misi 8: Kesinambungan Pembangunan yang Adaptif dan Inovatif

Misi ini mencerminkan komitmen Kutai Timur untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman dan mampu untuk berkembang secara mandiri dan inovatif. Kesinambungan pembangunan memerlukan kesiapan untuk menghadapi perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi. Keunggulan dalam kapabilitas dan adaptabilitas dapat menjadi kekuatan bagi Kutai Timur, sementara kelemahan dalam kurangnya fleksibilitas perlu diatasi melalui perencanaan yang responsif dan strategi pengembangan yang adaptif dan progresif.

Keseluruhan, misi-misi ini terpilih dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks unik Kutai Timur, dengan fokus pada keunggulan lokal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi tantangan strategis yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Pemilihan setiap misi didasarkan pada pertimbangan akademis dan teknokratis untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi pencapaian visi pembangunan Kutai Timur Hebat yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)

Kabupaten
Kutai Timur
2025-2045



Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Transformasi Kutai Timur



Misi 1

Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Modern dan Berkarakter

Misi 2

Transformasi Ekonomi Menuju Kemandirian dan Ketangguhan Struktur Ekonomi

Misi 3

Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Adaptif, dan Visioner

Kesehatan Untuk Semua

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Perlindungan Sosial yang Adaptif

IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Transformasi Digital

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Landasan Transformasi

● ○ □ ▷

Stabilitas Ekonomi Makro

Ketangguhan Diplomasi Pertahanan Berdaya Gentar

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Lingkungan Hidup Berkualitas

Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kerangka Implementasi Transformasi



Misi 6

Pembangunan Kewilayahan yang merata, terencana dan relevan

Misi 7

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan dan terjangkau

Misi 8

Kesinambungan Pembangunan yang mengoptimalkan potensi daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat dibandingkan yang pernah dialami sebelumnya. Perubahan ini tentunya menuntut upaya yang lebih baik dari Kutai Timur dalam menjaga perkembangan dan pembangunan daerah. Ditengah perubahan yang kompleks, Kutai Timur menghadapi berbagai tantangan lokal, regional maupun nasional yang cukup beragam. Hal ini harus disikapi dengan bijak dan tepat.

Dengan kondisi ini, untuk mencapai Visi Kutai Timur Hebat 2045, Kutai Timur harus menyesuaikan pendekatan pembangunan yang telah dijalankan. Sebagaimana dengan pendekatan pembangunan yang juga diterapkan oleh nasional dan provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen perencanaan, pendekatan pembangunan yang paling tepat dilakukan adalah pendekatan transformasi pembangunan. Transformasi pembangunan ini dibagi kedalam tiga aspek yaitu transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Ketiga transformasi ini adalah kunci penting pembangunan jangka Panjang, di mana ketiganya saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan Kutai Hebat 2045.

Tiga proses transformasi tersebut harus didukung oleh landasan kuat terkait dengan dukungan, daya adaptabilitas dan stabilitas lingkungan sosial ekonomi, hukum dan birokrasi serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang dimiliki Kutai Timur. Kerangka implementasi transformasi harus dijalankan secara bijak dan terencana serta

mempertimbangkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Masing-masing misi yang Terdapat dalam Visi Kutim Hebat 2045 ini perlu diturunkan kedalam beberapa arah pembangunan dan arah Kebijakan sebagai kerangka detail dan arahan implementasinya. Masing-masing arah pembangunan ini akan diturunkan kedalam arah kebijakan transformasi masing-masing misi. Sebagai target pencapaian di akhir periode perencanaan, masing-masing arah pembangunan akan merepresentasikan sasaran pokok yang ingin dicapai. Masing-masing sasaran pokok ini akan memiliki indikator utama pembangunan yang dapat dijadikan patokan pencapaian dan evaluasi proses pembangunan dalam 20 tahun mendatang.

Untuk arah pembangunan dan indikator yang digunakan mengikuti arahan imperatif dan pengembangan dari RPJPN dan RPJPD Kalimantan Kutai Timur dan memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan arah Kebijakan berkelanjutan serta kebutuhan yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah skenario dan rekomendasi dari KLHS. Skenario dan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat penting untuk diintegrasikan dalam arah kebijakan pembangunan RPJPD Kutai Timur. KLHS, dengan analisis mendalam terhadap dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari berbagai skenario pembangunan, memberikan panduan berharga untuk merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Skenario yang dikembangkan memungkinkan pemangku kebijakan memahami implikasi jangka panjang dari berbagai pilihan kebijakan, memastikan keseimbangan antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Rekomendasi dari KLHS membantu merancang kebijakan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta memberikan panduan praktis untuk implementasi pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kutai Timur, terdapat dua skenario utama: Tanpa Upaya Tambahan (TUT) dan Dengan Upaya Tambahan (DUT). Skenario TUT menggambarkan capaian TPB tanpa intervensi tambahan, sedangkan skenario DUT mempertimbangkan upaya tambahan untuk mencapai TPB, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kedua skenario ini memberikan pandangan berbeda tentang pendekatan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya upaya tambahan dalam pelestarian lingkungan untuk mencapai tujuan yang belum terpenuhi. Kedua skenario ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan arah pembangunan dan indikator pembangunan Kabupaten Kutai Timur, sekaligus mengevaluasi kelayakan, risiko, dan upaya tambahan untuk mencapai Visi Kutim Hebat 2045.

Selanjutnya, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci arah kebijakan dan sasaran pokok yang terkait dengan proses transformasi pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Sebelum menjelaskan lebih detail terkait arah pembangunan, sasaran pokok, arah kebijakan transformasi dan indikator utama pembangunan masing-masing misi, maka juga akan dijelaskan arah kebijakan pembangunan per masing-masing tahapan pembangunan yang mengikuti tahapan pembangunan yang dijelaskan pada bab

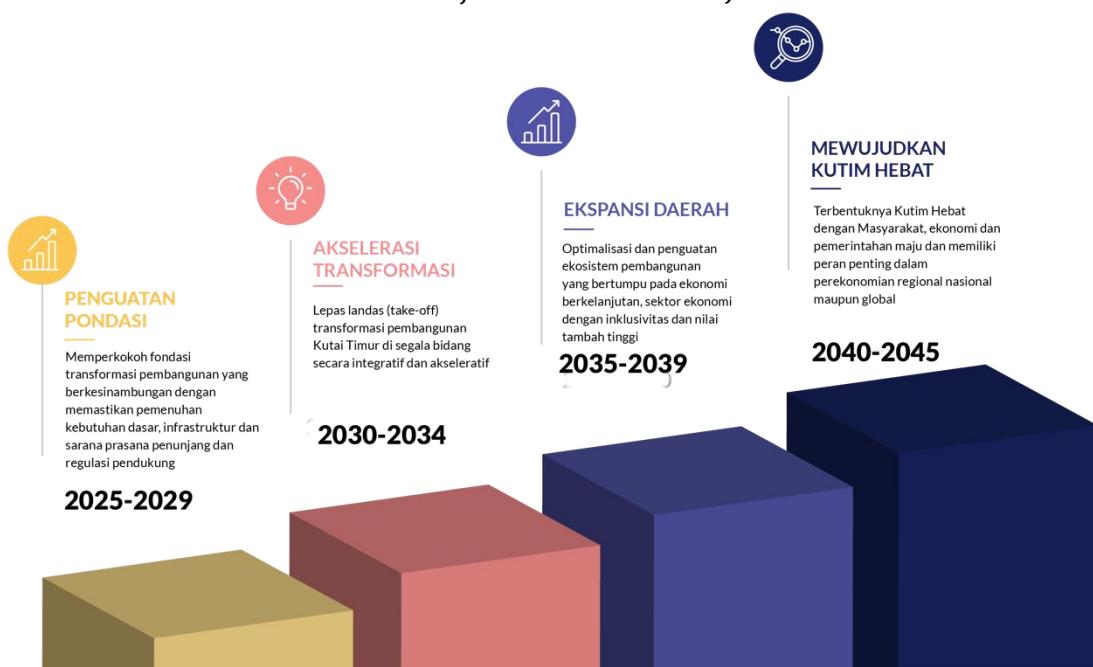
sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesinambungan dan kematangan strategi pencapaian visi secara bertahap dan acuan untuk penurunan dokumen RPJPD.

5.1. Arah Kebijakan

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahunan Kutai Timur

Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 yang telah disusun di bab sebelumnya diturunkan ke dalam 4 arah kebijakan bertahap yang memperhatikan tujuan akhir dari pembangunan yang dilakukan serta tahapan pembangunan yang akan di rencanakan. Secara umum arah kebijakan umum dari visi Kutai Timur ini tersaji dalam gambar 5.1.

Gambar 5. 1 Arah Kebijakan 5 tahunan RPJPD Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Arah kebijakan pembangunan per tahapan ini sudah disesuaikan dengan periode pembangunan RPJPN maupun RPJPD Kalimantan Timur yang terdiri dari 4 fase pembangunan yaitu: penguatan fondasi, akselerasi transformasi, ekspansi daerah dan perwujudan Kutim Hebat. Secara substansi hal ini juga disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang telah dibuat pada bab sebelumnya dan memperhatikan proses kesinambungan pencapaian visi yang telah dicanangkan. Empat tahapan ini juga selaras dengan periodisasi RPJMD dua puluh tahun mendatang. Penjelasan masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan Penguatan Fondasi (2025-2029)

Tahapan ini merupakan tahapan pertama periode RPJMD 2025-2029. Dalam tahapan Kutai Timur diharapkan memperkokoh fondasi transformasi pembangunan yang berkesinambungan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur dan sarana prasana penunjang dan regulasi

- pendukung. Hal ini penting untuk dilakukan sebelum dilaksanakan proses Transformasi yang masif pada tahap kedua.
2. Tahapan Akselerasi Transformasi (2030-2034)
Tahapan kedua adalah akselerasi Transformasi yang dapat diartikan sebagai proses masif dari Transformasi pembangunan yang dilakukan oleh Kutai Timur. Fase ini adalah fase Lepas landas (take-off) transformasi pembangunan Kutai Timur di segala bidang secara integratif dan akseleratif.
 3. Tahapan Ekspansi (2035-2039)
Tahapan ini adalah tahapan RPJMD ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045. Pada tahapan ini, pembangunan Kutai Timur akan difokuskan untuk melakukan optimalisasi dan penguatan ekosistem pembangunan yang bertumpu pada ekonomi berkelanjutan, sektor ekonomi dengan inklusivitas dan nilai tambah tinggi. Dalam tahapan ini tujuan Kutai Timur untuk menjadi pusat hilirisasi SDA dan struktur ekonomi yang lebih inklusif sudah tercapai
 4. Tahapan Perwujudan Kutim Hebat 2045
Tahapan ini merupakan periode RPJMD terakhir dalam mencapai visi Kutim Hebat 2045. Dalam tahapan ini ditandai dengan terbentuknya masyarakat, ekonomi dan pemerintahan maju dan memiliki peran penting dalam perekonomian regional nasional maupun global. Sehingga Kutim Hebat yang dimaksud adalah Kutim Hebat yang memiliki pembangunan yang tidak hanya berhasil secara internal tetapi juga memiliki peran yang baik secara eksternal.

Arah Kebijakan pertahapan pembangunan Kabupaten Kutai Timur juga diturunkan berdasarkan masing-masing misi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kesinambungan pelaksanaan dan pencapaian misi masing-masing transformasi berdasarkan empat periode pembangunan Kutai Timur dipastikan dengan cara memastikan sinkronisasi arah kebijakan periodik untuk mencapai masing-masing Transformasi dalam jangka waktu dan tahapan pembangunan Kabupaten Kutai Timur di atas. Masing-masing arah Kebijakan pertahapan untuk masing-masing misi dalam visi Kutai Timur Hebat 2045 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Lima Tahunan Transformasi Sosial

Pada periode pertama (**tahapan penguatan fondasi**), untuk mewujudkan transformasi sosial Kutai Timur, maka perlu dilakukan peningkatan pemenuhan layanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau, serta program jaminan sosial yang inklusif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Pada periode berikutnya (**akselerasi transformasi**), percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan dilakukan melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif yang menggabungkan keterampilan modern dengan pemahaman dan penghargaan terhadap etika agama, sosial, dan budaya (pendidikan berkarakter dan terampil). Pendidikan yang berbasis teknologi dan inovasi akan diperkuat dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal. Sehingga diharapkan dalam fase ini, masyarakat Kutai Timur akan menjadi individu yang berkompeten dalam konteks modern namun tetap memelihara identitas kultural mereka.

Pada tahap ketiga (**periode pemantapan**), penguatan daya saing SDM untuk bersaing di tingkat nasional maupun global menjadi fokus utama. Peningkatan kompetensi dan keterampilan dapat dilakukan melalui program pendidikan tinggi, *vocational training*, dan kerja sama internasional. Masyarakat Kutai Timur akan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dengan menekankan pada penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan. Program-program yang mendukung inovasi dan kewirausahaan akan diperluas, sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada periode terakhir (**Perwujudan Kutim Hebat 2045**) masyarakat Kutai Timur yang modern, madani, dan berbudaya diharapkan akan tercapai. Dalam hal ini, masyarakat Kutai Timur diharapkan dikenal sebagai komunitas yang maju, berpendidikan tinggi, dan berbudaya, dengan peran yang signifikan dalam perekonomian regional, nasional, maupun global. Kehidupan sosial akan ditandai dengan harmoni antara kemajuan modern dan pelestarian nilai-nilai budaya, menjadikan Kutai Timur sebagai contoh daerah yang berhasil dalam transformasi sosial. Pembangunan yang telah dicapai tidak hanya berhasil secara internal tetapi juga diakui secara eksternal.

Gambar 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Sosial per Tahapan Pembangunan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

B. Arah Kebijakan Lima Tahunan Transformasi Ekonomi

Pada **lima tahun pertama**, fokus utama transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Timur adalah optimalisasi surplus tambang dengan penguatan riset inovasi dan pengembangan sumber perekonomian baru yang memiliki tingkat multiplier effect dan inklusivitas tinggi. Langkah-langkah ini akan mencakup investasi dalam riset dan pengembangan untuk menemukan potensi ekonomi baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tambang. Pemerintah Kutai Timur perlu berupaya untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang terintegratif serta memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sementara itu, pada **periode kedua**, fokus transformasi ekonomi Kutai Timur akan beralih ke *shifting* struktur perekonomian dari sektor tambang menuju sektor-sektor lain yang berkelanjutan. Selain itu proses hilirasi sudah dapat dimulai. Upaya akan difokuskan pada pengoptimalkan potensi kekayaan daerah yang terbarukan seperti sektor pertanian, perkebunan, dan ekonomi kreatif serta mengoptimalkan hilirisasi sektor tambang dan sawit. Penciptaan nilai tambah industri akan didorong melalui investasi dalam teknologi dan inovasi. Transformasi ini diharapkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada sektor tambang.

Pada tahap ekspansi (**periode ketiga**), fokus akan diarahkan pada penguatan *targeting, segmenting, dan positioning* (TSP) Kutai Timur sebagai daerah penyangga perekonomian provinsi, nasional, dan global dan pusat hilirisasi SDA. Peningkatan konektivitas barang dan jasa, baik secara domestik maupun global, akan menjadi prioritas. Upaya kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan mitra internasional akan ditingkatkan untuk meningkatkan akses pasar dan memperluas jaringan perdagangan.

Pada **periode keempat**, visi untuk mewujudkan perekonomian Kutai Timur yang tangguh dan mandiri akan tercapai. Ketergantungan pada sektor pertambangan akan berkurang secara signifikan, dan Kutai Timur akan menjadi contoh sukses dalam diversifikasi ekonomi. Perekonomian yang tangguh dan mandiri akan memberikan kestabilan dan ketahanan terhadap perubahan ekonomi global. Selain itu, Kutai Timur akan menjadi pusat inovasi dan pengembangan ekonomi yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian regional, nasional, dan global, sesuai dengan visi Kutim Hebat 2045.

Gambar 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi per Tahapan Pembangunan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

C. Arah Kebijakan Lima Tahunan Transformasi Tata Kelola

Pada periode pembangunan **tahap 1**, prioritas utama transformasi tata kelola Kutai Timur adalah penguatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem layanan birokrasi, dan koordinasi tata kelola pemerintahan secara horizontal maupun vertikal. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN melalui program pelatihan dan pengembangan. Sistem layanan birokrasi juga akan diperbaiki untuk memastikan efisiensi dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah akan ditingkatkan untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

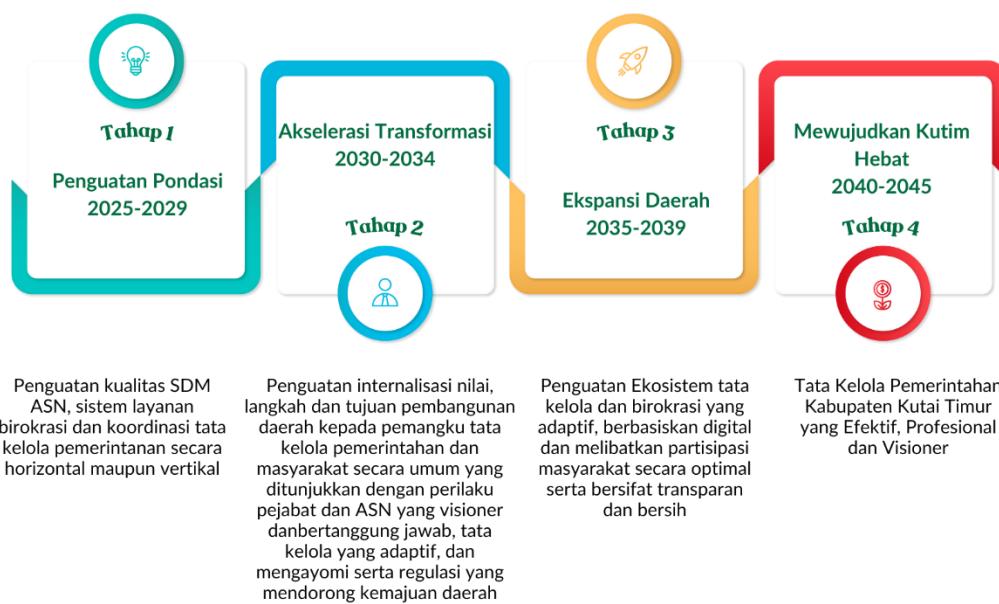
Pada **tahap kedua** (periode akselerasi transformasi), fokus akan beralih ke penguatan internalisasi nilai, langkah, dan tujuan pembangunan daerah kepada pemangku tata kelola pemerintahan dan masyarakat secara umum. Perilaku pejabat dan ASN yang visioner dan bertanggung jawab akan didorong melalui pembinaan etika dan moralitas yang tinggi. Tata kelola yang adaptif dan inklusif akan ditegakkan, dengan pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan. Regulasi yang progresif dan mendukung inovasi juga akan diperkenalkan untuk mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Pada **tahap 3** (periode ekspansi daerah), fokus akan ditempatkan pada penguatan ekosistem tata kelola dan birokrasi yang adaptif, berbasis digital, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Sistem tata kelola akan ditingkatkan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Partisipasi masyarakat akan didorong melalui

platform digital dan forum partisipatif, sehingga keputusan pemerintah menjadi lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada **tahap 4**, visi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan visioner akan tercapai. Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur akan menjadi contoh dalam tata kelola yang baik, dengan ASN yang kompeten dan bertanggung jawab serta sistem birokrasi yang efisien dan transparan. Keputusan yang diambil akan didasarkan pada visi jangka panjang yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, menjadikan Kutai Timur sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, sesuai dengan visi Kutim Hebat 2045.

Gambar 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola per Tahapan Pembangunan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

D. Arah Kebijakan Lima Tahunan Landasan Transformasi Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil

Pada **tahap pertama** (periode penguatan fondasi), prioritas utama dalam rangka penguatan ekosistem adalah memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekosistem sosial, ekonomi, dan birokrasi melalui kebijakan dan regulasi yang supportif dan tepat sasaran. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial yang inklusif serta menjaga stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pada **periode kedua** (akselerasi transformasi), fokus akan dialihkan pada usaha untuk memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekosistem sosial, ekonomi, dan birokrasi yang dapat mempercepat kemajuan sosial dan ekonomi. Reformasi hukum dan perbaikan sistem kelembagaan akan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum dan keadilan. Sementara itu, stabilitas ekonomi akan

dijaga melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada **tahap ketiga** (ekspansi), fokus akan diarahkan untuk memperkokoh ekosistem sosial, ekonomi, birokrasi, dan hukum di Kutai Timur yang adil, stabil, aman, nyaman, dan akseleratif. Langkah-langkah konkret yang akan diambil terutama untuk memperkuat kerja sama regional, kawasan, dan global dalam membangun ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah lainnya serta pihak swasta dan masyarakat sipil akan ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

Pada periode terakhir (**tahap ke empat**), visi untuk mewujudkan ekosistem sosial, ekonomi, hukum, dan birokrasi Kutai Timur yang integratif, supportif, agile, dan stabil akan tercapai. Sistem yang telah diperkuat dan diperbaiki akan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan Kutai Timur yang maju dan berkelanjutan. Masyarakat diharapkan dapat menikmati keamanan, kesejahteraan, dan keadilan yang lebih baik, sesuai dengan visi Kutim Hebat 2045.

Gambar 5. 5 Arah Kebijakan Landasan Transformasi (Misi 4) per Tahapan Pembangunan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

E. Arah Kebijakan Lima Tahunan Landasan Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Pada **tahap 1** (periode penguatan fondasi), fokus utama adalah memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Pemerintah perlu mengupayakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologi. Program-program ketahanan keluarga, pendidikan dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan dan pelestarian budaya lokal. Upaya

juga harus dilakukan untuk melindungi dan memelihara ekosistem alam yang menjadi basis bagi kehidupan manusia.

Pada **tahap 2** (periode akseleerasi transformasi), prioritas akan dialihkan untuk memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang merata dan inklusif. Upaya yang dilakukan akan difokuskan pada integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan ekologi juga perlu menjadi fokus dengan menumbuhkan keterampilan adaptasi dan mitigasi risiko.

Pada **tahap 3** (periode ekspansi), arah kebijakan akan difokuskan pada mewujudkan ketangguhan dan agility manusia, masyarakat, serta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan. Langkah-langkah taktis perlu diambil untuk memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim, peningkatan resiliensi komunitas terhadap bencana alam, dan penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Sinergi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi perlu menjadi kunci dalam membangun Kutai Timur yang tangguh dan berkelanjutan.

Pada **tahap 4** diharapkan Kabupaten Kutai Timur sebagai Daerah Maju dan Modern yang berkelanjutan secara sosial, budaya, dan lingkungan akan tercapai. Upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang tangguh, berbudaya, dan peduli lingkungan. Kutai Timur akan menjadi contoh dalam pelestarian budaya lokal, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Gambar 5. 6 Arah Kebijakan Landasan Transformasi (Misi 5) per Tahapan Pembangunan



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Arah Kebijakan pembangunan untuk masing-masing tahapan pembangunan Kutai Timur secara rinci tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Kabupaten Kutai Timur

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	AKSELERASI PEMBANGUNAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	PERWUJUDAN KUTIM HEBAT 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Visi Kutim Hebat 2045: Pusat Hilirisasi SDA yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan	Arah Kebijakan Tahapan Pembangunan Secara Umum	Memperkokoh fondasi transformasi pembangunan yang berkesinambungan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur dan sarana prasana penunjang dan regulasi pendukung	Lepas landas (take-off) transformasi pembangunan Kutai Timur di segala bidang secara integratif dan akeleratif.	Optimalisasi dan penguatan ekosistem pembangunan yang bertumpu pada ekonomi berkelanjutan, sektor ekonomi dengan inklusivitas dan nilai tambah tinggi	Terbentuknya Kutim Hebat dengan Masyarakat, ekonomi dan pemerintahan maju dan memiliki peran penting dalam perekonomian regional nasional maupun global
	Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Modern, Madani dan Berbudaya	Peningkatan pemenuhan layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat	Percepatan pembangunan SDM yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keseimbangan antara kapasitas sebagai individu modern dan kemampuan dalam menjaga etika agama sosial dan budaya	Penguatan daya saing SDM untuk bersaing di tingkat nasional maupun global, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta perwujudan dari kesejahteraan berkelanjutan	Terbentuknya masyarakat Kutai Timur yang modern madani dan berbudaya
	Transformasi Ekonomi Menuju Kemandirian dan Ketangguhan Ekonomi	Optimalisasi surplus tambang dengan penguatan riset inovasi dan sumber perekonomian baru yang memiliki tingkat multiplier effect dan inklusivitas tinggi serta penciptaan ekosistem perekonomian terintegratif	Shifting struktur perekonomian dari sektor tambang dan pelaksanaan perekonomian berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi kekayaan daerah yang terbarukan seperti sektor pertanian dan perkebunan, ekonomi kreatif dan penciptaan nilai tambah industri	Penguatan targetting, segmenting dan positioning (TSP) sebagai daerah penyangga perekonomian provinsi, nasional dan global melalui peningkatan koneksi barang dan jasa secara domestik dan global.	Terbentuknya Perekonomian Kutai Timur yang tangguh dan mandiri dengan ketergantungan pada sektor pertambangan yang rendah
	Transformasi Tata Kelola Menuju	Penguatan kualitas SDM ASN, sistem layanan birokrasi dan koordinasi tata kelola	Penguatan internalisasi nilai, langkah dan tujuan pembangunan daerah	Penguatan Ekosistem tata kelola dan birokrasi yang adaptif, berbasiskan digital	Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN	AKSELERASI PEMBANGUNAN	PEMANTAPAN PEMBANGUNAN	PERWUJUDAN KUTIM HEBAT 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintahan yang Profesional, Efektif dan Visioner	pemerintahan secara horizontal maupun vertikal	kepada pemangku tata kelola pemerintahan dan masyarakat secara umum yang ditunjukkan dengan perilaku pejabat dan ASN yang visioner dan bertanggung jawab, tata kelola yang adaptif, dan mengayomi serta regulasi yang mendorong kemajuan daerah	dan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal serta bersifat transparan dan bersih	Efektif, Profesional dan Visioner
	Penguatan Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum dan Birokrasi yang supportif, agile dan stabil	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekosistem sosial, ekonomi dan birokrasi melalui kebijakan dan regulasi yang supportif dan tepat sasaran	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekosistem sosial, ekonomi dan birokrasi yang dapat mempercepat kemajuan sosial dan ekonomi	Memperkokoh ekosistem sosial, ekonomi, birokrasi dan hukum Kutai Timur yang adil, stabil, aman nyaman dan akseleratif serta kerja sama regional, kawasan dan global	Mewujudkan ekosistem sosial, ekonomi, hukum dan birokrasi Kutai Timur yang integratif, supportif, agile dan stabil.
	Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang merata dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan dan agility manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sebagai Daerah Maju dan Modern yang berkelanjutan secara sosial, budaya dan lingkungan

5.1.2. Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan Transformasi Visi Kutim Hebat 2045

Masing-masing misi yang telah jabarkan pada bab sebelumnya memiliki arah (tujuan) pembangunan yang menjelaskan lebih detail terkait pelaksanaan misi ini yang juga selaras dengan RPJPN dan RPJPD Kalimantan Timur. Gambar 5.7 di bawah menunjukkan misi pembangunan Kutai Timur beserta arah pembangunannya masing-masing. Setiap arah-arah pembangunan juga akan dijabarkan dengan arah Kebijakan transformasinya.

Gambar 5. 7 Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045

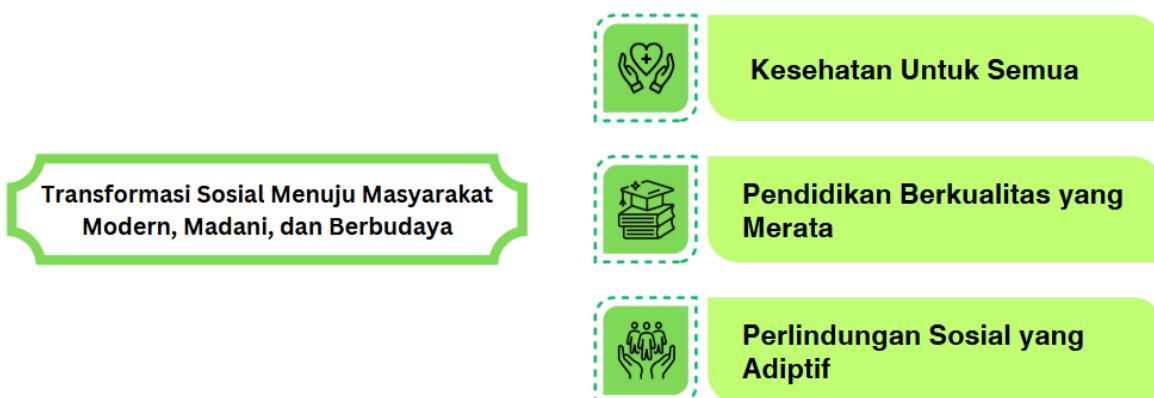


Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

5.1.2.1 Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Modern, Madani, dan Berkarakter

Transformasi sosial mengacu pada perubahan dalam nilai, norma, budaya, dan struktur sosial suatu masyarakat yang melibatkan perubahan dalam pandangan terhadap berbagai isu seperti gender, agama, etnisitas, dan hak asasi manusia. Transformasi sosial melibatkan perubahan dalam sistem pendidikan, peran keluarga, dan struktur sosial ekonomi yang dipicu oleh faktor-faktor seperti perubahan teknologi, globalisasi, atau gerakan sosial. Dalam mewujudkan Visi Kutim Hebat 2045, proses transformasi sosial merupakan kunci penting, terutama dalam menciptakan SDM unggul yang merupakan salah satu faktor ekonomi utama sekaligus subjek dan objek pembangunan. Transformasi sosial Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk menciptakan masyarakat Kutim yang modern, madani dan berbudaya. Untuk mencapai tujuan ini maka diturunkan empat arah pembangunan seperti tersaji dalam gambar dibawah.

Gambar 5. 8 Arah Pembangunan Transformasi Sosial Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Kesegatan Untuk Semua: Hal ini ditetapkan sebagai arah pembangunan pertama dalam transformasi sosial Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada pertimbangan bahwa kesehatan masyarakat merupakan fondasi utama bagi transformasi sosial yang berkelanjutan. Keunggulan Kutai Timur dalam sumber daya alam dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur kesehatan yang berkualitas. Kelemahan, seperti ketidakmerataan akses pada layanan kesehatan, memerlukan pendekatan yang merata untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. Peluang dalam pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan mengatasi tantangan kesehatan spesifik daerah perlu diidentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal. Fokus pada penyediaan layanan kesehatan yang *up to date* dan merata juga mendukung upaya pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan. Investasi dalam layanan kesehatan yang modern dan terjangkau adalah langkah strategis untuk mencapai masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing di zaman yang semakin berkembang.

Pendidikan Berkualitas yang Merata: Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk membentuk masyarakat modern dan

berbudaya. Keunggulan Kutai Timur dalam sumber daya manusia dan potensi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dapat ditingkatkan melalui penyediaan layanan pendidikan yang merata dan sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan pembangunan daerah. Kelemahan seperti ketidakmerataan akses pendidikan dan perbedaan kualitas pendidikan di berbagai wilayah memerlukan upaya meratakan standar pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas. Peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam pendidikan perlu dikaji dan diimplementasikan secara matang. Selain itu, dengan memastikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, hal ini juga mendukung upaya provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia dalam menciptakan SDM yang unggul dan adaptif.

Perlindungan Sosial yang Adaptif: Arah pembangunan ini ditetapkan dengan dasar bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat adalah landasan yang sangat esensial untuk transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Keunggulan Kutai Timur dalam SDA dapat diarahkan untuk mendukung program-program jaminan sosial yang berkelanjutan dan juga merata. Kelemahan dalam ketidakmerataan distribusi kesejahteraan dan kurangnya jaminan sosial yang memadai memerlukan kebijakan yang mampu menyasar dan mendukung lapisan masyarakat yang membutuhkan. Peluang untuk menciptakan program jaminan sosial yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal perlu diperhatikan. Dengan memastikan jaminan sosial yang merata dan tepat sasaran, arah kebijakan ini juga sejalan dengan isu strategis nasional dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Arah kebijakan ini juga menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mencapai transformasi sosial yang berkelanjutan. Keunggulan Kutai Timur dalam keberagaman budaya dan potensi sumber daya manusia dapat diperkuat melalui pendekatan pemberdayaan yang inovatif dan terencana. Ketidakmerataan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang saat ini terjadi memerlukan strategi yang dapat mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat secara kolaboratif untuk memperbaiki keadaan. Adanya teknologi informasi dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung inovasi lokal perlu dioptimalkan. Dengan memastikan pemberdayaan masyarakat yang inovatif, integratif, kolaboratif, dan terencana, maka juga akan mendukung upaya dalam mewujudkan masyarakat yang aktif, partisipatif, dan berdaya saing.

Arah pembangunan transformasi sosial ini dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan transformasi sosial yang menjelaskan lebih detail langkah-langkah yang dapat dilakukan Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai misi transformasi sosial ini. Arah kebijakan transformasi ini diidentifikasi dari kondisi yang dihadapi oleh Kutai Timur dan juga arah kebijakan strategis yang diturunkan oleh provinsi. Arah kebijakan transformasi tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Sosial Kabupaten Kutai Timur

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan	Perluasan upaya promotif- preventif kesehatan dilaksanakan melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan pendidikan kesehatan sejak dini, termasuk eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	18 Kecamatan
Penurunan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis	Penurunan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis dilaksanakan melalui pendekatan integrasi multisektor, rekayasa lingkungan habitat vektor dan pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan	18 Kecamatan
Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas serta kualitas tenaga kesehatan dilaksanakan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, serta afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di wilayah tertinggal	18 Kecamatan
Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis kewilayahan dan teknologi, penguatan ketahanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.	18 Kecamatan
Percepatan wajib belajar tahun	Percepatan wajib belajar tahun dilaksanakan melalui pemenuhan akses tahun prasekolah dan tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah	18 Kecamatan
Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah yang berkarakter	Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis kewilayahan dengan tingkat kebekerjaan tinggi dengan menjunjung tinggi tujuan penjagaan nilai-nilai moral, agama, kebangsaan, budi pekerti luhur, budaya serta sejarah perjuangan bangsa.	18 Kecamatan
Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dilaksanakan melalui pemberian kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan pemberian dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi serta pengadaan program studi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dan potensi pengembangan ekonomi daerah, khususnya program studi Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic (STEAM).	18 Kecamatan
Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif serta pemenuhan ketersediaan tenaga pendidik	18 Kecamatan

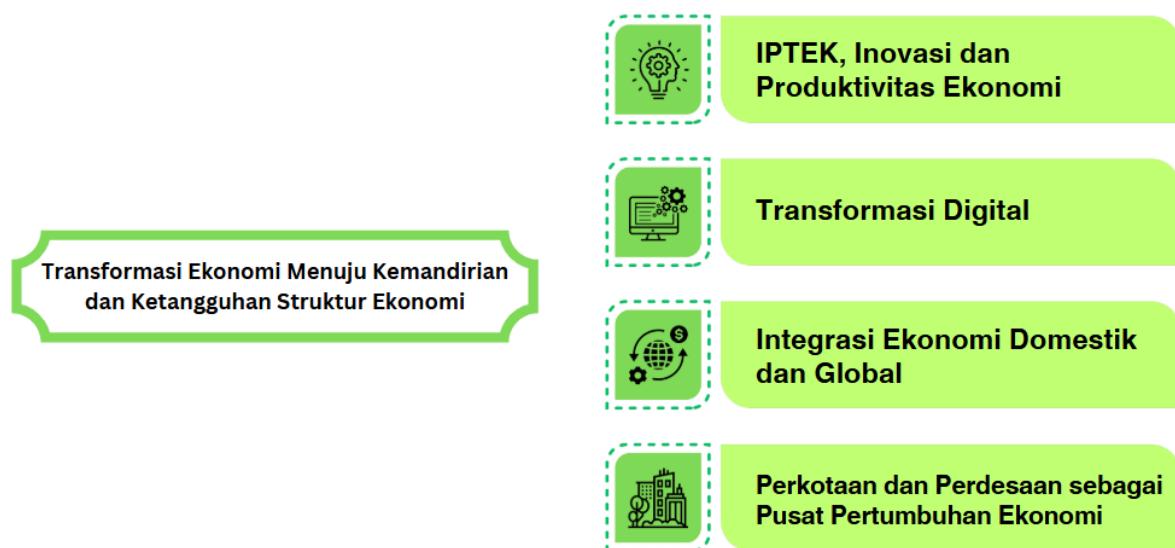
Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus	Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dilaksanakan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global yang didasarkan pada lapangan usaha potensial masa depan	Sangatta Utara
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dilaksanakan melalui revitalisasi dan pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, dengan memperhatikan sistem produksi dan tata niaga serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment dan pembentukan Center of Excellence	18 Kecamatan
Penyediaan afirmasi akses pendidikan	Penyediaan afirmasi akses pendidikan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah tertinggal dan terpencil	18 Kecamatan
Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal, pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan maupun perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terintegrasi antara program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program sosial kemasyarakatan (CSR perusahaan, lembaga sosial) program peningkatan infrastruktur, program ketenagakerjaan, serta program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan	18 Kecamatan
Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbarui secara berkala, terutama untuk daerah tertinggal	
Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui diantaranya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, serta pemanfaatan dan dukungan pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan	18 Kecamatan

5.1.2.2. Transformasi Ekonomi Menuju Kemandirian dan Ketangguhan

Transformasi ekonomi merujuk pada perubahan mendasar dalam struktur dan perilaku ekonomi suatu daerah. Transformasi ekonomi melibatkan perubahan dari struktur ekonomi. Transformasi ekonomi bertujuan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kutai Timur transformasi ekonomi utama adalah dalam merubah struktur ekonomi yang sangat bergantung pada SDA menjadi ekonomi yang memiliki basis yang cukup kuat pada sektor lain (memiliki diversifikasi ekonomi yang tinggi). Hal ini menjadi semakin sangat krusial dengan kondisi yang tidak pasti terkait dengan sektor pertambangan seperti batu bara. Ditambah lagi sektor ekonomi Kutai Timur yang didominasi sektor tambang dan galian menjadi sangat rapuh dan sensitif dengan perubahan harga komoditas barang tambang tersebut. Transformasi ekonomi dalam visi Kutai Timur Hebat 2045 ditujukan untuk menciptakan kemandirian dan ketangguhan Ekonomi Kutai Timur. Terdapat lima arah (kebijakan) pembangunan dalam misi ini sebagaimana tersaji dalam gambar di bawah.

Gambar 5. 9 Arah Pembangunan Transformasi Ekonomi Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi. Arah pembangunan ini merupakan arah pembangunan pertama dalam Transformasi Ekonomi Kutai timur. Peningkatan nilai tambah ekonomi Kabupaten Kutai Timur, arah pengembangan dan inovasi ekonomi harus diarahkan sejalan dengan tujuan Kutai Timur untuk menjadi pusat hilirisasi SDA. Langkah ini harus dilakukan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kutai Timur kedepan.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mampu *mengoptimalkan potensi Ekonomi IKN*. Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi pendorong utama transformasi ekonomi daerah terutama di daerah-daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur termasuk Kutai Timur. Keunggulan Kutai Timur dalam potensi sumber daya alam dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor yang dibutuhkan IKN. Kelemahan dalam kurangnya diversifikasi ekonomi dan ketergantungan pada sektor tambang memerlukan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan potensi IKN secara optimal bukan hanya untuk mendapatkan nilai ekonomi tetapi juga menjadi pendorong untuk bertransformasi menjadi daerah yang tidak terlalu bergantung pada sektor SDA tidak terbarukan. Selain itu, peluang untuk menarik investasi, mengembangkan industri terkait, dan menciptakan lapangan kerja dapat diperkuat melalui strategi pembangunan yang terencana. Dengan memastikan optimalisasi potensi ekonomi IKN secara otomatis Kutai Timur juga turut aktif berperan dalam agenda prioritas nasional.

Selain mengoptimalkan potensi IKN, untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Kutai Timur perlu *mengoptimalkan nilai ekonomi sektor tambang untuk industri potensial yang lebih sustainable*. Merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengarahkan manfaat ekonomi dari sektor tambang ke industri lain yang lebih berkelanjutan. Pemilihan arah kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan yang sangat logis dan

mendasar bahwa sektor tambang dapat berfungsi sebagai katalisator untuk perkembangan industri lain yang lebih berkesinambungan. Keunggulan Kutai Timur dalam potensi sumber daya alam dapat digunakan untuk menghasilkan nilai tambah dan mendukung diversifikasi ekonomi termasuk untuk menyokong agenda hilirisasi. Secara berkala hal ini tentunya juga akan mengurangi tingkat ketergantungan Kabupaten Kutai Timur terhadap sektor tambang. Pengembangkan industri pengolahan mineral, teknologi hijau, dan energi terbarukan dapat dioptimalkan melalui strategi optimalisasi nilai ekonomi. Hal ini dalam jangka Panjang juga memastikan struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur menjadi lebih Tangguh dan inklusif.

Sejalan dengan hal ini, pemerintah Kutai Timur juga harus melakukan *peningkatan kualitas dan kapasitas Industri/Sektor Non-SDA tak terbarukan*. Arah kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri non-SDA tak terbarukan adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam. Keunggulan Kutai Timur dalam potensi sumber daya manusia dan keberagaman sektor industri dapat diperkuat melalui peningkatan kualitas dan kapasitas industri non-SDA. Dalam mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor sumber daya alam memerlukan diversifikasi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Peluang dalam pengembangan industri manufaktur, teknologi, dan jasa dapat dioptimalkan melalui investasi dalam peningkatan kualitas dan kapasitas sektor industri.

Transformasi Digital. Untuk mengoptimalkan hasil dari dua arah pembangunan transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Timur sebelumnya, diperlukan arah pembangunan terkait transformasi digital. Digitalisasi sektor ekonomi akan memberikan *multiplier effect* yang lebih tinggi karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi. Digitalisasi di sisi lain juga memberikan peluang baik bagi pelaku ekonomi besar terutama pelaku ekonomi kecil seperti UMKM untuk mengembangkan usaha dan menambah daya jangkau aktivitasnya. Lebih lanjut arah pembangunan ini juga menekankan sisi penting dari mengembangkan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar dan kemajuan teknologi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing adalah kunci untuk mencapai kemandirian ekonomi. Potensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu menyediakan perguruan tinggi spesifik seperti vokasional dapat dikembangkan. Apalagi Kutim saat ini sudah memiliki perguruan tinggi seperti STIPER yang tinggal dikembangkan secara serius. Kesenjangan keterampilan dan kurangnya adaptabilitas tenaga kerja yang saat ini dihadapi memerlukan investasi dalam peningkatan kualifikasi dan keterampilannya. Kesempatan untuk menciptakan program pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan industri dan mempromosikan inovasi dalam pendidikan dapat dioptimalkan melalui strategi penciptaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini juga mendukung tujuan bangsa secara umum dalam menciptakan tenaga kerja untuk era industri 4.0.

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Arah pembangunan lainnya yang sangat krusial untuk melengkapi arah pembangunan Transformasi Kutai Timur adalah integrasi yang kuat antara perekonomian domestik, regional, nasional dan global. Perekonomian yang terintegrasi memberikan peluang yang lebih baik dalam meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa di dan melalui Kabupaten Kutai Timur. Posisi strategis Kutai Timur sebagai daerah Jalur ALKI II harus dimanfaatkan secara optimal. Selain itu integrasi ekonomi ini juga sangat penting dalam mendukung tujuan Kabupaten Kutai Timur sebagai Pusat Hilirisasi SDA karena akan menjamin konektivitas maupun aksesibilitas Kabupaten Kutai Timur sehingga meningkatkan daya saing produk hilirisasi yang dihasilkan. Selain itu integrasi ekonomi ini juga akan mendukung aktivitas ekonomi lain seperti pariwisata.

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Untuk memastikan Transformasi ekonomi yang membentuk struktur ekonomi Kutai Timur yang inklusif, maka diperlukan program-program ekonomi yang tidak hanya mendukung satu sektor, tetapi juga terintegrasi dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengembangan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik dan saling mendukung. Keunggulan Kutai Timur dalam potensi sumber daya dan keberagaman sektor dapat diarahkan untuk menciptakan program ekonomi yang berbasis pada keberlanjutan. Kondisi dimana kurangnya sinergi antar-sektor memerlukan langkah-langkah konkret untuk mengembangkan ekosistem ekonomi terintegrasi. Peluang untuk menciptakan kawasan ekonomi yang berbasis pada keberlanjutan, mendukung inovasi lintas-sektor, dan mempromosikan kemitraan antar-pelaku industri dapat dioptimalkan melalui strategi pembangunan ekonomi katalisator.

Arah kebijakan transformasi ekonomi ini juga dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan transformasi ekonomi yang menjelaskan lebih detail langkah-langkah yang dapat dilakukan Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai misi ini. Arah kebijakan transformasi ini diidentifikasi dari kondisi yang dihadapi oleh Kutai Timur dan juga arah kebijakan strategis yang diturunkan oleh provinsi. Arah kebijakan transformasi tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Kabupaten Kutai Timur

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN.	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN dilaksanakan melalui optimalisasi keunggulan komparatif wilayah, penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran arus barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan, yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Peningkatan posisi strategis daerah dalam ekonomi regional dan nasional	Peningkatan posisi strategis daerah dalam ekonomi regional dan nasional melalui peran penting sebagai daerah mitra strategis IKN dalam penyediaan kebutuhan masyarakat IKN dan global serta menjadi kawasan perlintasan strategis barang dan jasa di jalur ALKI	18 Kecamatan
Peningkatan akses pendanaan ekonomi yang sustainable, terjangkau dan berorientasi jangka panjang	Peningkatan akses pendanaan ekonomi yang sustainable, terjangkau dan berorientasi jangka panjang melalui penyediaan dana abadi ventura sebagai sumber permodalan usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar serta penetapan anggaran khusus (persentase tetap) dana bagi hasil tambang untuk kegiatan investasi jangka panjang	18 Kecamatan
Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	Pengembangan potensi sektor ekonomi baru berbasis inovasi dilaksanakan melalui pengembangan biosimilar dan vaksin, protein nabati, energi terbarukan	18 Kecamatan
Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan kawasan industri lainnya.	18 Kecamatan
Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/ bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai	18 Kecamatan
Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui penguatan nilai tambah industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis	18 Kecamatan
Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis	Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis melalui optimalisasi sektor ekonomi eksisting secara luas dan terintegrasi terutama untuk sektor petrokimia dan oleokimia serta turunan produk lainnya serta dengan pembentukan badan dan tim hilirisasi khusus percepatan pelaksanaan hilirisasi (Dewan Hilirisasi Kutai Timur).	18 Kecamatan
Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru	Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang dilaksanakan melalui peningkatan inovasi pengembangan produk potensial seperti	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
	biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan dalam kerangka transformasi ekonomi berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Kecerdasan Buatan (AI).	
Optimalisasi pengembangan lahan sisa pertambangan untuk peningkatan produktivitas ekonomi	Optimalisasi pengembangan lahan sisa pertambangan untuk peningkatan produktivitas ekonomi melalui penciptaan daerah strategis sisa tambang yang produktif dan inovatif baik sebagai kawasan pariwisata, ekonomi kreatif maupun kegiatan ekonomi produktif potensial lainnya	18 Kecamatan
Pengembangan destinasi wisata potensial	Pengembangan destinasi wisata potensial dilaksanakan melalui penetapan destinasi super prioritas , pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan yang dilakukan dengan pembangunan investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat	18 Kecamatan
Pengembangan industri energi terbarukan	Pengembangan industri energi terbarukan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan industri panel surya, bioenergi, hidroelektrik dan industri energi terbarukan lainnya, dalam upaya mendukung percepatan transisi energi.	18 Kecamatan
Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan berbasis agro- ekosistem untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani	18 Kecamatan
Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumberenergi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauranpembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkitfosil melalui cofiring dan peralihan menjadi	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
	pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	
Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan	Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	18 Kecamatan
Pengembangan ekonomi maritim	Pengembangan ekonomi maritim dilaksanakan melalui perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan laut, budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi, hilirisasi produk perikanan, pengembangan industri berbasis pesisir, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut untuk research and development dan portofolio ekonomi karbon, coastal tourism, serta marine services, dengan mengedepankan penerapan blue economy	18 Kecamatan
Penyediaan jaringan dan layanan listrik cerdas	Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui pengembangan teknologi digital guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik, serta pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik	18 Kecamatan
Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital dilaksanakan melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (perluasan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (peningkatan digitalisasi di sektor strategis), peningkatan fasilitas pendukung	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
	transformasi digital (peningkatan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill)	
Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilaksanakan melalui optimalisasi kawasan industri dan peningkatan daya saing komoditi unggulan daerah dengan memanfaatkan skema- skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik	18 Kecamatan
Optimalisasi Kawasan Stretegis daerah untuk menunjang perekonomian kawasan lainnya	Optimalisasi Kawasan Stretegis daerah untuk menunjang perekonomian kawasan lainnya melalui Optimalisasi keberadaan KEK Maloy sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Kutai Timur	18 Kecamatan
Industrialisasi koperasi	Industrialisasi koperasi dilaksanakan melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	18 Kecamatan
Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	18 Kecamatan
Peningkatan produktivitas BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, mengoptimalkan pengelolaan aset, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi jenis usaha, dan penguatan kapasitas pengelola	18 Kecamatan
Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dilaksanakan melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	18 Kecamatan
Optimalisasi mekanisme transisi ekonomi	Optimalisasi mekanisme transisi ekonomi melalui kebijakan yang tepat dan adil serta mengantisipasi adanya migrasi/mobilitas tenaga kerja antar sektor yang tidak terkendalikan (Sektor Pertambangan ke sektor lainnya);	18 Kecamatan
Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan	18 Kecamatan

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

5.1.2.3. Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Adaptif dan Visioner

Transformasi tata kelola merujuk pada perubahan dalam cara pemerintahan mengelola sumber daya dan menjalankan kegiatannya yang melibatkan perubahan dalam kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan budaya kerja. Transformasi tata kelola sering kali dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas suatu pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Untuk menggapai visi Kutai Timur Hebat 2045, transformasi tata kelola merupakan suatu keharusan. Transformasi tata kelola ini diharapkan mampu untuk membentuk pemerintah yang profesional, efektif, adaptif dan efisien. Untuk mendukung misi transformasi tata kelola ini diturunkan arah pembangunan seperti yang tersaji dalam gambar di bawah.

Gambar 5. 10 Arah Pembangunan Transformasi Tata Kelola Kabupaten Kutai Timur



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Arah pembangunan dari misi ini adalah **pelaksanaan tata kelola yang profesional, efektif, adaptif dan visioner**. Di mana arah pembangunan ini perlu didukung oleh lima arah Kebijakan utama (sub-arah pembangunan) yang satu sama lainnya saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola yang dicanangkan dalam misi Transformasi tata kelola.

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola merupakan dasar untuk mencapai pemerintahan yang profesional. Untuk mengurangi birokrasi yang kompleks dan proses pengambilan keputusan yang lambat memerlukan upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola. Peluang untuk menerapkan teknologi informasi, evaluasi kinerja, dan perbaikan proses administratif dapat dioptimalkan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi tata kelola ini di satu sisi juga merupakan insentif bagi agen ekonomi dan pembangunan untuk memaksimalkan usahanya dalam berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Kutai Timur kedepannya.

Integrasi dan Koordinasi Tata Kelola secara vertikal dan horizontal: Integrasi dan koordinasi yang baik antar berbagai tingkatan dan sektor pemerintahan merupakan kunci utama keberhasilan transformasi tata kelola. Potensi SDA dan keberagaman sektor yang dimiliki Kutai Timur dapat dioptimalkan melalui integrasi kebijakan dan koordinasi yang efektif. Kurangnya sinergi antar instansi memerlukan upaya untuk memperkuat integrasi secara vertikal dan horizontal. Hal ini sangat penting untuk dilakukan ditengah upaya yang dilakukan oleh Kutai Timur kedepan dalam melakukan transformasi pembangunan yang mendorong pada pendekatan dan pemahaman baru dalam agenda

pembangunan yang dilakukan kedepan. Agenda-agenda baru dan besar yang dilakukan ke depan tidak akan dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya tanpa koordinasi yang baik oleh pemerintah selaku garda terdepan dalam pembangunan.

Pelaksanaan Tata Kelola secara teknokratis, reasonable, partisipatif, dan transparan: Pengelolaan pemerintahan dengan pendekatan yang terencana, berdasarkan fakta dan data, serta melibatkan partisipasi masyarakat merupakan suatu yang penting dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan tata kelola teknokratis dan partisipatif dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan. Pengelolaan potensi sumber daya alam dapat lebih dioptimalkan melalui keputusan yang rasional dan transparan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya transparansi juga diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan publik dan sebagai bentuk akuntabilitas. Peluang untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan dan membangun budaya transparansi dapat dioptimalkan melalui strategi penerapan tata kelola yang teknokratis, *reasonable*, partisipatif, dan transparan.

Manajemen Anggaran, Aset, dan Sumber Daya Alam yang Adil, Visioner, dan Bertanggung Jawab: Pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting. Manajemen anggaran, aset, dan sumber daya alam yang adil dan visioner dapat menjadi dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan. Keunggulan Kutai Timur dalam sumber daya alam dapat dioptimalkan melalui manajemen yang visioner dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, kurangnya transparansi dalam manajemen anggaran dan pengelolaan sumber daya alam memerlukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan. Peluang untuk mengimplementasikan praktik manajemen anggaran yang efektif, visi jangka panjang, dan tanggung jawab sosial dapat dioptimalkan melalui strategi manajemen yang adil, visioner, dan bertanggung jawab. Dengan memastikan manajemen anggaran, aset, dan sumber daya alam yang adil dan visioner, arah kebijakan ini juga mendukung tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas, Kapasitas, dan Profesionalitas ASN dan Pejabat Daerah: Pelayanan publik yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Keunggulan Kutai Timur dalam potensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas, kapasitas, dan profesionalitas ASN serta pejabat daerah. Peluang untuk menerapkan program pelatihan, rekrutmen terencana, dan sistem evaluasi kinerja dapat dioptimalkan melalui strategi peningkatan kualitas, kapasitas, dan profesionalitas ASN dan pejabat daerah.

Arah pembangunan transformasi sosial ini juga dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan transformasi tata kelola yang menjelaskan lebih detail langkah-langkah yang dapat dilakukan Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai misi transformasi tata kelola ini dalam dua dekade kedepan. Arah kebijakan transformasi ini diidentifikasi dari kondisi yang dihadapi oleh Kutai Timur dan juga arah kebijakan strategis yang diturunkan oleh provinsi. Arah kebijakan transformasi tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 4 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Kabupaten Kutai Timur

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Optimasi regulasi daerah	Optimalisasi regulasi daerah dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, pra-regulasi, re-regulasi dan de-regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan instrumen penegakan regulasi daerah.	18 Kecamatan
Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan penanganan laporan masyarakat	18 Kecamatan
Pengembangan smart govenrment serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kapasitas digital SDM ASN, percepatan digitalisasi layanan publik, optimalisasi pelaksanaan SPBE dan pengelolaan aset daerah berbasis digital	18 Kecamatan
Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan	Peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan dilaksanakan melalui Peningkatan Koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan tugas dan program daerah terutama untuk program yang beririsan; Peningkatan Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menciptakan efisiensi pelaksanaan tata kelola dan program daerah; serta melakukan advokasi berkesinambungan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program yang menjadi wewenang pemerintah provinsi maupun pusat	18 Kecamatan
Peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan	Peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan dilaksanakan melalui penciptaan dan pelaksanaan tata kelola belanja daerah secara efektif, efisien, tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang	18 Kecamatan
Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan	18 Kecamatan
Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan dan	Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan dan keputusan tata kelola pemerintah daerah melalui Penciptaan kebijakan yang reasonable yang	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
keputusan tata kelola pemerintah daerah	berlandaskan pada penggunaan bukti empiris dan kajian objektif terhadap setiap kebijakan yang diambil; Melakukan asesment yang objektif dalam setiap pembuatan izin dan penetapan regulasi, terutama terkait penggunaan sumber daya alam; Melakukan pemetaan yang rapi, real time (up to date) dan terintegrasi terhadap data potensi SDA di masing-masing daerah; serta Melakukan kajian yang objektif pada setiap pemberian anggaran program pemerintah.	
Optimalisasi Penerapan Sistem Merit.	Optimalisasi penerapan sistem merit dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang memanfaatkan teknologi informasi.	18 Kecamatan
Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa, transparansi layanan perizinan berbasis digital, optimalisasi whistle blowing system, serta membangun sistem manajemen anti penyuapan	18 Kecamatan

5.1.2.4. Landasan Transformasi Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil

Daya dukung, agility dan sabilitas ekosistem ekonomi dan sosial serta penegakan hukum dan birokrasi yang baik merupakan salah satu landasan penting dalam proses transformasi Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini akan memastikan bahwa proses transformasi berjalan secara optimal. Untuk menciptakan kondisi ini diturunkan empat arah pembangunan terkait seperti tersaji pada gambar di bawah.

Gambar 5. 11 Arah Pembangunan Landasan Transformasi Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil Kabupaten Kutai Timur (Misi 4)



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Stabilitas Ekonomi: Fondasi ekonomi yang stabil merupakan dasar bagi pembangunan jangka panjang. Stabilitas ekonomi menjadi prasyarat untuk terjadinya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Fluktuasi harga komoditas dan ketergantungan pada sektor tertentu memerlukan diversifikasi ekonomi dan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi melalui pengembangan sektor industri dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat dioptimalkan

melalui strategi menciptakan stabilitas ekonomi. Hal ini juga sangat penting dipastikan dalam upaya untuk mengoptimalkan agenda Kutai Timur untuk menjadi Pusat Hilirisasi yang membutuhkan kestabilan ekonomi.

Ketangguhan Diplomasi Pertahanan Berdaya Gentar: Ketangguhan diplomasi pertahanan yang berdaya gentar berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Dengan menciptakan keamanan yang terjamin, negara mampu melindungi investasi dan perdagangan, mencegah konflik yang merusak infrastruktur ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan internasional. Diplomasi pertahanan yang efektif juga memungkinkan pengelolaan anggaran yang efisien, mengalihkan dana ke sektor pembangunan. Selain itu, stabilitas regional yang dihasilkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan demikian, diplomasi pertahanan tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kemakmuran ekonomi.

Arah pembangunan dalam menciptakan landasan transformasi ini juga dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan transformasi yang menjelaskan lebih detail langkah-langkah yang dapat dilakukan Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai kondisi yang ideal untuk melaksanakan transformasi pembangunan. Arah kebijakan transformasi ini diidentifikasi dari kondisi yang dihadapi oleh Kutai Timur dan juga arah kebijakan strategis yang diturunkan oleh provinsi. Arah kebijakan transformasi tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 5 Arah Kebijakan Landasan Transformasi Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas dilaksanakan melalui peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan dan pencatatan masyarakat, pemetaan wilayah rawan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kolaborasi pengawasan dengan pihak terkait.	18 Kecamatan
Penciptaan lingkungan sosial, politik dan hukum yang kondusif dan berkeadilan	Penciptaan lingkungan sosial, politik dan hukum yang kondusif dan berkeadilan yang dilaksanakan melalui Peningkatan pada partisipasi politik dan kegiatan daerah; Penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif; Penguatan pada sistem pemberantasan korupsi; Pembangunan budaya hukum dengan melakukan transformasi sistem penegakan etika/perilaku; Pemberian perlindungan hukum yang merata pada semua masyarakat yang membutuhkan; dan peningkatan kapasitas kelembagaan resolusi konflik terutama konflik perkebunan	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Peningkatan stabilitas pertumbuhan ekonomi dan penciptaan struktur ekonomi yang inklusif	Peningkatan stabilitas pertumbuhan ekonomi dan penciptaan struktur ekonomi yang inklusif dilaksanakan melalui penciptaan keseimbangan antara pertumbuhan sektor tambang dengan non-tambang dengan menjaga kestabilan kontribusi tambang di sisi sisi dan meningkatkan progresivitas sektor non-tambang secara signifikan di sisi lain.	18 Kecamatan
Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi	18 Kecamatan
.Peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas belanja daerah	Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dilaksanakan melalui intensifikasi dan inisiasi ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional	18 Kecamatan
Peningkatan regulasi ramah investasi dan penciptaan kebijakan pro investasi	Peningkatan regulasi ramah investasi melalui pembentukan perda yang mendukung investasi baik dari dalam maupun dari luar serta memberlakukan kebijakan subsidi dan kemudahan pada investor program utama pemerintah	18 Kecamatan
Optimalisasi pendanaan dan pelaksanaan proyek strategis daerah	Optimalisasi pendanaan dan pelaksanaan proyek strategis daerah yang dilaksanakan melalui pemetaan proyek strategis daerah yang bernilai jual tinggi dan pemetaan perencanaan pembiayaan untuk setiap proyek pembangunan beserta potensi pembiayaan untuk masing-masingnya serta pembentukan Tim Khusus Investasi Daerah untuk meningkatkan jumlah investasi dalam melaksanakan proyek dan rencana pembangunan daerah	18 Kecamatan
Optimalisasi peran masyarakat dan agen pembangunan lainnya dalam mendorong kemajuan daerah	Optimalisasi peran masyarakat dan agen pembangunan lainnya dalam mendorong kemajuan daerah yang dilaksanakan melalui Peningkatan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; Mendorong Kolaborasi Antara Pemerintah, Industri, Akademisi, dan Masyarakat; dan Meningkatkan Keterbukaan dan Keterjangkauan Informasi	18 Kecamatan

Arah kebijakan dalam misi landasan transformasi ini juga dilengkapi dengan indikator pencapaian beserta target untuk tahun 2045. Tapi dalam rancangan awal ini indikator tersebut masih dalam pengelompokan indikator terkait dengan target yang belum ditentukan. Indikator-indikator tersebut tersaji dalam tabel berikut.

5.1.2.5. Landasan Transformasi Ketahanan, Sosial, Budaya, dan Ekologi

Landasan transformasi lainnya yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai visi Kutai Timur Hebat 2045 adalah ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Hal ini untuk memastikan bahwa berlangsungnya pembangunan dapat berjalan optimal di satu sisi dan memastikan kekayaan daerah dapat dijaga kelestariannya. Hal ini juga selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Misi ini didukung oleh lima arah pembangunan seperti yang tersaji pada gambar di bawah.

Gambar 5. 12 Arah Pembangunan Landasan Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Kabupaten Kutai Timur (Misi 5)



Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju: Kemajuan budaya lokal, kearifan tradisional, adat, dan agama adalah aspek penting dari keberlanjutan sosial dan budaya. Keunggulan Kutai Timur dalam keberagaman budaya dan tradisi dapat dioptimalkan melalui upaya pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal. Kondisi dimana kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya memerlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan budaya. Peluang untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan dapat dioptimalkan melalui strategi kebijakan pelestarian dan kemajuan budaya lokal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan Penerapan *Cultural Led Development* (Pembangunan berbasis budaya). Pembangunan yang berfokus pada budaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan identitas lokal. Keberagaman budaya dan potensi pariwisata yang dimiliki Kutai Timur dapat dioptimalkan melalui pendekatan pembangunan yang berbasis budaya. Dengan

memastikan penerapan *Cultural Led Development*, kebijakan ini juga mendukung upaya untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Ketahanan Keluarga Menuju Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inkusif. Selain penguatan nilai budaya, adat, sejarah dan agama, arah pembangunan lain yang perlu dilakukan adalah memastikan terbentuknya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa optimalisasi potensi daerah yang berkaitan dengan budaya, adat, sejarah dan agama memastikan terbentuknya keluarga yang berkualitas, perlindungan hak asasi manusia serta menyasar seluruh lapisan masyarakat. Kemajemukan yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur juga perlu dijaga keharmonisannya melalui keselarasan antara kepentingan sosial dan individu.

Lingkungan Hidup yang Berkualitas. Hal penting yang juga perlu diperhatikan untuk memastikan Peningkatan kapasitas masyarakat dan optimalisasi fungsinya dalam kehidupan sosial maupun ekonomi adalah menjamin terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas. Tanpa lingkungan hidup yang berkualitas masyarakat tidak akan mampu secara maksimal untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Kualitas lingkungan disini tidak hanya secara kehidupan sosial, tetapi juga dari segi fisik termasuk kecukupan fasilitas, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta hal lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum.

Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan: Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan menjadi landasan untuk stabilitas ekonomi dan sosial. Keunggulan Kutai Timur dalam potensi sumber daya alam dapat dioptimalkan melalui upaya untuk mencapai ketahanan dan kemandirian dalam sumber daya kunci tersebut. Mengintegrasikan energi terbarukan, pengelolaan air yang bijaksana, dan pertanian berkelanjutan dapat dioptimalkan melalui strategi kebijakan mencapai ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan yang relevan dan tepat sasaran.

Pembangunan Infrastruktur yang Resilien Terhadap Bencana dan Iklim: Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan iklim adalah prasyarat untuk keberlanjutan dan ketahanan masyarakat. Keunggulan Kutai Timur dalam potensi sumber daya alam dapat dioptimalkan melalui upaya untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya efisien tetapi juga tahan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Arah pembangunan dalam salah satu misi landasan transformasi ini juga dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan transformasi yang menjelaskan lebih detail langkah-langkah yang dapat dilakukan Kabupaten Kutai Timur dalam memembentuk ekosistem yang ideal dalam menjalankan transformasi pembangunan daerah. Arah kebijakan transformasi ini diidentifikasi dari kondisi yang dihadapi oleh Kutai Timur dan juga arah kebijakan strategis yang diturunkan oleh provinsi. Arah kebijakan transformasi tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 6 Arah Kebijakan Landasan Transformasi Ketahanan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Pelestarian budaya daerah	Pelestarian budaya daerah dilaksanakan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan lokal, seperti festival, pertunjukan seni, dan kegiatan tradisional, untuk memperkuat rasa kebanggaan dan identitas kultural; pengembangan program pendidikan dan kesadaran budaya untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap kearifan tradisional, adat, dan agama sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari; dan inisiatif pemberdayaan komunitas lokal dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya, seperti mendukung kelompok seni dan kerajinan tradisional.	18 Kecamatan
Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.	18 Kecamatan
Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, penguatan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan lembaga adat dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan	18 Kecamatan
Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi, penguatan kebijakan pengembangan dan perlindungan budaya, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat	18 Kecamatan
Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum kebudayaan, pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial, pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda	18 Kecamatan
Pelestarian nilai sejarah	Pelestarian nilai sejarah dilaksanakan melalui pembangunan pusat dokumentasi sejarah yang modern dan terjangkau untuk melestarikan dan membagikan pengetahuan sejarah kepada generasi muda dan masyarakat umum;	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
	penyusunan program pelatihan dan pendidikan untuk pelestarian benda-benda bersejarah dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran sejarah dalam membentuk identitas sosial dan ekonomi; dan Mendorong kolaborasi antara pelaku bisnis lokal dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai sejarah dalam pengembangan produk dan layanan yang berkontribusi pada perekonomian daerah.	
Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya;	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ruang publik yang representatif untuk interaksi sosial dan aktivitas kebudayaan.	18 Kecamatan
Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi lokal yang dapat memperkuat kualitas ketahanan fisik, sosial dan ekonomi keluarga	18 Kecamatan
Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.	Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas publik, pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	18 Kecamatan
Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan perlindungan terhadap resiko kekerasan, penelantaran dan eksplorasi	18 Kecamatan
Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan	18 Kecamatan
Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pengedukasian masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip reduce, reuse dan recycle, penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, serta penerapan pengelolaan TPA sanitary landfill untuk mencapai ekonomi sirkular.	18 Kecamatan
Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut.	Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut dilaksanakan melalui penghambatan	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
	laju deforestasi, peningkatan restorasi hutan dan lahan gambut, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan dan ekosistem gambut	
Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang dilaksanakan melalui reklamasi pasca tambang, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pemulihian sosial dan ekosistem serta pengembangan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan	18 Kecamatan
Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem.	18 Kecamatan
Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi dilaksanakan melalui identifikasi spesies yang dilindungi, karakteristik hubungan antar-spesies dan wilayah jelajahnya, serta perlindungan dan konservasi kawasan.	18 Kecamatan
Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem	18 Kecamatan
Pengembangan diversifikasi pangan	Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal	18 Kecamatan
Peningkatan implementasi teknologi energi terbarukan yang efisien	Peningkatan implementasi teknologi energi terbarukan yang efisien melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang inovatif.	18 Kecamatan
Peningkatan pengelolaan air yang berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan air yang berkelanjutan dilaksanakan melalui program konservasi, rehabilitasi sumber daya air, dan edukasi masyarakat tentang penggunaan air yang bijaksana.	18 Kecamatan

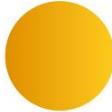
Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Pengembangan diversifikasi pertanian lokal	Pengembangan diversifikasi pertanian lokal dilaksanakan melalui penciptaan ekosistem pendukung untuk petani lokal, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan/ Good Agricultural Practices (GAP), dan menciptakan kebijakan yang memperkuat kemandirian pangan.	18 Kecamatan
Penerapan regulasi dan standar pembangunan yang berkelanjutan	Penerapan regulasi dan standar pembangunan yang berkelanjutan melalui peraturan yang memperhitungkan risiko bencana dan perubahan iklim, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap mencerminkan karakteristik budaya lokal.	18 Kecamatan
Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	18 Kecamatan
Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural, termasuk adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi	18 Kecamatan
Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dilaksanakan melalui peningkatan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal, dan peningkatan respons adaptif terhadap bencana	18 Kecamatan
Pengembangan natural based solution untuk kebakaran hutan	Pengembangan natural based solution untuk kebakaran hutan dilaksanakan melalui restorasi tutupan hutan, peningkatan pemahaman tentang nilai hutan, dan peningkatan manajemen pengelolaan risiko kebakaran hutan	18 Kecamatan
Pengendalian banjir	Pengendalian banjir dilaksanakan melalui pengembangan natural based solution dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah sekitar IKN	18 Kecamatan
Pencitaan ekosistem sejarah, budaya dan pembangunan yang integratif	Penciptaan ekosistem sejarah, budaya dan pembangunan yang integratif melalui pelaksanaan survei dan dokumentasi terhadap situs-situs bersejarah dan budaya dan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dalam perencanaan pembangunan infrastruktur untuk menjaga identitas dan kekayaan budaya daerah.	18 Kecamatan
Pembangunan bendung/bendungan	Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Pembangunan irigasi baru	Pembangunan irigasi baru diutamakan pada wilayah sawah tada hujan eksisting dan area dengan kategori lahan yang sesuai untuk tanaman pangan	18 Kecamatan

5.1.2.6. Kerangka Implementasi Transformasi Pembangunan Kutai Timur

Kerangka implementasi transformasi pembangunan Kutai Timur ditopang oleh 3 misi sebagaimana terlampir dalam gambar di bawah.

Gambar 5. 13 Misi terkait Kerangka Implementasi Transformasi Kabupaten Kutai Timur

-  **Pembangunan Kewilayahan yang merata, terencana dan relevan**
-  **Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan dan terjangkau**
-  **Kesinambungan Pembangunan yang mengoptimalkan potensi daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman**

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Pembangunan Kewilayahan bertujuan mencapai **pertumbuhan dan pembangunan yang merata, terencana, dan relevan di seluruh wilayah**. Fokusnya adalah menciptakan inklusivitas dan mengurangi disparitas antarwilayah, dengan pemahaman bahwa pemanfaatan potensi lokal dapat diperluas ke seluruh daerah.

Sementara itu pembangunan Sarana dan Prasarana bertujuan memastikan **infrastruktur yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terjangkau, sebagai dasar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat**. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup.

Terakhir, kesinambungan Pembangunan menunjukkan komitmen Kutai Timur untuk tetap **adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman dan dapat menjaga keberlangsungan pembangunan secara optimal**. Fokusnya adalah mengoptimalkan potensi daerah dan menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi melalui adaptabilitas, inovasi, perencanaan responsif, dan strategi pengembangan progresif.

Arah kebijakan dari kerangka implementasi transformasi pembangunan Kutai Timur ini diturunkan pada langkah strategis transformasi sarana prasarana kewilayahan. Sementara itu untuk misi terakhir akan berkaitan cukup besar dengan rencana strategis pembiayaan pembangunan dalam 2 dekade mendatang. Mengacu pada kondisi dan perencanaan strategis infrastruktur yang telah dijabarkan pada bab 2 dokumen ini maka dapat dirangkum arah kebijakan pembangunan terkait infrastruktur kewilayahan dan sarana prasarana (kerangka implementasi transformasi) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. 7 Arah Kebijakan Kerangka Pelaksanaan Transformasi (Infrastruktur Kewilayah dan Sarana Prasarana)

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang, pengendalian konsistensi pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR kabupaten/kota	18 Kecamatan
Pengembangan pelabuhan laut	Pengembangan pelabuhan laut diutamakan pada pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep Economic Hub tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) di antaranya pada Pelabuhan Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda, serta Pelabuhan Maloy yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional)	18 Kecamatan
Pengembangan Bandara	Pengembangan bandara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan strategis mobilisasi cepat dari dan ke Kutai Timur	18 Kecamatan
Pembangunan Jalan Tol	Pembangunan jalan tol dilakukan untuk memastikan kelancaran arus orang, barang dan jasa	18 Kecamatan
Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ditujukan untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	18 Kecamatan
Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk pembentukan kelembagaan agraria di daerah, legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan, berkelanjutan dan akuntabel, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat subjek reforma agraria, salah satunya melalui program perhutanan sosial	18 Kecamatan
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Pengembangan moda kereta api	Pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah	18 Kecamatan
Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, pengembangan dan peningkatan akses sanitasi, peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman	18 Kecamatan
Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana	18 Kecamatan
Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dalam rangka pendayagunaan air baku untuk air minum dan irigasi, serta pengendalian daya rusak air terhadap banjir dan pantai kritis bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim dan berbasis lingkungan, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan, daerah kepulauan dan daerah rawan air	18 Kecamatan
Pemerataan terhadap akses hunian layak	Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan salah satunya untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat	18 Kecamatan
Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman dilaksanakan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau SPALD-S maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau SPALD-T	18 Kecamatan
Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok Kutai Timur.	18 Kecamatan
Penanganan kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik	18 Kecamatan

Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan	Lokus
Pengembangan pasokan listrik integratif	Pengembangan Pasokan Listrik yang Terintegrasi dengan Industri dan berbasis energi terbarukan	18 Kecamatan
Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi	Sinkronisasi substansi dan periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam dokumen RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi) dalam RTRW Provinsi dengan mengacu pada lingkup waktu periodisasi RPJPD	18 Kecamatan
Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah;	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran daerah	18 Kecamatan
Perkuatan pengendalian pembangunan	Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan SPIP terintegrasi dan penerapan manajemen risiko	18 Kecamatan
Pengembangan pembiayaan inovatif	Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, blended finance, pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon.	18 Kecamatan
Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasi keberlanjutannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah antar periode.	18 Kecamatan
Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen rencana pembangunan di tingkat pusat sebagai acuan penyelarasan lingkup waktu pelaksanaan pembangunan	18 Kecamatan
Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, optimalisasi penyelenggaraan satu data, dan pengendalian pengembangan aplikasi bersifat khusus.	18 Kecamatan

5.2. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kutai Timur Hebat 2045

Mengacu kepada 8 misi RPJPD Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan Kutim Hebat 2045, maka dapat diturunkan 8 sasaran pokok utama pembangunan berdasarkan masing-masing misi yang telah disusun. Delapan sasaran pokok utama tersebut tersaji dalam gambar di bawah.

Gambar 5. 14 Sasaran Pokok Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur



Sasaran pokok utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur ini juga lebih detail diturunkan kedalam sasaran pokok yang merupakan capaian dari arah pembangunan masing-masing misi yang telah dijelaskan diatas. Masing-masing sasaran pokok ini mempertegas fokus dan sasaran dari masing-masing misi dan arah pembangunan yang ditetapkan serta sebagai jembatan untuk melihat capaian pembangunan yang dilakukan. Setiap arah pembangunan (sasaran pokok) juga dilengkapi dengan indikator utama pembangunan (IUP). IUP ini memberikan ukuran yang lebih jelas untuk masing-masing arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur 20 tahun mendatang. IUP yang dipakai dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur ini secara umum selaras dengan IUP yang dipakai oleh RPJPN dan juga RPJPD Kalimantan Timur. IUP memuat baseline 2025 dan target pencapaian untuk empat tahap pembangunan hingga tahun 2045. Masing-masing

indikator merepresentasikan arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur untuk periode dua puluh tahun mendatang. Sasaran pokok beserta indikator utama pembangunan tersebut tersaji dalam tabel di bawah.

Tabel 5. 8 Indikator Utama Pembangunan

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045					
					Baseline 2025	Target RPJPD				
						Tahap 1 2025- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Modern, Madani dan Berkarakter										
Terwujudnya Masyarakat Modern, Madani dan Berkarakter	KH 1. Kesehatan Untuk Semua		1	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,44	75,83	77,22	78,61	80,00
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
			a	Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	jiwa	10	8,00	5,50	2,50	0
			b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,00	18,50	15,00	10,30	4,80
			3	Penanganan Tuberkulosis:						
			a	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	80,00	83,75	87,50	91,25	95,00
			b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,00	92,25	94,50	96,75	99,00
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
	KH 2. Pendidikan Berkualitas yang merata		5	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
			a	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	55,4 - 56,00	60,86 - 62,01	66,33 - 68,03	71,79 - 74,04	77,25 - 80,05
			b	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	70	70,01 - 71,26	70,03 - 72,53	70,04 - 73,79	70,05 - 75,05
			c	Numerasi SD/Sederajat	%	50-55	58,38 - 62,56	66,75 - 70,13	75,13 - 77,69	83,5 - 85,25
			d	Numerasi SMP/Sederajat	%	62-65	65,13 - 67,75	68,25 - 70,5	71,38 - 73,25	74,5 - 76,00
			e	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,54	10,51	11,49	12,46	13,43
			f	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,09	13,76	14,43	15,09	15,76
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00
	KH 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	%	54,66	61,07	67,48	73,89	80,30
			8	Tingkat Kemiskinan	%	7,87	6,60 - 6,50	4,40 - 4,20	2,4 - 2,30	0,13 - 0,58

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045					
					Baseline 2025	Target RPJPD				
						Tahap 1 2025- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	72	78,50	84,75	91,00	97,5	
Transformasi Ekonomi Menuju Kemandirian dan Ketangguhan Ekonomi	Terwujudnya Ekonomi Menuju Kemandirian dan Ketangguhan Struktur Ekonomi	KH 4. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	10 Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	3,52	12,54	21,57	30,59	39,61	
			11 Pengembangan Pariwisata							
			a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,26	1,60	2,94	4,27	5,61	
			b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang/tahun	1250	1700,00	2250,00	2850,00	3500	
			12 Jumlah pelaku ekonomi kreatif	usaha	85-90	440,00	795,00	1145,00	1500	
			13 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
			a Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	%	862	1.112	1.362	1.612	1.862	
			b Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,82	4,76	5,71	6,65	7,59	
			c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,28-0,30	1,47	2,65	3,82	5	
			d Return on Aset (ROA) BUMD	%	0-1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4-5	
			14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	5,30	5,06 - 5,29	4,82 - 5,29	4,58 - 5,28	4,34 - 5,27	
			15 Kualitas lapangan dan angkatan kerja							
			a Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	47,48	50,24	52,99	55,75	58,50	
			b Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	%	53,95	62,43	70,91	79,38	87,86	
			16 Tingkat penguasaan IPTEK							
			a Indeks Inovasi Daerah	indeks	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	
			KH 5. Transformasi Digital							
			17 Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	82,00	87,00	91,00	93,00	95,00	
			KH 6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	18 Disparitas Harga	%	7,1	5	3,5	1,75	0 - 1
				19 Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	20,32	23,61	26,91	30,20	33,49

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045					
					Baseline 2025	Target RPJPD				
						Tahap 1 2025- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		KH 7. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	20	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	72,26	69,37	66,49	63,60	60,71
			21	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelaanjutan						
			a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelaanjutan	%	67,89	75,92	83,95	91,97	100,00
			b	Persentase Desa Mandiri	%	13,67	26,08	38,49	50,90	63,31
Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Adaptif, dan Visioner	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif dan visioner	KH 8. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
			23	Indeks Pelayanan Publik	indeks	2,48	3,11	3,74	4,37	5
			24	Indeks Integritas Pemerintah	indeks	73,80	76,73	79,65	82,58	85,50
Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil	Terwujudnya Ekosistem Sosial, Ekonomi, Hukum, dan Birokrasi yang Supportif, Agile, dan Stabil	KH 9. Stabilitas Ekonomi Makro	25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,06	0,35	0,90	1,40	2,00
			26	Pendalamkan/Intermediasi Sektor Keuangan						
			a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	11,32	27,94	44,55	61,17	77,78
			b	Total Kredit/PDRB	%	1,15	18,19	35,22	52,26	69,29
			27	Indeks Perkembangan Harga (indeks)		+- 2,5	+- 2,5	-2,5	-2	-2
		KH 10. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	28	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	2,89	3,18	3,47	3,76	4,05
			29	Jumlah kejadian tindak kriminal	kejadian	526	395	263	132	0
Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal	KH 11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	30	Pembangunan Kebudayaan						
			a	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	11	30	50	70	95
			b	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	9,5	30	52	75	95

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	RPJPD Kabupaten Kutai Timur 2025-2045				
					Baseline 2025	Target RPJPD			
						Tahap 1 2025- 2029	Tahap 2 2030- 2034	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			31 Jumlah Kejadian Konflik SARA	kejadian	0	0	0	0	0
	KH 12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	32 Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	indeks	75,50	79,06	82,63	86,19	89,75	
		33 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,48	0,44 - 0,46	0,41 - 0,44	0,37 - 0,41	0,33 - 0,39	
		34 Kualitas Lingkungan Hidup							
	KH 13. Lingkungan Hidup Berkualitas	a Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	indeks	78,88	79,74	80,59	81,45	82,30	
		b Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00	
		c Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	55	63,75	72,50	81,25	90	
	KH 14. Berketahanan Air, dan Kemandirian Pangan	35 Ketahanan Air dan Pangan							
		a Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7,58	5,76	3,94	2,11	0,29	
		b Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,65	0,69	0,74	0,78	0,82	
		c Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan	%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
	KH 15. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	36 Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	175,45	164,17	152,89	141,60	130,32	
		37 Persentase Penurunan Emisi GRK							
		a Kumulatif	%	20,47	28,31	36,15	43,98	51,82	
		b Tahunan	%	26,31	43,50	60,70	77,89	95,08	

Sumber: Hasil analisis Bappeda Kutai Timur, 2024

Penutup

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)

Kabupaten
Kutai Timur
2025-2045



BAB VI

PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur adalah sebuah pedoman yang sangat penting untuk membimbing langkah-langkah pembangunan daerah dalam dua dekade ke depan. Rancangan awal RPJPD ini disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2025 hingga 2045. Pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Timur menuntut pentingnya keterpaduan, keselarasan, dan sinkronisasi antara para pelaku pembangunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen RPJPD ini harus didukung oleh penjabaran yang jelas mengenai manajemen risiko dan sumber pendanaan yang terukur untuk melaksanakan rencana pembangunan. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan kaidah pelaksanaan yang terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan menjadi bagian dari rencana yang komprehensif dan terintegrasi.

Visi pembangunan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 yakni "Kutim Hebat 2045: Pusat Hilirisasi SDA yang Maju, inklusif dan berkelanjutan" menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan, dimana dalam pelaksanaannya akan memerlukan dukungan kontribusi aktif, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD Kutai Timur 2025-2045 mengarah pada upaya pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD ini akan menjadi dasar di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam dimensi lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam dimensi satu tahunan.

6.1. Pelaksanaan

RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan untuk mengawal implementasi RPJPD Kutai Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) Sebagai bagian integral pembangunan Nasional, pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya, pencapaian visi RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 juga sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan RPJPD Kabupaten/Kota di Kutai Timur.
- 2) Bupati terpilih berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya ke dalam RPJMD sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih, arah kebijakan pentahapan pembangunan RPJPD pada periode berkenaan, serta menjadikan substansi RPJPD sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah disertai dengan pendanaan pembangunan yang memadai dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 3) Indikator kinerja sasaran visi dan indikator utama pembangunan beserta targetnya wajib di internalisasi ke dalam RPJMD dan/atau RENSTRA Perangkat Daerah. Sementara untuk target kinerja di setiap tahapan pembangunan dapat dilakukan pemutakhiran dalam RPJMD dan/atau RENSTRA Perangkat Daerah yang memperhatikan dinamika pembangunan terkini dengan tidak mengubah target akhir kinerja RPJPD di Tahun 2045.
- 4) Pemberian insentif bagi unsur pemerintah yang diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran, serta pemberian insentif bagi non-pemerintah berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045, meliputi antara lain :

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap sasaran visi, sasaran pokok dan arah kebijakan melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJPD secara periodik;
 - b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- 6) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses penyusunan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- 7) Melaksanakan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
- 8) Peraturan Daerah tentang RPJPD disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- 9) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, DPRD, dan seluruh masyarakat termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- 10) Unit satuan kerja vertikal maupun lembaga-lembaga lokal non-pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non-pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Kutai Timur, serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyelaraskan dan menjamin konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan partisipasinya terhadap RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045.
- 11) Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif baik bersumber dari dana pemerintah maupun non pemerintah, serta optimalisasi jasa sektor keuangan dalam upaya pencapaian visi RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045.
- 12) Bupati yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun dan menetapkan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2046–2065 serta menyusun dan menetapkan RKPD Tahun 2045 dengan berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045.

6.2. Pembiayaan

Untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan bertanggung jawab dari RPJPD Kabupaten Kutai Timur, penting untuk memastikan adanya dukungan sumber pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN dan APBD Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, pembiayaan pembangunan juga dapat diperoleh melalui sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa bentuk pembiayaan alternatif yang dimungkinkan adalah kemitraan antara pemerintah dan swasta (KPPU), pendekatan keuangan campuran (*blended finance*), penerbitan obligasi daerah, dan/atau sukuk daerah. Dengan adanya beragam sumber pembiayaan ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan optimal sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD

6.3. Mitigasi Resiko

Penting untuk menyadari bahwa dalam implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran utama yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Kutai Timur, ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan atau menghambat keberhasilannya. Keberlanjutan rencana pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam membangun kerangka manajemen risiko yang efektif, yang mencakup identifikasi, antisipasi, dan pengelolaan ketidakpastian masa depan. Manajemen risiko adalah proses yang sistematis yang didukung oleh budaya yang sadar akan risiko, yang bertujuan untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima, dengan tujuan memastikan pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah melalui pengidentifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko.

Langkah-langkah dalam manajemen risiko mencakup pengidentifikasi dan penilaian risiko, serta mitigasi risiko untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko tersebut. Mitigasi risiko mencakup berbagai strategi, seperti menerima risiko, mentransfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Manajemen risiko di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD 2025-2045, dengan mengacu pada lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, diharapkan Kabupaten Kutai Timur dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan pembangunan secara optimal.

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur 2025-2045 ini disusun dengan penuh optimisme menyongsong era baru. Era dimana setiap langkah yang diambil, setiap kebijakan yang diterapkan, dan setiap mimpi yang dirajut, akan menentukan arah masa depan Kabupaten Kutai Timur. Dalam rentang dua puluh tahun ke depan, Kabupaten Kutai Timur memiliki visi untuk melihat Kutai Timur tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tapi juga sebagai

simbol keharmonisan sosial dan kelestarian lingkungan. Visi ini diwujudkan melalui kolaborasi, dedikasi, dan kebijakan yang inklusif serta berkelanjutan.

Semangat para penyelenggara negara yang akan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup setiap warga Kutai Timur, dengan memastikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, infrastruktur yang modern dan berkelanjutan, serta ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Hal ini akan menjadikan Kutai Timur sebagai contoh nyata bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Kutai Timur akan terus bergerak maju, menghadapi setiap tantangan dengan keteguhan dan kebijaksanaan, sambil memelihara nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi ciri khasnya. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama, Kutai Timur akan menciptakan sejarah baru, sebuah cerita tentang kemajuan, harmoni, dan keberlanjutan yang akan diceritakan untuk generasi yang akan datang.

Mari semua pemangku kepentingan bahu-membahu, menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini bukan hanya sebagai dokumen perencanaan, tapi sebagai peta jalan (*road map*) menuju masa depan Kabupaten Kutai Timur yang gemilang. Bersama Kutai Timur bisa dan akan mewujudkan mimpi-mimpi besar ini.

Kutai Timur Maju, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Semua





**PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Kutai Timur Hebat
2045